

Buku Referensi **EKONOMI INTERNASIONAL**

Teori, Kebijakan, dan Dinamika Global



Dr. (Cand) Sarah Rizki Amalia, S.E., M.Si.
Bukhari Muslim, S.E., M.M., M.Si., C.TL., C.BC., C.SM., C.ME., C.LI.
Rudy Rahwana, S.E., M.M., M.Ak., CRPA.
Dr. Asep Sofwan Munandar, S.E., M.M.

BUKU REFERENSI
EKONOMI
INTERNASIONAL
Teori, Kebijakan, dan
Dinamika Global

Dr. (Cand) Sarah Rizki Amalia, S.E., M.Si.
Bukhari Muslim, S.E., M.M., M.Si., C.TL., C.BC., C.SM.,
C.ME., C.LI.
Rudy Rahwana, S.E., M.M., M.Ak., CRPA.
Dr. Asep Sofwan Munandar, S.E., M.M.



EKONOMI INTERNASIONAL

TEORI, KEBIJAKAN, DAN DINAMIKA GLOBAL

Ditulis oleh:

Dr. (Cand) Sarah Rizki Amalia, S.E., M.Si.
Bukhari Muslim, S.E., M.M., M.Si., C.TL., C.BC., C.SM., C.ME.,
C.LI.
Rudy Rahwana, S.E., M.M., M.Ak., CRPA.
Dr. Asep Sofwan Munandar, S.E., M.M.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras
memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun
keseluruhan isi buku
tanpa izin tertulis dari penerbit.



ISBN: 978-634-316-002-1
IV + 252 hlm; 18,2 x 25,7 cm.
Cetakan I, Juni 2026

Desain Cover dan Tata Letak:

Ajrina Putri Hawari, S.AB.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT Media Penerbit Indonesia

Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131

Telp: 081362150605

Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com

Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>

Anggota IKAPI No.088/SUT/2024



KATA PENGANTAR

Buku referensi “Ekonomi Internasional: Teori, Kebijakan, dan Dinamika Global” disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, pendekatan analitis, serta perkembangan mutakhir dalam ekonomi internasional. Materi yang disajikan berangkat dari kebutuhan akan sumber pembelajaran yang sistematis, terstruktur, dan relevan dengan dinamika perekonomian global yang terus mengalami perubahan.

Ekonomi internasional berkembang seiring dengan meningkatnya integrasi ekonomi antarnegara yang ditandai oleh intensifikasi perdagangan, arus investasi internasional, mobilitas faktor produksi, serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi hubungan ekonomi antarnegara, tetapi juga membentuk pola baru dalam produksi global, distribusi nilai tambah, serta perumusan kebijakan ekonomi di tingkat nasional maupun internasional.

Buku ini mengintegrasikan pembahasan mengenai teori-teori perdagangan internasional, baik klasik maupun modern, dengan analisis kebijakan perdagangan dan keuangan internasional. Pembahasan dilanjutkan pada dinamika global kontemporer, termasuk *Global Value Chain*, integrasi ekonomi regional, serta transformasi ekonomi digital. Penyajian materi dilakukan secara bertahap dengan pendekatan konseptual dan analitis, sehingga pembaca dapat memahami keterkaitan antara teori, kebijakan, dan praktik empiris.

Salam Hangat

Tim Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I PENDAHULUAN EKONOMI INTERNASIONAL 1

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Internasional.....	2
B. Perbedaan Ekonomi Internasional dan Ekonomi Domestik	10
C. Sejarah Perkembangan Perdagangan Internasional	18
D. Peran Globalisasi dalam Ekonomi Internasional	21
E. Aktor dalam Ekonomi Global.....	27
F. Tantangan dan Peluang Ekonomi Global	33

BAB II TEORI PERDAGANGAN INTERNASIONAL KLASIK39

A. Merkantilisme	39
B. Teori Keunggulan Absolut (Adam Smith)	44
C. Teori Keunggulan Komparatif (David Ricardo).....	51
D. Model Heckscher-Ohlin.....	58
E. Kritik terhadap Teori Klasik.....	66
F. Relevansi Teori Klasik dalam Ekonomi Modern	70

BAB III TEORI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

MODERN	77
A. Teori Perdagangan Baru (<i>New Trade Theory</i>).....	78
B. Teori Siklus Hidup Produk	83
C. Teori Keunggulan Kompetitif (Michael Porter)	90
D. Peran Inovasi dan Teknologi dalam Perdagangan.....	98
E. <i>Global Value Chain</i> (GVC).....	105
F. <i>Digital Trade</i> dan Ekonomi Digital	109

BAB IV KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL . 113

- A. Pengertian Kebijakan Perdagangan 113
- B. Tarif dan Non-Tarif Barrier 116
- C. Proteksionisme vs Liberalisasi Perdagangan 119
- D. Kebijakan Subsidi dan *Dumping* 122
- E. Perjanjian Perdagangan Internasional..... 125
- F. Dampak Kebijakan terhadap Perekonomian 128

BAB V SISTEM KEUANGAN INTERNASIONAL..... 129

- A. Pengertian Sistem Keuangan Internasional 129
- B. Sistem Nilai Tukar 132
- C. Pasar Valuta Asing (*Forex Market*)..... 134
- D. Neraca Pembayaran (*Balance of Payments*)..... 138
- E. Krisis Keuangan Internasional..... 143
- F. Peran Cadangan Devisa 147

BAB VI LEMBAGA EKONOMI INTERNASIONAL..... 151

- A. Peran Lembaga Internasional dalam Ekonomi Global 151
- B. IMF (*International Monetary Fund*) 155
- C. *World Bank* 157
- D. WTO (*World Trade Organization*)..... 159
- E. ASEAN dan Kerja Sama Regional 162
- F. Kritik terhadap Lembaga Internasional 164

BAB VII INVESTASI INTERNASIONAL DAN PERUSAHAAN

MULTINASIONAL..... 169

- A. *Foreign Direct Investment* (FDI)..... 170
- B. Motif Investasi Internasional 172
- C. Peran Perusahaan Multinasional (MNC) 177
- D. Dampak FDI terhadap Negara Berkembang..... 181
- E. Risiko dan Tantangan Investasi Global 183
- F. Kebijakan Investasi..... 186

BAB VIII DINAMIKA GLOBAL DAN ISU KONTEMPORER189

- A. Globalisasi dan De-Globalisasi..... 189
- B. Perang Dagang (*Trade War*)..... 194
- C. Krisis Ekonomi Global 196

D.	Perubahan Iklim dan Ekonomi Internasional	198
E.	Ekonomi Digital Global.....	200
F.	Ketimpangan Ekonomi Global	203
BAB IX	EKONOMI INTERNASIONAL INDONESIA.....	207
A.	Peran Indonesia dalam Perdagangan Global	207
B.	Struktur Ekspor dan Impor Indonesia.....	211
C.	Kebijakan Perdagangan Indonesia.....	213
D.	Investasi Asing di Indonesia.....	215
E.	Tantangan dan Peluang Indonesia di Pasar Global.....	219
F.	Strategi Peningkatan Daya Saing Nasional	221
BAB X	PROSPEK EKONOMI INTERNASIONAL	225
A.	Tren Ekonomi Global Masa Depan	225
B.	Peran Teknologi dan Digitalisasi.....	227
C.	Integrasi Ekonomi Regional	229
D.	Ketahanan Ekonomi Global.....	231
E.	Strategi Negara Berkembang.....	234
DAFTAR PUSTAKA		237
GLOSARIUM		243
INDEKS		247
BIOGRAFI PENULIS		251



BAB I

PENDAHULUAN

EKONOMI

INTERNASIONAL

Ekonomi internasional adalah bidang ilmu yang mengkaji bagaimana interaksi ekonomi antarnegara membentuk kemakmuran, distribusi sumber daya, dan stabilitas sistem ekonomi global. Sejak era merkantilisme hingga era revolusi digital, hubungan ekonomi antarbangsa terus berevolusi dalam kompleksitas dan intensitasnya. Pemahaman atas fondasi konseptual ekonomi internasional menjadi prasyarat mutlak bagi analisis kebijakan yang berbasis bukti di abad ke-21. Ekonomi internasional berfokus pada kajian hubungan ekonomi antarnegara yang memengaruhi tingkat kemakmuran, cara sumber daya dialokasikan, serta kestabilan sistem ekonomi dunia. Hubungan ini tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang dari masa merkantilisme yang menekankan perdagangan dan kekuatan negara hingga era revolusi digital yang ditandai oleh arus informasi, teknologi, dan modal yang semakin cepat dan kompleks. Perubahan tersebut membuat interaksi ekonomi Global menjadi semakin intens dan saling bergantung, sehingga pemahaman yang kuat terhadap konsep dasar ekonomi internasional menjadi sangat penting agar analisis kebijakan dapat dilakukan secara tepat, rasional, dan berbasis data di tengah dinamika ekonomi global abad ke-21.

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Internasional

Definisi Ekonomi Internasional

Ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari interaksi ekonomi antar negara, mencakup perdagangan barang dan jasa, aliran modal, migrasi tenaga kerja, transfer teknologi, dan mekanisme pembayaran internasional, serta dampak interaksi tersebut terhadap output, harga, upah, dan kesejahteraan masing-masing negara (Krugman, Obstfeld & Melitz, 2022).

Ruang lingkup ekonomi internasional mencakup dua cabang utama yang saling berkaitan erat. Pertama, perdagangan internasional (*International trade*) yang mengkaji pola, determinan, dan akibat pertukaran barang dan jasa antar negara. Kedua, keuangan internasional (*International finance*) yang mempelajari mekanisme pembayaran antar negara, sistem nilai tukar, neraca pembayaran, dan aliran modal global (Carbaugh, 2019). Ekonomi internasional terdiri atas dua bidang utama yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan dalam memahami dinamika ekonomi global. Perdagangan internasional berfokus pada bagaimana dan mengapa negara saling bertukar barang dan jasa, termasuk faktor yang memengaruhi pola perdagangan serta dampaknya terhadap perekonomian masing-masing negara. Keuangan internasional menyoroti aspek moneter dan finansial, seperti cara pembayaran antar negara dilakukan, bagaimana nilai tukar mata uang ditentukan, kondisi neraca pembayaran, serta pergerakan modal lintas batas. Keduanya saling berkaitan karena aktivitas perdagangan membutuhkan dukungan sistem keuangan yang stabil, sementara kondisi keuangan Global juga dipengaruhi oleh intensitas dan struktur perdagangan antar negara.

Tabel 1.1 Ruang Lingkup Ekonomi Internasional

Dimensi	Perdagangan Internasional	Keuangan Internasional
Objek Kajian	Aliran barang & jasa antarnegara	Aliran uang & kapital antarnegara
Variabel Kunci	Harga relatif, keunggulan komparatif	Nilai tukar, neraca pembayaran
Kebijakan Utama	Tarif, kuota, subsidi ekspor	Intervensi valas, kontrol kapital
Institusi Relevan	WTO, FTA, RCEP	IMF, Bank Dunia, BIS
Isu Kontemporer	GVC, Digital <i>Trade</i> , NTM	<i>Crypto</i> , CBDC, <i>Capital flow</i>

Sumber: Diadaptasi dari Krugman, P., Obstfeld, M., & Melitz, M. (2022)

Tabel ruang lingkup ekonomi internasional menggambarkan perbedaan fokus kajian antara perdagangan internasional dan keuangan internasional melalui beberapa dimensi utama yang saling melengkapi dalam menjelaskan dinamika ekonomi global. Pada dimensi objek kajian, perdagangan internasional berfokus pada aliran barang dan jasa antarnegara. Aktivitas ini mencakup ekspor dan impor yang dilakukan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun memperluas pasar. Analisisnya mencermati jenis komoditas yang diperdagangkan, arah perdagangan, serta struktur pasar global. Keuangan internasional menitikberatkan pada aliran uang dan kapital antarnegara, termasuk investasi asing langsung, investasi portofolio, pinjaman internasional, dan pergerakan dana jangka pendek. Perhatian utamanya tertuju pada bagaimana dana mengalir lintas batas dan bagaimana hal tersebut memengaruhi stabilitas ekonomi.

Pada dimensi variabel kunci, perdagangan internasional menggunakan harga relatif dan keunggulan komparatif sebagai dasar analisis. Harga relatif menentukan daya saing suatu produk di pasar global, sedangkan keunggulan komparatif menjelaskan alasan negara memilih memproduksi barang tertentu yang lebih efisien dibanding

negara lain. Keuangan internasional menempatkan nilai tukar dan neraca pembayaran sebagai variabel utama. Nilai tukar menentukan harga mata uang suatu negara terhadap mata uang lain yang berdampak langsung pada perdagangan dan investasi, sedangkan neraca pembayaran mencatat seluruh transaksi ekonomi internasional suatu negara dalam periode tertentu.

Pada dimensi kebijakan utama, perdagangan internasional berkaitan dengan instrumen seperti tarif, kuota, dan subsidi ekspor. Tarif digunakan untuk mengenakan pajak pada barang impor, kuota membatasi jumlah impor, sementara subsidi ekspor bertujuan meningkatkan daya saing produk domestik di pasar internasional. Keuangan internasional melibatkan kebijakan seperti intervensi valuta asing dan kontrol kapital. Intervensi valas dilakukan oleh otoritas moneter untuk menstabilkan nilai tukar, sedangkan kontrol kapital mengatur arus masuk dan keluar dana guna menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pada dimensi institusi relevan, perdagangan internasional didukung oleh organisasi seperti WTO, FTA, dan RCEP yang berperan dalam mengatur aturan perdagangan, menyelesaikan sengketa, serta mendorong liberalisasi perdagangan. Keuangan internasional berhubungan dengan lembaga seperti IMF, Bank Dunia, dan BIS yang berfungsi menjaga stabilitas keuangan Global, memberikan bantuan keuangan, serta mengoordinasikan kebijakan moneter antarnegara.

Pada dimensi isu kontemporer, perdagangan internasional menghadapi perkembangan seperti *Global Value Chains* (GVC), perdagangan digital, dan *Non-Tariff Measures* (NTM). *Global Value Chains* menunjukkan fragmentasi proses produksi lintas negara, perdagangan digital memperluas transaksi berbasis teknologi, sementara *Non-Tariff Measures* mencakup regulasi non-tarif seperti standar teknis dan kebijakan lingkungan. Keuangan internasional menghadapi isu seperti *cryptocurrency*, *Central Bank Digital Currency* (CBDC), dan dinamika arus modal global. Perkembangan ini menimbulkan tantangan baru terkait regulasi, stabilitas sistem keuangan, serta peran otoritas moneter dalam menghadapi inovasi teknologi finansial. Setiap dimensi dalam tabel memperlihatkan bahwa perdagangan internasional dan keuangan internasional memiliki fokus yang berbeda namun saling terhubung erat, karena aktivitas pertukaran barang dan jasa membutuhkan dukungan sistem keuangan yang efisien dan stabil.

Ekonomi internasional tidak sekadar menjumlahkan ekonomi domestik berbagai negara, melainkan menghasilkan fenomena unik yang tidak dapat dijelaskan oleh teori ekonomi tertutup semata. Baldwin dan Lopez-Gonzalez (2015) menekankan bahwa *Global Value Chains* telah mengubah secara fundamental cara negara-negara berpartisipasi dalam perdagangan, sehingga konsep "negara mengekspor produk" telah berkembang menjadi "negara berpartisipasi dalam tugas-tugas produksi." Ekonomi internasional memiliki karakteristik khas yang tidak bisa dipahami hanya dari penjumlahan aktivitas ekonomi masing-masing negara, karena interaksi lintas batas menciptakan pola baru yang lebih kompleks. Kehadiran rantai nilai global menunjukkan bahwa proses produksi suatu barang tidak lagi berlangsung di satu negara secara utuh, melainkan tersebar ke berbagai negara yang masing-masing mengerjakan bagian tertentu sesuai keunggulannya. Gagasan ini mengubah cara pandang tradisional tentang perdagangan, dari sekadar ekspor produk jadi menjadi keterlibatan dalam tahapan produksi seperti perakitan, desain, atau penyediaan komponen. Perubahan tersebut membuat peran negara dalam perdagangan internasional menjadi lebih spesifik dan terfragmentasi, sehingga analisisnya membutuhkan pendekatan yang melampaui teori ekonomi tertutup. Perubahan struktur produksi global yang ditandai oleh fragmentasi proses manufaktur lintas negara mendorong lahirnya pendekatan analisis baru dalam ekonomi internasional. Setiap tahapan produksi kini dapat dilakukan di lokasi berbeda berdasarkan efisiensi biaya, ketersediaan tenaga kerja, kedekatan pasar, maupun kualitas infrastruktur. Perusahaan multinasional memainkan peran dominan dalam mengkoordinasikan jaringan produksi tersebut melalui keputusan investasi dan penempatan fasilitas produksi di berbagai negara. Pola ini menghasilkan spesialisasi yang lebih sempit namun lebih dalam, karena suatu negara tidak lagi harus menguasai seluruh proses produksi, melainkan cukup unggul pada satu atau beberapa tahapan tertentu.

Keterlibatan dalam rantai nilai global membawa implikasi terhadap pengukuran kinerja perdagangan. Nilai ekspor bruto sering kali tidak mencerminkan nilai tambah domestik yang sebenarnya dihasilkan oleh suatu negara. Komponen impor yang digunakan dalam proses produksi dapat cukup besar, sehingga nilai ekspor perlu dianalisis dalam kerangka nilai tambah untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat. Pendekatan ini memperkenalkan konsep *Trade in Value Added* (TiVA)

yang memungkinkan identifikasi kontribusi nyata suatu negara dalam produksi global. Analisis berbasis nilai tambah memberikan wawasan mengenai posisi suatu negara dalam rantai produksi, apakah berada pada tahap awal seperti penyedia bahan baku, tahap menengah seperti manufaktur komponen, atau tahap akhir seperti desain dan pemasaran.

Integrasi produksi global juga meningkatkan sensitivitas perekonomian terhadap gangguan eksternal. Gangguan pada satu titik dalam rantai pasok dapat menyebar dengan cepat ke berbagai negara yang terhubung dalam jaringan tersebut. Krisis keuangan, pandemi, konflik geopolitik, maupun gangguan logistik dapat menghambat aliran barang dan komponen penting. Perusahaan kemudian mulai mempertimbangkan strategi diversifikasi sumber pasokan dan relokasi produksi untuk mengurangi risiko. Strategi seperti *reshoring*, *nearshoring*, dan *friend-shoring* muncul sebagai respons terhadap kebutuhan menjaga ketahanan rantai pasok.

Perkembangan teknologi digital mempercepat transformasi dalam ekonomi internasional. *Platform* digital memungkinkan transaksi lintas batas dilakukan secara lebih efisien tanpa kehadiran fisik. Perdagangan jasa mengalami ekspansi signifikan melalui layanan berbasis internet seperti perangkat lunak, konsultasi, pendidikan daring, dan layanan kreatif. Batas antara perdagangan barang dan jasa menjadi semakin kabur karena banyak produk fisik yang kini dilengkapi dengan komponen digital. Nilai ekonomi tidak lagi hanya berasal dari produksi barang, melainkan juga dari data, algoritma, dan inovasi berbasis teknologi.

Peran data menjadi semakin penting sebagai faktor produksi baru dalam ekonomi global. Perusahaan yang mampu mengelola dan memanfaatkan data dalam skala besar memperoleh keunggulan kompetitif yang signifikan. Data digunakan untuk memahami perilaku konsumen, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengembangkan produk dan layanan baru. Negara yang memiliki infrastruktur digital yang kuat cenderung lebih mampu berpartisipasi dalam ekonomi berbasis data. Regulasi terkait aliran data lintas batas menjadi isu penting karena berkaitan dengan privasi, keamanan, dan kedaulatan digital.

Liberalisasi perdagangan tetap menjadi salah satu pendorong utama integrasi ekonomi global, meskipun pendekatan yang digunakan mengalami perubahan. Perjanjian perdagangan modern tidak hanya mencakup penurunan tarif, tetapi juga mengatur berbagai aspek lain

seperti perlindungan investasi, hak kekayaan intelektual, standar lingkungan, dan regulasi digital. Perjanjian regional dan bilateral semakin berkembang sebagai alternatif dari negosiasi multilateral yang sering menghadapi kebuntuan. Setiap perjanjian mencerminkan kepentingan strategis negara-negara yang terlibat serta upaya untuk meningkatkan daya saing dalam sistem ekonomi global.

Ketimpangan distribusi manfaat dari perdagangan internasional menjadi perhatian penting dalam analisis ekonomi. Tidak semua kelompok masyarakat memperoleh manfaat yang sama dari keterbukaan ekonomi. Sektor tertentu dapat mengalami tekanan akibat persaingan impor, sementara sektor lain memperoleh keuntungan dari ekspansi pasar ekspor. Tenaga kerja dengan keterampilan rendah cenderung lebih rentan terhadap perubahan struktur industri, sedangkan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi lebih mampu beradaptasi. Kebijakan domestik seperti pendidikan, pelatihan, dan perlindungan sosial memainkan peran penting dalam mengurangi dampak negatif dan memastikan distribusi manfaat yang lebih merata.

Mobilitas modal internasional memberikan peluang bagi negara untuk memperoleh sumber pembiayaan tambahan, namun juga membawa risiko volatilitas. Aliran modal jangka pendek dapat berubah dengan cepat sebagai respons terhadap perubahan kondisi ekonomi global maupun kebijakan moneter negara maju. Perubahan suku bunga internasional dapat memicu arus keluar modal dari negara berkembang, yang berdampak pada nilai tukar dan stabilitas keuangan. Otoritas moneter perlu mengelola kebijakan secara hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara menarik investasi dan mempertahankan stabilitas makroekonomi.

Nilai tukar memainkan peran sentral dalam menghubungkan sektor riil dan sektor keuangan dalam ekonomi internasional. Perubahan nilai tukar memengaruhi daya saing ekspor dan impor, serta nilai aset dan kewajiban dalam mata uang asing. Depresiasi mata uang dapat meningkatkan daya saing ekspor, namun juga meningkatkan biaya impor dan beban utang luar negeri. Apresiasi mata uang memiliki dampak sebaliknya. Dinamika nilai tukar dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perbedaan suku bunga, inflasi, ekspektasi pasar, dan intervensi kebijakan.

Neraca pembayaran menjadi alat penting untuk memahami posisi eksternal suatu negara. Komponen utama seperti transaksi berjalan,

transaksi modal, dan transaksi finansial memberikan gambaran mengenai sumber dan penggunaan dana internasional. Defisit transaksi berjalan menunjukkan bahwa suatu negara mengimpor lebih banyak barang dan jasa dibandingkan eksportnya, sehingga membutuhkan pembiayaan dari luar negeri. Surplus transaksi berjalan menunjukkan kelebihan ekspor yang dapat digunakan untuk investasi di luar negeri. Keseimbangan neraca pembayaran mencerminkan hubungan antara aktivitas ekonomi domestik dan interaksi dengan dunia internasional.

Peran institusi internasional tetap relevan dalam menjaga stabilitas dan keteraturan sistem ekonomi global. Organisasi seperti IMF menyediakan bantuan keuangan dan rekomendasi kebijakan bagi negara yang mengalami krisis neraca pembayaran. Bank Dunia mendukung pembangunan melalui pembiayaan proyek dan bantuan teknis. Organisasi perdagangan internasional memfasilitasi negosiasi dan penyelesaian sengketa antarnegara. Koordinasi antarnegara menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan global yang tidak dapat diselesaikan secara unilateral.

Isu keberlanjutan lingkungan semakin terintegrasi dalam ekonomi internasional. Aktivitas produksi dan perdagangan memiliki dampak terhadap lingkungan yang tidak dapat diabaikan. Emisi karbon, eksploitasi sumber daya alam, dan polusi menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan ekonomi global. Negara-negara mulai menerapkan standar lingkungan yang lebih ketat, termasuk mekanisme seperti carbon border adjustment yang memengaruhi pola perdagangan. Perusahaan dituntut untuk mengadopsi praktik produksi yang lebih ramah lingkungan guna memenuhi tuntutan pasar dan regulasi.

Transformasi struktur ekonomi global juga dipengaruhi oleh perubahan demografi dan urbanisasi. Pertumbuhan populasi di negara berkembang menciptakan pasar baru sekaligus meningkatkan pasokan tenaga kerja. Urbanisasi mendorong peningkatan produktivitas melalui aglomerasi ekonomi, namun juga menimbulkan tantangan seperti kebutuhan infrastruktur dan layanan publik. Perubahan demografi di negara maju, seperti penuaan populasi, memengaruhi pola konsumsi, tabungan, dan investasi yang berdampak pada aliran ekonomi internasional.

Perkembangan geopolitik memberikan pengaruh signifikan terhadap arah ekonomi internasional. Ketegangan antarnegara dapat memicu perubahan kebijakan perdagangan dan investasi. Sanksi

ekonomi, pembatasan teknologi, dan kebijakan proteksionis menjadi instrumen yang digunakan dalam persaingan global. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian yang memengaruhi keputusan pelaku ekonomi. Perusahaan dan negara perlu menyesuaikan strategi untuk menghadapi dinamika tersebut.

Integrasi ekonomi regional menjadi salah satu strategi untuk memperkuat posisi dalam ekonomi global. Negara-negara yang tergabung dalam suatu kawasan dapat memperoleh manfaat dari pasar yang lebih besar, efisiensi produksi, dan koordinasi kebijakan. Integrasi ini dapat berbentuk kawasan perdagangan bebas, serikat pabean, pasar bersama, hingga integrasi ekonomi penuh. Tingkat integrasi yang lebih tinggi memerlukan harmonisasi kebijakan yang lebih kompleks, termasuk dalam bidang fiskal dan moneter.

Peran inovasi dan teknologi dalam meningkatkan daya saing tidak dapat diabaikan. Negara yang mampu mengembangkan kapasitas inovasi memiliki peluang lebih besar untuk bergerak ke segmen nilai tambah yang lebih tinggi dalam rantai produksi global. Investasi dalam penelitian dan pengembangan, pendidikan, serta infrastruktur teknologi menjadi faktor penentu dalam menentukan posisi suatu negara dalam ekonomi internasional. Inovasi tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan produk dan pasar baru.

Hubungan antara perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu topik utama dalam literatur ekonomi. Keterbukaan perdagangan dapat mendorong pertumbuhan melalui peningkatan efisiensi, transfer teknologi, dan akses ke pasar yang lebih luas. Efek tersebut bergantung pada kemampuan negara dalam memanfaatkan peluang yang tersedia. Kebijakan yang mendukung stabilitas makroekonomi, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas institusi menjadi faktor pendukung yang penting.

Perdagangan jasa mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan perdagangan barang dalam beberapa dekade terakhir. Sektor seperti keuangan, pendidikan, kesehatan, dan teknologi informasi menjadi kontributor utama dalam ekonomi global. Digitalisasi memungkinkan layanan diberikan secara lintas batas tanpa kehadiran fisik penyedia maupun konsumen. Perkembangan ini membuka peluang bagi negara untuk mengembangkan sektor jasa sebagai sumber pertumbuhan baru.

Pengukuran kesejahteraan dalam ekonomi internasional tidak hanya terbatas pada indikator pendapatan, tetapi juga mencakup aspek lain seperti distribusi, kualitas hidup, dan keberlanjutan. Interaksi ekonomi antarnegara dapat meningkatkan kesejahteraan melalui akses terhadap barang dan jasa yang lebih beragam dan murah. Dampak tersebut perlu dianalisis secara komprehensif untuk memahami implikasi jangka panjang terhadap masyarakat.

Kebijakan ekonomi internasional memerlukan koordinasi antara berbagai lembaga domestik seperti kementerian perdagangan, keuangan, dan bank sentral. Setiap kebijakan yang diambil memiliki implikasi lintas sektor yang perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Pendekatan yang terintegrasi memungkinkan pengelolaan ekonomi yang lebih efektif dalam menghadapi dinamika global. Dinamika ekonomi internasional menunjukkan bahwa interaksi antarnegara menghasilkan kompleksitas yang terus berkembang. Setiap perubahan dalam teknologi, kebijakan, maupun kondisi global menciptakan tantangan dan peluang baru. Pemahaman yang mendalam terhadap berbagai aspek dalam ekonomi internasional menjadi kunci untuk merumuskan strategi yang tepat dalam menghadapi perubahan tersebut.

B. Perbedaan Ekonomi Internasional dan Ekonomi Domestik

Meskipun ekonomi internasional menggunakan alat analisis yang sama dengan ekonomi umum (penawaran dan permintaan, keseimbangan pasar, teori perusahaan) terdapat perbedaan fundamental yang membuat analisis internasional jauh lebih kompleks. Ekonomi internasional memang memakai perangkat analisis dasar yang sama seperti ekonomi umum, seperti konsep penawaran dan permintaan, keseimbangan pasar, serta perilaku perusahaan, tetapi penerapannya menjadi jauh lebih rumit karena melibatkan banyak negara dengan sistem yang berbeda. Kompleksitas ini muncul dari adanya perbedaan mata uang, kebijakan pemerintah, hambatan perdagangan, mobilitas faktor produksi, serta ketidakpastian global yang tidak dijumpai dalam ekonomi tertutup. Interaksi lintas negara juga menciptakan dinamika tambahan seperti fluktuasi nilai tukar dan arus modal internasional yang saling memengaruhi, sehingga analisisnya membutuhkan pertimbangan yang lebih luas dibandingkan dengan ekonomi domestik semata.

Tabel 1.2 Perbedaan Utama Ekonomi Internasional dan Ekonomi Domestik

Dimensi	Ekonomi Domestik	Ekonomi Internasional
Mata uang	Satu mata uang	Berbeda-beda; ada risiko nilai tukar
Faktor produksi	Bergerak bebas	<i>Relatif immobile</i> (visa, imigrasi)
Regulasi	Satu sistem hukum	Beragam yurisdiksi & standar
Politik	Satu entitas politik	Banyak kedaulatan; potensi konflik
Informasi	Relatif simetris	Asimetri tinggi lintas batas
Penegakan kontrak	Melalui pengadilan nasional	Kompleks; perlu arbitrase internasional
Kebijakan moneter	Bank sentral tunggal	Beragam; efek <i>spillover</i>
Proteksi	Tidak ada (<i>Free Internal Trade</i>)	Ada; tarif, NTB, regulasi

Sumber: Diadaptasi dari Salvatore, D. (2022)

Tabel perbedaan utama ekonomi internasional dan ekonomi domestik menunjukkan bagaimana aktivitas ekonomi lintas negara memiliki karakteristik yang jauh lebih kompleks dibandingkan aktivitas dalam satu negara, dilihat dari berbagai dimensi penting berikut. Pada dimensi mata uang, ekonomi domestik hanya menggunakan satu mata uang resmi sehingga transaksi berlangsung tanpa risiko perubahan nilai tukar. Harga barang, upah, dan biaya produksi dinyatakan dalam satu unit yang stabil. Ekonomi internasional melibatkan berbagai mata uang yang nilainya saling berfluktuasi. Setiap transaksi lintas negara

menghadapi risiko nilai tukar (*Exchange Rate Risk*), yang dapat memengaruhi keuntungan eksportir, Importir, maupun investor.

Pada dimensi faktor produksi, dalam ekonomi domestik tenaga kerja dan modal dapat bergerak relatif bebas antarwilayah tanpa hambatan berarti. Perpindahan tenaga kerja tidak memerlukan izin khusus yang kompleks. Ekonomi internasional menghadapi keterbatasan mobilitas faktor produksi, terutama tenaga kerja, karena adanya aturan visa, imigrasi, serta perbedaan kebijakan ketenagakerjaan. Modal memang lebih fleksibel bergerak lintas negara, tetapi tetap dipengaruhi oleh regulasi dan risiko politik. Pada dimensi regulasi, ekonomi domestik berada dalam satu sistem hukum yang seragam, sehingga pelaku ekonomi mengikuti aturan yang sama. Hal ini memudahkan koordinasi dan kepastian hukum. Ekonomi internasional melibatkan berbagai yurisdiksi dengan aturan hukum, standar produk, perpajakan, dan kebijakan perdagangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini menambah biaya kepatuhan dan meningkatkan kompleksitas transaksi.

Pada dimensi politik, ekonomi domestik berada dalam satu entitas politik yang memiliki otoritas tunggal dalam pengambilan kebijakan. Stabilitas politik relatif lebih terjaga karena keputusan diambil oleh satu pemerintahan. Ekonomi internasional melibatkan banyak negara dengan kedaulatan masing-masing, sehingga terdapat potensi konflik kepentingan, perang dagang, maupun ketegangan geopolitik yang dapat memengaruhi aktivitas ekonomi. Pada dimensi informasi, pelaku ekonomi domestik cenderung memiliki akses informasi yang lebih merata dan mudah diperoleh, baik mengenai harga, regulasi, maupun kondisi pasar. Ekonomi internasional ditandai oleh tingkat asimetri informasi yang lebih tinggi karena perbedaan bahasa, budaya, sistem hukum, serta keterbatasan akses data antarnegara. Kondisi ini meningkatkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan.

Pada dimensi penegakan kontrak, dalam ekonomi domestik kontrak dapat ditegakkan melalui sistem peradilan nasional yang jelas dan memiliki kewenangan penuh. Proses penyelesaian sengketa relatif lebih terstruktur. Ekonomi internasional menghadapi tantangan dalam penegakan kontrak karena melibatkan pihak dari negara berbeda, sehingga sering memerlukan mekanisme arbitrase internasional atau lembaga penyelesaian sengketa lintas negara yang prosesnya lebih kompleks. Pada dimensi kebijakan moneter, ekonomi domestik dikendalikan oleh satu bank sentral yang mengatur suku bunga, jumlah

uang beredar, dan stabilitas harga. Kebijakan ini berdampak langsung pada seluruh perekonomian nasional. Ekonomi internasional melibatkan banyak bank sentral dengan kebijakan yang berbeda-beda, sehingga kebijakan suatu negara dapat menimbulkan efek rambatan (*spillover*) ke negara lain, seperti perubahan arus modal atau tekanan terhadap nilai tukar.

Pada dimensi proteksi, dalam ekonomi domestik tidak terdapat hambatan perdagangan internal sehingga barang dan jasa dapat bergerak bebas di dalam negeri. Ekonomi internasional justru diwarnai oleh berbagai bentuk proteksi seperti tarif, hambatan non-tarif, serta regulasi teknis yang membatasi arus perdagangan. Kebijakan ini digunakan untuk melindungi industri dalam negeri, tetapi juga dapat memicu distorsi pasar global. Setiap dimensi tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi internasional menghadirkan lapisan tantangan tambahan yang tidak ditemui dalam ekonomi domestik, terutama karena adanya perbedaan sistem, kepentingan, dan kondisi antarnegara.

Obstfeld dan Rogoff (2020) dalam analisis mereka tentang *Global imBalances* menekankan bahwa perbedaan institusional dan asimetri informasi lintas batas menciptakan gesekan (*frictions*) yang secara signifikan mempengaruhi pola perdagangan dan aliran modal. Gesekan-gesekan ini yang Anderson dan van Wincoop (2003) kuantifikasi setara dengan tarif 170% menjelaskan mengapa perdagangan internasional jauh di bawah prediksi model *frictionless*. Hubungan ekonomi antarnegara tidak berlangsung mulus karena adanya berbagai hambatan yang berasal dari perbedaan sistem institusi, aturan, dan keterbatasan informasi antar pihak di berbagai negara. Hambatan ini menimbulkan gesekan yang memengaruhi keputusan perdagangan dan pergerakan modal, seperti meningkatnya biaya transaksi, ketidakpastian, dan risiko yang harus ditanggung pelaku ekonomi.

Penelitian menunjukkan bahwa dampak gesekan tersebut sangat besar, bahkan setara dengan beban tarif yang sangat tinggi, sehingga aktivitas perdagangan nyata menjadi jauh lebih rendah dibandingkan dengan prediksi teori yang mengasumsikan tidak adanya hambatan. Hal ini menegaskan bahwa faktor non-teknis seperti kelembagaan dan informasi memiliki peran penting dalam membentuk pola ekonomi global. Perbedaan antara ekonomi internasional dan ekonomi domestik tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga memengaruhi cara teori ekonomi dikembangkan dan diterapkan. Model ekonomi yang bekerja

dengan baik dalam konteks domestik sering kali memerlukan modifikasi ketika digunakan untuk menganalisis interaksi lintas negara. Asumsi sederhana seperti tidak adanya biaya transaksi, informasi sempurna, dan mobilitas faktor produksi penuh menjadi kurang relevan ketika batas negara diperhitungkan. Analisis ekonomi internasional berkembang dengan memasukkan berbagai friksi yang muncul akibat perbedaan sistem dan kondisi antarnegara.

Salah satu konsekuensi utama dari perbedaan tersebut terlihat pada pembentukan harga. Harga dalam ekonomi domestik cenderung ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan dalam satu pasar terpadu. Mekanisme arbitrase memastikan bahwa perbedaan harga antarwilayah relatif kecil karena barang dapat bergerak dengan mudah. Harga dalam ekonomi internasional tidak selalu mengalami konvergensi yang sama karena adanya biaya transportasi, tarif, hambatan non-tarif, serta perbedaan mata uang. Hukum satu harga (*law of one price*) sering kali tidak berlaku secara sempurna, sehingga harga barang yang sama dapat berbeda antarnegara dalam jangka waktu yang cukup lama.

Fluktuasi nilai tukar memperkenalkan dimensi tambahan dalam pembentukan harga internasional. Nilai tukar menentukan berapa banyak mata uang domestik yang diperlukan untuk membeli mata uang asing. Perubahan nilai tukar dapat mengubah harga relatif barang dan jasa secara cepat tanpa perubahan pada biaya produksi. Depresiasi mata uang domestik dapat membuat ekspor menjadi lebih murah bagi pembeli asing, sementara impor menjadi lebih mahal bagi konsumen domestik. Apresiasi mata uang menghasilkan efek sebaliknya. Ketidakpastian nilai tukar mendorong pelaku ekonomi untuk menggunakan instrumen lindung nilai seperti kontrak *forward*, *futures*, dan opsi untuk mengurangi risiko.

Perbedaan lain muncul dalam perilaku konsumen dan produsen. Konsumen domestik biasanya menghadapi pilihan yang relatif homogen dalam hal regulasi, standar kualitas, dan preferensi budaya. Konsumen internasional memiliki preferensi yang lebih beragam yang dipengaruhi oleh budaya, tingkat pendapatan, serta kebiasaan konsumsi lokal. Perusahaan yang beroperasi secara internasional harus menyesuaikan produk mereka agar sesuai dengan karakteristik pasar tujuan. Strategi diferensiasi produk menjadi lebih penting dalam menghadapi heterogenitas preferensi global.

Struktur pasar juga mengalami perubahan ketika aktivitas ekonomi melintasi batas negara. Persaingan dalam ekonomi domestik sering kali terbatas pada pelaku dalam negeri. Pasar internasional mempertemukan perusahaan dari berbagai negara dengan tingkat efisiensi dan teknologi yang berbeda. Perusahaan multinasional memiliki keunggulan dalam skala produksi, akses terhadap teknologi, serta jaringan distribusi global. Kondisi ini dapat meningkatkan intensitas persaingan dan mendorong inovasi, tetapi juga dapat menimbulkan dominasi pasar oleh perusahaan besar yang memiliki sumber daya lebih kuat.

Aspek risiko dalam ekonomi internasional jauh lebih kompleks dibandingkan ekonomi domestik. Risiko tidak hanya berasal dari fluktuasi permintaan dan penawaran, tetapi juga dari faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah, ketegangan politik, serta krisis global. Risiko negara (*Country Risk*) menjadi pertimbangan penting dalam keputusan investasi. Risiko ini mencakup kemungkinan perubahan kebijakan yang merugikan investor, ketidakstabilan politik, hingga potensi gagal bayar utang pemerintah. Penilaian terhadap risiko tersebut memengaruhi aliran investasi internasional dan biaya pembiayaan suatu negara.

Perbedaan sistem perpajakan antarnegara menambah kompleksitas dalam aktivitas ekonomi internasional. Perusahaan yang beroperasi di banyak negara harus menghadapi berbagai aturan perpajakan yang berbeda, termasuk tarif pajak, insentif investasi, serta perjanjian penghindaran pajak berganda. Strategi perencanaan pajak internasional menjadi bagian penting dalam manajemen perusahaan global. Negara juga bersaing dalam menarik investasi melalui kebijakan pajak yang lebih kompetitif.

Perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh standar dan regulasi teknis yang berbeda antarnegara. Standar tersebut mencakup aspek keselamatan produk, kesehatan, lingkungan, serta spesifikasi teknis. Perbedaan standar dapat menjadi hambatan bagi perusahaan yang ingin memasuki pasar luar negeri. Proses sertifikasi dan kepatuhan terhadap regulasi memerlukan biaya tambahan dan waktu yang tidak sedikit. Harmonisasi standar menjadi salah satu upaya untuk mengurangi hambatan tersebut, meskipun tidak selalu mudah dicapai karena perbedaan kepentingan nasional.

Ketidakpastian hukum dalam ekonomi internasional mendorong berkembangnya mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Arbitrase internasional menjadi pilihan utama karena dianggap lebih netral dan efisien dibandingkan pengadilan nasional. Lembaga seperti *International Chamber of Commerce* (ICC) dan *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) menyediakan forum bagi penyelesaian sengketa antara pelaku ekonomi dari berbagai negara. Keberadaan mekanisme ini meningkatkan kepercayaan dalam transaksi internasional meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan risiko.

Perbedaan dalam kebijakan ekonomi makro antarnegara menciptakan interaksi yang kompleks dalam sistem global. Kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan oleh suatu negara dapat memengaruhi negara lain melalui perdagangan dan aliran modal. Penurunan suku bunga di negara maju dapat mendorong arus modal ke negara berkembang yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi. Kondisi ini dapat memperkuat nilai tukar negara penerima, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap pembalikan arus modal secara tiba-tiba.

Mobilitas tenaga kerja internasional menunjukkan dinamika yang berbeda dibandingkan mobilitas domestik. Hambatan administratif, perbedaan bahasa, serta faktor sosial budaya membatasi perpindahan tenaga kerja antarnegara. Migrasi internasional tetap terjadi dalam skala besar, terutama dari negara berkembang ke negara maju, didorong oleh perbedaan upah dan peluang kerja. Remitansi yang dikirim oleh pekerja migran menjadi sumber pendapatan penting bagi banyak negara berkembang dan berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi domestik.

Ketergantungan antarnegara dalam ekonomi internasional menciptakan efek rambatan yang kuat. Perubahan ekonomi di satu negara dapat memengaruhi negara lain melalui berbagai saluran. Penurunan permintaan di negara besar dapat mengurangi ekspor negara mitra dagangnya. Krisis keuangan dapat menyebar melalui sistem perbankan dan pasar keuangan global. Hubungan ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi global memerlukan koordinasi kebijakan yang efektif antarnegara.

Perbedaan tingkat pembangunan ekonomi juga memengaruhi pola interaksi internasional. Negara maju cenderung mengeksport barang dengan teknologi tinggi dan jasa bernilai tambah tinggi, sementara negara berkembang lebih banyak mengeksport komoditas atau produk

manufaktur berbasis tenaga kerja. Pola ini mencerminkan perbedaan dalam struktur ekonomi dan kapasitas teknologi. Upaya untuk meningkatkan nilai tambah menjadi fokus utama bagi negara berkembang dalam meningkatkan posisi mereka dalam ekonomi global.

Integrasi pasar keuangan global memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien, tetapi juga meningkatkan risiko sistemik. Keterkaitan antar lembaga keuangan lintas negara dapat mempercepat penyebaran krisis. Regulasi keuangan internasional berupaya untuk mengurangi risiko tersebut melalui standar seperti Basel III yang mengatur kecukupan modal bank dan manajemen risiko. Implementasi standar ini memerlukan koordinasi yang erat antarnegara.

Perbedaan budaya memainkan peran penting dalam transaksi ekonomi internasional. Nilai-nilai sosial, norma bisnis, serta gaya komunikasi memengaruhi cara negosiasi dan hubungan bisnis dibangun. Kesalahan dalam memahami perbedaan budaya dapat menyebabkan kegagalan dalam kerja sama ekonomi. Perusahaan yang berhasil di pasar internasional biasanya memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan budaya yang berbeda.

Perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi mengurangi sebagian hambatan dalam ekonomi internasional, tetapi tidak menghilangkan seluruh perbedaan yang ada. Biaya pengiriman yang lebih rendah dan akses informasi yang lebih luas meningkatkan efisiensi perdagangan. Teknologi digital memungkinkan koordinasi aktivitas produksi lintas negara secara real-time. Perubahan ini mempercepat integrasi ekonomi global sekaligus meningkatkan persaingan.

Peran negara dalam ekonomi internasional tetap signifikan meskipun terjadi liberalisasi perdagangan. Pemerintah menentukan kebijakan yang memengaruhi daya saing nasional, seperti investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan penelitian. Kebijakan industri digunakan untuk mendukung sektor tertentu agar mampu bersaing di pasar global. Intervensi pemerintah sering kali menjadi perdebatan karena dapat meningkatkan efisiensi atau justru menciptakan distorsi.

Analisis keseimbangan umum dalam ekonomi internasional menunjukkan bahwa perubahan di satu sektor dapat memengaruhi sektor lain melalui hubungan antar pasar. Kebijakan perdagangan, perubahan nilai tukar, maupun aliran modal dapat menghasilkan efek yang luas

dalam perekonomian. Pendekatan ini membantu memahami dampak kebijakan secara lebih komprehensif dibandingkan analisis parsial.

Perbedaan antara ekonomi internasional dan domestik juga terlihat dalam mekanisme penyesuaian terhadap ketidakseimbangan. Ekonomi domestik dapat menyesuaikan melalui perubahan harga dan mobilitas faktor produksi. Ekonomi internasional menghadapi keterbatasan dalam mekanisme tersebut karena adanya batas negara. Penyesuaian sering kali terjadi melalui perubahan nilai tukar, arus modal, atau kebijakan pemerintah.

Keterkaitan antara sektor riil dan sektor keuangan menjadi lebih kompleks dalam ekonomi internasional. Perubahan dalam pasar keuangan dapat memengaruhi aktivitas produksi dan perdagangan. Krisis keuangan dapat menyebabkan penurunan investasi dan konsumsi, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hubungan ini menunjukkan pentingnya stabilitas keuangan dalam mendukung aktivitas ekonomi global.

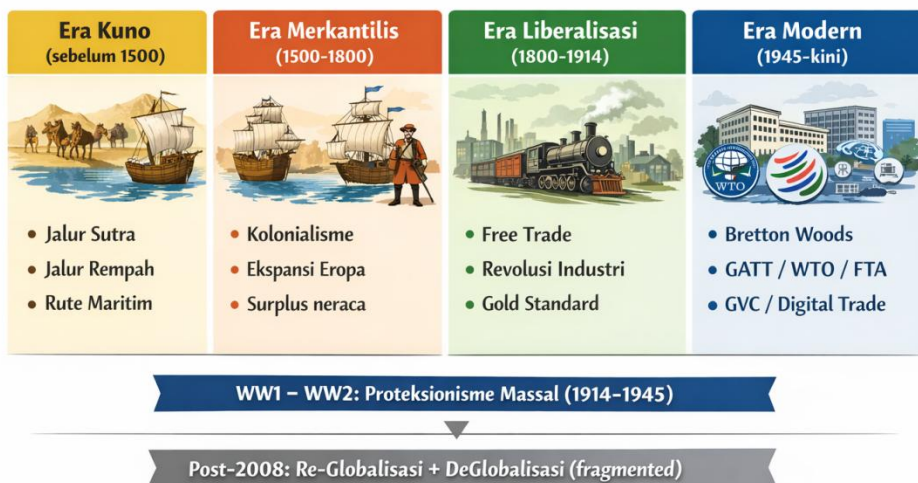
Perbedaan institusional antarnegara menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan integrasi ekonomi. Kualitas institusi seperti sistem hukum, perlindungan hak milik, dan efektivitas birokrasi memengaruhi kepercayaan investor dan pelaku ekonomi. Negara dengan institusi yang kuat cenderung lebih mampu menarik investasi dan berpartisipasi aktif dalam perdagangan internasional. Kompleksitas ekonomi internasional mencerminkan interaksi berbagai faktor yang tidak ditemukan dalam ekonomi domestik. Setiap dimensi perbedaan menambah lapisan analisis yang perlu dipertimbangkan. Pemahaman yang mendalam terhadap perbedaan tersebut memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berkembang.

C. Sejarah Perkembangan Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional memiliki sejarah panjang yang merentang dari ribuan tahun sebelum masehi. Jalur Sutra (*Silk Road*) yang menghubungkan Tiongkok dengan Mediterania sejak abad ke-2 SM adalah bukti bahwa hasrat manusia untuk bertukar komoditas melampaui batas geografis telah ada jauh sebelum konsep "negara" itu sendiri terbentuk. Aktivitas perdagangan antarwilayah sudah berlangsung sejak masa sangat awal dalam sejarah manusia, bahkan

sebelum terbentuknya sistem negara modern. Keberadaan Jalur Sutra menunjukkan bahwa manusia telah lama menjalin hubungan ekonomi lintas wilayah untuk saling memenuhi kebutuhan, menukar barang, serta memperoleh komoditas yang tidak tersedia di daerahnya. Dorongan untuk berdagang ini muncul dari keinginan memperoleh keuntungan, memperluas jaringan, dan mengakses sumber daya yang berbeda, sehingga interaksi ekonomi melampaui batas geografis dan budaya. Hal ini menegaskan bahwa perdagangan internasional berakar pada naluri dasar manusia untuk berinteraksi dan bertukar, bukan semata hasil dari sistem politik atau ekonomi modern.

Gambar 1. Periodisasi Perkembangan Perdagangan Internasional



Sumber: Diadaptasi dari O'Rourke, K.H. & Williamson, J.G. (2017)

Gambar periodisasi perkembangan perdagangan internasional menggambarkan tahapan evolusi perdagangan lintas wilayah dari masa kuno hingga era kontemporer, dengan ciri khas yang berbeda pada setiap periode. Pada era kuno (sebelum 1500), perdagangan internasional masih bersifat sederhana dan berbasis pada rute-rute fisik yang menghubungkan berbagai peradaban besar. Jalur Sutra menjadi simbol utama yang menghubungkan Tiongkok, Asia Tengah, hingga kawasan Mediterania, memungkinkan pertukaran barang seperti sutra, rempah-rempah, dan logam mulia. Jalur rempah di Asia Tenggara juga memainkan peran penting dalam distribusi komoditas bernilai tinggi seperti cengkeh dan pala. Rute maritim mulai berkembang sebagai

alternatif jalur darat, terutama melalui Samudra Hindia. Aktivitas perdagangan pada periode ini sangat bergantung pada kondisi geografis, keamanan jalur, serta hubungan antar kerajaan.

Pada era merkantilisme (1500–1800), perdagangan internasional mulai dipengaruhi oleh kepentingan negara dan kekuasaan politik. Kolonialisme menjadi ciri utama, di mana negara-negara Eropa melakukan ekspansi ke Asia, Afrika, dan Amerika untuk menguasai sumber daya alam. Pemerintah berperan aktif dalam mengatur perdagangan dengan tujuan memperoleh surplus neraca perdagangan, yaitu meningkatkan ekspor dan membatasi impor. Ekspansi Eropa melalui jalur laut memperluas jaringan perdagangan global dan menciptakan sistem ekonomi yang terpusat pada negara penjajah. Perdagangan tidak lagi sekadar pertukaran, tetapi menjadi instrumen kekuatan ekonomi dan politik.

Pada era liberalisasi (1800–1914), terjadi perubahan besar menuju perdagangan yang lebih terbuka. Prinsip *Free Trade* mulai berkembang, didorong oleh pemikiran ekonomi klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo. Revolusi Industri meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan, sehingga negara-negara industri membutuhkan pasar yang lebih luas untuk menjual produknya. Sistem *Gold Standard* diperkenalkan untuk menstabilkan nilai tukar mata uang, yang mempermudah transaksi internasional. Perdagangan global mengalami pertumbuhan pesat karena hambatan tarif mulai dikurangi dan teknologi transportasi seperti kapal uap serta kereta api mempercepat distribusi barang.

Periode 1914–1945 (Perang Dunia I hingga Perang Dunia II) ditandai oleh proteksionisme massal. Banyak negara menerapkan tarif tinggi dan pembatasan perdagangan untuk melindungi ekonomi domestik dari ketidakstabilan global. Krisis ekonomi seperti *Great Depression* memperburuk kondisi ini, menyebabkan penurunan drastis dalam volume perdagangan internasional. Fragmentasi ekonomi global menjadi ciri utama, di mana kerja sama antarnegara melemah dan masing-masing negara lebih fokus pada kepentingan nasional.

Pada era modern (1945–kini), perdagangan internasional berkembang dalam kerangka institusi global dan kerja sama multilateral. Sistem *Bretton Woods* membentuk fondasi stabilitas ekonomi pasca Perang Dunia II, termasuk pembentukan IMF dan Bank Dunia. *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang kemudian berkembang

menjadi *World Trade Organization* (WTO) mendorong liberalisasi perdagangan melalui pengurangan tarif dan penyelesaian sengketa. Perjanjian perdagangan bebas (FTA) juga semakin banyak dibentuk untuk memperkuat integrasi ekonomi regional. *Global Value Chains* (GVC) muncul sebagai pola produksi baru, di mana proses produksi tersebar di berbagai negara. Perdagangan digital menjadi fenomena penting seiring perkembangan teknologi informasi.

Pada fase pasca-krisis 2008 hingga saat ini, perdagangan internasional menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Fenomena re-globalisasi berjalan berdampingan dengan kecenderungan deglobalisasi yang ditandai oleh fragmentasi ekonomi, meningkatnya proteksionisme baru, serta ketegangan geopolitik. Negara-negara mulai meninjau kembali ketergantungan pada rantai pasok global dan berupaya memperkuat ketahanan ekonomi domestik, sambil tetap terlibat dalam jaringan perdagangan internasional. Setiap periode dalam tabel tersebut memperlihatkan perubahan pola, aktor, dan mekanisme perdagangan internasional yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, kekuatan politik, serta sistem ekonomi global.

Periode pasca-Perang Dunia II menandai babak baru dalam sejarah perdagangan internasional dengan berdirinya sistem *Bretton Woods* (1944), pembentukan GATT (1947), dan kemudian WTO (1995). Volume perdagangan dunia tumbuh rata-rata 6% per tahun antara 1950–2008, jauh melampaui pertumbuhan PDB dunia. Feenstra dan Taylor (2021) mencatat bahwa perdagangan dunia kini mencapai sekitar 60% dari PDB Global, mencerminkan tingkat integrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah.

D. Peran Globalisasi dalam Ekonomi Internasional

Definisi Globalisasi Ekonomi

Globalisasi ekonomi adalah proses integrasi ekonomi nasional ke dalam satu sistem ekonomi global melalui pergerakan bebas barang, jasa, modal, informasi, dan (secara terbatas) tenaga kerja melintasi batas-batas negara, yang dipercepat oleh kemajuan teknologi transportasi, komunikasi, dan penurunan hambatan kebijakan (Rodrik, 2011).

Globalisasi telah memberikan dampak transformatif terhadap struktur ekonomi dunia. Dollar, Kleineberg, dan Kraay (2016) menemukan bahwa liberalisasi perdagangan secara rata-rata meningkatkan pendapatan 40% terbawah masyarakat di negara berkembang, meskipun dengan dispersi yang sangat besar. Di sisi lain, Autor, Dorn, dan Hanson (2013) dalam studi mereka yang berpengaruh tentang "*China shock*" menunjukkan bahwa penetrasi impor dari Tiongkok menyebabkan kehilangan pekerjaan manufaktur yang signifikan di Amerika Serikat.

Rodrik (2011) dalam *The Globalization Paradox* berargumen bahwa terdapat trilemma fundamental dalam globalisasi: tidak mungkin secara simultan memiliki hiperglobalisasi, demokrasi, dan kedaulatan negara. Hanya dua dari tiga dapat dimiliki sekaligus. Argumen ini menjadi semakin relevan di tengah kebangkitan nasionalisme ekonomi pasca-2016. Globalisasi telah mengubah secara mendasar struktur ekonomi dunia dengan membawa manfaat sekaligus konsekuensi yang tidak merata. Liberalisasi perdagangan terbukti mampu meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di negara berkembang, tetapi dampaknya sangat bervariasi antarnegara dan kelompok sosial. Dampak negatif juga muncul, seperti berkurangnya lapangan kerja di sektor manufaktur di negara maju akibat meningkatnya impor dari negara dengan biaya produksi lebih rendah, seperti yang terlihat dalam fenomena "*China shock*" di Amerika Serikat.

Gagasan tentang trilema globalisasi menyoroti adanya ketegangan antara keinginan untuk memperdalam integrasi ekonomi global, menjaga sistem demokrasi, dan mempertahankan kedaulatan nasional, sehingga tidak semua tujuan tersebut dapat dicapai secara bersamaan. Situasi ini menjelaskan mengapa muncul kecenderungan baru seperti penguatan kebijakan ekonomi nasional di berbagai negara dalam beberapa tahun terakhir. Perjalanan panjang perdagangan internasional menunjukkan bahwa perubahan tidak hanya terjadi pada volume dan arah perdagangan, tetapi juga pada cara aktivitas tersebut diorganisasi dan dipahami. Setiap fase sejarah membawa inovasi institusional dan teknologi yang mengubah struktur interaksi ekonomi antarwilayah. Transformasi tersebut berlangsung secara kumulatif, sehingga perkembangan pada periode tertentu menjadi fondasi bagi periode berikutnya.

Perdagangan pada masa awal berkembang dalam kondisi keterbatasan informasi dan tingginya risiko perjalanan. Pedagang harus menghadapi ancaman perampokan, cuaca ekstrem, serta ketidakpastian politik di wilayah yang dilalui. Biaya transaksi menjadi sangat tinggi karena jarak yang jauh dan keterbatasan sarana transportasi. Aktivitas perdagangan pada masa ini cenderung melibatkan barang bernilai tinggi dan berukuran relatif kecil, seperti rempah-rempah, sutra, dan logam mulia. Karakteristik tersebut mencerminkan upaya untuk memaksimalkan keuntungan dari setiap perjalanan yang memiliki risiko besar.

Perkembangan teknologi navigasi dan kartografi pada akhir abad pertengahan membuka peluang ekspansi perdagangan melalui jalur laut. Penemuan rute baru menuju Asia dan Amerika mengubah peta perdagangan dunia secara drastis. Samudra tidak lagi menjadi penghalang, melainkan menjadi jalur utama distribusi barang. Kapal layar yang lebih canggih memungkinkan pengangkutan barang dalam jumlah lebih besar dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan jalur darat. Perubahan ini mendorong peningkatan volume perdagangan dan memperluas jaringan interaksi ekonomi antarwilayah.

Dominasi kekuatan Eropa pada era merkantilis menciptakan sistem perdagangan yang terintegrasi secara global, meskipun bersifat eksploitatif. Koloni berfungsi sebagai pemasok bahan mentah dan pasar bagi produk manufaktur negara penjajah. Pola ini menghasilkan ketergantungan struktural yang bertahan dalam jangka panjang. Distribusi keuntungan tidak merata karena nilai tambah lebih banyak dinikmati oleh negara pusat. Sistem ini juga memperkuat peran negara dalam mengatur perdagangan melalui kebijakan proteksionis dan monopoli perdagangan.

Perubahan menuju liberalisasi perdagangan pada abad ke-19 dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran ekonomi klasik. Ide tentang efisiensi dan spesialisasi mendorong pengurangan hambatan perdagangan. Negara mulai menyadari bahwa keterbukaan dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pertukaran yang saling menguntungkan. Revolusi Industri mempercepat proses ini dengan meningkatkan kapasitas produksi dan menurunkan biaya transportasi. Jalur kereta api dan kapal uap memperpendek waktu pengiriman barang, sehingga memperluas jangkauan pasar.

Standar moneter internasional seperti *Gold Standard* memberikan stabilitas dalam sistem pembayaran global. Nilai mata uang yang dikaitkan dengan emas menciptakan kepastian dalam transaksi lintas negara. Sistem ini memfasilitasi perdagangan dengan mengurangi risiko nilai tukar. Stabilitas tersebut mendorong peningkatan investasi internasional dan memperkuat integrasi ekonomi global pada periode tersebut. Keterbatasan muncul ketika negara menghadapi tekanan ekonomi domestik yang membutuhkan fleksibilitas kebijakan moneter.

Gangguan besar pada awal abad ke-20 menunjukkan bahwa integrasi ekonomi global tidak selalu berjalan secara linier. Perang dunia dan krisis ekonomi menyebabkan runtuhnya sistem perdagangan terbuka. Negara kembali menerapkan kebijakan proteksionis untuk melindungi ekonomi domestik. Tarif tinggi dan pembatasan impor menghambat aliran perdagangan dan memperdalam krisis. Pengalaman ini menunjukkan bahwa stabilitas politik dan kerja sama internasional merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan perdagangan global.

Pembentukan sistem ekonomi internasional pasca Perang Dunia II mencerminkan upaya untuk menciptakan tatanan yang lebih stabil dan terkoordinasi. Lembaga internasional dibentuk untuk mengatur hubungan ekonomi antarnegara dan mencegah terulangnya krisis besar. Aturan perdagangan yang lebih transparan dan mekanisme penyelesaian sengketa meningkatkan kepercayaan dalam sistem global. Pertumbuhan perdagangan yang pesat pada periode ini menunjukkan keberhasilan pendekatan tersebut dalam mendorong integrasi ekonomi.

Kemunculan perusahaan multinasional menjadi salah satu ciri utama dalam perkembangan perdagangan modern. Perusahaan ini tidak hanya melakukan perdagangan lintas negara, tetapi juga mengorganisasi produksi secara global. Investasi langsung luar negeri menjadi sarana untuk memperluas operasi dan memanfaatkan keunggulan lokasi. Perusahaan multinasional berperan dalam transfer teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta integrasi pasar global. Aktivitas mereka juga menimbulkan tantangan terkait regulasi dan distribusi keuntungan. Perkembangan rantai nilai global mengubah struktur perdagangan dari pertukaran produk akhir menjadi pertukaran komponen dan jasa antar tahap produksi. Setiap negara dapat berpartisipasi dalam bagian tertentu dari proses produksi sesuai dengan keunggulan yang dimiliki. Pola ini meningkatkan efisiensi, tetapi juga

menciptakan ketergantungan antarnegara. Gangguan pada satu bagian rantai dapat memengaruhi keseluruhan sistem produksi global.

Transformasi digital memberikan dimensi baru dalam perdagangan internasional. Teknologi informasi memungkinkan transaksi dilakukan secara instan dan mengurangi biaya komunikasi. *Platform* digital menghubungkan produsen dan konsumen dari berbagai negara tanpa perantara tradisional. Perdagangan jasa berkembang pesat karena banyak layanan dapat diberikan secara daring. Perubahan ini memperluas definisi perdagangan dan menciptakan peluang baru bagi pelaku ekonomi. Peran logistik dalam perdagangan internasional mengalami peningkatan seiring dengan kompleksitas rantai pasok global. Sistem distribusi yang efisien menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran aliran barang. Inovasi seperti kontainerisasi telah mengurangi biaya pengiriman dan meningkatkan kecepatan distribusi. Infrastruktur pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi darat menjadi elemen penting dalam mendukung aktivitas perdagangan.

Globalisasi ekonomi memperkuat keterkaitan antarnegara melalui integrasi pasar barang, jasa, dan keuangan. Proses ini didorong oleh liberalisasi kebijakan dan kemajuan teknologi. Negara yang membuka diri terhadap perdagangan dan investasi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Akses terhadap pasar global memungkinkan perusahaan untuk memperluas skala produksi dan meningkatkan efisiensi. Dampak globalisasi tidak merata antarnegara maupun antar kelompok masyarakat. Negara dengan kapasitas produksi yang kuat dan institusi yang baik cenderung memperoleh manfaat lebih besar. Kelompok masyarakat tertentu dapat mengalami tekanan akibat persaingan global. Perubahan struktur industri menyebabkan pergeseran permintaan tenaga kerja dari sektor tertentu ke sektor lain. Adaptasi menjadi kunci dalam menghadapi perubahan tersebut.

Ketimpangan menjadi isu penting dalam diskusi tentang globalisasi. Peningkatan pendapatan tidak selalu diikuti oleh distribusi yang merata. Perbedaan akses terhadap pendidikan, teknologi, dan peluang ekonomi memperlebar kesenjangan antar individu dan wilayah. Kebijakan publik berperan dalam mengurangi ketimpangan melalui investasi dalam sumber daya manusia dan perlindungan sosial. Integrasi keuangan global memungkinkan aliran modal yang lebih bebas antarnegara. Investasi dapat mengalir ke lokasi yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi. Kondisi ini meningkatkan efisiensi alokasi sumber

daya, tetapi juga meningkatkan risiko volatilitas. Perubahan kondisi global dapat memicu arus modal masuk atau keluar secara cepat, yang berdampak pada stabilitas ekonomi domestik.

Perkembangan teknologi komunikasi mempercepat penyebaran informasi di seluruh dunia. Pelaku ekonomi dapat mengakses data pasar, harga, dan peluang investasi dengan lebih mudah. Transparansi meningkat, tetapi juga menciptakan tantangan dalam mengelola arus informasi yang sangat besar. Kecepatan penyebaran informasi dapat mempercepat reaksi pasar terhadap perubahan kondisi ekonomi. Perubahan geopolitik memengaruhi arah globalisasi dan perdagangan internasional. Hubungan antarnegara yang dinamis menciptakan peluang sekaligus risiko. Ketegangan politik dapat memicu kebijakan proteksionis dan pembatasan perdagangan. Negara berupaya menyeimbangkan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan kepentingan nasional.

Isu keberlanjutan lingkungan menjadi bagian integral dalam perkembangan perdagangan internasional modern. Aktivitas produksi dan distribusi memiliki dampak terhadap lingkungan yang semakin mendapat perhatian. Standar lingkungan dan kebijakan terkait emisi karbon memengaruhi pola perdagangan. Perusahaan dan negara dituntut untuk mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan. Globalisasi juga memengaruhi struktur sosial dan budaya. Interaksi lintas negara mempercepat pertukaran ide, nilai, dan gaya hidup. Produk budaya seperti film, musik, dan makanan menyebar ke berbagai belahan dunia. Fenomena ini menciptakan homogenisasi budaya sekaligus memunculkan upaya untuk mempertahankan identitas lokal.

Perkembangan ekonomi digital memperluas cakupan globalisasi ke ranah baru. Data menjadi komoditas penting yang diperdagangkan dan dimanfaatkan dalam berbagai sektor. Regulasi terkait data lintas batas menjadi isu strategis karena berkaitan dengan keamanan dan kedaulatan. Negara berupaya menyeimbangkan antara keterbukaan dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Ketahanan ekonomi menjadi perhatian utama dalam era globalisasi yang semakin kompleks. Krisis global menunjukkan bahwa ketergantungan yang tinggi dapat menimbulkan kerentanan. Negara mulai mengembangkan strategi untuk memperkuat kapasitas domestik sambil tetap terlibat dalam perdagangan internasional. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi dan stabilitas. Perkembangan

perdagangan internasional dan globalisasi menunjukkan bahwa sistem ekonomi dunia terus mengalami perubahan. Setiap fase membawa tantangan dan peluang yang berbeda. Pemahaman terhadap dinamika sejarah dan peran globalisasi memberikan landasan untuk menganalisis perkembangan ekonomi internasional di masa depan.

E. Aktor dalam Ekonomi Global

Sistem ekonomi internasional melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan, kemampuan, dan pengaruh yang berbeda-beda. Pemahaman tentang siapa yang bermain dan bagaimana mereka berinteraksi adalah kunci analisis ekonomi internasional. Sistem ekonomi internasional tidak hanya terdiri dari negara, tetapi juga melibatkan berbagai aktor seperti perusahaan multinasional, lembaga keuangan, organisasi internasional, dan pelaku pasar lainnya yang memiliki tujuan, kekuatan, serta peran yang berbeda. Setiap aktor membawa kepentingan sendiri dan berinteraksi melalui kerja sama, persaingan, maupun negosiasi yang memengaruhi arah perdagangan, investasi, dan kebijakan global. Perbedaan kapasitas dan pengaruh antaraktor membuat hasil interaksi tidak selalu seimbang, sehingga memahami siapa saja yang terlibat dan bagaimana pola hubungan mereka berlangsung menjadi dasar penting untuk menganalisis dinamika ekonomi internasional.

Tabel 1.3 Aktor Utama dalam Ekonomi Global

Aktor	Peran Utama	Instrumen	Contoh
Negara-bangsa	Pembuat kebijakan ekonomi	Tarif, fiskal, moneter	AS, China, UE, Indonesia
Perusahaan Multinasional	Produksi & investasi Global	FDI, <i>transfer pricing</i>	Apple, Toyota, ExxonMobil
Lembaga Keuangan Internasional	Stabilitas & pinjaman	Kredit, kondisionalitas	IMF, World Bank, ADB

Organisasi Perdagangan	Negosiasi & penyelesaian sengketa	Perjanjian, panel	WTO, ASEAN, RCEP
Bank Sentral	Kebijakan moneter & nilai tukar	Suku bunga, intervensi	<i>The Fed</i> , ECB, Bank Indonesia
NGO & Masyarakat Sipil	Advokasi & pengawasan	Lobi, kampanye	Oxfam, WWF, <i>Greenpeace</i>

Sumber: Diadaptasi dari Gilpin, R. (2001) & UNCTAD (2023)

Tabel aktor utama dalam ekonomi global menunjukkan beragam pihak yang terlibat dalam sistem ekonomi internasional beserta fungsi, alat yang digunakan, dan contoh konkretnya. Setiap aktor memiliki peran yang berbeda namun saling berinteraksi dalam membentuk arah kebijakan, arus perdagangan, serta dinamika keuangan global. Pada aktor negara-bangsa, peran utamanya adalah sebagai pembuat kebijakan ekonomi yang mengatur aktivitas domestik maupun hubungan ekonomi dengan negara lain. Negara memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan perdagangan, mengelola anggaran fiskal, serta mengendalikan kebijakan moneter melalui institusi resmi. Instrumen yang digunakan meliputi tarif untuk mengatur impor, kebijakan fiskal seperti pajak dan belanja negara, serta kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi. Contoh negara seperti Amerika Serikat, China, Uni Eropa, dan Indonesia menunjukkan bagaimana kebijakan nasional dapat memengaruhi perekonomian global.

Pada aktor perusahaan multinasional, peran utamanya terletak pada kegiatan produksi dan investasi lintas negara. Perusahaan ini mengoperasikan bisnis di banyak negara untuk memanfaatkan perbedaan biaya produksi, akses pasar, dan sumber daya. Instrumen utama yang digunakan adalah investasi asing langsung untuk membangun atau mengakuisisi fasilitas produksi di luar negeri, serta praktik *transfer pricing* dalam pengelolaan keuntungan antarunit bisnis di berbagai yurisdiksi. Perusahaan seperti Apple, Toyota, dan ExxonMobil menjadi contoh bagaimana perusahaan multinasional membentuk jaringan produksi global dan memengaruhi perdagangan internasional.

Pada aktor lembaga keuangan internasional, peran utamanya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan global serta menyediakan bantuan pembiayaan bagi negara yang membutuhkan. Lembaga ini memberikan pinjaman, terutama kepada negara berkembang atau yang mengalami krisis, sering kali disertai syarat tertentu yang dikenal sebagai kondisionalitas. Instrumen yang digunakan mencakup kredit, program penyesuaian struktural, dan dukungan teknis. IMF, *World Bank*, dan ADB merupakan contoh lembaga yang berperan dalam membantu stabilitas ekonomi sekaligus mendorong reformasi kebijakan.

Pada aktor organisasi perdagangan internasional, peran utamanya adalah memfasilitasi negosiasi perdagangan serta menyelesaikan sengketa antarnegara. Organisasi ini menyediakan kerangka aturan yang mengatur bagaimana perdagangan dilakukan agar lebih adil dan transparan. Instrumen yang digunakan meliputi perjanjian perdagangan, mekanisme penyelesaian sengketa melalui panel, serta forum negosiasi multilateral maupun regional. WTO, ASEAN, dan RCEP menjadi contoh lembaga yang mendorong integrasi ekonomi dan pengurangan hambatan perdagangan.

Pada aktor bank sentral, peran utamanya adalah mengelola kebijakan moneter dan menjaga stabilitas nilai tukar. Bank sentral mengatur jumlah uang beredar, mengendalikan inflasi, serta merespons tekanan eksternal yang memengaruhi mata uang. Instrumen yang digunakan mencakup penetapan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan intervensi di pasar valuta asing. Contoh seperti *The Federal Reserve (The Fed)*, *European Central Bank (ECB)*, dan Bank Indonesia menunjukkan bagaimana keputusan moneter dapat berdampak tidak hanya pada ekonomi domestik tetapi juga pada arus modal global.

Pada aktor NGO dan masyarakat sipil, peran utamanya adalah melakukan advokasi, pengawasan, dan memberikan tekanan terhadap kebijakan ekonomi agar lebih memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Aktor ini tidak memiliki kekuatan formal seperti negara, tetapi mampu memengaruhi opini publik dan kebijakan melalui kampanye dan lobi. Instrumen yang digunakan meliputi kampanye global, penelitian, serta tekanan terhadap perusahaan dan pemerintah. Organisasi seperti Oxfam, WWF, dan *Greenpeace* menjadi contoh bagaimana masyarakat sipil berperan dalam mendorong praktik ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Setiap aktor dalam tabel tersebut berinteraksi melalui kerja sama, persaingan, dan negosiasi, sehingga membentuk struktur dan dinamika ekonomi global yang kompleks. Interaksi antaraktor dalam ekonomi global tidak berlangsung secara statis, melainkan membentuk jaringan hubungan yang dinamis dan terus berubah mengikuti perkembangan teknologi, politik, dan kondisi ekonomi dunia. Setiap aktor tidak hanya menjalankan perannya secara independen, tetapi juga saling memengaruhi melalui keputusan dan strategi yang diambil. Hubungan ini menciptakan sistem yang kompleks, di mana perubahan pada satu aktor dapat memicu respons berantai dari aktor lainnya.

Negara-bangsa tetap menjadi aktor sentral karena memiliki legitimasi politik dan kewenangan hukum dalam menetapkan aturan. Kapasitas negara dalam mengelola kebijakan ekonomi sangat menentukan posisi dalam sistem global. Negara dengan kekuatan ekonomi besar memiliki pengaruh lebih luas dalam menentukan arah kebijakan internasional, termasuk dalam negosiasi perdagangan dan pengaturan keuangan global. Kekuatan tersebut tidak hanya berasal dari ukuran ekonomi, tetapi juga dari stabilitas institusi, kapasitas militer, serta pengaruh diplomatik.

Perusahaan multinasional beroperasi sebagai penggerak utama aktivitas produksi dan perdagangan global. Keputusan investasi yang diambil oleh perusahaan ini dapat mengubah struktur ekonomi suatu negara. Pemilihan lokasi produksi mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya tenaga kerja, kualitas infrastruktur, stabilitas politik, serta akses ke pasar. Keberadaan perusahaan multinasional sering kali membawa teknologi dan praktik manajemen modern, yang dapat meningkatkan produktivitas di negara tuan rumah. Dampak yang muncul tidak selalu positif karena persaingan dengan perusahaan lokal dapat menimbulkan tekanan bagi industri domestik.

Hubungan antara negara dan perusahaan multinasional menunjukkan adanya interdependensi yang kompleks. Negara membutuhkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sementara perusahaan membutuhkan lingkungan yang stabil dan kebijakan yang mendukung untuk menjalankan operasinya. Negosiasi antara keduanya sering kali melibatkan insentif seperti keringanan pajak, kemudahan perizinan, serta penyediaan infrastruktur. Interaksi ini mencerminkan adanya keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan bisnis.

Lembaga keuangan internasional berfungsi sebagai penopang stabilitas dalam sistem ekonomi global. Peran mereka menjadi sangat penting ketika terjadi krisis yang memengaruhi banyak negara sekaligus. Bantuan keuangan yang diberikan sering kali disertai dengan rekomendasi kebijakan yang bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi negara penerima. Pendekatan ini menimbulkan perdebatan mengenai kedaulatan kebijakan karena negara harus menyesuaikan kebijakan domestik sesuai dengan persyaratan lembaga tersebut.

Organisasi perdagangan internasional menyediakan kerangka aturan yang memungkinkan interaksi antarnegara berlangsung secara lebih teratur. Aturan tersebut menciptakan kepastian bagi pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi lintas batas. Mekanisme penyelesaian sengketa membantu mengurangi konflik yang dapat mengganggu stabilitas perdagangan. Keberadaan organisasi ini mencerminkan upaya kolektif untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka dan adil, meskipun implementasinya sering menghadapi tantangan akibat perbedaan kepentingan antarnegara.

Bank sentral memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui pengelolaan kebijakan moneter. Keputusan yang diambil oleh bank sentral di negara besar dapat memengaruhi kondisi keuangan global. Perubahan suku bunga dapat mengalihkan aliran modal antarnegara, memengaruhi nilai tukar, serta menciptakan tekanan pada pasar keuangan. Koordinasi antar bank sentral menjadi penting untuk mengurangi volatilitas yang dapat merugikan perekonomian global.

Peran NGO dan masyarakat sipil menunjukkan bahwa aktor non-negara memiliki pengaruh yang semakin besar dalam ekonomi global. Kampanye yang dilakukan dapat memengaruhi perilaku perusahaan dan kebijakan pemerintah. Tekanan publik sering kali mendorong penerapan standar yang lebih tinggi dalam bidang lingkungan, hak tenaga kerja, dan tata kelola perusahaan. Kehadiran aktor ini memperluas dimensi ekonomi internasional dari sekadar pertumbuhan menjadi juga mencakup aspek keberlanjutan dan keadilan sosial. Interaksi antaraktor menciptakan struktur kekuasaan yang tidak merata. Negara maju dan perusahaan besar cenderung memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan negara berkembang dan pelaku usaha kecil. Ketimpangan ini memengaruhi distribusi manfaat dari aktivitas ekonomi global. Upaya untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif menjadi salah satu tantangan utama dalam ekonomi internasional.

Koordinasi kebijakan antaraktor menjadi semakin penting dalam menghadapi isu global seperti krisis keuangan, perubahan iklim, dan pandemi. Tidak ada satu aktor pun yang mampu menyelesaikan masalah tersebut secara mandiri. Kerja sama internasional memungkinkan penggabungan sumber daya dan pengetahuan untuk mencapai solusi yang lebih efektif. Proses koordinasi sering kali kompleks karena melibatkan berbagai kepentingan yang harus diselaraskan.

Perkembangan teknologi digital mengubah cara aktor berinteraksi dalam ekonomi global. Komunikasi yang lebih cepat dan akses informasi yang luas memungkinkan koordinasi yang lebih efisien. *Platform* digital juga menciptakan aktor baru seperti perusahaan teknologi global yang memiliki pengaruh besar dalam perdagangan dan keuangan. Perusahaan berbasis digital dapat beroperasi lintas negara tanpa kehadiran fisik yang signifikan, sehingga menantang kerangka regulasi tradisional. Peran data dalam ekonomi global semakin penting seiring dengan digitalisasi aktivitas ekonomi. Perusahaan dan pemerintah menggunakan data untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat. Pengelolaan data lintas batas menjadi isu strategis yang melibatkan berbagai aktor. Regulasi terkait privasi dan keamanan data menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan dalam sistem ekonomi digital.

Hubungan antara aktor juga dipengaruhi oleh dinamika geopolitik. Ketegangan antarnegara dapat memengaruhi kerja sama dalam bidang ekonomi. Kebijakan seperti sanksi ekonomi dan pembatasan perdagangan menjadi alat yang digunakan dalam persaingan global. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian yang memengaruhi keputusan investasi dan perdagangan. Aktor regional seperti organisasi kawasan memainkan peran penting dalam memperkuat integrasi ekonomi. Kerja sama regional memungkinkan negara untuk meningkatkan daya saing melalui koordinasi kebijakan dan penghapusan hambatan perdagangan. Integrasi ini juga menciptakan pasar yang lebih besar dan menarik bagi investasi. Keberhasilan integrasi bergantung pada komitmen negara anggota dalam menjalankan kesepakatan yang telah dibuat. Perusahaan kecil dan menengah juga memiliki peran dalam ekonomi global, meskipun sering kali tidak sekuat perusahaan multinasional. Kemajuan teknologi memungkinkan pelaku usaha skala kecil untuk mengakses pasar internasional melalui *platform* digital. Partisipasi ini meningkatkan inklusivitas dalam perdagangan global.

Tantangan tetap ada dalam bentuk keterbatasan akses pembiayaan, informasi, dan jaringan distribusi.

Perubahan dalam preferensi konsumen global memengaruhi strategi aktor ekonomi. Konsumen semakin memperhatikan aspek keberlanjutan, etika produksi, dan kualitas produk. Perusahaan merespons dengan mengadopsi praktik yang lebih bertanggung jawab. Negara juga menyesuaikan kebijakan untuk mendukung produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Interaksi antaraktor menciptakan mekanisme umpan balik yang memengaruhi perkembangan ekonomi global. Keputusan yang diambil oleh satu aktor dapat memicu perubahan pada aktor lain, yang kemudian memengaruhi kondisi awal. Proses ini berlangsung secara terus-menerus dan membentuk dinamika yang kompleks. Pemahaman terhadap pola interaksi ini menjadi penting untuk menganalisis arah perkembangan ekonomi internasional.

Kekuatan institusi menjadi faktor penentu dalam efektivitas peran aktor. Institusi yang kuat mampu mengelola interaksi antaraktor secara lebih teratur dan transparan. Kepercayaan menjadi elemen penting dalam hubungan ekonomi internasional. Aktor yang memiliki reputasi baik cenderung lebih mudah menjalin kerja sama dan menarik investasi. Peran inovasi dalam membentuk hubungan antaraktor semakin meningkat. Teknologi baru menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi berbagai aktor. Negara yang mampu beradaptasi dengan cepat akan memperoleh keuntungan dalam persaingan global. Perusahaan yang inovatif dapat menciptakan pasar baru dan mengubah struktur industri. Dinamika aktor dalam ekonomi global menunjukkan bahwa sistem ini bersifat multidimensi dan terus berkembang. Setiap aktor membawa kepentingan dan strategi yang berbeda, yang berinteraksi dalam kerangka yang kompleks. Analisis yang komprehensif memerlukan pemahaman terhadap peran masing-masing aktor serta hubungan yang terjalin di antara mereka.

F. Tantangan dan Peluang Ekonomi Global

Ekonomi global abad ke-21 menghadapi serangkaian tantangan yang belum pernah ada dalam skala dan kompleksitas seperti ini. IMF (2023) mengidentifikasi tiga fragmentasi (*Geoeconomic Fragmentation*) sebagai risiko terbesar: fragmentasi perdagangan, teknologi, dan pembayaran. WTO (2023) memperkirakan bahwa skenario fragmentasi

penuh dapat mengurangi output Global hingga 5–7% dalam jangka panjang. Ekonomi global saat ini menghadapi tantangan baru yang sangat kompleks dan luas, terutama berupa kecenderungan terpecahnya sistem ekonomi dunia ke dalam blok-blok yang saling terpisah.

Fragmentasi perdagangan terjadi ketika negara-negara mulai membatasi kerja sama dagang dan membentuk aliansi sendiri, fragmentasi teknologi muncul ketika akses dan pengembangan teknologi dibatasi antarnegara, sedangkan fragmentasi sistem pembayaran berkaitan dengan terpisahnya mekanisme transaksi keuangan global. Kondisi ini berpotensi mengurangi efisiensi, meningkatkan biaya, dan melemahkan pertumbuhan ekonomi dunia, sehingga dalam jangka panjang dapat menurunkan total *output* global secara signifikan sebagaimana diperkirakan oleh WTO.

1. Tantangan: Perang dagang, proteksionisme, ketimpangan pendapatan global, perubahan iklim, risiko siber, *weaponization of finance*.
2. Peluang: Digitalisasi perdagangan jasa, ekonomi hijau, diversifikasi rantai pasok, pasar berkembang sebagai motor pertumbuhan, inovasi keuangan digital.

Perkembangan ekonomi global pada abad ke-21 memperlihatkan pergeseran dari pola integrasi yang semakin dalam menuju konfigurasi yang lebih berhati-hati dan selektif. Fragmentasi yang muncul tidak selalu berarti disintegrasi total, melainkan pembentukan ulang jaringan ekonomi berdasarkan pertimbangan keamanan, politik, dan teknologi. Negara dan pelaku ekonomi mulai menilai kembali manfaat keterbukaan dibandingkan risiko ketergantungan yang berlebihan terhadap mitra tertentu. Perubahan orientasi ini menghasilkan lanskap ekonomi global yang lebih kompleks dan berlapis.

Perang dagang menjadi salah satu manifestasi nyata dari meningkatnya ketegangan antarnegara. Kebijakan tarif yang saling diberlakukan memengaruhi aliran barang dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Dampaknya tidak terbatas pada negara yang terlibat langsung, karena rantai pasok global menyebabkan efek menyebar ke berbagai wilayah lain. Perusahaan harus menyesuaikan strategi produksi dan distribusi untuk mengurangi dampak kebijakan tersebut. Keputusan relokasi produksi atau perubahan pemasok menjadi respons yang umum dilakukan.

Proteksionisme mengalami transformasi dari bentuk tradisional menuju instrumen yang lebih halus dan kompleks. Hambatan non-tarif seperti standar teknis, regulasi lingkungan, dan persyaratan keamanan produk semakin banyak digunakan. Kebijakan industri juga diarahkan untuk memperkuat sektor strategis domestik. Pendekatan ini mencerminkan upaya negara dalam menjaga daya saing sekaligus melindungi kepentingan nasional. Dampak yang muncul berupa peningkatan biaya perdagangan dan berkurangnya efisiensi alokasi sumber daya.

Ketimpangan pendapatan global tetap menjadi isu yang menantang dalam sistem ekonomi internasional. Perbedaan tingkat pembangunan antarnegara menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap teknologi, pendidikan, dan peluang ekonomi. Globalisasi telah meningkatkan pendapatan rata-rata, namun distribusinya tidak merata. Kelompok masyarakat tertentu memperoleh manfaat lebih besar, sementara kelompok lain menghadapi tekanan akibat perubahan struktur ekonomi. Ketimpangan ini berpotensi memicu ketegangan sosial dan politik yang memengaruhi stabilitas ekonomi.

Perubahan iklim menghadirkan tantangan struktural yang memengaruhi hampir seluruh aspek ekonomi global. Aktivitas produksi dan konsumsi yang intensif terhadap sumber daya alam meningkatkan emisi gas rumah kaca. Dampaknya terlihat dalam bentuk peningkatan frekuensi bencana alam, perubahan pola cuaca, dan gangguan terhadap produksi pangan. Negara dan perusahaan dituntut untuk menyesuaikan model ekonomi agar lebih berkelanjutan. Transisi menuju ekonomi rendah karbon memerlukan investasi besar serta inovasi teknologi.

Risiko siber menjadi perhatian penting seiring dengan meningkatnya digitalisasi ekonomi. Sistem keuangan, perdagangan, dan infrastruktur kritis bergantung pada teknologi informasi yang rentan terhadap serangan. Gangguan pada sistem digital dapat menghambat aktivitas ekonomi dan menimbulkan kerugian besar. Keamanan siber menjadi prioritas bagi pemerintah dan perusahaan dalam menjaga kelangsungan operasional. Kerja sama internasional diperlukan untuk menghadapi ancaman yang bersifat lintas batas.

Fenomena *weaponization of finance* menunjukkan bagaimana instrumen keuangan digunakan sebagai alat dalam persaingan geopolitik. Sanksi ekonomi, pembatasan akses terhadap sistem pembayaran, serta kontrol terhadap aliran modal menjadi strategi yang

digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan politik. Penggunaan instrumen ini dapat memengaruhi stabilitas ekonomi global dan mendorong negara lain untuk mengembangkan alternatif sistem keuangan. Kondisi ini mempercepat fragmentasi dalam sistem pembayaran internasional.

Perubahan dalam struktur rantai pasok global mencerminkan upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi. Diversifikasi pemasok dan lokasi produksi menjadi strategi utama dalam mengurangi risiko gangguan. Perusahaan tidak lagi hanya mempertimbangkan efisiensi biaya, tetapi juga stabilitas dan keamanan pasokan. Pendekatan ini menghasilkan konfigurasi rantai pasok yang lebih tersebar dan fleksibel. Biaya produksi mungkin meningkat, tetapi risiko gangguan dapat diminimalkan.

Digitalisasi membuka peluang besar dalam perdagangan jasa. Teknologi memungkinkan penyediaan layanan lintas negara tanpa kehadiran fisik. Sektor seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, dan teknologi informasi mengalami pertumbuhan pesat. Pelaku usaha kecil dan menengah dapat memanfaatkan *platform* digital untuk menjangkau pasar global. Akses terhadap teknologi menjadi faktor kunci dalam memanfaatkan peluang ini.

Ekonomi hijau muncul sebagai salah satu arah utama dalam transformasi ekonomi global. Investasi dalam energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi ramah lingkungan meningkat secara signifikan. Perubahan ini menciptakan peluang baru dalam sektor industri dan lapangan kerja. Negara yang mampu mengembangkan kapasitas dalam ekonomi hijau akan memperoleh keuntungan dalam jangka panjang. Transisi ini juga memerlukan penyesuaian kebijakan dan infrastruktur yang mendukung.

Pasar berkembang menunjukkan potensi sebagai motor pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan populasi dan peningkatan pendapatan menciptakan permintaan yang besar terhadap barang dan jasa. Urbanisasi mempercepat perkembangan sektor industri dan jasa. Negara berkembang memiliki peluang untuk meningkatkan posisi dalam rantai nilai global melalui investasi dalam pendidikan dan teknologi. Tantangan tetap ada dalam bentuk kebutuhan reformasi struktural dan peningkatan kualitas institusi.

Inovasi keuangan digital mengubah cara transaksi dan pengelolaan keuangan dilakukan. Teknologi seperti *blockchain*, *fintech*,

dan mata uang digital bank sentral menciptakan sistem yang lebih efisien dan inklusif. Akses terhadap layanan keuangan meningkat, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan tradisional. Regulasi menjadi aspek penting dalam memastikan stabilitas dan keamanan dalam perkembangan ini.

Ketegangan antara keterbukaan dan kedaulatan ekonomi menjadi tema utama dalam dinamika global saat ini. Negara berupaya menjaga kontrol terhadap sektor strategis sambil tetap berpartisipasi dalam ekonomi global. Kebijakan yang diambil mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara efisiensi dan keamanan. Proses ini menghasilkan variasi pendekatan antarnegara dalam menghadapi tantangan global.

Peran teknologi dalam membentuk peluang ekonomi semakin dominan. Inovasi dalam kecerdasan buatan, otomatisasi, dan analitik data meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Perusahaan yang mampu mengadopsi teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif. Negara yang mendukung pengembangan teknologi melalui kebijakan dan investasi akan memperoleh manfaat dalam jangka panjang. Transformasi tenaga kerja menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan ekonomi global. Keterampilan yang dibutuhkan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Pendidikan dan pelatihan menjadi kunci dalam meningkatkan kapasitas tenaga kerja. Adaptasi terhadap perubahan menjadi faktor penentu dalam mempertahankan daya saing di pasar global.

Koordinasi internasional tetap menjadi elemen penting dalam mengelola tantangan global. Isu seperti perubahan iklim, stabilitas keuangan, dan keamanan siber memerlukan kerja sama lintas negara. Mekanisme multilateral memberikan *platform* untuk dialog dan pengambilan keputusan bersama. Efektivitas kerja sama bergantung pada komitmen negara dalam menjalankan kesepakatan yang telah dibuat. Perubahan pola konsumsi juga memengaruhi arah ekonomi global. Konsumen semakin memperhatikan aspek kualitas, keberlanjutan, dan etika dalam memilih produk. Perusahaan menyesuaikan strategi produksi untuk memenuhi preferensi tersebut. Tren ini mendorong inovasi dalam desain produk dan proses produksi.

Keterkaitan antara berbagai tantangan menunjukkan bahwa solusi yang diambil harus bersifat terintegrasi. Kebijakan yang hanya fokus pada satu aspek dapat menimbulkan konsekuensi pada aspek lain.

Pendekatan holistik diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan keberlanjutan. Dinamika ekonomi global memperlihatkan bahwa tantangan dan peluang berjalan beriringan. Setiap perubahan menciptakan risiko sekaligus membuka kemungkinan baru. Kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi menjadi faktor kunci dalam menghadapi lingkungan yang terus berubah. Pemahaman yang mendalam terhadap dinamika ini memungkinkan perumusan strategi yang lebih efektif dalam memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang ada.



BAB II

TEORI PERDAGANGAN INTERNASIONAL KLASIK

Teori perdagangan internasional klasik merupakan kerangka analitis pertama yang mencoba menjelaskan secara sistematis mengapa negara-negara berdagang satu sama lain dan apa manfaat yang diperoleh dari perdagangan tersebut. Meskipun telah dikembangkan lebih dari dua abad lalu, fondasi konseptual teori klasik tetap menjadi titik berangkat yang tidak dapat diabaikan dalam setiap kajian ekonomi internasional. Teori perdagangan internasional klasik merupakan upaya awal yang terstruktur untuk memahami alasan terjadinya perdagangan antarnegara serta keuntungan yang bisa diperoleh dari aktivitas tersebut. Teori ini memberikan dasar pemikiran tentang bagaimana perbedaan antarnegara dapat mendorong pertukaran barang dan jasa yang saling menguntungkan. Walaupun muncul sejak lebih dari dua abad lalu, gagasan-gagasan utamanya masih relevan dan terus digunakan sebagai landasan awal dalam menganalisis fenomena perdagangan modern, karena banyak konsep dasarnya tetap mampu menjelaskan prinsip-prinsip utama dalam hubungan ekonomi antarnegara.

A. Merkantilisme

Merkantilisme adalah doktrin ekonomi yang mendominasi kebijakan ekonomi Eropa dari abad ke-16 hingga ke-18. Merkantilis berpandangan bahwa kemakmuran suatu negara diukur dari akumulasi logam mulia (emas dan perak), dan cara terbaik mencapainya adalah dengan memaksimalkan ekspor sambil meminimalkan impor sehingga terjadi surplus neraca perdagangan. Merkantilisme merupakan pandangan ekonomi yang menempatkan kekayaan negara pada jumlah emas dan perak yang dimiliki, sehingga kebijakan ekonomi difokuskan

pada upaya menambah cadangan logam mulia tersebut. Cara yang dianggap paling efektif adalah dengan mendorong ekspor sebesar mungkin agar memperoleh pemasukan dari luar negeri, sekaligus menekan impor agar tidak terjadi aliran keluar kekayaan. Pola pikir ini membuat negara cenderung menerapkan kebijakan protektif seperti pembatasan impor dan dukungan kuat terhadap industri dalam negeri, karena perdagangan dipandang sebagai persaingan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari negara lain.

Inti Doktrin Merkantilisme

Merkantilisme percaya bahwa kekayaan global bersifat tetap (*zero-sum game*); keuntungan satu negara berarti kerugian negara lain. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk mencapai surplus perdagangan permanen melalui promosi ekspor, pembatasan impor, dan kolonisasi sumber daya alam luar negeri (Mun, 1664; dikutip dalam Salvatore, 2022).

Kebijakan merkantilis memiliki warisan yang bertahan hingga hari ini. Neo-merkantilisme istilah yang digunakan Bhagwati (2014) dan Posen (2021) menggambarkan perilaku negara-negara yang secara sistematis mengejar surplus perdagangan melalui manipulasi nilai tukar, subsidi industri strategis, dan hambatan non-tarif. Tiongkok sering dikritik sebagai neo-merkantilist oleh para ekonom Barat, meskipun tuduhan ini diperdebatkan. Gagasan merkantilisme tidak sepenuhnya hilang, melainkan muncul kembali dalam bentuk modern yang disebut neo-merkantilisme, yaitu praktik negara yang berupaya mempertahankan keunggulan ekonomi dengan terus menciptakan surplus perdagangan. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kebijakan seperti mengatur nilai tukar agar ekspor lebih kompetitif, memberikan subsidi pada sektor industri tertentu, serta menerapkan hambatan non-tarif untuk membatasi masuknya produk asing.

Beberapa negara, seperti Tiongkok, kerap dituduh menerapkan pendekatan ini karena strategi ekonominya yang dianggap mendukung ekspor dan industri domestik secara kuat, meskipun pandangan tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan ekonom dan tidak sepenuhnya disepakati. Perkembangan merkantilisme tidak dapat dipisahkan dari

transformasi politik dan ekonomi Eropa pada masa awal modern. Munculnya negara-bangsa yang lebih terpusat mendorong kebutuhan akan sumber pendapatan yang stabil untuk membiayai administrasi, militer, dan ekspansi wilayah. Pemerintah melihat perdagangan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kekuasaan negara. Kebijakan ekonomi dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga untuk mendukung tujuan geopolitik dan dominasi internasional.

Pemikiran merkantilis menempatkan negara sebagai aktor utama dalam aktivitas ekonomi. Peran pemerintah menjadi sangat dominan dalam mengatur produksi, distribusi, dan perdagangan. Negara memberikan hak monopoli kepada perusahaan tertentu untuk mengelola perdagangan dengan wilayah tertentu, seperti yang dilakukan oleh *East India Company* dan *Dutch East India Company*. Perusahaan-perusahaan ini beroperasi dengan dukungan militer dan politik dari negara asalnya, sehingga mampu menguasai jalur perdagangan dan sumber daya di berbagai wilayah dunia.

Kebijakan tarif tinggi dan pembatasan impor menjadi instrumen utama dalam strategi merkantilis. Barang impor dianggap sebagai ancaman terhadap akumulasi kekayaan karena menyebabkan aliran keluar logam mulia. Pemerintah mendorong produksi domestik melalui berbagai bentuk proteksi dan insentif. Industri manufaktur mulai dikembangkan untuk menggantikan ketergantungan terhadap barang impor. Upaya ini menciptakan fondasi awal bagi industrialisasi di beberapa negara Eropa.

Ekspansi kolonial merupakan bagian integral dari sistem merkantilisme. Koloni berfungsi sebagai sumber bahan mentah dan pasar bagi produk jadi dari negara penjajah. Sistem ini menciptakan hubungan ekonomi yang tidak seimbang, di mana koloni bergantung pada negara pusat. Sumber daya alam dieksploitasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara penjajah. Struktur ekonomi yang terbentuk sering kali tidak berkelanjutan bagi wilayah koloni karena kurangnya diversifikasi dan pengembangan industri lokal.

Perdagangan segitiga menjadi salah satu contoh konkret praktik merkantilisme dalam skala global. Sistem ini melibatkan pertukaran barang, tenaga kerja, dan komoditas antara Eropa, Afrika, dan Amerika. Barang manufaktur dari Eropa ditukar dengan budak di Afrika, yang kemudian dikirim ke Amerika untuk bekerja di perkebunan. Hasil

produksi seperti gula dan kapas dikirim kembali ke Eropa. Pola ini menunjukkan bagaimana perdagangan digunakan untuk memaksimalkan keuntungan melalui pengendalian seluruh rantai distribusi.

Pemikiran merkantilis juga memengaruhi kebijakan moneter pada masa tersebut. Akumulasi emas dan perak dianggap sebagai indikator utama kekuatan ekonomi. Negara berusaha menjaga cadangan logam mulia melalui pembatasan ekspor dan peningkatan ekspor barang. Kebijakan ini menciptakan tekanan pada sistem moneter karena pasokan uang bergantung pada ketersediaan logam mulia. Inflasi dapat terjadi ketika aliran emas meningkat secara signifikan tanpa diimbangi oleh peningkatan produksi.

Kritik terhadap merkantilisme mulai muncul seiring dengan perkembangan pemikiran ekonomi klasik. Adam Smith menentang pandangan bahwa kekayaan diukur dari akumulasi logam mulia. Ia berpendapat bahwa kekayaan suatu negara terletak pada kapasitas produksinya dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perdagangan dipandang sebagai aktivitas yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, bukan sebagai permainan yang menghasilkan pemenang dan pecundang. Kritik ini menjadi dasar bagi perkembangan teori perdagangan bebas.

David Ricardo mengembangkan konsep keunggulan komparatif yang menunjukkan bahwa negara dapat memperoleh manfaat dari perdagangan meskipun tidak memiliki keunggulan absolut. Teori ini bertentangan dengan asumsi merkantilis yang melihat perdagangan sebagai kompetisi *zero-sum*. Pemikiran ini mengubah cara pandang terhadap perdagangan internasional dan mendorong liberalisasi ekonomi pada abad berikutnya. Perubahan paradigma ini tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses panjang yang melibatkan perdebatan intelektual dan perubahan kebijakan.

Warisan merkantilisme tetap terlihat dalam praktik ekonomi modern. Negara masih menggunakan kebijakan untuk melindungi industri strategis dan meningkatkan daya saing ekspor. Perbedaan terletak pada pendekatan yang lebih kompleks dan beragam dibandingkan masa lalu. Instrumen seperti subsidi, kebijakan industri, dan pengelolaan nilai tukar digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ide dasar merkantilisme masih memiliki relevansi dalam konteks tertentu.

Neo-merkantilisme mencerminkan adaptasi prinsip lama dalam lingkungan ekonomi yang berbeda. Negara tidak lagi secara eksplisit mengejar akumulasi emas, tetapi berfokus pada surplus perdagangan dan cadangan devisa. Surplus tersebut memberikan stabilitas dalam menghadapi ketidakpastian global. Kebijakan yang mendukung ekspor dan membatasi impor tetap digunakan, meskipun dalam bentuk yang lebih halus. Strategi ini sering dikaitkan dengan negara yang memiliki orientasi ekspor kuat.

Perdebatan mengenai neo-merkantilisme menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam menilai kebijakan ekonomi suatu negara. Sebagian ekonom melihat kebijakan tersebut sebagai upaya yang sah untuk mendorong pertumbuhan dan industrialisasi. Pandangan lain menganggapnya sebagai distorsi yang merugikan sistem perdagangan global. Perbedaan ini mencerminkan kompleksitas dalam menilai kebijakan ekonomi yang melibatkan berbagai kepentingan. Peran nilai tukar dalam strategi neo-merkantilis menjadi perhatian penting. Mata uang yang relatif *undervalued* dapat meningkatkan daya saing ekspor dengan membuat produk domestik lebih murah di pasar internasional. Kebijakan ini dapat menarik kritik dari negara lain karena dianggap menciptakan ketidakseimbangan dalam perdagangan. Pengelolaan nilai tukar menjadi alat strategis dalam mencapai tujuan ekonomi.

Kebijakan industri dalam kerangka neo-merkantilisme sering diarahkan pada sektor yang dianggap memiliki potensi strategis. Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk subsidi, perlindungan pasar, dan investasi dalam penelitian dan pengembangan. Tujuan utamanya adalah menciptakan keunggulan kompetitif dalam sektor tertentu. Pendekatan ini memerlukan koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mencapai hasil yang optimal. Perubahan struktur ekonomi global memengaruhi relevansi merkantilisme dan neo-merkantilisme. Rantai nilai Global membuat produksi tersebar di berbagai negara, sehingga sulit untuk mengukur keuntungan perdagangan secara sederhana. Komponen impor dalam ekspor menjadi signifikan, sehingga surplus perdagangan tidak selalu mencerminkan keuntungan bersih. Analisis ekonomi perlu mempertimbangkan nilai tambah dalam setiap tahap produksi.

Peran institusi internasional menjadi faktor penting dalam membatasi praktik merkantilis yang ekstrem. Aturan perdagangan global dirancang untuk mencegah kebijakan yang merugikan negara lain.

Mekanisme penyelesaian sengketa memberikan sarana untuk menangani konflik yang muncul. Keberadaan institusi ini mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih stabil dan adil. Perkembangan teknologi dan digitalisasi mengubah cara negara menerapkan kebijakan ekonomi. Perdagangan tidak lagi terbatas pada barang fisik, tetapi juga mencakup jasa dan data. Kebijakan yang efektif perlu mempertimbangkan dimensi baru ini. Negara berusaha mengembangkan kapasitas dalam ekonomi digital untuk meningkatkan daya saing global.

Perubahan geopolitik memengaruhi kebangkitan kembali ide-ide yang menyerupai merkantilisme. Persaingan antara kekuatan besar mendorong penggunaan kebijakan ekonomi sebagai alat strategi. Pembatasan teknologi, kontrol investasi, dan penguatan industri domestik menjadi bagian dari dinamika ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara ekonomi dan politik tetap erat dalam sistem global. Analisis terhadap merkantilisme memberikan pemahaman tentang bagaimana kebijakan ekonomi dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan ini menekankan pentingnya peran negara dalam mengarahkan aktivitas ekonomi. Pemahaman terhadap sejarah merkantilisme membantu menjelaskan dinamika kebijakan ekonomi modern yang sering kali mencerminkan prinsip serupa dalam bentuk yang berbeda. Evolusi pemikiran ekonomi dari merkantilisme menuju teori modern menunjukkan bahwa konsep ekonomi terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi global. Setiap teori memberikan kontribusi dalam memahami fenomena ekonomi, meskipun tidak selalu berlaku secara universal. Pendekatan yang fleksibel dan adaptif diperlukan untuk menghadapi kompleksitas ekonomi internasional yang terus berubah.

B. Teori Keunggulan Absolut (Adam Smith)

Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* (1776) meletakkan fondasi kritik terhadap merkantilisme dengan mengajukan teori keunggulan absolut. Smith berargumen bahwa perdagangan adalah permainan positif-sum (*positive-sum game*) di mana semua pihak dapat menang. Adam Smith menentang pandangan merkantilisme yang melihat perdagangan sebagai persaingan untuk mengumpulkan kekayaan, lalu memperkenalkan gagasan keunggulan absolut sebagai

dasar baru dalam memahami perdagangan antarnegara. Ia berpendapat bahwa setiap negara sebaiknya memproduksi barang yang dapat dihasilkan secara lebih efisien dibandingkan negara lain, lalu menukarkannya melalui perdagangan. Pola ini memungkinkan semua negara memperoleh manfaat karena masing-masing dapat mengakses barang dengan biaya lebih rendah dibandingkan jika memproduksi sendiri. Perdagangan dipandang sebagai aktivitas yang saling menguntungkan, bukan sebagai situasi di mana keuntungan satu pihak harus berasal dari kerugian pihak lain.

Teori Keunggulan Absolut (*Absolute advantage*)

Sebuah negara memiliki keunggulan absolut dalam produksi suatu barang jika ia dapat memproduksi barang tersebut dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya (tenaga kerja, kapital) dibandingkan negara lain untuk menghasilkan satu unit yang sama. Setiap negara seharusnya mengkhususkan diri (*specialisasi*) pada produksi barang di mana ia memiliki keunggulan absolut, dan berdagang untuk memperoleh barang yang tidak dihasilkannya secara efisien (Smith, 1776 / Krugman *et al.*, 2022).

Tabel 2.1 Ilustrasi Keunggulan Absolut: Produksi per Unit Kerja

Negara	Kain (meter)	Anggur (liter)	Keunggulan Absolut pada
Inggris	10	6	Kain ($10 > 5$)
Portugal	5	8	Anggur ($8 > 6$)

Sumber: Ilustrasi diadaptasi dari Krugman et al. (2022)

Keterangan: Inggris sebaiknya berspesialisasi pada kain, Portugal pada anggur. Keduanya diuntungkan dari perdagangan.

Tabel 2.1 menggambarkan perbandingan kemampuan produksi antara dua negara, yaitu Inggris dan Portugal, dalam menghasilkan dua jenis barang, yakni kain dan anggur. Angka-angka yang ditampilkan menunjukkan jumlah output yang dapat dihasilkan oleh masing-masing negara dengan jumlah sumber daya yang sama, misalnya satu unit tenaga

kerja. Data ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi keunggulan absolut yang dimiliki tiap negara. Kolom “Kain (meter)” menunjukkan bahwa Inggris mampu memproduksi 10 meter kain per unit kerja, sedangkan Portugal hanya mampu menghasilkan 5 meter. Perbedaan ini menandakan bahwa Inggris memiliki produktivitas yang lebih tinggi dalam produksi kain. Produktivitas yang lebih tinggi berarti penggunaan sumber daya di Inggris lebih efisien untuk menghasilkan kain dibandingkan Portugal. Situasi ini menjadikan Inggris memiliki keunggulan absolut pada komoditas kain, karena mampu menghasilkan output lebih besar dengan input yang sama.

Kolom “Anggur (liter)” memperlihatkan kondisi yang berbeda. Portugal mampu menghasilkan 8 liter anggur per unit kerja, sementara Inggris hanya menghasilkan 6 liter. Angka ini menunjukkan bahwa Portugal lebih efisien dalam memproduksi anggur. Keunggulan dalam produktivitas ini menjadikan Portugal memiliki keunggulan absolut pada komoditas anggur. Sumber daya yang digunakan di Portugal memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan Inggris dalam sektor ini. Kolom “Keunggulan Absolut pada” merangkum hasil perbandingan tersebut. Inggris unggul dalam produksi kain karena angka 10 lebih besar daripada 5, sedangkan Portugal unggul dalam produksi anggur karena angka 8 lebih besar daripada 6. Penentuan keunggulan absolut didasarkan pada perbandingan langsung produktivitas antarnegara pada barang yang sama, tanpa mempertimbangkan biaya peluang. Implikasi dari data dalam tabel tersebut mengarah pada prinsip spesialisasi. Inggris sebaiknya memfokuskan sumber dayanya untuk memproduksi kain, karena sektor tersebut memberikan hasil paling efisien. Portugal sebaiknya memusatkan produksi pada anggur karena memiliki produktivitas lebih tinggi pada komoditas tersebut. Spesialisasi memungkinkan masing-masing negara memaksimalkan output total yang dihasilkan dari sumber daya yang dimiliki.

Perdagangan kemudian menjadi mekanisme pertukaran hasil spesialisasi tersebut. Inggris dapat menukar sebagian produksi kainnya dengan anggur dari Portugal, sementara Portugal menukar sebagian produksi anggurnya dengan kain dari Inggris. Melalui pertukaran ini, kedua negara memperoleh barang yang tidak diproduksi secara efisien di dalam negeri tanpa harus mengorbankan sumber daya secara berlebihan. Manfaat yang diperoleh terlihat dari kemampuan kedua negara untuk mengakses barang dengan biaya lebih rendah dibandingkan jika

memproduksi sendiri. Inggris tidak perlu mengalihkan sumber daya untuk memproduksi anggur yang kurang efisien, dan Portugal tidak perlu memproduksi kain dengan produktivitas yang lebih rendah. Pola ini meningkatkan efisiensi global karena setiap negara beroperasi pada sektor di mana mereka paling produktif.

Tabel tersebut juga menegaskan gagasan utama Adam Smith bahwa perdagangan internasional bukanlah permainan yang menghasilkan pemenang dan pecundang, melainkan interaksi yang memungkinkan kedua pihak memperoleh keuntungan. Output total dunia meningkat karena sumber daya digunakan pada aktivitas yang paling produktif di masing-masing negara. Pembacaan tabel ini membantu memahami bahwa dasar keunggulan absolut terletak pada perbedaan produktivitas antarnegara. Perbedaan tersebut mendorong terbentuknya pola spesialisasi dan perdagangan yang saling menguntungkan. Struktur sederhana pada tabel mampu menunjukkan bagaimana keputusan produksi dan pertukaran dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi kedua negara yang terlibat.

Kontribusi terbesar Smith adalah menghancurkan mitos *zero-sum* dalam perdagangan. Namun teorinya memiliki keterbatasan: ia tidak dapat menjelaskan mengapa negara yang tidak unggul dalam produksi barang apapun secara absolut tetap dapat meraih keuntungan dari perdagangan. Pertanyaan inilah yang dijawab oleh David Ricardo. Adam Smith berhasil mengubah pandangan lama yang menganggap perdagangan sebagai permainan kalah-menang menjadi aktivitas yang dapat memberi manfaat bagi semua pihak, tetapi teorinya belum mampu menjelaskan situasi ketika suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi barang apa pun. Keterbatasan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana negara yang kurang efisien tetap bisa memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional. Permasalahan tersebut kemudian dijawab oleh David Ricardo melalui pengembangan teori yang menunjukkan bahwa keuntungan perdagangan tetap dapat terjadi meskipun suatu negara tidak unggul secara absolut, selama terdapat perbedaan efisiensi relatif dalam produksi. Pemikiran Adam Smith mengenai keunggulan absolut membawa perubahan mendasar dalam cara memahami aktivitas ekonomi lintas negara. Gagasan ini tidak hanya mengoreksi pandangan merkantilis, tetapi juga memperkenalkan logika efisiensi sebagai dasar interaksi ekonomi. Produksi tidak lagi dipandang sebagai sarana akumulasi kekayaan

semata, melainkan sebagai proses penciptaan nilai melalui penggunaan sumber daya yang paling produktif. Setiap negara diarahkan untuk mengenali kekuatan produktifnya sendiri dan memanfaatkannya secara optimal.

Konsep efisiensi yang diperkenalkan Smith berkaitan erat dengan pembagian kerja (*division of labor*). Pembagian kerja memungkinkan peningkatan produktivitas melalui spesialisasi tugas. Prinsip yang sama diterapkan dalam skala internasional, di mana negara bertindak seperti unit produksi yang fokus pada aktivitas tertentu. Spesialisasi menghasilkan peningkatan output karena setiap negara memusatkan sumber dayanya pada sektor yang paling dikuasai. Hasil produksi yang lebih besar kemudian dipertukarkan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri.

Produktivitas menjadi inti dalam menentukan keunggulan absolut. Faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas meliputi kualitas tenaga kerja, tingkat teknologi, ketersediaan sumber daya alam, serta organisasi produksi. Negara dengan teknologi lebih maju atau tenaga kerja yang lebih terampil cenderung memiliki keunggulan dalam menghasilkan barang tertentu. Perbedaan ini menciptakan dasar bagi terjadinya perdagangan karena tidak semua negara memiliki kondisi yang sama dalam setiap sektor produksi.

Perdagangan berbasis keunggulan absolut menghasilkan peningkatan output global. Sumber daya dialokasikan ke penggunaan yang paling produktif, sehingga jumlah barang dan jasa yang tersedia meningkat. Konsumen memperoleh manfaat melalui harga yang lebih rendah dan variasi produk yang lebih luas. Produsen memperoleh akses ke pasar yang lebih besar, yang memungkinkan peningkatan skala produksi. Interaksi ini menciptakan siklus pertumbuhan yang saling memperkuat antarnegara.

Harga relatif memainkan peran penting dalam mekanisme pertukaran. Negara akan mengekspor barang yang dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah dan mengimpor barang yang lebih mahal jika diproduksi sendiri. Perbedaan biaya produksi tercermin dalam harga relatif, yang menjadi dasar bagi keputusan perdagangan. Perdagangan akan berlangsung selama terdapat perbedaan harga yang menguntungkan kedua pihak. Proses ini mendorong konvergensi harga antarnegara, meskipun tidak selalu sempurna karena adanya hambatan perdagangan.

Peran pasar dalam teori Smith sangat dominan. Mekanisme pasar mengoordinasikan keputusan produksi dan konsumsi melalui interaksi antara penawaran dan permintaan. Negara tidak perlu mengontrol perdagangan secara berlebihan karena pasar dianggap mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Pandangan ini menjadi dasar bagi argumen perdagangan bebas yang menekankan pentingnya mengurangi intervensi pemerintah dalam aktivitas ekonomi. Implikasi kebijakan dari teori keunggulan absolut mendorong pengurangan hambatan perdagangan. Tarif dan pembatasan impor dianggap mengganggu efisiensi karena menghambat alokasi sumber daya yang optimal. Negara dianjurkan untuk membuka diri terhadap perdagangan internasional agar dapat memanfaatkan keunggulan yang dimiliki. Kebijakan yang mendukung kompetisi dan inovasi akan memperkuat kemampuan produksi dan meningkatkan daya saing.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa manfaat perdagangan tidak hanya terbatas pada efisiensi statis, tetapi juga mencakup efek dinamis. Spesialisasi memungkinkan pembelajaran dan peningkatan keterampilan dalam sektor tertentu. Pengalaman produksi yang berulang meningkatkan produktivitas melalui *learning by doing*. Akses terhadap pasar internasional juga mendorong inovasi karena perusahaan menghadapi persaingan yang lebih ketat. Efek ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Distribusi manfaat perdagangan menjadi aspek penting dalam evaluasi teori Smith. Keuntungan yang diperoleh tidak selalu tersebar merata di dalam suatu negara. Sektor yang memiliki keunggulan akan berkembang, sementara sektor lain mungkin mengalami penurunan. Tenaga kerja yang berpindah dari sektor yang kurang produktif ke sektor yang lebih produktif dapat meningkatkan efisiensi, tetapi proses penyesuaian ini tidak selalu berjalan tanpa biaya. Kebijakan domestik diperlukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap kelompok tertentu.

Perbedaan ukuran negara dan struktur ekonomi juga memengaruhi penerapan teori keunggulan absolut. Negara kecil mungkin memiliki keterbatasan dalam jumlah sektor yang dapat dikembangkan secara efisien. Negara besar dengan sumber daya yang beragam memiliki peluang lebih luas untuk mengembangkan berbagai sektor. Perbedaan ini memengaruhi pola spesialisasi dan ketergantungan terhadap perdagangan internasional.

Kemajuan teknologi mengubah dasar keunggulan absolut dari waktu ke waktu. Inovasi dapat meningkatkan produktivitas dan mengubah posisi suatu negara dalam perdagangan internasional. Negara yang sebelumnya tidak memiliki keunggulan dalam suatu sektor dapat mengembangkan kemampuan melalui investasi dalam teknologi dan pendidikan. Dinamika ini menunjukkan bahwa keunggulan absolut tidak bersifat statis, melainkan dapat berubah sesuai dengan perkembangan ekonomi. Perdagangan berbasis keunggulan absolut juga berkaitan dengan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Negara dengan ketersediaan sumber daya tertentu dapat memanfaatkannya untuk menghasilkan barang dengan biaya lebih rendah. Pemanfaatan ini harus dilakukan secara berkelanjutan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Pengelolaan sumber daya yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga keunggulan jangka panjang.

Integrasi ekonomi global memperkuat relevansi konsep keunggulan absolut. Rantai nilai global memungkinkan spesialisasi yang lebih rinci dalam proses produksi. Negara tidak hanya memproduksi barang akhir, tetapi juga komponen atau tahap tertentu dalam produksi. Spesialisasi ini meningkatkan efisiensi dan memperluas peluang partisipasi dalam perdagangan internasional. Analisis keunggulan absolut dapat diterapkan pada tingkat yang lebih mikro dalam konteks ini. Perkembangan sektor jasa menunjukkan bahwa keunggulan absolut tidak terbatas pada barang fisik. Layanan seperti teknologi informasi, keuangan, dan pendidikan juga dapat diperdagangkan secara internasional. Negara yang memiliki tenaga kerja terampil dan infrastruktur digital yang baik dapat mengembangkan keunggulan dalam sektor jasa. Perdagangan jasa memberikan kontribusi yang semakin besar dalam ekonomi global.

Peran institusi menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan keunggulan absolut. Sistem hukum yang jelas, perlindungan hak milik, dan kebijakan yang stabil meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi. Lingkungan institusional yang baik mendorong investasi dan inovasi, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas. Negara dengan institusi yang kuat cenderung lebih mampu memanfaatkan peluang perdagangan internasional. Analisis terhadap keunggulan absolut juga memperhatikan biaya transportasi dan hambatan perdagangan. Keunggulan dalam produksi tidak selalu menghasilkan perdagangan jika biaya pengiriman terlalu tinggi. Infrastruktur transportasi dan logistik menjadi elemen

penting dalam menghubungkan produsen dan konsumen di berbagai negara. Penurunan biaya transportasi meningkatkan kemungkinan terjadinya perdagangan dan memperluas manfaat yang diperoleh.

Perubahan preferensi konsumen memengaruhi pola perdagangan yang didasarkan pada keunggulan absolut. Permintaan terhadap produk tertentu dapat meningkat atau menurun seiring waktu. Negara perlu menyesuaikan struktur produksinya agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar global. Fleksibilitas dalam merespons perubahan permintaan menjadi kunci dalam mempertahankan daya saing. Hubungan antara keunggulan absolut dan kebijakan industri menunjukkan adanya ruang bagi intervensi pemerintah. Negara dapat mendukung pengembangan sektor tertentu untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan keunggulan baru. Pendekatan ini memerlukan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan distorsi yang merugikan. Kebijakan yang tepat dapat mempercepat proses transformasi ekonomi.

Keterbatasan teori keunggulan absolut membuka jalan bagi pengembangan teori perdagangan yang lebih komprehensif. Situasi di mana suatu negara tidak memiliki keunggulan dalam produksi barang tertentu memerlukan penjelasan tambahan. Perbedaan biaya peluang menjadi dasar bagi teori selanjutnya yang menjelaskan manfaat perdagangan secara lebih luas. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi terus berkembang untuk menjawab kompleksitas dunia nyata. Konsep yang diperkenalkan oleh Adam Smith tetap menjadi fondasi dalam analisis ekonomi internasional. Prinsip efisiensi, spesialisasi, dan pertukaran yang saling menguntungkan masih relevan dalam memahami perdagangan modern. Adaptasi terhadap kondisi baru diperlukan untuk menerapkan konsep tersebut dalam lingkungan yang semakin kompleks. Pemahaman yang mendalam terhadap teori ini memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis dinamika perdagangan internasional.

C. Teori Keunggulan Komparatif (David Ricardo)

David Ricardo dalam *Principles of Political Economy and Taxation* (1817) mengajukan salah satu argumen paling elegan dalam sejarah ilmu ekonomi: teori keunggulan komparatif. Ricardo menunjukkan bahwa bahkan jika satu negara lebih tidak efisien dalam memproduksi semua barang, perdagangan tetap menguntungkan kedua

belah pihak selama keunggulan absolutnya berbeda-beda. David Ricardo memperkenalkan gagasan keunggulan komparatif untuk menunjukkan bahwa perdagangan tetap bermanfaat meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi barang apa pun. Intinya terletak pada perbandingan efisiensi relatif, bukan efisiensi absolut, sehingga setiap negara sebaiknya fokus pada produksi barang yang memiliki biaya peluang paling rendah dibandingkan barang lainnya. Perbedaan tingkat efisiensi relatif antarnegara inilah yang menciptakan peluang pertukaran yang saling menguntungkan, karena masing-masing pihak dapat memperoleh barang dengan biaya lebih rendah melalui perdagangan dibandingkan memproduksinya sendiri.

Hukum Keunggulan Komparatif (Law of *Comparative Advantage*)

Sebuah negara memiliki keunggulan komparatif dalam produksi suatu barang jika biaya peluang (*opportunity cost*) untuk memproduksi barang tersebut (diukur dalam satuan barang lain yang dikorbankan) lebih rendah dibandingkan negara mitra dagangnya. Perdagangan yang menguntungkan terjadi ketika setiap negara berspesialisasi pada produksi barang yang memiliki biaya peluang relatif paling rendah (Ricardo, 1817; Deardorff, 2014).

Tabel 2.2 Ilustrasi Keunggulan Komparatif Ricardo

Negara	Kain (jam kerja)	Anggur (jam kerja)	Keunggulan Komparatif
Inggris	100	120	Kain ($120/100=1.2$ $< 90/80=1.125...$ REVISI)
Portugal	90	80	Anggur ($80/90=0.89$ $< 120/100=1.2$)

Sumber: Diadaptasi dari Ricardo (1817) dalam Krugman et al. (2022)

Tabel 2.2 menyajikan perbandingan kebutuhan input tenaga kerja (dalam jam kerja) antara Inggris dan Portugal untuk memproduksi dua barang, yaitu kain dan anggur. Angka dalam tabel menunjukkan berapa banyak jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit barang.

Semakin kecil jumlah jam kerja, semakin efisien negara tersebut dalam memproduksi barang yang dimaksud. Meski Portugal unggul secara absolut ($90 < 100$ dan $80 < 120$), Inggris memiliki biaya peluang lebih rendah untuk kain. Perdagangan menguntungkan keduanya.

Baris Inggris menunjukkan bahwa untuk menghasilkan satu unit kain dibutuhkan 100 jam kerja, sedangkan untuk satu unit anggur diperlukan 120 jam kerja. Baris Portugal menunjukkan bahwa produksi kain membutuhkan 90 jam kerja dan anggur 80 jam kerja. Perbandingan langsung ini memperlihatkan bahwa Portugal lebih efisien dalam memproduksi kedua barang karena membutuhkan lebih sedikit jam kerja pada masing-masing komoditas dibandingkan Inggris. Situasi ini menandakan bahwa Portugal memiliki keunggulan absolut pada kain dan anggur sekaligus.

Analisis keunggulan komparatif tidak berhenti pada perbandingan langsung tersebut, melainkan beralih pada perhitungan biaya peluang. Biaya peluang mengukur berapa banyak satu barang harus dikorbankan untuk memproduksi satu unit barang lain. Nilai ini dihitung sebagai rasio kebutuhan jam kerja antarbarang dalam satu negara. Untuk Inggris, biaya peluang memproduksi satu unit kain adalah $100/120 = 0,83$ unit anggur. Artinya, untuk memproduksi kain, Inggris harus mengorbankan 0,83 unit anggur. Biaya peluang memproduksi satu unit anggur adalah $120/100 = 1,2$ unit kain. Nilai ini menunjukkan bahwa produksi anggur di Inggris relatif mahal karena mengorbankan lebih banyak kain. Untuk Portugal, biaya peluang memproduksi satu unit kain adalah $90/80 = 1,125$ unit anggur. Produksi kain di Portugal mengorbankan lebih banyak anggur dibandingkan Inggris. Biaya peluang memproduksi satu unit anggur adalah $80/90 = 0,89$ unit kain, yang berarti pengorbanan kain untuk memproduksi anggur relatif lebih kecil dibandingkan Inggris.

Kolom “Keunggulan Komparatif” merangkum hasil perhitungan tersebut. Inggris memiliki keunggulan komparatif pada kain karena biaya peluangnya (0,83 anggur) lebih rendah dibandingkan Portugal (1,125 anggur). Portugal memiliki keunggulan komparatif pada anggur karena biaya peluangnya (0,89 kain) lebih rendah dibandingkan Inggris (1,2 kain). Penentuan ini didasarkan pada efisiensi relatif, bukan jumlah jam kerja absolut. Implikasi dari tabel tersebut mengarah pada pola spesialisasi yang berbeda dari keunggulan absolut. Inggris, meskipun kurang efisien dalam memproduksi kedua barang, tetap sebaiknya

memfokuskan produksi pada kain karena pengorbanannya paling kecil di antara pilihannya. Portugal sebaiknya memusatkan produksi pada anggur karena biaya peluangnya paling rendah pada komoditas tersebut.

Perdagangan menjadi rasional ketika masing-masing negara menukar hasil spesialisasinya. Inggris dapat mengekspor kain dan mengimpor anggur dari Portugal, sedangkan Portugal mengekspor anggur dan mengimpor kain dari Inggris. Pertukaran ini memberikan keuntungan karena masing-masing negara memperoleh barang dengan biaya peluang yang lebih rendah dibandingkan jika memproduksi sendiri. Tabel ini menunjukkan bahwa perbedaan efisiensi relatif sudah cukup untuk menciptakan manfaat perdagangan. Negara yang tampak “lebih lemah” dalam semua lini produksi tetap memiliki ruang untuk memperoleh keuntungan melalui spesialisasi berbasis biaya peluang. Struktur angka dalam tabel memperlihatkan bagaimana konsep sederhana dapat menjelaskan pola perdagangan internasional yang kompleks dan menjadi dasar teori perdagangan modern.

Teori keunggulan komparatif adalah fondasi teoritis yang paling kokoh untuk argumen pro-perdagangan. Samuelson (1962) menyebutnya sebagai satu dari sedikit proposisi dalam ilmu sosial yang “benar dan tidak trivial sekaligus.” Deardorff (2014) dalam pembaruan formalnya membuktikan bahwa hukum keunggulan komparatif tetap berlaku dalam model multi-negara dan multi-barang yang jauh lebih kompleks. Teori keunggulan komparatif merupakan dasar paling kuat dalam menjelaskan mengapa perdagangan internasional memberikan manfaat bagi negara-negara yang terlibat. Teori ini dianggap sangat penting karena mampu menunjukkan secara logis dan konsisten bahwa perbedaan biaya relatif sudah cukup untuk menciptakan keuntungan bersama, bahkan dalam kondisi yang tidak sederhana. Pengakuan dari Samuelson menunjukkan bahwa gagasan ini memiliki kekuatan ilmiah yang tinggi dan tidak mudah dibantah, sementara pengembangan oleh Deardorff memperlihatkan bahwa prinsip tersebut tetap relevan dan berlaku meskipun diterapkan pada situasi yang lebih kompleks dengan banyak negara dan berbagai jenis barang. Konstruksi teori keunggulan komparatif memperkenalkan cara pandang yang jauh lebih halus dalam memahami efisiensi produksi. Fokus analisis berpindah dari kemampuan absolut menuju perbandingan relatif antarbarang dalam satu negara. Pergeseran ini memungkinkan penjelasan yang lebih luas mengenai pola perdagangan, karena hampir setiap negara memiliki struktur biaya

peluang yang berbeda. Perbedaan tersebut menjadi sumber utama terbentuknya pertukaran yang saling menguntungkan.

Biaya peluang menjadi konsep kunci dalam kerangka Ricardo. Setiap keputusan produksi melibatkan pengorbanan terhadap alternatif lain yang tidak dipilih. Nilai pengorbanan ini mencerminkan biaya sebenarnya dari suatu aktivitas ekonomi. Negara akan memperoleh manfaat jika memusatkan sumber dayanya pada produksi barang yang memiliki biaya peluang paling rendah. Pilihan ini memastikan bahwa pengorbanan yang dilakukan seminimal mungkin dibandingkan alternatif lain yang tersedia.

Representasi grafis melalui kurva kemungkinan produksi (*Production Possibility Frontier*) membantu memahami konsep ini secara lebih sistematis. Kemiringan kurva *Production Possibility Frontier* mencerminkan biaya peluang antara dua barang. Negara dengan kemiringan kurva yang berbeda akan memiliki rasio pertukaran domestik yang berbeda pula. Perbedaan rasio ini menciptakan peluang perdagangan karena masing-masing negara dapat memperoleh barang dengan biaya yang lebih rendah melalui pertukaran dibandingkan produksi sendiri. Harga relatif internasional terbentuk di antara harga relatif domestik kedua negara. Rentang harga ini menentukan apakah perdagangan akan terjadi dan bagaimana keuntungan dibagi. Jika harga internasional berada di antara dua rasio biaya peluang, kedua negara akan memperoleh manfaat. Posisi harga tersebut juga memengaruhi distribusi keuntungan, karena negara dengan posisi tawar lebih kuat dapat memperoleh bagian manfaat yang lebih besar.

Spesialisasi dalam kerangka keunggulan komparatif tidak selalu bersifat penuh. Dalam praktik, negara sering kali tetap memproduksi berbagai barang karena adanya faktor seperti biaya transportasi, preferensi konsumen, dan kebijakan pemerintah. Spesialisasi parsial tetap memberikan manfaat selama sebagian sumber daya dialokasikan pada sektor dengan biaya peluang lebih rendah. Tingkat spesialisasi bergantung pada kondisi ekonomi dan struktur produksi masing-masing negara. Perdagangan berbasis keunggulan komparatif meningkatkan kesejahteraan melalui ekspansi kemungkinan konsumsi. Negara dapat mengonsumsi kombinasi barang di luar batas produksi domestiknya. Garis kemungkinan konsumsi menjadi lebih luas dibandingkan *Production Possibility Frontier* domestik. Peningkatan ini mencerminkan keuntungan nyata dari perdagangan, karena masyarakat

memperoleh akses terhadap lebih banyak barang dengan sumber daya yang sama.

Efek distribusi dalam teori Ricardo menunjukkan bahwa tidak semua faktor produksi memperoleh manfaat yang sama. Perubahan pola produksi dapat meningkatkan permintaan terhadap faktor tertentu dan menurunkan permintaan terhadap faktor lain. Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor unggulan cenderung memperoleh keuntungan, sementara sektor yang kurang kompetitif dapat mengalami penurunan aktivitas. Penyesuaian ini memerlukan waktu dan dapat menimbulkan biaya sosial. Perbedaan teknologi menjadi sumber utama keunggulan komparatif dalam model Ricardo klasik. Negara yang memiliki teknologi lebih efisien dalam suatu sektor akan memiliki biaya peluang lebih rendah pada sektor tersebut. Teknologi tidak hanya mencakup mesin dan peralatan, tetapi juga mencakup pengetahuan, keterampilan, dan organisasi produksi. Investasi dalam pendidikan dan inovasi menjadi cara untuk mengubah struktur keunggulan komparatif.

Pengembangan teori keunggulan komparatif meluas ke model dengan banyak barang dan banyak negara. Setiap negara memiliki spektrum biaya peluang yang berbeda untuk berbagai jenis barang. Pola perdagangan ditentukan oleh peringkat biaya relatif tersebut. Negara akan mengeksport barang yang berada pada posisi biaya peluang terendah dalam spektrum tersebut dan mengimpor barang dengan biaya peluang lebih tinggi. Struktur ini menciptakan jaringan perdagangan yang kompleks di tingkat global. Perdagangan intra-industri memberikan dimensi tambahan yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh model Ricardo sederhana. Negara dapat saling mengeksport dan mengimpor barang dalam kategori yang sama, seperti mobil atau elektronik. Fenomena ini berkaitan dengan diferensiasi produk dan skala ekonomi. Perusahaan memproduksi variasi produk yang berbeda untuk memenuhi preferensi konsumen yang beragam. Keunggulan komparatif tetap relevan karena perbedaan efisiensi dalam menghasilkan variasi tertentu.

Integrasi dalam rantai nilai global memperdalam penerapan konsep keunggulan komparatif. Produksi suatu barang dipecah menjadi berbagai tahap yang tersebar di berbagai negara. Setiap tahap produksi dilakukan di lokasi dengan biaya peluang paling rendah untuk aktivitas tersebut. Negara dapat memiliki keunggulan komparatif dalam tugas tertentu, bukan hanya dalam produk akhir. Pendekatan ini memperluas ruang partisipasi dalam perdagangan internasional. Biaya transportasi

dan hambatan perdagangan memengaruhi realisasi keunggulan komparatif. Keuntungan dari spesialisasi dapat berkurang jika biaya pengiriman tinggi atau terdapat pembatasan perdagangan. Infrastruktur logistik yang efisien menjadi faktor penting dalam memaksimalkan manfaat perdagangan. Penurunan biaya transportasi dalam beberapa dekade terakhir meningkatkan intensitas perdagangan global.

Nilai tukar memengaruhi daya saing relatif dalam perdagangan internasional. Perubahan nilai tukar dapat mengubah harga relatif barang antarnegara. Depresiasi mata uang dapat memperkuat posisi ekspor, sementara apresiasi dapat melemahkannya. Faktor ini berinteraksi dengan struktur biaya peluang dalam menentukan pola perdagangan. Analisis yang komprehensif perlu mempertimbangkan kedua aspek tersebut. Peran institusi dalam mendukung keunggulan komparatif tidak dapat diabaikan. Sistem hukum yang efektif, stabilitas politik, dan kualitas tata kelola memengaruhi efisiensi produksi. Negara dengan institusi yang kuat mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan inovasi. Kondisi ini memperkuat kemampuan untuk mengembangkan sektor unggulan dan meningkatkan daya saing global.

Dinamika keunggulan komparatif menunjukkan bahwa posisi suatu negara dapat berubah seiring waktu. Transformasi ekonomi, investasi dalam teknologi, dan perubahan struktur tenaga kerja dapat menggeser pola biaya peluang. Negara yang sebelumnya bergantung pada komoditas dapat beralih ke sektor manufaktur atau jasa. Proses ini mencerminkan evolusi ekonomi yang dipengaruhi oleh kebijakan dan kondisi global. Kebijakan industri sering digunakan untuk mempercepat perubahan keunggulan komparatif. Pemerintah dapat memberikan dukungan pada sektor tertentu melalui subsidi, perlindungan pasar, atau investasi dalam infrastruktur. Tujuannya adalah menciptakan kapasitas produksi yang lebih efisien dalam jangka panjang. Pendekatan ini memerlukan evaluasi yang cermat agar tidak menghasilkan distorsi yang merugikan.

Perdagangan jasa memperluas penerapan teori keunggulan komparatif ke sektor non-barang. Negara dengan tenaga kerja terampil dalam bidang tertentu dapat mengekspor jasa seperti teknologi informasi, keuangan, atau pendidikan. Digitalisasi memungkinkan layanan diberikan lintas negara tanpa kehadiran fisik. Struktur biaya peluang dalam sektor jasa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Ketimpangan antarnegara dalam

memanfaatkan keunggulan komparatif menjadi isu penting. Negara dengan kapasitas terbatas mungkin menghadapi kesulitan dalam mengembangkan sektor unggulan. Hambatan seperti kurangnya infrastruktur, keterbatasan akses pembiayaan, dan rendahnya kualitas pendidikan menghambat partisipasi dalam perdagangan global. Dukungan kebijakan dan kerja sama internasional diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Krisis global dapat memengaruhi pola perdagangan yang didasarkan pada keunggulan komparatif. Gangguan pada rantai pasok, perubahan permintaan, dan ketidakpastian ekonomi dapat mengubah struktur produksi. Negara mungkin menyesuaikan strategi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi. Penyesuaian ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak selalu menjadi satu-satunya pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Interaksi antara keunggulan komparatif dan keberlanjutan lingkungan menjadi perhatian dalam ekonomi modern. Produksi yang efisien secara ekonomi tidak selalu sejalan dengan keberlanjutan ekologis. Eksploitasi sumber daya yang berlebihan dapat merusak lingkungan dan mengurangi kesejahteraan jangka panjang. Kebijakan yang mengintegrasikan efisiensi ekonomi dan perlindungan lingkungan menjadi semakin penting.

Konsep keunggulan komparatif tetap menjadi pilar utama dalam teori perdagangan internasional. Prinsip bahwa perbedaan biaya relatif dapat menghasilkan keuntungan bersama memberikan dasar logis bagi keterbukaan ekonomi. Pengembangan teori ini dalam berbagai model menunjukkan fleksibilitas dan relevansinya dalam menjelaskan fenomena perdagangan yang kompleks. Pemahaman yang mendalam terhadap konsep ini memungkinkan analisis yang lebih akurat terhadap dinamika ekonomi global yang terus berkembang.

D. Model Heckscher-Ohlin

Eli Heckscher (1919) dan Bertil Ohlin (1933) mengembangkan model perdagangan yang menjelaskan pola perdagangan berdasarkan perbedaan kelimpahan faktor produksi antarnegara. Model H-O menjadi teori perdagangan paling berpengaruh dalam ekonomi neoklasik abad ke-20. Heckscher dan Ohlin mengembangkan pendekatan yang melihat perdagangan internasional sebagai akibat dari perbedaan ketersediaan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam di

setiap negara. Negara yang memiliki faktor produksi tertentu dalam jumlah melimpah cenderung memproduksi dan mengekspor barang yang menggunakan faktor tersebut secara intensif, sementara akan mengimpor barang yang membutuhkan faktor yang relatif langka di dalam negeri. Gagasan ini memberikan penjelasan yang lebih sistematis tentang pola perdagangan Global dan menjadi salah satu teori paling berpengaruh dalam kerangka ekonomi neoklasik karena mampu menghubungkan struktur ekonomi domestik dengan perilaku perdagangan internasional.

Teorema Heckscher-Ohlin

Sebuah negara akan mengekspor barang yang produksinya menggunakan secara intensif faktor produksi yang dimilikinya secara relatif berlimpah, dan mengimpor barang yang produksinya menggunakan faktor produksi yang relatif langka di negara tersebut. Dengan kata lain: negara padat modal mengekspor barang padat modal; negara padat tenaga kerja mengekspor barang padat tenaga kerja (Ohlin, 1933; Feenstra & Taylor, 2021).

Model H-O menghasilkan beberapa teorema turunan yang penting: (1) Teorema Stolper-Samuelson menyatakan bahwa liberalisasi perdagangan meningkatkan imbal hasil faktor yang berlimpah dan menurunkan imbal hasil faktor yang langka, sehingga menjelaskan distribusi pendapatan; (2) Teorema Rybczynski menyatakan bahwa pertumbuhan suatu faktor akan meningkatkan output industri yang menggunakan faktor tersebut secara intensif dan mengurangi output industri lainnya. Model Heckscher-Ohlin tidak hanya menerangkan pola perdagangan, tetapi juga menghasilkan implikasi penting terhadap distribusi pendapatan dan struktur produksi dalam suatu negara. Teorema Stolper-Samuelson menunjukkan bahwa ketika perdagangan dibuka, kelompok pemilik faktor produksi yang melimpah akan memperoleh keuntungan lebih besar, sementara pemilik faktor yang terbatas justru dapat mengalami penurunan pendapatan, sehingga perdagangan memengaruhi ketimpangan ekonomi. Teorema Rybczynski menjelaskan bahwa jika jumlah suatu faktor produksi meningkat, maka sektor yang paling banyak menggunakan faktor tersebut akan berkembang lebih pesat, sedangkan sektor lain cenderung menyusut. Kedua teorema ini menggambarkan bagaimana perubahan dalam

perdagangan dan ketersediaan faktor produksi dapat menggeser keseimbangan ekonomi domestik.

Tabel 2.3 Prediksi Model H-O untuk Pola Perdagangan

Negara/Tipe	Faktor Berlimpah	Ekspor Utama Diprediksi	Impor Utama
AS, Jerman, Jepang	Modal & teknologi	Manufaktur maju, jasa	Barang padat TK
China, Vietnam	Tenaga kerja	Elektronik dasar, garmen	Modal, teknologi
Saudi, Rusia	SDA (minyak)	Komoditas energi	Manufaktur, jasa
Indonesia, Brasil	TK + SDA	Komoditas, garmen	Teknologi tinggi

Sumber: Diadaptasi dari Feenstra, R.C. & Taylor, A.M. (2021)

Tabel 2.3 menyajikan prediksi pola perdagangan internasional berdasarkan Model Heckscher-Ohlin, yaitu hubungan antara jenis faktor produksi yang melimpah di suatu negara dengan jenis barang yang diekspor dan diimpor. Struktur tabel terdiri dari empat kolom utama: “Negara/Tipe”, “Faktor Berlimpah”, “Ekspor Utama Diprediksi”, dan “Impor Utama”. Setiap baris menggambarkan kelompok negara dengan karakteristik faktor produksi tertentu. Baris pertama menampilkan kelompok negara seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Kolom “Faktor Berlimpah” menunjukkan bahwa negara-negara ini memiliki kelimpahan modal dan teknologi. Modal mencakup mesin, infrastruktur, serta investasi fisik, sedangkan teknologi mencakup pengetahuan, inovasi, dan kemampuan riset. Kelimpahan ini mendorong kemampuan produksi yang kompleks dan efisien pada sektor industri maju. Kolom “Ekspor Utama Diprediksi” menunjukkan bahwa negara-negara tersebut mengeksport manufaktur maju dan jasa. Manufaktur maju meliputi produk seperti kendaraan, mesin industri, dan peralatan elektronik canggih, sedangkan jasa mencakup keuangan, teknologi informasi, dan layanan profesional. Kolom “Impor Utama” menunjukkan bahwa negara-negara ini cenderung mengimpor barang padat tenaga kerja,

karena biaya produksi untuk barang tersebut relatif lebih tinggi jika diproduksi di dalam negeri.

Baris kedua mencantumkan negara seperti China dan Vietnam. Kolom “Faktor Berlimpah” menunjukkan dominasi tenaga kerja dalam jumlah besar. Tenaga kerja yang melimpah, terutama dengan upah relatif lebih rendah, menciptakan keunggulan dalam produksi barang yang membutuhkan banyak tenaga manusia. Kolom “Ekspor Utama Diprediksi” mencantumkan elektronik dasar dan garmen. Produk-produk ini membutuhkan proses produksi yang intensif tenaga kerja, seperti perakitan dan penjahitan. Kolom “Impor Utama” menunjukkan bahwa negara-negara ini mengimpor modal dan teknologi. Keterbatasan dalam faktor tersebut membuat mereka bergantung pada negara lain untuk memperoleh mesin, peralatan canggih, dan inovasi teknologi.

Baris ketiga menggambarkan negara seperti Arab Saudi dan Rusia. Kolom “Faktor Berlimpah” menunjukkan kekayaan sumber daya alam, khususnya energi seperti minyak dan gas. Kelimpahan ini memberikan keunggulan dalam sektor ekstraktif. Kolom “Ekspor Utama Diprediksi” menunjukkan komoditas energi sebagai barang utama yang dijual ke pasar internasional. Produksi energi memanfaatkan langsung sumber daya alam yang tersedia dalam jumlah besar. Kolom “Impor Utama” menunjukkan bahwa negara-negara ini mengimpor manufaktur dan jasa. Keterbatasan dalam diversifikasi industri dan teknologi menyebabkan ketergantungan pada produk industri dari luar.

Baris keempat menampilkan negara seperti Indonesia dan Brasil. Kolom “Faktor Berlimpah” menunjukkan kombinasi tenaga kerja dan sumber daya alam. Struktur ini menciptakan pola produksi yang beragam, namun belum sepenuhnya didukung oleh teknologi tinggi. Kolom “Ekspor Utama Diprediksi” mencantumkan komoditas dan garmen. Komoditas meliputi hasil tambang, perkebunan, dan produk agrikultur, sedangkan garmen memanfaatkan tenaga kerja yang relatif melimpah. Kolom “Impor Utama” menunjukkan kebutuhan terhadap teknologi tinggi. Barang seperti mesin canggih, perangkat elektronik mutakhir, dan sistem digital masih lebih efisien diperoleh dari negara yang memiliki keunggulan pada faktor tersebut.

Hubungan antar kolom dalam tabel menunjukkan pola yang konsisten. Faktor produksi yang melimpah menentukan jenis barang yang dapat diproduksi secara intensif. Produksi intensif ini menghasilkan surplus yang kemudian diekspor. Barang yang membutuhkan faktor

produksi langka di dalam negeri menjadi kandidat utama untuk diimpor. Mekanisme ini menciptakan spesialisasi berbasis struktur faktor produksi. Tabel ini juga dapat dikaitkan dengan implikasi distribusi pendapatan. Negara yang membuka perdagangan akan mengalami peningkatan imbal hasil pada faktor yang melimpah. Negara padat modal akan melihat peningkatan pendapatan pemilik modal, sedangkan negara padat tenaga kerja akan mengalami peningkatan upah tenaga kerja. Perubahan ini mencerminkan prinsip dalam teorema Stolper-Samuelson.

Perubahan jumlah faktor produksi juga dapat menggeser pola dalam tabel. Peningkatan modal di suatu negara akan memperkuat sektor industri yang menggunakan modal secara intensif. Output sektor tersebut meningkat, sementara sektor lain yang tidak menggunakan faktor tersebut secara dominan dapat mengalami penurunan. Pola ini mencerminkan mekanisme dalam teorema Rybczynski. Tabel tersebut memberikan gambaran sistematis mengenai bagaimana karakteristik internal suatu negara membentuk arah perdagangan internasional. Perbedaan faktor produksi bukan hanya menentukan apa yang diproduksi, tetapi juga menjelaskan mengapa arus ekspor dan impor antarnegara memiliki pola yang dapat diprediksi. Model Heckscher-Ohlin memberikan kerangka analitis yang menghubungkan struktur internal suatu negara dengan pola perdagangan internasional yang terbentuk. Fokus utamanya terletak pada perbedaan endowment faktor produksi, yaitu bagaimana kombinasi tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam yang dimiliki suatu negara membentuk keunggulan dalam produksi. Pendekatan ini memperluas pemahaman perdagangan dari sekadar perbedaan produktivitas menuju analisis yang lebih struktural mengenai asal-usul keunggulan ekonomi.

Asumsi dasar model H-O memainkan peran penting dalam membangun logika teoritisnya. Model ini berangkat dari anggapan bahwa teknologi antarnegara identik, sehingga perbedaan produksi tidak berasal dari kemampuan teknis, melainkan dari ketersediaan faktor produksi. Dua negara, dua barang, dan dua faktor produksi sering digunakan sebagai kerangka sederhana untuk menjelaskan mekanisme dasar. Tenaga kerja dan modal menjadi fokus utama karena keduanya dianggap sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses produksi modern. Intensitas faktor menjadi konsep sentral dalam model ini. Setiap barang memiliki kebutuhan faktor produksi yang berbeda. Barang padat tenaga kerja membutuhkan proporsi tenaga kerja yang lebih besar

dibandingkan modal, sedangkan barang padat modal membutuhkan investasi mesin dan teknologi yang lebih tinggi. Negara akan cenderung memproduksi barang yang sesuai dengan faktor yang dimilikinya secara relatif melimpah. Perbedaan intensitas ini menciptakan dasar bagi spesialisasi dan perdagangan.

Perbedaan kelimpahan faktor antarnegara menciptakan perbedaan harga faktor produksi. Negara dengan tenaga kerja melimpah cenderung memiliki upah yang lebih rendah, sementara negara dengan modal melimpah memiliki biaya modal yang lebih rendah. Perbedaan harga faktor ini diterjemahkan menjadi perbedaan biaya produksi barang. Barang yang menggunakan faktor yang murah akan diproduksi dengan biaya lebih rendah, sehingga memiliki daya saing di pasar internasional. Model H-O menghasilkan prediksi mengenai arah perdagangan yang sistematis. Negara padat tenaga kerja akan mengekspor barang padat tenaga kerja dan mengimpor barang padat modal. Negara padat modal akan melakukan hal sebaliknya. Pola ini menciptakan aliran perdagangan yang saling melengkapi antarnegara. Perdagangan menjadi sarana untuk memanfaatkan perbedaan struktur faktor produksi secara efisien.

Teorema Stolper-Samuelson memberikan implikasi penting terhadap distribusi pendapatan. Ketika perdagangan dibuka, permintaan terhadap faktor produksi yang digunakan secara intensif dalam sektor ekspor akan meningkat. Kenaikan permintaan ini mendorong peningkatan imbal hasil faktor tersebut. Faktor yang tidak digunakan secara intensif dalam sektor ekspor dapat mengalami penurunan imbal hasil. Perubahan ini menjelaskan mengapa perdagangan dapat meningkatkan ketimpangan dalam jangka pendek. Teorema Rybczynski menjelaskan hubungan antara perubahan endowment faktor dan output produksi. Peningkatan jumlah suatu faktor akan memperbesar produksi barang yang menggunakan faktor tersebut secara intensif. Sektor lain akan mengalami penurunan relatif karena sumber daya dialihkan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa perubahan internal dalam suatu negara dapat mengubah struktur produksi dan pola perdagangan. Teorema *equalization* harga faktor (*factor price equalization*) merupakan implikasi lanjutan dari model H-O. Perdagangan internasional cenderung menyamakan harga faktor produksi antarnegara. Upah tenaga kerja di negara padat tenaga kerja akan meningkat, sementara di negara padat modal dapat mengalami tekanan. Proses ini

terjadi karena perdagangan menggantikan mobilitas faktor produksi secara langsung. Barang yang diperdagangkan membawa “faktor produksi tersirat” yang terkandung di dalamnya.

Pengujian empiris terhadap model H-O menghasilkan temuan yang menarik. Leontief (1953) menemukan bahwa Amerika Serikat, yang dikenal sebagai negara padat modal, justru mengekspor barang yang lebih padat tenaga kerja. Fenomena ini dikenal sebagai *Leontief Paradox*. Temuan ini memicu pengembangan teori lanjutan yang memasukkan faktor lain seperti kualitas tenaga kerja, teknologi, dan diferensiasi produk. Tenaga kerja tidak lagi dipandang homogen, melainkan memiliki tingkat keterampilan yang berbeda. Perkembangan teori perdagangan modern mengintegrasikan model H-O dengan pendekatan lain. Model faktor spesifik (*specific factors model*) menyoroti bahwa dalam jangka pendek, faktor produksi tidak sepenuhnya mobile antar sektor. Modal tertentu mungkin terikat pada industri tertentu, sehingga penyesuaian terhadap perdagangan menjadi tidak sempurna. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai dampak perdagangan terhadap distribusi pendapatan.

Global Value Chains memberikan perspektif baru terhadap model H-O. Produksi tidak lagi dilakukan secara utuh dalam satu negara, melainkan dibagi ke dalam berbagai tahap yang tersebar secara geografis. Setiap tahap produksi ditempatkan di lokasi dengan faktor produksi yang paling sesuai. Negara dapat memiliki keunggulan dalam tahap tertentu, seperti perakitan atau desain. Struktur ini menunjukkan bahwa keunggulan tidak hanya ditentukan oleh produk akhir, tetapi juga oleh posisi dalam rantai nilai. Peran teknologi dalam model H-O mengalami reinterpretasi dalam ekonomi modern. Meskipun asumsi awal menyatakan teknologi identik, kenyataannya menunjukkan bahwa inovasi menjadi faktor pembeda utama antarnegara. Negara dengan kemampuan riset dan pengembangan yang tinggi dapat menciptakan keunggulan baru yang tidak hanya bergantung pada faktor produksi tradisional. Teknologi menjadi faktor produksi tersendiri yang memengaruhi pola perdagangan.

Kualitas institusi memengaruhi kemampuan suatu negara dalam memanfaatkan kelimpahan faktor produksi. Negara dengan tata kelola yang baik mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Infrastruktur yang memadai, sistem hukum yang kuat, dan kebijakan yang stabil meningkatkan produktivitas faktor produksi. Kondisi ini

memperkuat keunggulan yang dimiliki dan meningkatkan daya saing di pasar global. Mobilitas faktor produksi lintas negara juga memengaruhi relevansi model H-O. Modal dapat bergerak lebih bebas dibandingkan tenaga kerja, sehingga perusahaan dapat memindahkan produksi ke lokasi dengan biaya lebih rendah. Fenomena ini mengurangi perbedaan harga faktor antarnegara dan mengubah pola perdagangan. Investasi asing langsung menjadi sarana untuk mengakses faktor produksi di negara lain tanpa harus bergantung pada perdagangan barang.

Perdagangan jasa memperluas cakupan model H-O. Tenaga kerja terampil menjadi faktor utama dalam sektor jasa modern seperti teknologi informasi dan keuangan. Negara dengan sumber daya manusia berkualitas tinggi dapat mengekspor jasa bernilai tambah tinggi. Struktur ini menunjukkan bahwa faktor produksi tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga kualitas manusia dan pengetahuan. Isu lingkungan menambah dimensi baru dalam analisis berbasis faktor produksi. Negara dengan regulasi lingkungan yang lebih longgar dapat memiliki biaya produksi lebih rendah pada industri tertentu. Fenomena ini dikenal sebagai "*pollution haven hypothesis*". Perdagangan dapat memindahkan aktivitas produksi yang intensif polusi ke negara dengan standar lingkungan yang lebih rendah. Kebijakan internasional diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan ini.

Ketimpangan global dalam distribusi faktor produksi memengaruhi pola pembangunan ekonomi. Negara berkembang sering memiliki tenaga kerja melimpah tetapi kekurangan modal dan teknologi. Perdagangan memberikan peluang untuk memanfaatkan tenaga kerja tersebut melalui ekspor barang padat tenaga kerja. Proses ini dapat mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Transisi menuju ekonomi berbasis teknologi memerlukan investasi dalam pendidikan dan inovasi. Perubahan demografi memengaruhi kelimpahan faktor produksi dalam jangka panjang. Negara dengan populasi muda memiliki potensi tenaga kerja yang besar, sementara negara dengan populasi menua menghadapi kekurangan tenaga kerja. Perbedaan ini memengaruhi struktur biaya dan pola perdagangan. Migrasi tenaga kerja dapat menjadi mekanisme penyesuaian terhadap perubahan demografi.

Kebijakan perdagangan memainkan peran dalam menentukan sejauh mana prediksi model H-O terealisasi. Hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota dapat mengganggu alokasi sumber daya yang efisien. Negara mungkin melindungi sektor tertentu untuk alasan

strategis atau sosial. Intervensi ini dapat mengubah pola perdagangan yang seharusnya terbentuk berdasarkan kelimpahan faktor produksi. Ketahanan ekonomi menjadi pertimbangan penting dalam konteks global yang tidak stabil. Ketergantungan berlebihan pada satu jenis ekspor dapat meningkatkan risiko terhadap guncangan eksternal. Diversifikasi ekonomi menjadi strategi untuk mengurangi risiko tersebut. Negara perlu menyeimbangkan antara memanfaatkan keunggulan faktor produksi dan menjaga stabilitas jangka panjang.

Model Heckscher-Ohlin tetap menjadi salah satu pilar utama dalam teori perdagangan internasional. Hubungan antara faktor produksi dan pola perdagangan memberikan dasar yang kuat untuk memahami dinamika ekonomi global. Pengembangan teori dan integrasi dengan pendekatan lain menunjukkan bahwa konsep ini terus relevan dalam menjelaskan perubahan yang terjadi. Pemahaman mendalam terhadap model ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap interaksi ekonomi antarnegara yang semakin kompleks.

E. Kritik terhadap Teori Klasik

Paradoks Leontief (1953) adalah pukulan empiris pertama yang serius terhadap model H-O: data menunjukkan bahwa justru mengekspor barang padat tenaga kerja. Berbagai penjelasan telah diajukan, termasuk heterogenitas tenaga kerja (*Human Capital*), perbedaan teknologi, dan faktor alam sebagai faktor ketiga. Temuan Leontief menantang prediksi utama model Heckscher-Ohlin yang menyatakan bahwa negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang paling melimpah, karena Amerika Serikat yang dikenal kaya modal justru ditemukan lebih banyak mengekspor barang yang padat tenaga kerja. Hasil ini menimbulkan keraguan terhadap kesederhanaan asumsi model tersebut dan mendorong para ekonom untuk mencari penjelasan tambahan, seperti perbedaan kualitas tenaga kerja yang mencerminkan tingkat pendidikan dan keterampilan, variasi teknologi antarnegara, serta peran sumber daya alam yang tidak sepenuhnya tercakup dalam model awal. Temuan ini memperlihatkan bahwa realitas perdagangan internasional lebih kompleks dibandingkan prediksi teori dasar.

1. Teori klasik mengasumsikan persaingan sempurna dan skala hasil konstan, bertentangan dengan realitas pasar yang sering oligopolistik.

2. Tidak menjelaskan perdagangan intra-industri (negara maju saling mengekspor dan mengimpor produk sejenis), yang justru mendominasi perdagangan dunia.
3. Mengabaikan diferensiasi produk, economies of scale, dan peran permintaan sebagai penentu perdagangan.

Kritik terhadap teori klasik perdagangan internasional berkembang seiring meningkatnya kompleksitas ekonomi global dan ketersediaan data empiris yang lebih kaya. Paradoks Leontief membuka ruang refleksi terhadap asumsi dasar model Heckscher-Ohlin yang terlalu menyederhanakan struktur produksi dan karakteristik faktor produksi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kelimpahan faktor dan pola perdagangan tidak selalu linear. Analisis lanjutan menekankan bahwa tenaga kerja tidak homogen, melainkan terdiri dari berbagai tingkat keterampilan yang menghasilkan produktivitas berbeda.

Human Capital muncul sebagai penjelasan utama terhadap anomali empiris tersebut. Tenaga kerja di negara maju memiliki tingkat pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang lebih tinggi, sehingga secara efektif berperilaku seperti faktor yang berbeda dari tenaga kerja tidak terampil. Barang yang tampak padat tenaga kerja dalam statistik tradisional sebenarnya menggunakan tenaga kerja terampil yang memiliki karakteristik mendekati modal. Perbedaan ini mengaburkan klasifikasi sederhana antara tenaga kerja dan modal dalam model klasik. Perbedaan teknologi antarnegara juga menjadi sumber kritik yang signifikan. Model klasik mengasumsikan teknologi identik, padahal realitas menunjukkan adanya kesenjangan teknologi yang besar. Negara dengan teknologi lebih maju dapat memproduksi barang dengan efisiensi lebih tinggi meskipun tidak memiliki kelimpahan faktor tertentu. Keunggulan teknologi memungkinkan negara menciptakan pola perdagangan yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh endowment faktor produksi.

Peran sumber daya alam sebagai faktor produksi tambahan memperluas kerangka analisis. Model awal berfokus pada tenaga kerja dan modal, sementara banyak negara memiliki keunggulan pada sumber daya alam seperti minyak, mineral, atau lahan pertanian. Faktor ini sering menjadi penentu utama ekspor suatu negara. Pengabaian terhadap dimensi ini membuat prediksi model menjadi kurang akurat dalam menjelaskan perdagangan komoditas primer. Struktur pasar yang tidak

sempurna menjadi kritik lain yang mendasar. Banyak industri global didominasi oleh perusahaan besar yang memiliki kekuatan pasar signifikan. Oligopoli dan monopoli menciptakan perilaku strategis yang tidak sesuai dengan asumsi persaingan sempurna. Perusahaan dapat memengaruhi harga, menentukan output, dan menggunakan strategi diferensiasi produk untuk mempertahankan pangsa pasar. Kondisi ini mengubah dinamika perdagangan karena keputusan tidak hanya didasarkan pada biaya produksi.

Economies of scale memberikan penjelasan tambahan mengenai pola perdagangan yang tidak dapat dijelaskan oleh teori klasik. Produksi dalam skala besar menurunkan biaya rata-rata, sehingga perusahaan memiliki insentif untuk memusatkan produksi dan mengekspor ke berbagai negara. Negara dapat mengembangkan keunggulan dalam industri tertentu bukan karena kelimpahan faktor, melainkan karena kemampuan mencapai skala produksi yang efisien. Fenomena ini terlihat jelas dalam industri otomotif, elektronik, dan farmasi. Perdagangan intra-industri menjadi salah satu fenomena yang paling menantang teori klasik. Negara dengan tingkat perkembangan yang serupa saling mengekspor dan mengimpor barang dalam kategori yang sama. Contoh nyata terlihat pada perdagangan mobil antarnegara maju. Fenomena ini berkaitan dengan diferensiasi produk, di mana konsumen menghargai variasi dalam desain, kualitas, dan fitur. Perdagangan tidak lagi semata-mata didorong oleh perbedaan biaya produksi, tetapi juga oleh preferensi konsumen terhadap keragaman.

Model perdagangan baru (*New Trade Theory*) muncul sebagai respons terhadap keterbatasan teori klasik. Pendekatan ini menggabungkan *economies of scale* dan diferensiasi produk dalam menjelaskan perdagangan internasional. Perusahaan beroperasi dalam pasar monopolistik kompetitif, di mana setiap produsen menawarkan produk yang sedikit berbeda. Struktur ini memungkinkan terjadinya perdagangan intra-industri dan menjelaskan mengapa negara dengan karakteristik serupa tetap saling berdagang. Peran permintaan menjadi semakin penting dalam analisis perdagangan modern. Preferensi konsumen memengaruhi jenis barang yang diproduksi dan diperdagangkan. Negara dengan permintaan domestik yang besar untuk produk tertentu dapat mengembangkan industri tersebut hingga mencapai skala yang memungkinkan ekspor. Pola ini menunjukkan

bahwa sisi permintaan tidak dapat diabaikan dalam menentukan struktur perdagangan.

Kritik terhadap asumsi mobilitas faktor dalam model klasik juga mendapatkan perhatian. Tenaga kerja sering kali tidak dapat berpindah antar sektor dengan mudah karena keterbatasan keterampilan atau hambatan sosial. Modal mungkin terikat pada investasi jangka panjang yang sulit dialihkan. Kekakuan ini menyebabkan penyesuaian terhadap perdagangan tidak berjalan secara instan, sehingga menimbulkan dampak distribusi yang lebih kompleks. Ketidakpastian dan risiko dalam perdagangan internasional menambah dimensi baru yang tidak tercakup dalam teori klasik. Fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan, dan ketegangan geopolitik memengaruhi keputusan pelaku ekonomi. Risiko ini dapat mengurangi insentif untuk berdagang meskipun terdapat keunggulan biaya. Perusahaan perlu mempertimbangkan faktor risiko dalam menentukan strategi internasionalnya.

Peran jaringan dan hubungan bisnis menjadi faktor penting dalam perdagangan modern. Perusahaan multinasional membangun jaringan produksi dan distribusi lintas negara yang memengaruhi aliran perdagangan. Hubungan jangka panjang dengan pemasok dan distributor menciptakan pola perdagangan yang tidak hanya ditentukan oleh harga. Kepercayaan dan koordinasi menjadi elemen penting dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi lintas batas. Inovasi dan penelitian memainkan peran yang semakin besar dalam menentukan keunggulan kompetitif. Negara yang berinvestasi dalam riset dan pengembangan dapat menciptakan produk baru dan meningkatkan kualitas produksi. Keunggulan ini tidak selalu terkait dengan kelimpahan faktor tradisional. Pengetahuan dan kreativitas menjadi sumber utama pertumbuhan dalam ekonomi berbasis inovasi.

Perdagangan digital memperluas batasan tradisional dalam teori klasik. Produk digital dapat diperdagangkan tanpa biaya transportasi fisik, sehingga mengubah struktur biaya dan hambatan perdagangan. *Platform* digital memungkinkan perusahaan kecil untuk mengakses pasar global tanpa harus memiliki kehadiran fisik di luar negeri. Fenomena ini menantang asumsi klasik mengenai pentingnya lokasi geografis dalam perdagangan. Isu lingkungan dan keberlanjutan menambah kompleksitas dalam analisis perdagangan. Produksi yang efisien secara ekonomi tidak selalu mempertimbangkan dampak lingkungan. Negara dapat memperoleh keunggulan biaya dengan

mengabaikan standar lingkungan, yang menciptakan distorsi dalam perdagangan. Kebijakan internasional diperlukan untuk memastikan bahwa perdagangan tidak merusak keseimbangan ekologis.

Ketimpangan global menjadi isu penting yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh teori klasik. Perdagangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi manfaatnya tidak selalu merata. Negara dengan kapasitas produksi yang lebih rendah mungkin tertinggal dalam persaingan global. Perbedaan ini menimbulkan kebutuhan akan kebijakan yang mendukung inklusi ekonomi dan pembangunan yang lebih merata. Perkembangan institusi internasional memengaruhi cara perdagangan berlangsung. Organisasi seperti WTO menciptakan aturan yang mengatur interaksi antarnegara. Aturan ini memengaruhi tarif, subsidi, dan penyelesaian sengketa. Keberadaan institusi ini menunjukkan bahwa perdagangan tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi juga oleh kerangka hukum dan politik.

Perubahan struktur ekonomi global menunjukkan pergeseran dari produksi berbasis industri menuju ekonomi berbasis jasa dan pengetahuan. Transformasi ini memengaruhi relevansi teori klasik yang berfokus pada barang fisik. Analisis modern perlu memasukkan dimensi baru seperti layanan digital, data, dan inovasi sebagai faktor utama dalam perdagangan. Kritik terhadap teori klasik tidak menghilangkan nilai dasarnya, tetapi memperkaya pemahaman tentang perdagangan internasional. Teori klasik memberikan fondasi yang kuat mengenai pentingnya perbedaan biaya dan efisiensi. Pengembangan teori modern menambahkan elemen-elemen baru yang mencerminkan realitas ekonomi yang lebih kompleks. Integrasi berbagai pendekatan menghasilkan kerangka analisis yang lebih komprehensif untuk memahami dinamika perdagangan global.

F. Relevansi Teori Klasik dalam Ekonomi Modern

Meski memiliki keterbatasan, teori klasik tetap relevan. Costinot dan Donaldson (2016) secara empiris memvalidasi hukum keunggulan komparatif menggunakan data produktivitas pertanian lintas negara dan menunjukkan bahwa pola spesialisasi aktual sangat sesuai dengan prediksi Ricardo. Dalam konteks *Global Value Chain*, Koopman *et al.* (2014) menunjukkan bahwa keunggulan komparatif dalam tugas-tugas (tasks) tertentu adalah yang menentukan posisi negara dalam rantai nilai

global. Meskipun teori klasik perdagangan memiliki kekurangan, gagasan utamanya tetap terbukti relevan dalam menjelaskan pola perdagangan modern. Penelitian empiris menunjukkan bahwa negara cenderung berspesialisasi pada sektor di mana mereka memiliki keunggulan relatif, sesuai dengan prediksi teori keunggulan komparatif.

Perkembangan ekonomi global yang ditandai oleh rantai nilai global juga memperluas pemahaman ini, di mana keunggulan tidak lagi hanya dilihat dari kemampuan menghasilkan produk akhir, tetapi dari kemampuan menjalankan tahapan produksi tertentu secara lebih efisien. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip dasar teori klasik masih berlaku, meskipun bentuk penerapannya telah berkembang mengikuti perubahan struktur ekonomi dunia. Relevansi teori klasik dalam ekonomi modern tidak hanya bertahan sebagai warisan intelektual, melainkan terus berfungsi sebagai kerangka dasar untuk memahami dinamika perdagangan yang semakin kompleks. Prinsip efisiensi relatif yang diperkenalkan oleh Ricardo tetap menjadi fondasi analisis, meskipun bentuk manifestasinya telah mengalami transformasi seiring perubahan struktur ekonomi global. Keunggulan komparatif tidak lagi terbatas pada perbandingan sederhana antarbarang, melainkan berkembang menjadi analisis yang mencakup berbagai dimensi produksi, teknologi, dan organisasi ekonomi.

Pendekatan berbasis data dalam penelitian kontemporer memberikan validasi empiris terhadap prinsip dasar teori klasik. Studi yang memanfaatkan data produktivitas lintas negara menunjukkan bahwa pola spesialisasi masih mengikuti perbedaan efisiensi relatif. Negara dengan produktivitas lebih tinggi dalam sektor tertentu cenderung mengeksport produk tersebut, sementara mengimpor barang yang memiliki produktivitas relatif lebih rendah. Temuan ini memperkuat argumen bahwa mekanisme dasar perdagangan tetap berakar pada perbedaan biaya peluang.

Transformasi menuju rantai nilai global mengubah cara memahami spesialisasi. Produksi tidak lagi dipandang sebagai proses tunggal, tetapi sebagai rangkaian aktivitas yang terpisah secara geografis. Setiap tahap produksi ditempatkan di lokasi yang memiliki efisiensi tertinggi untuk aktivitas tersebut. Keunggulan komparatif menjadi lebih granular karena diterapkan pada tingkat tugas atau proses tertentu. Negara dapat unggul dalam desain, perakitan, logistik, atau pemasaran, tanpa harus menguasai seluruh proses produksi.

Fragmentasi produksi meningkatkan kompleksitas hubungan antarnegara. Interdependensi menjadi lebih tinggi karena setiap negara bergantung pada kontribusi negara lain dalam rantai nilai. Struktur ini menciptakan jaringan produksi yang saling terhubung, di mana gangguan pada satu bagian dapat memengaruhi keseluruhan sistem. Analisis keunggulan komparatif tetap relevan karena membantu menjelaskan mengapa aktivitas tertentu terkonsentrasi di lokasi tertentu.

Perkembangan teknologi digital memperluas ruang penerapan teori klasik. Layanan berbasis digital memungkinkan perdagangan jasa lintas negara tanpa hambatan geografis yang signifikan. Negara dengan keunggulan dalam sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi dapat mengekspor jasa seperti pengembangan perangkat lunak, analisis data, dan layanan keuangan. Struktur biaya peluang dalam sektor ini ditentukan oleh keterampilan dan inovasi, bukan hanya faktor fisik.

Perubahan struktur tenaga kerja menjadi faktor penting dalam menentukan keunggulan komparatif modern. Keterampilan, pendidikan, dan kemampuan adaptasi menjadi penentu utama produktivitas. Negara yang berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia dapat menciptakan keunggulan baru yang tidak bergantung pada sumber daya alam atau modal fisik. Transformasi ini menunjukkan bahwa keunggulan komparatif bersifat dinamis dan dapat dibentuk melalui kebijakan.

Peran institusi dalam ekonomi modern memperkuat atau melemahkan potensi keunggulan komparatif. Lingkungan regulasi yang mendukung inovasi dan investasi meningkatkan efisiensi produksi. Kepastian hukum dan stabilitas kebijakan menciptakan kepercayaan bagi pelaku ekonomi. Negara dengan institusi yang kuat cenderung lebih mampu memanfaatkan peluang perdagangan dan berpartisipasi dalam rantai nilai global.

Interaksi antara perdagangan dan investasi memperkaya pemahaman terhadap teori klasik. Perusahaan multinasional tidak hanya mengekspor barang, tetapi juga memindahkan aktivitas produksi ke berbagai negara. Keputusan lokasi produksi didasarkan pada perbandingan biaya dan akses pasar. Investasi langsung menjadi sarana untuk mengoptimalkan penggunaan faktor produksi secara global. Hubungan ini menunjukkan bahwa perdagangan dan investasi merupakan dua sisi dari proses yang sama.

Dinamika geopolitik memengaruhi penerapan prinsip keunggulan komparatif. Ketegangan antarnegara dapat mengubah pola

perdagangan melalui kebijakan proteksi atau pembatasan teknologi. Negara mungkin memilih untuk mengurangi ketergantungan pada mitra tertentu demi alasan keamanan ekonomi. Keputusan ini tidak selalu didasarkan pada efisiensi, tetapi pada pertimbangan strategis yang lebih luas.

Ketahanan rantai pasok menjadi isu penting dalam ekonomi global. Krisis kesehatan, konflik geopolitik, dan gangguan logistik menunjukkan kerentanan sistem produksi yang sangat terintegrasi. Negara dan perusahaan mulai mempertimbangkan diversifikasi lokasi produksi untuk mengurangi risiko. Pendekatan ini dapat mengubah pola spesialisasi yang sebelumnya didasarkan murni pada efisiensi biaya.

Perdagangan berbasis pengetahuan menyoroti pentingnya inovasi sebagai sumber keunggulan komparatif. Produk dengan kandungan teknologi tinggi memberikan nilai tambah yang lebih besar. Negara yang mampu mengembangkan kapasitas riset dan pengembangan memiliki peluang untuk mendominasi sektor ini. Pengetahuan menjadi faktor produksi yang semakin menentukan dalam ekonomi modern.

Isu keberlanjutan mengubah cara mengevaluasi keunggulan komparatif. Produksi yang efisien secara ekonomi perlu mempertimbangkan dampak lingkungan. Negara dengan kebijakan lingkungan yang ketat mungkin menghadapi biaya produksi lebih tinggi, tetapi juga memperoleh keuntungan dalam jangka panjang melalui inovasi hijau. Perdagangan internasional mulai dipengaruhi oleh standar lingkungan dan preferensi konsumen terhadap produk berkelanjutan.

Peran permintaan global dalam menentukan pola perdagangan semakin terlihat. Pertumbuhan kelas menengah di negara berkembang meningkatkan permintaan terhadap berbagai produk. Perubahan preferensi konsumen memengaruhi jenis barang yang diproduksi dan diperdagangkan. Negara perlu menyesuaikan strukturnya agar sesuai dengan dinamika permintaan global. Ketimpangan dalam distribusi manfaat perdagangan tetap menjadi tantangan. Keunggulan komparatif dapat meningkatkan efisiensi, tetapi tidak menjamin pemerataan hasil. Sektor tertentu mungkin berkembang pesat, sementara sektor lain mengalami penurunan. Kebijakan domestik diperlukan untuk memastikan bahwa manfaat perdagangan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Integrasi ekonomi regional memberikan konteks baru bagi penerapan teori klasik. Perjanjian perdagangan bebas mengurangi hambatan dan memperkuat hubungan antarnegara. Integrasi ini memungkinkan spesialisasi yang lebih dalam dan meningkatkan efisiensi produksi. Negara anggota dapat memanfaatkan pasar yang lebih besar untuk mengembangkan sektor unggulan. Perkembangan ekonomi digital menciptakan bentuk perdagangan baru yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh teori klasik. Data menjadi komoditas penting yang diperdagangkan lintas negara. *Platform* digital menghubungkan produsen dan konsumen secara langsung. Struktur ini mengurangi peran perantara dan mengubah cara nilai diciptakan dalam ekonomi global.

Perubahan iklim memengaruhi pola produksi dan perdagangan. Ketersediaan sumber daya alam dapat berubah akibat perubahan lingkungan. Negara perlu menyesuaikan strategi ekonominya untuk menghadapi kondisi ini. Keunggulan komparatif dapat bergeser seiring perubahan kondisi alam dan teknologi adaptasi. Keterkaitan antara perdagangan dan pembangunan ekonomi menunjukkan relevansi berkelanjutan teori klasik. Negara yang berhasil memanfaatkan keunggulan komparatif dapat meningkatkan pendapatan dan mempercepat pertumbuhan. Proses ini sering kali melibatkan transformasi struktural dari sektor tradisional menuju sektor modern. Perdagangan menjadi salah satu pendorong utama dalam proses tersebut. Pendekatan interdisipliner memperkaya analisis perdagangan internasional. Faktor sosial, politik, dan budaya memengaruhi keputusan ekonomi. Interaksi antara berbagai dimensi ini menciptakan dinamika yang kompleks. Teori klasik memberikan kerangka awal yang dapat dikembangkan dengan memasukkan variabel tambahan.

Pemahaman terhadap teori klasik tetap penting bagi analisis kebijakan ekonomi. Prinsip efisiensi dan spesialisasi memberikan panduan dalam merancang strategi perdagangan. Adaptasi terhadap kondisi modern memungkinkan penerapan yang lebih relevan. Integrasi antara teori klasik dan pendekatan kontemporer menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ekonomi internasional. Keberlanjutan relevansi teori klasik menunjukkan kekuatan konseptualnya. Prinsip dasar yang sederhana mampu menjelaskan fenomena yang kompleks ketika dikombinasikan dengan pendekatan modern. Evolusi ekonomi global tidak menghapus validitas teori tersebut, melainkan memperluas ruang aplikasinya. Pemahaman

mendalam terhadap konsep ini menjadi kunci dalam menganalisis perubahan yang terus berlangsung dalam sistem ekonomi dunia.



BAB III

TEORI PERDAGANGAN

INTERNASIONAL

MODERN

Revolusi intelektual dalam teori perdagangan internasional dimulai pada akhir 1970-an dan awal 1980-an ketika para ekonom seperti Paul Krugman, Elhanan Helpman, Avinash Dixit, dan Victor Norman menunjukkan bahwa perdagangan dapat terjadi dan menguntungkan bahkan di antara negara-negara yang identik, tanpa perbedaan teknologi maupun kelimpahan faktor. Inilah yang dikenal sebagai Teori Perdagangan Baru (*New Trade Theory*). Terjadi perubahan besar dalam cara memahami perdagangan internasional ketika para ekonom menemukan bahwa perdagangan tidak selalu bergantung pada perbedaan antarnegara seperti teknologi atau sumber daya. Teori Perdagangan Baru menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki kondisi serupa pun tetap dapat berdagang dan memperoleh keuntungan melalui mekanisme seperti skala ekonomi, diferensiasi produk, dan preferensi konsumen terhadap variasi. Pendekatan ini memperluas penjelasan sebelumnya yang hanya berfokus pada perbedaan, lalu menambahkan bahwa struktur pasar dan efisiensi produksi juga menjadi alasan penting terjadinya perdagangan antarnegara.

A. Teori Perdagangan Baru (*New Trade Theory*)

New Trade Theory

Teori Perdagangan Baru, dikembangkan oleh Krugman (1979, 1980) dan Helpman & Krugman (1985), menjelaskan perdagangan internasional berdasarkan dua fondasi: (1) *economies of scale* (biaya rata-rata menurun seiring peningkatan produksi, sehingga negara diuntungkan dari spesialisasi dan pasar yang lebih besar); dan (2) diferensiasi produk (konsumen menghargai variasi, sehingga impor memberikan akses ke varietas yang tidak diproduksi domestik).

Krugman (1979) menggunakan model *Dixit-Stiglitz* dengan preferensi CES (*Constant Elasticity of Substitution*) dan skala hasil meningkat untuk menunjukkan bahwa bahkan dua negara yang identik akan saling berdagang karena setiap negara dapat berspesialisasi pada varietas berbeda. Perdagangan ini meningkatkan kesejahteraan bukan melalui efisiensi alokasi, melainkan melalui akses ke varietas produk yang lebih banyak (*love of variety*) dan eksploitasi *economies of scale*.

Melitz (2003) membawa revolusi berikutnya dengan model *heterogeneous firms* yang menunjukkan bahwa hanya perusahaan dengan produktivitas di atas *threshold* tertentu yang mampu mengekspor. Liberalisasi perdagangan mendorong realokasi sumber daya dari perusahaan tidak produktif ke perusahaan produktif, menghasilkan *gains from trade* melalui seleksi perusahaan yang efisien. Perkembangan teori perdagangan modern menunjukkan sumber keuntungan perdagangan tidak hanya berasal dari perbedaan antarnegara, tetapi juga dari struktur pasar dan karakteristik perusahaan. Model Krugman menunjukkan bahwa negara yang identik pun tetap berdagang karena masing-masing memproduksi variasi produk yang berbeda, sehingga konsumen memperoleh lebih banyak pilihan dan perusahaan dapat memanfaatkan skala produksi yang lebih besar untuk menekan biaya.

Pendekatan Melitz menambahkan bahwa tidak semua perusahaan memiliki kemampuan yang sama untuk terlibat dalam perdagangan internasional, karena hanya perusahaan yang cukup produktif yang mampu menanggung biaya ekspor. Pembukaan perdagangan mendorong perpindahan sumber daya ke perusahaan yang

lebih efisien, sementara perusahaan yang kurang produktif tersisih, sehingga peningkatan kesejahteraan muncul dari proses seleksi dan penguatan pelaku ekonomi yang lebih kompetitif. Teori Perdagangan Baru menghadirkan perubahan mendasar dalam cara memahami sumber dan pola perdagangan internasional. Fokus analisis tidak lagi semata pada perbedaan antarnegara, melainkan pada struktur pasar, skala produksi, serta perilaku perusahaan dalam lingkungan persaingan tidak sempurna. Pendekatan ini memperluas cakupan teori perdagangan dengan memasukkan unsur yang sebelumnya diabaikan oleh teori klasik, seperti *increasing returns to scale* dan diferensiasi produk.

Economies of scale menjadi salah satu pilar utama dalam menjelaskan mengapa perdagangan dapat terjadi bahkan ketika negara memiliki karakteristik yang serupa. Produksi dalam skala besar memungkinkan perusahaan menurunkan biaya rata-rata, sehingga meningkatkan daya saing di pasar global. Ketika pasar domestik terbatas, perdagangan internasional membuka akses ke permintaan yang lebih luas, memungkinkan perusahaan mencapai skala produksi yang optimal. Mekanisme ini menciptakan insentif kuat bagi negara untuk terlibat dalam perdagangan, meskipun tidak terdapat perbedaan signifikan dalam faktor produksi.

Diferensiasi produk memberikan dimensi tambahan dalam analisis perdagangan. Konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga variasi dan karakteristik produk. Preferensi terhadap keberagaman menciptakan permintaan terhadap berbagai varietas barang yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi domestik saja. Perdagangan memungkinkan konsumen mengakses produk dengan desain, kualitas, dan fitur yang berbeda. Keberagaman ini meningkatkan utilitas konsumen karena pilihan yang lebih luas memberikan fleksibilitas dalam konsumsi.

Model *Dixit-Stiglitz* yang digunakan dalam kerangka ini menggambarkan bagaimana preferensi terhadap variasi dapat diintegrasikan dalam analisis ekonomi formal. Elastisitas substitusi yang konstan memungkinkan pengukuran sejauh mana konsumen bersedia mengganti satu varietas dengan varietas lain. Nilai elastisitas ini memengaruhi tingkat persaingan antarperusahaan dan jumlah varietas yang dapat bertahan di pasar. Struktur ini menunjukkan bahwa keseimbangan pasar ditentukan oleh interaksi antara skala produksi dan preferensi konsumen.

Perdagangan intra-industri menjadi fenomena yang dapat dijelaskan secara lebih memadai melalui pendekatan ini. Negara maju sering kali mengekspor dan mengimpor barang dalam kategori yang sama, seperti mobil atau elektronik. Pola ini tidak dapat dijelaskan oleh teori keunggulan komparatif tradisional yang menekankan perbedaan antarnegara. *New Trade Theory* menunjukkan bahwa perdagangan tersebut muncul dari spesialisasi pada varietas produk yang berbeda serta manfaat skala produksi.

Peran struktur pasar oligopolistik menjadi semakin penting dalam analisis perdagangan modern. Perusahaan besar dengan kapasitas produksi tinggi memiliki kemampuan untuk memanfaatkan skala ekonomi dan menguasai pangsa pasar internasional. Persaingan tidak sempurna memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan ekonomi yang tidak nol, yang kemudian dapat digunakan untuk investasi lebih lanjut dalam inovasi dan ekspansi. Struktur ini menciptakan dinamika persaingan yang berbeda dari asumsi pasar kompetitif sempurna.

Model Melitz memperkenalkan heterogenitas perusahaan sebagai faktor kunci dalam perdagangan internasional. Perusahaan tidak memiliki tingkat produktivitas yang sama, sehingga hanya sebagian yang mampu menanggung biaya tetap untuk memasuki pasar ekspor. Biaya tersebut mencakup adaptasi produk, pemasaran, serta kepatuhan terhadap regulasi di negara tujuan. Perusahaan dengan produktivitas rendah cenderung hanya melayani pasar domestik, sementara perusahaan dengan produktivitas tinggi menjadi pelaku utama dalam perdagangan internasional.

Liberalisasi perdagangan memicu proses seleksi yang signifikan dalam struktur industri. Perusahaan yang tidak efisien menghadapi tekanan kompetitif yang lebih besar dan berpotensi keluar dari pasar. Sumber daya yang sebelumnya digunakan oleh perusahaan tersebut dialihkan ke perusahaan yang lebih produktif. Proses ini meningkatkan efisiensi agregat dalam perekonomian karena output dihasilkan oleh pelaku yang memiliki kemampuan lebih tinggi. Realokasi sumber daya dalam kerangka Melitz menjelaskan bagaimana *gains from trade* tidak hanya berasal dari perbedaan antarnegara, tetapi juga dari dinamika internal industri. Produktivitas rata-rata meningkat karena komposisi perusahaan bergeser ke arah yang lebih efisien. Peningkatan ini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Interaksi antara *economies of scale* dan diferensiasi produk menciptakan keseimbangan yang unik dalam jumlah perusahaan dan varietas yang tersedia. Terlalu banyak perusahaan dapat mengurangi skala produksi masing-masing, sementara terlalu sedikit perusahaan dapat membatasi variasi produk. Keseimbangan ini ditentukan oleh ukuran pasar dan preferensi konsumen terhadap variasi. Perdagangan internasional memperluas ukuran pasar, sehingga memungkinkan lebih banyak varietas diproduksi tanpa mengorbankan efisiensi skala.

Peran kebijakan industri menjadi lebih relevan dalam kerangka ini. Pemerintah dapat memengaruhi struktur pasar melalui subsidi, perlindungan sementara, atau dukungan terhadap sektor tertentu. Kebijakan tersebut dapat membantu perusahaan domestik mencapai skala produksi yang kompetitif di pasar global. Pendekatan ini sering dikaitkan dengan argumen *strategic trade policy* yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam industri dengan karakteristik oligopolistik.

Strategic trade policy menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, intervensi pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan nasional dengan menggeser keuntungan dari perusahaan asing ke perusahaan domestik. Kebijakan seperti subsidi ekspor atau perlindungan pasar domestik dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan nasional dalam persaingan global. Efektivitas kebijakan ini bergantung pada struktur pasar dan respons negara lain, sehingga memerlukan analisis yang cermat. Integrasi antara *New Trade Theory* dan realitas global menunjukkan bahwa perdagangan modern tidak hanya ditentukan oleh keunggulan komparatif, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan untuk berinovasi dan bersaing dalam pasar yang kompleks. Perusahaan yang mampu mengembangkan produk unik dan memanfaatkan skala produksi memiliki peluang lebih besar untuk sukses di pasar internasional.

Perkembangan teknologi memperkuat relevansi teori ini. Inovasi dalam produksi dan distribusi memungkinkan perusahaan mengurangi biaya dan meningkatkan diferensiasi produk. Teknologi digital memungkinkan personalisasi produk dan memperluas jangkauan pasar. Perubahan ini meningkatkan pentingnya kemampuan adaptasi perusahaan dalam menghadapi persaingan global. Rantai nilai global memberikan konteks tambahan bagi penerapan *New Trade Theory*. Perusahaan multinasional mengorganisasi produksi secara internasional

untuk memanfaatkan keunggulan lokasi yang berbeda. Setiap tahap produksi ditempatkan di lokasi yang memberikan efisiensi terbaik. Struktur ini menciptakan hubungan kompleks antara skala produksi, diferensiasi produk, dan lokasi produksi.

Perdagangan jasa juga mengalami transformasi melalui prinsip yang serupa. Layanan seperti teknologi informasi, desain, dan konsultasi dapat diperdagangkan lintas negara dengan memanfaatkan skala dan diferensiasi. Perusahaan yang mampu menawarkan layanan unik dengan kualitas tinggi dapat bersaing di pasar global meskipun tidak memiliki keunggulan faktor tradisional. Preferensi konsumen yang terus berkembang mendorong peningkatan diferensiasi produk. Konsumen tidak hanya mencari harga rendah, tetapi juga kualitas, merek, dan pengalaman penggunaan. Perusahaan merespons dengan mengembangkan produk yang memiliki karakteristik unik. Proses ini meningkatkan kompleksitas pasar dan memperkuat relevansi pendekatan yang menekankan diferensiasi.

Distribusi manfaat perdagangan dalam kerangka ini menunjukkan variasi antarperusahaan dan pekerja. Perusahaan produktif memperoleh keuntungan lebih besar, sementara pekerja di perusahaan tersebut dapat menikmati upah yang lebih tinggi. Pekerja di perusahaan kurang produktif menghadapi risiko kehilangan pekerjaan akibat tekanan kompetitif. Dinamika ini menunjukkan bahwa perdagangan dapat menciptakan pemenang dan pihak yang dirugikan dalam jangka pendek. Kebijakan publik memiliki peran penting dalam mengelola dampak distribusi tersebut. Program pelatihan dan pendidikan dapat membantu pekerja beradaptasi dengan perubahan struktur industri. Dukungan terhadap inovasi dan kewirausahaan dapat mendorong munculnya perusahaan baru yang kompetitif. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa manfaat perdagangan dapat dirasakan secara lebih luas.

Peran kota dan klaster industri menjadi semakin penting dalam konteks *economies of scale*. Konsentrasi aktivitas ekonomi di lokasi tertentu memungkinkan berbagi sumber daya, pengetahuan, dan jaringan. Klaster industri menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan efisiensi. Fenomena ini memperkuat daya saing perusahaan dalam pasar global. Globalisasi mempercepat penyebaran ide dan teknologi yang mendukung diferensiasi produk. Perusahaan dapat mengakses pengetahuan dari berbagai sumber dan mengintegrasikannya

dalam proses produksi. Interaksi ini meningkatkan dinamika inovasi dan menciptakan peluang baru dalam perdagangan internasional.

Perubahan kebijakan perdagangan global memengaruhi penerapan teori ini. Penurunan tarif dan hambatan perdagangan memperluas akses pasar dan meningkatkan persaingan. Perusahaan perlu menyesuaikan strategi untuk mempertahankan posisi dalam lingkungan yang semakin kompetitif. Adaptasi ini mencakup peningkatan efisiensi, inovasi produk, dan ekspansi pasar. Ketahanan ekonomi menjadi isu penting dalam konteks struktur pasar yang terkonsentrasi. Ketergantungan pada sejumlah kecil perusahaan besar dapat menciptakan risiko sistemik. Gangguan pada perusahaan tersebut dapat berdampak luas pada perekonomian. Diversifikasi dan penguatan perusahaan kecil dan menengah menjadi strategi untuk mengurangi risiko tersebut.

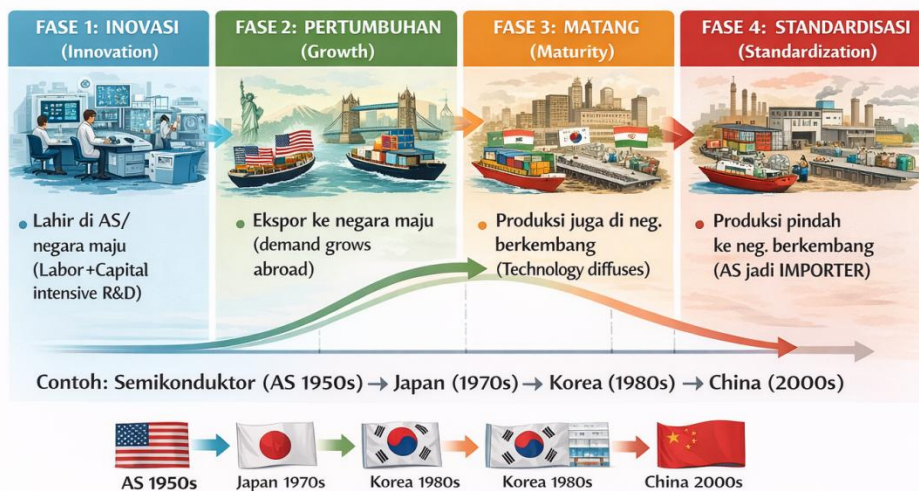
Evolusi teori perdagangan menunjukkan bahwa *New Trade Theory* tidak menggantikan teori klasik, melainkan melengkapinya. Keunggulan komparatif tetap relevan dalam menjelaskan perbedaan antarnegara, sementara *economies of scale* dan diferensiasi produk menjelaskan dinamika dalam pasar yang lebih kompleks. Kombinasi kedua pendekatan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perdagangan internasional. Pemahaman terhadap Teori Perdagangan Baru memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis fenomena perdagangan modern. Interaksi antara skala produksi, diferensiasi produk, dan heterogenitas perusahaan menciptakan kerangka analisis yang mampu menjelaskan berbagai pola perdagangan yang tidak dapat dijelaskan oleh teori sebelumnya. Pendekatan ini terus berkembang seiring perubahan struktur ekonomi global, menunjukkan fleksibilitas dan relevansinya dalam menghadapi tantangan ekonomi abad ke-21.

B. Teori Siklus Hidup Produk

Raymond Vernon (1966) mengembangkan teori siklus hidup produk (*Product Life Cycle*) yang menjelaskan bagaimana pola perdagangan suatu produk berubah seiring evolusi teknologi dan proses manufakturnya. Teori siklus hidup produk yang dikemukakan Raymond Vernon menggambarkan perubahan pola perdagangan suatu barang seiring perkembangan tahap produksinya dari awal hingga matang. Pada

tahap awal, produk biasanya dikembangkan dan diproduksi di negara maju yang memiliki kemampuan inovasi tinggi, lalu ketika teknologi mulai menyebar dan proses produksi menjadi lebih standar, produksi cenderung berpindah ke negara lain yang memiliki biaya lebih rendah. Perubahan ini menyebabkan arah ekspor dan impor juga ikut bergeser, karena negara yang semula menjadi eksportir dapat berubah menjadi Importir untuk produk yang sama. Teori ini menunjukkan bahwa keunggulan suatu negara dalam perdagangan tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah mengikuti dinamika teknologi dan efisiensi produksi.

Gambar 2. Model Siklus Hidup Produk Vernon



Sumber: Diadaptasi dari Vernon, R. (1966)

Gambar 2 menggambarkan tahapan perkembangan suatu produk dari awal kemunculannya hingga menjadi komoditas yang terstandarisasi, disertai perubahan lokasi produksi dan arah perdagangan internasional. Struktur ini dibagi menjadi empat fase: inovasi, pertumbuhan, matang, dan standardisasi. Setiap fase menunjukkan hubungan antara tingkat kemajuan teknologi, lokasi produksi, serta pola ekspor-impor.

Fase pertama adalah Inovasi (*Innovation*). Bagian ini menunjukkan bahwa produk lahir di Amerika Serikat atau negara maju lainnya. Kolom keterangan menegaskan bahwa proses produksi pada tahap ini bersifat intensif riset, menggabungkan tenaga kerja terampil dan modal dalam bentuk teknologi tinggi. Aktivitas penelitian dan

pengembangan menjadi kunci karena produk masih baru dan belum memiliki standar produksi yang mapan. Produksi dilakukan dekat dengan pusat inovasi untuk memudahkan pengujian, penyempurnaan desain, dan respons cepat terhadap perubahan. Perdagangan internasional belum dominan karena produk masih dalam tahap pengenalan dan pasar utamanya berada di dalam negeri atau negara maju yang memiliki daya beli tinggi.

Fase kedua adalah Pertumbuhan (*Growth*). Diagram menunjukkan bahwa produk mulai diekspor ke negara maju lainnya. Permintaan meningkat di luar negara asal karena konsumen di negara lain mulai mengenal dan membutuhkan produk tersebut. Produksi masih terpusat di negara inovator, namun skala produksi meningkat untuk memenuhi pasar internasional. Teknologi mulai lebih stabil dibanding fase awal, meskipun masih berkembang. Ekspor menjadi aktivitas utama karena negara asal memiliki keunggulan teknologi dan belum banyak pesaing yang mampu memproduksi barang serupa dengan kualitas yang sama.

Fase ketiga adalah Matang (*Maturity*). Bagian ini menunjukkan bahwa produksi tidak lagi terbatas di negara maju, tetapi mulai dilakukan juga di negara berkembang. Penyebaran teknologi terjadi karena proses produksi sudah lebih dipahami dan dapat direplikasi. Perusahaan mulai memindahkan sebagian fasilitas produksi ke negara dengan biaya tenaga kerja lebih rendah untuk meningkatkan efisiensi. Negara berkembang mulai berperan sebagai produsen sekaligus eksportir. Persaingan meningkat karena lebih banyak pelaku yang mampu memproduksi barang yang sama. Negara asal masih terlibat dalam produksi, tetapi tidak lagi menjadi satu-satunya pusat manufaktur.

Fase keempat adalah Standardisasi (*Standardization*). Diagram menunjukkan bahwa produksi berpindah secara dominan ke negara berkembang. Proses produksi telah menjadi rutin, teknologi telah tersebar luas, dan inovasi tidak lagi menjadi faktor pembeda utama. Efisiensi biaya menjadi pertimbangan utama, sehingga perusahaan memilih lokasi dengan biaya produksi paling rendah. Negara maju seperti Amerika Serikat beralih peran menjadi Importir untuk produk tersebut. Barang yang dahulu dikembangkan dan diproduksi di dalam negeri kini lebih murah diperoleh dari luar negeri. Perubahan ini mencerminkan pergeseran keunggulan dari inovasi menuju efisiensi biaya.

Contoh yang ditampilkan dalam diagram memperjelas alur tersebut, yaitu industri semikonduktor. Produksi awal dimulai di Amerika Serikat pada 1950-an, kemudian berpindah ke Jepang pada 1970-an, dilanjutkan ke Korea Selatan pada 1980-an, dan akhirnya ke China pada 2000-an. Perpindahan ini menunjukkan bagaimana lokasi produksi mengikuti perubahan struktur biaya dan penyebaran teknologi dari waktu ke waktu. Hubungan antar fase dalam tabel menunjukkan dinamika yang berurutan. Produk baru membutuhkan lingkungan inovatif, lalu berkembang melalui ekspansi pasar, kemudian mengalami difusi teknologi, dan akhirnya mencapai tahap efisiensi global. Pola perdagangan berubah seiring pergeseran tersebut. Negara yang awalnya menjadi eksportir dapat berubah menjadi Importir ketika produksi berpindah ke lokasi yang lebih efisien. Struktur tabel ini menekankan bahwa keunggulan dalam perdagangan bersifat dinamis. Posisi suatu negara dalam rantai produksi global dapat berubah tergantung pada tahap perkembangan produk. Faktor teknologi, biaya produksi, dan penyebaran pengetahuan menjadi penentu utama dalam setiap fase.

Teori Vernon relevan untuk memahami relokasi produksi manufaktur Global. Antras (2015) dalam kontemporer memperbarui argumen Vernon dengan menunjukkan bahwa fragmentasi produksi melalui *Global Value Chain* telah mengkomplikasi pola siklus hidup produk, karena berbagai tahap produksi produk yang sama dapat berlangsung secara simultan di berbagai negara. Gagasan Vernon tentang perpindahan produksi antarnegara masih berguna untuk memahami dinamika manufaktur global, tetapi realitas saat ini menjadi lebih kompleks karena proses produksi tidak lagi berpindah secara utuh dari satu negara ke negara lain. Perkembangan rantai nilai global membuat tahapan produksi suatu produk terpecah dan dapat dilakukan secara bersamaan di berbagai negara sesuai keunggulan masing-masing, seperti desain di satu negara, perakitan di negara lain, dan distribusi di tempat berbeda. Kondisi ini memperumit pola siklus hidup produk karena perubahan tidak lagi berlangsung secara linier, melainkan tersebar dan saling terhubung dalam jaringan produksi internasional yang lebih terintegrasi. Teori siklus hidup produk memberikan kerangka dinamis untuk memahami bagaimana inovasi, produksi, dan perdagangan saling berinteraksi sepanjang waktu. Pendekatan ini menempatkan teknologi sebagai penggerak utama perubahan, sekaligus menyoroti bahwa keunggulan suatu negara tidak bersifat permanen.

Evolusi produk menciptakan pergeseran lokasi produksi dan arah arus perdagangan, sehingga hubungan antarnegara terus berubah mengikuti tahap perkembangan industri.

Fase inovasi menggambarkan kondisi ketika ketidakpastian teknologi masih tinggi. Perusahaan membutuhkan kedekatan dengan pusat riset, tenaga kerja terampil, serta pasar yang mampu menyerap produk baru meskipun harganya relatif tinggi. Lingkungan ini umumnya ditemukan di negara maju yang memiliki ekosistem inovasi yang kuat. Produksi dalam tahap ini bersifat fleksibel karena desain produk masih sering mengalami perubahan. Skala produksi belum besar, sehingga biaya per unit relatif tinggi.

Fase pertumbuhan ditandai oleh peningkatan permintaan yang signifikan. Produk mulai diterima secara luas oleh konsumen, baik di pasar domestik maupun internasional. Perusahaan meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan tersebut. Standarisasi mulai berkembang, meskipun inovasi masih berlangsung untuk menyempurnakan produk. Ekspor meningkat karena negara lain belum mampu memproduksi barang yang sama dengan kualitas setara. Fase matang menunjukkan perubahan penting dalam struktur produksi. Teknologi telah menjadi lebih stabil dan mudah direplikasi. Perusahaan mulai memindahkan sebagian produksi ke negara dengan biaya lebih rendah untuk meningkatkan efisiensi. Kompetisi meningkat karena lebih banyak produsen yang memasuki pasar. Harga cenderung menurun akibat persaingan dan peningkatan skala produksi. Peran negara berkembang mulai meningkat sebagai lokasi produksi utama.

Fase standarisasi mencerminkan kondisi ketika produk telah menjadi komoditas yang umum. Diferensiasi produk berkurang karena teknologi telah tersebar luas. Keputusan produksi didasarkan pada efisiensi biaya, terutama biaya tenaga kerja dan logistik. Negara dengan biaya produksi rendah menjadi pusat manufaktur. Negara inovator awal beralih menjadi konsumen yang mengimpor produk tersebut karena produksi domestik tidak lagi kompetitif. Perubahan antar fase menunjukkan bahwa pola perdagangan tidak statis. Negara yang memimpin inovasi pada awalnya menikmati posisi sebagai eksportir utama. Posisi ini dapat berubah ketika produksi berpindah ke negara lain yang menawarkan biaya lebih rendah. Pergeseran ini mencerminkan dinamika keunggulan yang bergantung pada tahap perkembangan produk.

Interaksi antara teknologi dan biaya produksi menjadi kunci dalam menjelaskan perpindahan lokasi produksi. Teknologi baru biasanya membutuhkan keterampilan tinggi dan infrastruktur canggih. Seiring waktu, proses produksi menjadi lebih sederhana dan dapat dilakukan dengan tenaga kerja yang lebih murah. Perubahan ini menciptakan insentif bagi perusahaan untuk merelokasi produksi ke negara yang menawarkan efisiensi biaya. Peran perusahaan multinasional sangat penting dalam proses ini. Perusahaan mengelola jaringan produksi global untuk mengoptimalkan setiap tahap siklus hidup produk. Keputusan lokasi produksi didasarkan pada kombinasi faktor seperti biaya, akses pasar, dan stabilitas kebijakan. Jaringan ini memungkinkan perusahaan memanfaatkan keunggulan masing-masing negara pada tahap yang berbeda.

Difusi teknologi mempercepat pergeseran dalam siklus hidup produk. Pengetahuan produksi menyebar melalui investasi asing, transfer teknologi, dan mobilitas tenaga kerja. Negara yang mampu menyerap teknologi dengan cepat dapat mempercepat transisi ke tahap produksi yang lebih maju. Kemampuan ini menjadi faktor penting dalam menentukan posisi dalam perdagangan internasional. Keterkaitan antara teori siklus hidup produk dan rantai nilai global menunjukkan bahwa proses produksi tidak selalu berpindah secara utuh. Tahap desain, produksi komponen, perakitan, dan distribusi dapat berada di lokasi yang berbeda secara simultan. Fragmentasi ini menciptakan struktur produksi yang lebih kompleks dibandingkan pola linier yang digambarkan dalam model awal.

Perdagangan intra-industri dapat dijelaskan melalui interaksi antara siklus hidup produk dan diferensiasi produk. Negara dapat mengeksport dan mengimpor barang dalam kategori yang sama karena berada pada tahap produksi yang berbeda atau menghasilkan varietas yang berbeda. Pola ini mencerminkan kompleksitas perdagangan modern yang tidak hanya didasarkan pada perbedaan faktor produksi. Perubahan preferensi konsumen juga memengaruhi siklus hidup produk. Permintaan terhadap inovasi mendorong perusahaan untuk terus mengembangkan produk baru. Produk lama yang telah mencapai tahap standardisasi menghadapi tekanan untuk berinovasi kembali atau digantikan oleh teknologi baru. Siklus ini menciptakan dinamika berkelanjutan dalam perdagangan internasional.

Peran kebijakan pemerintah dalam setiap fase memiliki implikasi yang berbeda. Dukungan terhadap riset dan pengembangan penting pada tahap inovasi. Kebijakan perdagangan dan investasi memengaruhi ekspansi pada tahap pertumbuhan. Regulasi tenaga kerja dan infrastruktur menjadi faktor penting pada tahap matang dan standardisasi. Koordinasi kebijakan yang tepat dapat memperkuat posisi suatu negara dalam siklus tersebut. Keunggulan kompetitif dalam kerangka ini bersifat dinamis dan dapat dibentuk melalui strategi jangka panjang. Negara yang mampu mengembangkan kapasitas inovasi dapat mempertahankan posisi pada tahap awal siklus. Negara yang fokus pada efisiensi produksi dapat menjadi pusat manufaktur pada tahap akhir. Perbedaan strategi ini menciptakan pola perdagangan yang beragam.

Perkembangan teknologi digital mengubah karakteristik siklus hidup produk. Produk digital memiliki biaya reproduksi yang sangat rendah dan dapat didistribusikan secara instan. Tahap standardisasi dapat terjadi lebih cepat karena penyebaran teknologi yang cepat. Perubahan ini menantang asumsi tradisional mengenai durasi setiap fase dalam siklus. Globalisasi mempercepat transisi antar fase melalui integrasi pasar dan teknologi. Perusahaan dapat dengan cepat memindahkan produksi dan menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi Global. Kecepatan ini meningkatkan kompetisi dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tahap matang atau standardisasi.

Ketahanan rantai pasok menjadi pertimbangan penting dalam menentukan lokasi produksi. Gangguan global dapat memengaruhi keputusan relokasi produksi. Perusahaan mulai mempertimbangkan diversifikasi lokasi untuk mengurangi risiko. Pendekatan ini dapat memperlambat atau mengubah pola siklus hidup produk. Isu keberlanjutan memberikan dimensi baru dalam analisis siklus hidup produk. Produksi yang efisien secara biaya perlu mempertimbangkan dampak lingkungan. Regulasi lingkungan dapat memengaruhi lokasi produksi dan biaya. Negara dengan standar lingkungan tinggi dapat mendorong inovasi teknologi yang lebih bersih.

Keterkaitan antara siklus hidup produk dan pembangunan ekonomi menunjukkan peluang bagi negara berkembang. Tahap matang dan standardisasi memberikan kesempatan untuk menarik investasi dan meningkatkan kapasitas produksi. Proses ini dapat menjadi langkah awal menuju industrialisasi dan peningkatan pendapatan. Transformasi struktural dalam perekonomian sering kali mengikuti pola siklus hidup

produk. Sektor baru muncul melalui inovasi, berkembang melalui ekspansi, dan akhirnya mengalami standardisasi. Perubahan ini menciptakan pergeseran tenaga kerja dan sumber daya antar sektor. Adaptasi terhadap perubahan ini menjadi kunci keberhasilan ekonomi.

Analisis empiris menunjukkan variasi dalam penerapan teori ini di berbagai industri. Produk dengan siklus teknologi cepat mengalami transisi yang lebih singkat antar fase. Produk dengan kompleksitas tinggi dapat mempertahankan produksi di negara maju lebih lama. Perbedaan ini menunjukkan bahwa karakteristik industri memengaruhi dinamika siklus hidup produk. Integrasi antara teori siklus hidup produk dan pendekatan modern memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Keunggulan komparatif, *economies of scale*, dan diferensiasi produk dapat dihubungkan dengan perubahan tahap produksi. Kombinasi ini membantu menjelaskan pola perdagangan yang kompleks dalam ekonomi global.

Pemahaman mendalam terhadap teori ini memberikan dasar untuk analisis kebijakan dan strategi bisnis. Perusahaan dapat menentukan lokasi produksi dan strategi ekspansi berdasarkan tahap produk. Pemerintah dapat merancang kebijakan untuk menarik investasi pada tahap tertentu. Pendekatan ini meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi global. Evolusi teori siklus hidup produk menunjukkan fleksibilitasnya dalam menghadapi perubahan zaman. Prinsip dasar mengenai hubungan antara inovasi, produksi, dan perdagangan tetap relevan. Penyesuaian terhadap realitas modern memperluas cakupan analisis dan meningkatkan akurasi dalam menjelaskan dinamika perdagangan internasional.

C. Teori Keunggulan Kompetitif (Michael Porter)

Michael Porter dalam *The Competitive Advantage of Nations* (1990) mengajukan kerangka *Diamond Model* untuk menjelaskan mengapa industri tertentu di negara tertentu mencapai kesuksesan kompetitif internasional yang berkelanjutan. Michael Porter mengembangkan kerangka *Diamond Model* untuk memahami alasan suatu negara dapat unggul secara berkelanjutan dalam industri tertentu di tingkat global. Keunggulan ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh interaksi berbagai faktor seperti kondisi permintaan domestik yang menuntut, kualitas dan

kesiapan faktor produksi, keberadaan industri pendukung yang kuat, serta tingkat persaingan dalam negeri yang mendorong inovasi. Kombinasi faktor-faktor tersebut menciptakan lingkungan yang memacu perusahaan untuk terus meningkatkan daya saing, sehingga mampu bertahan dan unggul dalam persaingan internasional.

Gambar 3. Model Berlian Keunggulan Kompetitif Porter



Sumber: Porter, M.E. (1990). Diperbarui dalam Porter, M.E. & Rivkin, J. (2012).

Gambar 3 menampilkan Model Berlian Porter (*Porter's Diamond Model*) yang menjelaskan sumber keunggulan kompetitif suatu negara melalui interaksi empat komponen utama. Struktur berbentuk berlian menunjukkan bahwa keunggulan kompetitif nasional tidak muncul dari satu faktor tunggal, melainkan dari keterkaitan yang saling memperkuat antar elemen. Bagian atas berlian adalah "Kondisi Faktor". Elemen ini mencakup kualitas tenaga kerja, infrastruktur, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan pada tabel menekankan bahwa bukan sekadar jumlah faktor produksi yang penting, melainkan kualitas dan spesialisasinya. Tenaga kerja terampil, sistem pendidikan yang kuat, jaringan transportasi yang efisien, serta kapasitas riset yang tinggi akan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan produk bernilai tambah. Negara yang mampu mengembangkan faktor produksi tingkat lanjut akan lebih mudah bersaing dalam industri berbasis teknologi dan inovasi.

Bagian kiri adalah “Kondisi Permintaan”. Komponen ini merujuk pada karakteristik pasar domestik, termasuk ukuran pasar dan tingkat sofistikasi konsumen. Konsumen yang menuntut kualitas tinggi akan mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan standar produk. Permintaan domestik yang kompleks menciptakan tekanan kompetitif yang membuat perusahaan lebih siap menghadapi pasar global. Perusahaan yang terbiasa melayani pasar dalam negeri yang kritis cenderung memiliki keunggulan saat memasuki pasar internasional.

Bagian kanan adalah “Industri Terkait dan Pendukung”. Elemen ini mencakup keberadaan pemasok (*supplier*), jaringan industri, serta klaster ekonomi. Ketersediaan industri pendukung yang kuat memungkinkan efisiensi produksi dan percepatan inovasi. Hubungan yang erat antar perusahaan dalam satu klaster mempermudah aliran informasi, teknologi, dan keahlian. Kolaborasi antar sektor menciptakan ekosistem industri yang saling mendukung, sehingga meningkatkan daya saing kolektif. Bagian bawah adalah “Strategi dan Persaingan Perusahaan”. Elemen ini menyoroti bagaimana perusahaan dibentuk, dikelola, dan bersaing di dalam negeri. Intensitas persaingan domestik menjadi pendorong utama peningkatan kualitas dan efisiensi. Persaingan yang ketat memaksa perusahaan untuk terus memperbaiki strategi, meningkatkan produktivitas, dan mengembangkan inovasi. Orientasi manajemen yang adaptif dan visioner juga berperan dalam menentukan keberhasilan perusahaan di pasar global.

Bagian tengah berlian menunjukkan “Keunggulan Kompetitif Nasional” sebagai hasil dari interaksi keempat komponen tersebut. Hubungan antar elemen bersifat dua arah, yang berarti perubahan pada satu faktor dapat memengaruhi faktor lain. Kondisi permintaan yang kuat dapat mendorong peningkatan kualitas faktor produksi, sementara keberadaan industri pendukung dapat memperkuat strategi perusahaan. Arah panah dalam diagram menandakan keterkaitan yang dinamis. Kondisi faktor memengaruhi kemampuan perusahaan dalam merespons permintaan domestik. Permintaan domestik yang tinggi mendorong perkembangan industri pendukung. Industri pendukung yang kuat memperkuat strategi perusahaan dan meningkatkan intensitas persaingan. Persaingan yang ketat kemudian memacu inovasi yang kembali meningkatkan kualitas faktor produksi.

Struktur tabel ini menunjukkan bahwa keunggulan kompetitif tidak bersifat statis. Lingkungan domestik yang kondusif akan menciptakan siklus peningkatan daya saing yang berkelanjutan. Negara yang mampu menjaga keseimbangan dan interaksi positif antar elemen dalam berlian akan memiliki peluang lebih besar untuk unggul dalam industri tertentu di tingkat internasional. Porter berargumen bahwa keunggulan nasional tidak sekadar berbasis faktor *endowment statis* (seperti H-O), melainkan diciptakan secara dinamis melalui investasi, inovasi, dan kompetisi. Klaster industri seperti Silicon Valley untuk teknologi, atau klaster otomotif Jerman adalah bukti nyata bagaimana kondisi lokal yang sesuai dapat menghasilkan keunggulan kompetitif global yang berkelanjutan. Menurut Porter, keunggulan suatu negara tidak hanya bergantung pada sumber daya alam atau faktor produksi yang sudah tersedia, tetapi dibentuk melalui proses yang terus berkembang seperti investasi, inovasi, dan persaingan yang intens. Lingkungan yang mendorong perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas akan menciptakan daya saing yang lebih kuat di pasar global.

Keberadaan klaster industri menunjukkan bagaimana konsentrasi perusahaan, tenaga kerja terampil, lembaga pendukung, dan jaringan pengetahuan dalam satu wilayah dapat saling memperkuat dan menghasilkan keunggulan yang sulit ditiru oleh negara lain. Pendekatan Porter membawa pergeseran penting dari penjelasan berbasis faktor statis menuju pemahaman yang menekankan proses penciptaan keunggulan melalui interaksi dinamis antar elemen ekonomi. Kerangka berlian tidak hanya menjelaskan posisi suatu negara dalam perdagangan, tetapi juga memberikan gambaran bagaimana keunggulan tersebut dibangun, diperkuat, dan dipertahankan dalam jangka panjang. Fokus utama terletak pada kualitas lingkungan domestik yang membentuk perilaku perusahaan serta kemampuan inovasi.

Kondisi faktor dalam kerangka Porter tidak dipahami sebagai sesuatu yang diberikan secara alami, melainkan sebagai hasil investasi jangka panjang. Tenaga kerja terampil, infrastruktur modern, serta kapasitas riset merupakan faktor tingkat lanjut yang memerlukan pembentukan melalui pendidikan, pelatihan, dan kebijakan publik. Negara yang mampu menciptakan faktor produksi tingkat lanjut memiliki keunggulan yang lebih berkelanjutan dibandingkan negara yang hanya mengandalkan sumber daya alam. Proses pembentukan ini

sering kali melibatkan kerja sama antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta.

Peran kondisi permintaan domestik memberikan tekanan yang unik bagi perusahaan. Pasar domestik yang menuntut kualitas tinggi dan inovasi mendorong perusahaan untuk meningkatkan standar produk sejak awal. Konsumen yang kritis berfungsi sebagai mekanisme seleksi yang memaksa perusahaan beradaptasi dan berkembang. Perusahaan yang berhasil memenuhi tuntutan tersebut cenderung memiliki kesiapan lebih baik untuk bersaing di pasar internasional. Pola ini terlihat pada industri yang berkembang di negara dengan konsumen yang memiliki preferensi kompleks dan ekspektasi tinggi.

Industri terkait dan pendukung menciptakan jaringan yang memperkuat efisiensi dan inovasi. Keberadaan pemasok berkualitas tinggi memungkinkan perusahaan memperoleh input yang lebih baik dengan biaya yang kompetitif. Interaksi antar perusahaan dalam satu ekosistem industri mempercepat penyebaran pengetahuan dan teknologi. Kluster industri menjadi bentuk konkret dari interaksi ini, di mana perusahaan, lembaga penelitian, dan institusi pendukung berkumpul dalam satu wilayah geografis. Kedekatan fisik mempermudah koordinasi dan mempercepat proses inovasi.

Strategi dan persaingan perusahaan dalam lingkungan domestik menjadi pendorong utama peningkatan daya saing. Intensitas kompetisi memaksa perusahaan untuk terus meningkatkan efisiensi dan kualitas. Lingkungan yang kompetitif tidak hanya menghasilkan perusahaan yang kuat, tetapi juga menciptakan budaya inovasi. Perusahaan belajar untuk merespons tekanan pasar dengan mengembangkan strategi yang adaptif dan berorientasi jangka panjang. Struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan juga memengaruhi kemampuan dalam bersaing secara global.

Interaksi antar komponen dalam model berlian menciptakan efek penguatan yang saling terkait. Kondisi faktor yang baik meningkatkan kemampuan perusahaan untuk merespons permintaan domestik. Permintaan yang menuntut mendorong perkembangan industri pendukung. Industri pendukung yang kuat memperkuat strategi perusahaan dan meningkatkan intensitas persaingan. Siklus ini menciptakan dinamika yang terus mendorong peningkatan keunggulan kompetitif.

Peran pemerintah dalam kerangka Porter bersifat sebagai fasilitator dan katalis. Kebijakan publik dapat memperkuat setiap komponen dalam berlian melalui investasi dalam pendidikan, infrastruktur, dan riset. Regulasi yang mendorong persaingan sehat juga berperan dalam meningkatkan efisiensi dan inovasi. Intervensi yang tepat dapat mempercepat pembentukan keunggulan kompetitif, sementara kebijakan yang tidak tepat dapat menghambat perkembangan industri.

Faktor peluang juga memiliki peran dalam membentuk keunggulan kompetitif. Perubahan teknologi, krisis ekonomi, atau pergeseran geopolitik dapat menciptakan peluang baru bagi negara tertentu. Kemampuan untuk merespons perubahan ini menentukan apakah suatu negara dapat memanfaatkan peluang tersebut. Adaptasi yang cepat menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian global. Perbandingan dengan teori Heckscher-Ohlin menunjukkan perbedaan pendekatan yang signifikan. Model H-O menekankan perbedaan *endowment* faktor sebagai penentu perdagangan. Pendekatan Porter menyoroti bahwa keunggulan dapat diciptakan melalui investasi dan inovasi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi domestik dan kebijakan memainkan peran yang lebih besar dalam menentukan daya saing dibandingkan faktor yang bersifat alami.

Integrasi dengan *New Trade Theory* memperkaya pemahaman mengenai keunggulan kompetitif. *Economies of scale* dan diferensiasi produk dapat berkembang dalam lingkungan yang didukung oleh elemen-elemen dalam berlian Porter. Perusahaan yang beroperasi dalam klaster industri memiliki akses terhadap sumber daya dan jaringan yang memungkinkan mereka memanfaatkan skala produksi dan mengembangkan produk yang unik. Interaksi ini menciptakan sinergi antara teori modern dan kerangka Porter.

Perkembangan teknologi digital memberikan dimensi baru dalam penerapan model berlian. Infrastruktur digital menjadi bagian penting dari kondisi faktor. Permintaan domestik terhadap layanan digital mendorong inovasi dalam sektor teknologi. Industri pendukung seperti startup teknologi dan penyedia layanan digital membentuk ekosistem yang dinamis. Persaingan dalam sektor ini berlangsung cepat dan mendorong inovasi berkelanjutan. Klaster industri modern tidak selalu terbatas pada lokasi geografis yang sempit. Jaringan digital memungkinkan kolaborasi lintas wilayah, meskipun kedekatan fisik

tetap memberikan keuntungan dalam pertukaran pengetahuan tacit. Kombinasi antara kedekatan geografis dan konektivitas digital menciptakan bentuk klaster yang lebih fleksibel. Struktur ini memperluas peluang bagi negara untuk mengembangkan keunggulan kompetitif.

Peran sumber daya manusia menjadi semakin penting dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Kualitas pendidikan dan kemampuan inovasi menentukan posisi suatu negara dalam industri global. Investasi dalam pendidikan tinggi dan pelatihan teknis menjadi faktor kunci dalam membangun keunggulan kompetitif. Negara yang mampu mengembangkan talenta berkualitas tinggi memiliki peluang lebih besar untuk memimpin dalam industri berbasis teknologi. Keterkaitan antara model berlian dan rantai nilai global menunjukkan bahwa keunggulan kompetitif dapat muncul pada berbagai tahap produksi. Negara tidak harus menguasai seluruh rantai produksi untuk menjadi kompetitif. Spesialisasi pada tahap tertentu yang memiliki nilai tambah tinggi dapat memberikan keuntungan signifikan. Strategi ini memungkinkan negara berkembang untuk masuk ke dalam jaringan produksi Global dan meningkatkan posisi mereka secara bertahap.

Perubahan lingkungan global memengaruhi dinamika keunggulan kompetitif. Ketegangan perdagangan, perubahan kebijakan, dan perkembangan teknologi menciptakan tantangan baru bagi perusahaan. Lingkungan domestik yang adaptif memungkinkan perusahaan merespons perubahan tersebut dengan lebih efektif. Fleksibilitas menjadi elemen penting dalam mempertahankan daya saing. Isu keberlanjutan juga memengaruhi struktur keunggulan kompetitif. Konsumen semakin memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam keputusan pembelian. Perusahaan yang mampu memenuhi standar keberlanjutan memiliki keunggulan dalam pasar global. Kebijakan domestik yang mendukung praktik berkelanjutan dapat memperkuat posisi negara dalam industri tertentu.

Distribusi manfaat dari keunggulan kompetitif menunjukkan variasi antar sektor dan kelompok masyarakat. Industri yang kompetitif secara global dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Dampak ini tidak selalu merata, sehingga kebijakan domestik diperlukan untuk memastikan pemerataan manfaat. Pendekatan ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Peran inovasi menjadi inti dalam mempertahankan keunggulan

kompetitif. Perusahaan perlu terus mengembangkan produk dan proses baru untuk menghadapi persaingan global. Lingkungan yang mendukung riset dan pengembangan mempercepat proses inovasi. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem inovasi.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan dalam membangun keunggulan kompetitif memerlukan strategi jangka panjang. Investasi dalam pendidikan, infrastruktur, dan teknologi membutuhkan waktu untuk menghasilkan hasil yang signifikan. Konsistensi kebijakan menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan proses ini.

Analisis empiris menunjukkan bahwa negara dengan kluster industri yang kuat cenderung memiliki kinerja ekspor yang lebih baik. Konsentrasi aktivitas ekonomi menciptakan efisiensi dan meningkatkan kemampuan inovasi. Pola ini terlihat pada berbagai industri seperti teknologi, otomotif, dan manufaktur maju. Keberhasilan kluster menunjukkan pentingnya interaksi antar elemen dalam berlian Porter. Integrasi antara model berlian dan pendekatan ekonomi internasional lainnya memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif. Keunggulan komparatif menjelaskan dasar perdagangan, sementara model Porter menjelaskan bagaimana keunggulan tersebut dapat dikembangkan dan diperkuat. Kombinasi ini membantu memahami dinamika perdagangan dalam ekonomi global yang kompleks.

Pemahaman terhadap teori keunggulan kompetitif memberikan dasar bagi perumusan kebijakan dan strategi bisnis. Perusahaan dapat mengidentifikasi faktor yang mendukung daya saing dan mengembangkan strategi yang sesuai. Pemerintah dapat merancang kebijakan untuk memperkuat elemen dalam berlian. Pendekatan ini meningkatkan kemampuan negara dalam bersaing di pasar global. Evolusi konsep keunggulan kompetitif menunjukkan bahwa daya saing tidak hanya bergantung pada sumber daya yang dimiliki, tetapi juga pada kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya tersebut secara efektif. Lingkungan yang mendorong inovasi, persaingan, dan kolaborasi menjadi kunci dalam menciptakan keunggulan yang berkelanjutan.

D. Peran Inovasi dan Teknologi dalam Perdagangan

Perkembangan literatur terkini semakin menegaskan peran sentral inovasi dan teknologi sebagai penentu keunggulan kompetitif dalam perdagangan. Helpman, Itskhoki, dan Redding (2023) menunjukkan bahwa investasi dalam R&D dan adopsi teknologi secara langsung meningkatkan probabilitas perusahaan untuk mengekspor dan ukuran ekspor mereka. Dalam perkembangan terbaru kajian ekonomi internasional, inovasi dan teknologi dipandang sebagai faktor utama yang menentukan kemampuan suatu perusahaan atau negara untuk bersaing di pasar global. Perusahaan yang активно berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan serta cepat mengadopsi teknologi baru cenderung memiliki produktivitas lebih tinggi, kualitas produk yang lebih baik, dan biaya yang lebih efisien. Kondisi ini meningkatkan peluang mereka untuk memasuki pasar ekspor sekaligus memperbesar volume penjualan ke luar negeri. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keunggulan dalam perdagangan tidak lagi hanya bergantung pada sumber daya tradisional, tetapi semakin ditentukan oleh kemampuan menciptakan dan memanfaatkan pengetahuan serta teknologi.

Tabel 3.1 Hubungan Inovasi dan Kinerja Ekspor

Dimensi Inovasi	Mekanisme Transmisi ke Ekspor	Bukti Empiris Kunci
R&D <i>Investment</i>	Produk baru, kualitas lebih tinggi	Griffith <i>et al.</i> (2016): R&D meningkat ekspor 15-20%
Adopsi teknologi Digital	Pengurangan biaya transaksi ekspor	OECD (2022): <i>e-commerce</i> potong biaya ekspor 26%
Paten & IP	Diferensiasi produk, <i>pricing power</i>	Blind <i>et al.</i> (2023): Paten tingkatkan ekspor 30%
Kualitas tenaga kerja	Produktivitas & kompleksitas produk	Hausmann & Hidalgo (2014): ECI & pertumbuhan

Tabel 3.1 menampilkan hubungan antara berbagai dimensi inovasi dengan kinerja ekspor melalui tiga kolom utama, yaitu “Dimensi Inovasi”, “Mekanisme Transmisi ke Ekspor”, dan “Bukti Empiris Kunci”. Setiap baris menjelaskan bagaimana satu aspek inovasi memengaruhi kemampuan perusahaan atau negara dalam meningkatkan ekspor. Baris pertama adalah “R&D *Investment*”. Dimensi ini merujuk pada investasi dalam penelitian dan pengembangan. Kolom mekanisme menunjukkan bahwa aktivitas R&D menghasilkan produk baru serta peningkatan kualitas barang yang sudah ada. Inovasi produk membuat perusahaan memiliki keunggulan diferensiasi yang sulit ditiru pesaing, sehingga lebih menarik di pasar internasional. Kolom bukti empiris mencatat temuan Griffith *et al.* (2016) yang menunjukkan bahwa peningkatan investasi R&D berkorelasi dengan kenaikan ekspor sekitar 15–20 persen. Angka ini menggambarkan bahwa inovasi berbasis riset memiliki dampak langsung terhadap daya saing Global.

Baris kedua adalah “Adopsi teknologi Digital”. Dimensi ini mencakup penggunaan *platform* digital, *e-commerce*, sistem manajemen berbasis teknologi, serta digitalisasi rantai pasok. Kolom mekanisme menjelaskan bahwa teknologi digital menurunkan biaya transaksi ekspor, termasuk biaya pencarian pasar, komunikasi, logistik, dan distribusi. Proses ekspor menjadi lebih cepat dan efisien karena banyak tahapan dapat dilakukan secara daring. Kolom bukti empiris menunjukkan laporan OECD (2022) yang menemukan bahwa penggunaan *e-commerce* mampu mengurangi biaya ekspor hingga 26 persen. Penurunan biaya ini memperluas akses perusahaan, terutama usaha kecil dan menengah, ke pasar internasional.

Baris ketiga adalah “*Paten & Intellectual Property (IP)*”. Dimensi ini berkaitan dengan perlindungan atas hasil inovasi melalui hak kekayaan intelektual. Kolom mekanisme menunjukkan bahwa kepemilikan paten memungkinkan diferensiasi produk dan memberikan kekuatan dalam penetapan harga (*pricing power*). Produk yang dilindungi paten cenderung memiliki karakteristik unik yang tidak mudah ditiru, sehingga perusahaan dapat menjual dengan harga lebih tinggi di pasar global. Kolom bukti empiris mencatat penelitian Blind *et al.* (2023) yang menunjukkan bahwa kepemilikan paten dapat meningkatkan ekspor hingga 30 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa perlindungan inovasi berkontribusi signifikan terhadap performa perdagangan.

Baris keempat adalah “Kualitas tenaga kerja”. Dimensi ini merujuk pada tingkat pendidikan, keterampilan, dan kemampuan adaptasi tenaga kerja terhadap teknologi. Kolom mekanisme menjelaskan bahwa tenaga kerja berkualitas tinggi meningkatkan produktivitas serta memungkinkan produksi barang dengan tingkat kompleksitas lebih tinggi. Produk yang kompleks biasanya memiliki nilai tambah besar dan lebih kompetitif di pasar internasional. Kolom bukti empiris merujuk pada Hausmann dan Hidalgo (2014) yang mengaitkan *Economic Complexity Index* (ECI) dengan pertumbuhan ekonomi dan ekspor. Negara dengan tenaga kerja yang mampu menghasilkan produk kompleks cenderung memiliki kinerja ekspor yang lebih kuat. Hubungan antar kolom dalam tabel menunjukkan pola yang konsisten. Setiap dimensi inovasi bekerja melalui mekanisme tertentu yang pada akhirnya meningkatkan daya saing ekspor. Inovasi produk meningkatkan kualitas, teknologi Digital menekan biaya, paten memperkuat posisi pasar, dan kualitas tenaga kerja meningkatkan kompleksitas produksi. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan fondasi yang kuat bagi ekspansi perdagangan internasional.

Tabel ini menegaskan bahwa keberhasilan ekspor tidak lagi hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam atau biaya tenaga kerja rendah. Kapasitas inovasi, penguasaan teknologi, dan kualitas sumber daya manusia menjadi penentu utama dalam memenangkan persaingan global. Struktur yang ditampilkan memberikan gambaran jelas mengenai jalur bagaimana inovasi diterjemahkan menjadi kinerja ekspor yang lebih tinggi. Perkembangan inovasi dan teknologi dalam perdagangan internasional tidak hanya berfungsi sebagai pendorong peningkatan ekspor, tetapi juga mengubah struktur dasar bagaimana perdagangan itu sendiri berlangsung. Transformasi ini terlihat dari pergeseran pola produksi, distribusi, hingga konsumsi yang semakin bergantung pada kemampuan teknologi dan penguasaan informasi. Aktivitas perdagangan yang sebelumnya bertumpu pada pertukaran fisik kini semakin terintegrasi dengan sistem digital, data, dan jaringan global yang kompleks.

Kemajuan teknologi informasi memungkinkan perusahaan mengakses pasar internasional tanpa harus memiliki kehadiran fisik di negara tujuan. *Platform* digital seperti *marketplace* global, sistem pembayaran lintas negara, serta logistik berbasis teknologi telah menurunkan hambatan masuk bagi pelaku usaha. Perusahaan kecil yang

sebelumnya terbatas pada pasar lokal kini dapat menjangkau konsumen global melalui *e-commerce*. Akses ini menciptakan demokratisasi perdagangan, di mana partisipasi tidak lagi didominasi oleh perusahaan besar.

Perubahan ini juga memengaruhi struktur biaya dalam perdagangan. Biaya tetap untuk memasuki pasar internasional mengalami penurunan karena proses seperti pemasaran, komunikasi, dan negosiasi dapat dilakukan secara daring. Biaya variabel seperti transportasi dan distribusi juga mengalami efisiensi melalui optimasi logistik berbasis data. Penggunaan teknologi seperti *artificial intelligence* dalam manajemen rantai pasok memungkinkan perusahaan memprediksi permintaan, mengelola inventori, dan mengurangi pemborosan.

Dampak teknologi terlihat jelas pada integrasi rantai nilai global. Produksi tidak lagi dilakukan dalam satu lokasi, tetapi tersebar di berbagai negara berdasarkan keunggulan spesifik masing-masing. Teknologi komunikasi memungkinkan koordinasi lintas wilayah secara real time, sehingga proses produksi dapat dipecah menjadi berbagai tahapan yang saling terhubung. Desain produk dapat dilakukan di satu negara, produksi komponen di negara lain, dan perakitan di lokasi berbeda. Pola ini meningkatkan efisiensi karena setiap tahapan dilakukan di tempat yang paling optimal. Perubahan struktur ini menuntut peningkatan kemampuan koordinasi dan manajemen yang lebih kompleks. Perusahaan harus mampu mengelola jaringan produksi yang luas, menghadapi risiko gangguan rantai pasok, serta memastikan kualitas produk tetap konsisten. Teknologi berperan sebagai alat utama dalam mengatasi kompleksitas tersebut, terutama melalui sistem informasi terintegrasi dan analitik data.

Inovasi juga berperan dalam menciptakan diferensiasi produk yang menjadi kunci dalam persaingan global. Produk tidak lagi bersaing hanya berdasarkan harga, tetapi juga kualitas, desain, dan fitur yang ditawarkan. Perusahaan yang mampu menciptakan nilai tambah melalui inovasi memiliki posisi tawar yang lebih kuat di pasar internasional. Diferensiasi ini memungkinkan perusahaan menetapkan harga yang lebih tinggi dan mempertahankan loyalitas konsumen. Peran teknologi dalam perdagangan jasa juga mengalami peningkatan signifikan. Jasa yang sebelumnya sulit diperdagangkan lintas negara kini dapat ditransmisikan secara digital. Layanan seperti konsultasi, pendidikan,

desain, dan pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan tanpa batas geografis. Perdagangan jasa digital menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru dalam ekonomi global, terutama bagi negara yang memiliki sumber daya manusia terampil.

Transformasi digital juga membawa perubahan dalam struktur tenaga kerja. Permintaan terhadap tenaga kerja dengan keterampilan tinggi meningkat, sementara pekerjaan rutin yang dapat diotomatisasi mengalami penurunan. Perubahan ini menciptakan tantangan dalam penyesuaian tenaga kerja, karena tidak semua individu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan menjadi faktor penting untuk memastikan tenaga kerja dapat mengikuti perkembangan ini.

Peran data menjadi semakin dominan dalam perdagangan internasional. Data tidak hanya digunakan untuk analisis pasar, tetapi juga menjadi aset strategis yang menentukan keunggulan kompetitif. Perusahaan yang memiliki akses dan kemampuan mengelola data dalam jumlah besar dapat memahami perilaku konsumen, mengidentifikasi peluang pasar, dan mengoptimalkan strategi bisnis. Data menjadi sumber nilai baru yang melengkapi faktor produksi tradisional seperti tenaga kerja dan modal. Penggunaan teknologi juga meningkatkan transparansi dalam perdagangan. Informasi mengenai harga, kualitas, dan reputasi produk menjadi lebih mudah diakses oleh konsumen. Transparansi ini meningkatkan persaingan karena konsumen dapat membandingkan berbagai pilihan dengan lebih mudah. Perusahaan dituntut untuk menjaga kualitas dan reputasi karena informasi negatif dapat menyebar dengan cepat melalui *platform* digital.

Inovasi dalam sistem pembayaran turut mempercepat perdagangan internasional. Teknologi *Financial Technology* memungkinkan transaksi lintas negara dilakukan dengan cepat dan biaya rendah. Sistem pembayaran digital, mata uang elektronik, serta *blockchain* mengurangi ketergantungan pada perantara tradisional seperti bank. Efisiensi ini meningkatkan likuiditas dan mempercepat arus perdagangan. *Blockchain* memiliki potensi besar dalam meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam perdagangan. Teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi yang transparan dan tidak dapat diubah, sehingga mengurangi risiko penipuan dan kesalahan. Penggunaan smart contract memungkinkan eksekusi kontrak secara

otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi. Hal ini mengurangi kebutuhan akan pihak ketiga dan mempercepat proses transaksi.

Perkembangan teknologi juga memengaruhi kebijakan perdagangan. Pemerintah harus menyesuaikan regulasi untuk mengakomodasi perdagangan digital, perlindungan data, serta keamanan siber. Regulasi yang tidak adaptif dapat menghambat inovasi dan mengurangi daya saing. Kebijakan yang mendukung inovasi dan adopsi teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi dalam perdagangan global.

Peran inovasi dalam sektor manufaktur terlihat melalui penerapan teknologi seperti otomatisasi dan robotika. Produksi menjadi lebih efisien dan presisi, sehingga meningkatkan kualitas produk. Teknologi ini juga mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja dalam jumlah besar, yang dapat mengubah pola keunggulan komparatif antarnegara. Negara dengan teknologi maju dapat mempertahankan produksi domestik meskipun biaya tenaga kerja tinggi. Fenomena *reshoring* atau kembalinya produksi ke negara asal menjadi salah satu implikasi dari perkembangan teknologi. Otomatisasi mengurangi perbedaan biaya tenaga kerja antarnegara, sehingga perusahaan tidak lagi harus memindahkan produksi ke negara dengan upah rendah. Keputusan lokasi produksi menjadi lebih dipengaruhi oleh faktor seperti stabilitas politik, infrastruktur, dan kedekatan dengan pasar.

Teknologi juga berperan dalam meningkatkan keberlanjutan perdagangan. Inovasi dalam energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah membantu mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi. Konsumen global semakin memperhatikan aspek keberlanjutan, sehingga perusahaan dituntut untuk mengadopsi praktik yang ramah lingkungan. Keunggulan kompetitif tidak hanya ditentukan oleh efisiensi ekonomi, tetapi juga oleh tanggung jawab lingkungan. Perubahan preferensi konsumen turut dipengaruhi oleh teknologi. Konsumen memiliki akses informasi yang luas dan dapat mengekspresikan preferensi mereka secara langsung melalui *platform* digital. Perusahaan harus mampu merespons perubahan ini dengan cepat melalui inovasi produk dan strategi pemasaran yang adaptif. Kemampuan membaca tren pasar menjadi faktor penting dalam mempertahankan daya saing.

Inovasi juga memengaruhi struktur pasar global. Perusahaan teknologi besar memiliki pengaruh yang signifikan dalam perdagangan

internasional karena menguasai *platform* digital yang menjadi penghubung antara produsen dan konsumen. Dominasi ini menciptakan tantangan dalam hal persaingan dan regulasi, karena kekuatan pasar yang besar dapat menghambat masuknya pemain baru. Perdagangan internasional modern menunjukkan bahwa keunggulan tidak lagi hanya ditentukan oleh faktor statis seperti sumber daya alam. Kemampuan berinovasi, mengadopsi teknologi, dan mengelola pengetahuan menjadi faktor utama dalam menentukan posisi suatu negara dalam ekonomi global. Negara yang mampu mengembangkan ekosistem inovasi yang kuat akan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan daya saing.

Hubungan antara inovasi dan perdagangan juga bersifat dua arah. Perdagangan membuka akses terhadap teknologi dan pengetahuan dari negara lain, yang kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas inovasi domestik. Interaksi ini menciptakan siklus yang memperkuat pertumbuhan ekonomi dan integrasi global. Perkembangan teknologi yang cepat menuntut adaptasi yang berkelanjutan. Perusahaan dan negara harus mampu mengikuti perubahan agar tidak tertinggal dalam persaingan global. Investasi dalam riset, pendidikan, dan infrastruktur menjadi fondasi utama dalam menghadapi dinamika ini. Perdagangan internasional di era modern tidak dapat dipisahkan dari inovasi dan teknologi. Keduanya menjadi pendorong utama yang membentuk pola, struktur, dan dinamika perdagangan global. Transformasi yang terjadi menunjukkan bahwa ekonomi internasional terus berkembang mengikuti kemajuan pengetahuan dan teknologi, menciptakan peluang baru sekaligus tantangan yang harus dihadapi oleh setiap pelaku ekonomi.

E. *Global Value Chain (GVC)*

Global Value Chain (GVC)

Global Value Chain mengacu pada serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan di berbagai lokasi geografis untuk membawa produk dari konsepsi hingga penggunaan akhir, mencakup desain, produksi, pemasaran, distribusi, dan dukungan pelanggan. *Global Value Chain* mewakili 'unbundling' produksi di mana setiap tahap dapat dilokasikan di mana pun yang paling efisien secara biaya (Baldwin, 2016; UNCTAD, 2020).

Baldwin (2016) berargumen bahwa *Global Value Chain* adalah fenomena terpenting dalam ekonomi internasional sejak dua dekade terakhir. *Global Value Chain* memungkinkan negara berkembang untuk industrialisasi dengan bergabung dalam rantai nilai yang sudah ada tanpa harus membangun seluruh industri dari nol. Koopman *et al.* (2014) mengembangkan metodologi *decomposition* nilai tambah yang menunjukkan bahwa sekitar 30% nilai ekspor global sebenarnya adalah impor yang diolah kembali. Rantai nilai global telah menjadi perubahan besar dalam ekonomi internasional karena memungkinkan proses produksi tersebar di berbagai negara dan saling terhubung. Negara berkembang tidak lagi harus membangun industri secara lengkap dari awal, tetapi dapat langsung berpartisipasi dengan mengambil peran pada tahapan produksi tertentu sesuai kemampuan yang dimiliki. Pola ini mempercepat proses industrialisasi dan integrasi ke pasar global.

Analisis nilai tambah menunjukkan bahwa sebagian besar ekspor suatu negara sebenarnya mengandung komponen impor yang telah diproses kembali, sehingga perdagangan modern lebih mencerminkan jaringan produksi lintas negara daripada pertukaran barang jadi semata. Perkembangan *Global Value Chain* tidak hanya mengubah cara produksi dilakukan, tetapi juga mengubah cara nilai ekonomi diciptakan, didistribusikan, dan diukur dalam sistem perdagangan internasional. Struktur produksi yang terfragmentasi menciptakan jaringan lintas negara yang kompleks, di mana setiap tahapan memiliki kontribusi berbeda terhadap nilai akhir suatu produk. Nilai tidak lagi terkonsentrasi

pada proses manufaktur semata, melainkan tersebar mulai dari riset, desain, produksi komponen, perakitan, hingga layanan purna jual.

Konsep “*smile curve*” yang diperkenalkan oleh Stan Shih memberikan gambaran penting mengenai distribusi nilai dalam rantai global. Aktivitas di bagian awal seperti penelitian dan pengembangan serta desain memiliki nilai tambah tinggi, demikian pula aktivitas di bagian akhir seperti branding dan pemasaran. Tahap produksi massal di tengah rantai sering kali memiliki nilai tambah yang lebih rendah. Pola ini menjelaskan mengapa negara yang hanya terlibat dalam perakitan sering memperoleh bagian nilai yang lebih kecil dibandingkan negara yang menguasai teknologi dan merek.

Partisipasi dalam *Global Value Chain* membuka peluang industrialisasi yang lebih cepat bagi negara berkembang. Negara tidak perlu menguasai seluruh proses produksi, tetapi dapat masuk melalui tahapan tertentu yang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Tahap awal biasanya melibatkan aktivitas padat karya seperti perakitan sederhana. Seiring waktu, peningkatan kemampuan teknologi dan keterampilan tenaga kerja memungkinkan pergeseran ke aktivitas dengan nilai tambah lebih tinggi. Proses ini sering disebut sebagai *upgrading* dalam literatur *Global Value Chain*.

Upgrading memiliki beberapa bentuk yang berbeda. *Process upgrading* terjadi ketika perusahaan meningkatkan efisiensi produksi melalui adopsi teknologi atau perbaikan manajemen. *Product upgrading* terjadi ketika perusahaan beralih ke produk dengan kualitas atau kompleksitas lebih tinggi. *Functional upgrading* melibatkan perpindahan ke fungsi yang memiliki nilai tambah lebih besar, seperti desain atau pemasaran. *Inter-sectoral upgrading* terjadi ketika perusahaan memanfaatkan kompetensi yang ada untuk memasuki sektor baru yang lebih menguntungkan.

Keberhasilan *upgrading* sangat bergantung pada kemampuan menyerap pengetahuan dari mitra global. Transfer teknologi menjadi salah satu mekanisme utama yang mendorong peningkatan kapasitas domestik. Perusahaan multinasional sering membawa standar produksi, teknik manajemen, dan teknologi baru ke negara tuan rumah. Interaksi antara perusahaan lokal dan global menciptakan proses pembelajaran yang meningkatkan produktivitas.

Struktur tata kelola dalam *Global Value Chain* memainkan peran penting dalam menentukan peluang *upgrading*. Gereffi, Humphrey, dan

Sturgeon (2005) mengidentifikasi beberapa tipe *governance* seperti *market*, *modular*, *relational*, *captive*, dan *hierarchy*. Setiap tipe memiliki karakteristik hubungan yang berbeda antara perusahaan utama dan pemasok. Dalam struktur *captive*, pemasok sangat bergantung pada perusahaan utama dan memiliki ruang terbatas untuk inovasi. Struktur *relational* memberikan ruang lebih besar bagi kolaborasi dan pembelajaran.

Perusahaan utama atau *lead firms* memiliki peran dominan dalam mengatur rantai nilai. Mereka menentukan spesifikasi produk, standar kualitas, serta koordinasi produksi lintas negara. Kekuasaan ini memungkinkan mereka mengendalikan distribusi nilai dalam rantai. Negara yang ingin meningkatkan posisi dalam *Global Value Chain* perlu memperkuat kapasitas perusahaan domestik agar dapat bernegosiasi lebih baik dalam struktur tersebut.

Perubahan dalam teknologi digital mempercepat evolusi *Global Value Chain*. Digitalisasi memungkinkan koordinasi yang lebih efisien antar lokasi produksi. Sistem manajemen berbasis *cloud*, *Internet of Things*, dan analitik data memungkinkan perusahaan memantau proses produksi secara *real time*. Integrasi ini meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas terhadap perubahan permintaan pasar.

Pandemi global memberikan pelajaran penting mengenai kerentanan *Global Value Chain*. Gangguan pada satu titik dalam rantai dapat memengaruhi keseluruhan sistem. Ketergantungan yang tinggi pada pemasok tertentu meningkatkan risiko disrupsi. Banyak perusahaan mulai mempertimbangkan strategi diversifikasi pemasok dan regionalisasi produksi untuk meningkatkan ketahanan. Fenomena *reshoring* dan *nearshoring* menjadi respons terhadap risiko tersebut. Perusahaan memindahkan sebagian produksi lebih dekat ke pasar utama atau kembali ke negara asal. Keputusan ini dipengaruhi oleh pertimbangan stabilitas, keamanan pasokan, serta perubahan biaya akibat otomatisasi. Struktur *Global Value Chain* menjadi lebih beragam dan tidak lagi sepenuhnya terpusat pada efisiensi biaya semata.

Peran negara dalam *Global Value Chain* mengalami perubahan signifikan. Kebijakan industri tidak lagi hanya berfokus pada proteksi, tetapi juga pada integrasi strategis ke dalam rantai global. Pemerintah berupaya menarik investasi asing, mengembangkan infrastruktur, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan posisi dalam rantai nilai dan memperoleh manfaat

yang lebih besar. Pengukuran perdagangan juga mengalami perubahan akibat *Global Value Chain*. Statistik tradisional yang berbasis nilai bruto tidak mampu menggambarkan kontribusi sebenarnya suatu negara. Pendekatan *Value-added Trade* memberikan gambaran yang lebih akurat dengan mengukur nilai tambah domestik dalam ekspor. Pendekatan ini menunjukkan bahwa banyak negara berkontribusi pada satu produk akhir.

Peran usaha kecil dan menengah dalam *Global Value Chain* menjadi semakin penting. Teknologi digital memungkinkan UKM terhubung dengan pasar global tanpa harus memiliki jaringan distribusi yang luas. *Platform* digital menjadi jembatan yang menghubungkan produsen kecil dengan konsumen internasional. Partisipasi ini meningkatkan inklusivitas dalam perdagangan global. *Global Value Chain* juga memiliki implikasi terhadap distribusi pendapatan. Negara yang berada pada tahap bernilai tambah rendah cenderung memperoleh manfaat yang lebih kecil. Ketimpangan dapat muncul baik antarnegara maupun di dalam negara. Pekerja dengan keterampilan tinggi memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan pekerja dengan keterampilan rendah.

Isu keberlanjutan menjadi bagian penting dalam *Global Value Chain* modern. Konsumen dan regulator semakin menuntut transparansi dalam proses produksi. Perusahaan harus memastikan bahwa rantai pasok mereka memenuhi standar lingkungan dan sosial. Sertifikasi dan audit menjadi alat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar tersebut. Tekanan terhadap praktik produksi yang berkelanjutan mendorong perubahan dalam struktur rantai nilai. Perusahaan mulai memilih pemasok yang memenuhi standar tertentu. Negara yang mampu memenuhi standar ini memiliki peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam *Global Value Chain*. Kepatuhan terhadap standar menjadi faktor kompetitif yang tidak kalah penting dibandingkan biaya.

Perkembangan *Global Value Chain* juga memengaruhi hubungan perdagangan antarnegara. Perdagangan tidak lagi didominasi oleh pertukaran barang jadi, tetapi oleh aliran komponen dan input antara berbagai tahap produksi. Pola ini menciptakan interdependensi yang tinggi antarnegara. Gangguan di satu negara dapat berdampak luas pada sistem global. Peran regionalisasi dalam *Global Value Chain* semakin terlihat. Kawasan seperti Asia Timur, Eropa, dan Amerika Utara memiliki jaringan produksi yang terintegrasi. Kedekatan geografis

memudahkan koordinasi dan mengurangi biaya logistik. Integrasi regional memperkuat posisi kawasan dalam perdagangan global.

Peningkatan kompleksitas *Global Value Chain* menuntut kemampuan analisis yang lebih mendalam. Perusahaan dan pemerintah perlu memahami posisi mereka dalam rantai nilai untuk merancang strategi yang tepat. Identifikasi tahapan dengan nilai tambah tinggi menjadi kunci dalam meningkatkan manfaat ekonomi. Transformasi *Global Value Chain* menunjukkan bahwa perdagangan internasional tidak lagi sekadar pertukaran barang antarnegara. Sistem ini telah berkembang menjadi jaringan produksi global yang saling terhubung dan dinamis. Keberhasilan dalam sistem ini ditentukan oleh kemampuan beradaptasi, berinovasi, dan membangun koneksi yang kuat dalam jaringan global.

Perubahan yang terus berlangsung dalam *Global Value Chain* mencerminkan dinamika ekonomi internasional yang semakin kompleks. Negara dan perusahaan yang mampu memahami dan memanfaatkan struktur ini akan memiliki keunggulan dalam persaingan Global. Integrasi yang efektif ke dalam rantai nilai menjadi salah satu strategi utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

F. *Digital Trade* dan Ekonomi Digital

Digital Trade (perdagangan yang dimediasi oleh *platform* digital atau terdiri dari produk dan layanan digital) adalah frontier terbaru dalam perdagangan internasional. OECD (2022) memperkirakan bahwa perdagangan jasa digital global mencapai USD 3,5 triliun pada 2022, tumbuh 8,1% per tahun. Perdagangan digital merupakan perkembangan terbaru dalam aktivitas perdagangan internasional yang melibatkan penggunaan teknologi dan *platform* online untuk memperdagangkan barang maupun jasa, terutama yang berbasis digital seperti layanan cloud, perangkat lunak, dan konten digital. Pertumbuhan yang pesat dalam nilai perdagangan jasa digital menunjukkan bahwa teknologi telah mengubah cara transaksi lintas negara menjadi lebih cepat, efisien, dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada batas geografis. Perkembangan ini menandai pergeseran penting dalam ekonomi global, di mana peran data, konektivitas, dan inovasi digital semakin dominan dalam menentukan arus perdagangan antarnegara.

Tabel 3.3 Karakteristik *Digital Trade* vs Perdagangan Konvensional

Aspek	Perdagangan Konvensional	Digital Trade
Biaya marjinal	Tinggi (logistik, bea cukai)	Mendekati nol (kopi Digital)
Hambatan jarak	Signifikan	Drastis berkurang
Regulasi	Tarif WTO <i>established</i>	<i>Grey area</i> ; belum ada konsensus
Pengukuran	Relatif jelas (bea cukai)	Sulit; sering <i>under-reported</i>
Pelaku	Didominasi MNC besar	Dapat menjangkau UMKM
Hambatan utama	Tarif, NTB fisik	<i>Data localization, privacy rules</i>

Sumber: OECD (2022) & WTO (2023)

Tabel 3.3 membandingkan karakteristik perdagangan konvensional dan *Digital Trade* melalui beberapa aspek kunci. Setiap baris menunjukkan perbedaan mendasar dalam cara transaksi dilakukan, biaya yang muncul, hingga tantangan regulasi yang dihadapi. Baris pertama adalah “Biaya marjinal”. Pada perdagangan konvensional, biaya marjinal cenderung tinggi karena melibatkan pengeluaran untuk logistik, transportasi, pergudangan, serta bea cukai. Setiap tambahan unit barang yang dikirim akan menambah biaya secara nyata. Pada *Digital Trade*, biaya marjinal mendekati nol, terutama untuk produk Digital seperti perangkat lunak, musik, atau layanan berbasis cloud. Setelah produk dibuat, distribusi tambahan hampir tidak memerlukan biaya signifikan karena hanya berupa proses penggandaan atau akses digital.

Baris kedua adalah “Hambatan jarak”. Perdagangan konvensional sangat dipengaruhi oleh jarak geografis karena biaya transportasi dan waktu pengiriman meningkat seiring jauhnya lokasi tujuan. Jarak juga memengaruhi risiko kerusakan barang dan kompleksitas distribusi. *Digital Trade* menunjukkan hambatan jarak yang jauh lebih kecil. Transaksi dapat dilakukan secara instan melalui internet tanpa memperhatikan lokasi fisik, sehingga pasar global menjadi lebih terintegrasi. Baris ketiga adalah “Regulasi”. Pada perdagangan

konvensional, aturan relatif sudah mapan melalui kerangka seperti WTO yang mengatur tarif dan prosedur perdagangan. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. *Digital Trade* berada pada area yang belum sepenuhnya memiliki konsensus global. Banyak aspek seperti pajak digital, aliran data lintas negara, dan perlindungan konsumen masih berkembang, sehingga menciptakan ketidakpastian regulasi.

Baris keempat adalah “Pengukuran”. Aktivitas perdagangan konvensional relatif mudah diukur karena tercatat melalui dokumen bea cukai, manifest pengiriman, dan data ekspor-impor resmi. *Digital Trade* lebih sulit diukur karena banyak transaksi terjadi secara online tanpa melalui sistem pelaporan tradisional. Sebagian transaksi lintas negara tidak tercatat secara lengkap, sehingga nilai sebenarnya sering kali lebih besar dari data yang tersedia. Baris kelima adalah “Pelaku”. Perdagangan konvensional didominasi oleh perusahaan multinasional besar yang memiliki sumber daya untuk mengelola logistik internasional dan memenuhi regulasi lintas negara. *Digital Trade* membuka peluang lebih luas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Platform* digital memungkinkan pelaku usaha kecil menjangkau pasar global tanpa harus memiliki infrastruktur fisik yang besar.

Baris keenam adalah “Hambatan utama”. Dalam perdagangan konvensional, hambatan utama berupa tarif dan hambatan non-tarif seperti kuota, standar teknis, dan prosedur administratif. Pada *Digital Trade*, hambatan bergeser ke isu data seperti kebijakan lokalisasi data, aturan privasi, dan pembatasan aliran data lintas negara. Hambatan ini berkaitan erat dengan keamanan informasi dan kedaulatan digital. Hubungan antar aspek dalam tabel menunjukkan adanya perubahan struktur perdagangan global. Peralihan dari barang fisik ke produk dan layanan digital mengurangi ketergantungan pada logistik dan jarak, namun menghadirkan tantangan baru dalam regulasi dan pengukuran. Perubahan ini juga memperluas partisipasi pelaku ekonomi karena hambatan masuk menjadi lebih rendah. Tabel tersebut menggambarkan transformasi mendasar dalam perdagangan internasional, di mana teknologi digital mengubah cara produksi, distribusi, dan konsumsi lintas negara. Perbandingan ini membantu memahami bahwa dinamika perdagangan modern semakin ditentukan oleh faktor data, konektivitas, dan kemampuan adaptasi terhadap ekosistem digital.



BAB IV

KEBIJAKAN

PERDAGANGAN

INTERNASIONAL

Terlepas dari argumen teoritis yang kuat untuk perdagangan bebas, hampir semua negara di dunia menerapkan berbagai bentuk kebijakan perdagangan yang membatasi atau mendistorsi aliran perdagangan bebas. Ini bukan ironi, melainkan cerminan dari realitas politik-ekonomi bahwa *gains from trade* tidak terdistribusi merata, sehingga menciptakan kelompok yang menang dan yang kalah dari setiap kebijakan liberalisasi. Teori ekonomi menunjukkan perdagangan bebas membawa manfaat secara keseluruhan, praktik di dunia nyata tidak sepenuhnya mengikuti prinsip tersebut karena adanya kepentingan politik dan distribusi manfaat yang tidak merata. Sebagian kelompok atau sektor memperoleh keuntungan dari keterbukaan perdagangan, sementara yang lain justru mengalami kerugian seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan daya saing. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menerapkan berbagai kebijakan seperti tarif, subsidi, atau pembatasan impor guna melindungi kelompok yang terdampak negatif. Keputusan tersebut mencerminkan kompromi antara efisiensi ekonomi dan tekanan politik domestik yang muncul dari perbedaan kepentingan dalam masyarakat.

A. Pengertian Kebijakan Perdagangan

Kebijakan perdagangan merupakan serangkaian keputusan, aturan, dan tindakan yang dirumuskan oleh pemerintah untuk mengatur

arus barang dan jasa lintas batas negara, baik dalam konteks ekspor maupun impor, dengan tujuan mencapai kepentingan ekonomi nasional sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi global (Irwin, 2020). Secara konseptual, kebijakan perdagangan tidak hanya terbatas pada penetapan tarif atau bea masuk, tetapi mencakup spektrum instrumen yang luas, seperti kuota impor, subsidi ekspor, standar teknis, regulasi non-tarif, perjanjian perdagangan internasional, hingga kebijakan nilai tukar yang secara tidak langsung memengaruhi daya saing produk domestik. Dalam praktiknya, kebijakan perdagangan menjadi alat strategis bagi negara untuk melindungi industri dalam negeri, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas neraca pembayaran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya, terdapat dua pendekatan utama dalam kebijakan perdagangan, yaitu proteksionisme dan perdagangan bebas. Proteksionisme merujuk pada upaya pemerintah untuk melindungi industri domestik dari persaingan luar negeri melalui pembatasan impor, seperti tarif tinggi, kuota, atau regulasi ketat. Pendekatan ini biasanya digunakan oleh negara berkembang yang ingin memperkuat industri dalam negeri agar mampu bersaing di pasar global. Sementara itu, perdagangan bebas menekankan pada pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan sehingga memungkinkan arus barang dan jasa bergerak lebih efisien antarnegara. Pendukung perdagangan bebas berargumen bahwa keterbukaan pasar akan meningkatkan efisiensi ekonomi, menurunkan harga bagi konsumen, dan memperluas pilihan produk. Namun, dalam kenyataannya, hampir tidak ada negara yang sepenuhnya menganut salah satu pendekatan secara murni, karena kebijakan perdagangan umumnya merupakan kombinasi dari keduanya sesuai dengan kepentingan nasional.

Kebijakan perdagangan juga berkaitan erat dengan konsep keunggulan komparatif, yaitu kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Melalui kebijakan perdagangan yang tepat, negara dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dengan memfokuskan produksi pada sektor-sektor yang memiliki keunggulan tersebut, sekaligus mengimpor barang yang tidak efisien untuk diproduksi sendiri. Dengan demikian, kebijakan perdagangan berperan sebagai mekanisme untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya

nasional dalam konteks global. Namun demikian, dalam implementasinya, faktor politik, sosial, dan keamanan sering kali memengaruhi arah kebijakan perdagangan, sehingga tidak selalu sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata.

Instrumen kebijakan perdagangan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu tarif dan non-tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan pada barang impor yang bertujuan untuk meningkatkan harga barang tersebut di pasar domestik sehingga produk lokal menjadi lebih kompetitif. Sementara itu, hambatan non-tarif mencakup berbagai regulasi yang tidak berbentuk pajak, seperti standar kualitas, persyaratan teknis, lisensi impor, dan prosedur administrasi yang kompleks. Dalam beberapa kasus, hambatan non-tarif bahkan lebih efektif dibandingkan tarif dalam membatasi impor, karena sering kali sulit diukur dan diatur secara transparan. Oleh karena itu, dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi, banyak perjanjian perdagangan internasional berupaya mengurangi tidak hanya tarif, tetapi juga hambatan non-tarif guna menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka dan adil.

Selain itu, kebijakan perdagangan juga memiliki dimensi internasional yang penting, terutama dalam konteks kerja sama ekonomi antarnegara. Negara-negara sering menjalin perjanjian perdagangan bilateral, regional, maupun multilateral untuk mengatur hubungan perdagangan mereka. Perjanjian ini dapat mencakup pengurangan tarif, harmonisasi standar, perlindungan investasi, hingga penyelesaian sengketa perdagangan. Melalui kerja sama tersebut, negara dapat memperoleh akses pasar yang lebih luas, meningkatkan volume perdagangan, dan memperkuat posisi tawar dalam ekonomi global. Namun, di sisi lain, perjanjian perdagangan juga dapat menimbulkan tantangan, seperti meningkatnya persaingan bagi industri domestik dan potensi ketergantungan terhadap pasar luar negeri.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, kebijakan perdagangan memiliki peran yang sangat signifikan. Negara yang mampu merancang kebijakan perdagangan secara efektif dapat memanfaatkan peluang globalisasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, dengan mendorong ekspor produk bernilai tambah tinggi, negara dapat meningkatkan pendapatan nasional dan menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Di sisi lain, kebijakan perdagangan yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti defisit neraca perdagangan,

deindustrialisasi, atau ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, perumusan kebijakan perdagangan memerlukan analisis yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi ekonomi domestik, struktur industri, serta perkembangan ekonomi global.

Kebijakan perdagangan juga berkaitan dengan isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian terhadap aspek lingkungan dan hak asasi manusia dalam perdagangan internasional semakin meningkat. Banyak negara dan organisasi internasional mulai memasukkan ketentuan terkait perlindungan lingkungan, standar tenaga kerja, dan praktik bisnis yang berkelanjutan dalam perjanjian perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Pengertian kebijakan perdagangan mencerminkan kompleksitas hubungan antara ekonomi domestik dan sistem perdagangan internasional. Kebijakan ini bukan sekadar alat untuk mengatur ekspor dan impor, tetapi juga merupakan instrumen strategis yang memengaruhi arah pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan pendekatan yang tepat, kebijakan perdagangan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, tanpa perencanaan dan implementasi yang matang, kebijakan perdagangan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang justru menghambat kemajuan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep, tujuan, dan instrumen kebijakan perdagangan menjadi sangat penting bagi para pembuat kebijakan, pelaku usaha, maupun masyarakat luas dalam menghadapi tantangan dan peluang di era globalisasi.

B. Tarif dan Non-Tarif Barrier

Tarif (bea masuk) adalah pajak yang dikenakan pada barang impor. Meskipun merupakan instrumen paling transparan dan paling mudah diukur, signifikansi tarif telah menurun dramatik setelah 75 tahun negosiasi GATT/WTO. Tarif rata-rata MFN Global telah turun dari sekitar 40% pada 1947 menjadi kurang dari 6% pada 2022 (WTO, 2023). Namun penurunan tarif ini diimbangi dengan proliferasi hambatan non-tarif (NTB). Tarif merupakan bentuk pajak atas barang impor yang

mudah dikenali dan diukur, tetapi perannya dalam membatasi perdagangan semakin berkurang seiring upaya liberalisasi global melalui perundingan GATT dan WTO selama puluhan tahun. Penurunan tarif yang signifikan menunjukkan adanya komitmen negara-negara untuk membuka perdagangan dan mengurangi hambatan formal. Kondisi ini tidak berarti perdagangan menjadi sepenuhnya bebas, karena banyak negara beralih menggunakan hambatan non-tarif seperti regulasi teknis, standar kualitas, kuota, atau prosedur administrasi yang lebih kompleks. Pergeseran ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan perdagangan tetap ada, hanya berubah menjadi lebih tidak langsung dan sering kali lebih sulit diukur.

Tabel 4.1 Klasifikasi Instrumen Kebijakan Perdagangan

Kategori	Instrumen	Mekanisme	Transparansi
Tarif	<i>Ad valorem</i> , spesifik, gabungan	Pajak impor langsung	Tinggi
NTB Kuantitatif	Kuota, VER, embargo	Batasi volume impor	Sedang
NTB Teknis	SPS, TBT, standar	Hambat via regulasi teknis	Rendah
Kebijakan Parapemerintah	Subsidi ekspor, kredit ekspor	Distorsi harga	Rendah
Kebijakan Nilai Tukar	Depresiasi disengaja	Pengaruhi daya saing	Sangat rendah
Pengadaan Publik	<i>Buy local</i> , TKDN	Diskriminasi impor	Rendah

Sumber: WTO (2023) & Bown, C.P. (2022)

Tabel 4.1 mengklasifikasikan berbagai instrumen kebijakan perdagangan ke dalam beberapa kategori, disertai mekanisme kerja dan tingkat transparansinya. Struktur ini membantu memahami bagaimana negara memengaruhi arus impor tidak hanya melalui pajak langsung, tetapi juga melalui berbagai kebijakan lain yang lebih kompleks. Baris pertama adalah “Tarif”. Kolom instrumen mencantumkan bentuk seperti

ad valorem, spesifik, dan gabungan. Tarif *ad valorem* dihitung sebagai persentase dari nilai barang, tarif spesifik dikenakan per unit barang, sedangkan tarif gabungan merupakan kombinasi keduanya. Kolom mekanisme menjelaskan bahwa tarif bekerja sebagai pajak impor langsung, sehingga harga barang impor meningkat di pasar domestik. Kenaikan harga ini menurunkan daya saing produk asing dan melindungi produsen dalam negeri. Kolom transparansi menunjukkan tingkat tinggi karena tarif mudah diidentifikasi, diukur, dan dibandingkan antarnegara melalui data resmi.

Baris kedua adalah “NTB Kuantitatif”. Instrumen yang termasuk di dalamnya adalah kuota, *Voluntary Export Restraints* (VER), dan embargo. Kuota membatasi jumlah barang yang boleh diimpor, VER merupakan kesepakatan pembatasan ekspor oleh negara mitra, sedangkan embargo melarang perdagangan secara total. Kolom mekanisme menunjukkan bahwa kebijakan ini membatasi volume impor secara langsung, bukan melalui harga. Dampaknya adalah kelangkaan barang impor di pasar domestik yang dapat menaikkan harga. Kolom transparansi berada pada tingkat sedang karena batas kuota dapat diketahui, tetapi dampak ekonominya tidak selalu mudah diukur secara presisi.

Baris ketiga adalah “NTB Teknis”. Instrumen yang tercantum meliputi *sanitary and phytosanitary* (SPS), *Technical Barriers to Trade* (TBT), serta berbagai standar produk. *Sanitary and phytosanitary* berkaitan dengan kesehatan dan keamanan pangan, sedangkan *Technical Barriers to Trade* mencakup regulasi teknis seperti spesifikasi produk dan sertifikasi. Kolom mekanisme menjelaskan bahwa hambatan muncul melalui persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh produk impor. Persyaratan ini dapat meningkatkan biaya kepatuhan atau bahkan menghalangi masuknya barang tertentu. Kolom transparansi tergolong rendah karena regulasi teknis sering kali kompleks dan sulit dibandingkan antarnegara.

Baris keempat adalah “Kebijakan Parapemerintah”. Instrumen yang termasuk di dalamnya adalah subsidi ekspor dan kredit ekspor. Subsidi ekspor memberikan dukungan finansial kepada produsen domestik untuk menjual barang ke luar negeri dengan harga lebih kompetitif. Kredit ekspor mempermudah pembiayaan bagi pembeli asing. Kolom mekanisme menunjukkan bahwa kebijakan ini mendistorsi harga dengan memberikan keuntungan tambahan bagi produsen

domestik. Kolom transparansi rendah karena bentuk dan besaran dukungan sering tidak sepenuhnya terbuka atau sulit diukur secara langsung.

Baris kelima adalah “Kebijakan Nilai Tukar”. Instrumen yang ditampilkan adalah depresiasi mata uang yang disengaja. Kolom mekanisme menjelaskan bahwa pelemahan nilai tukar membuat harga barang ekspor menjadi lebih murah di pasar internasional, sementara impor menjadi lebih mahal. Dampak ini meningkatkan daya saing ekspor tanpa menggunakan instrumen perdagangan tradisional. Kolom transparansi sangat rendah karena sulit menentukan apakah perubahan nilai tukar merupakan kebijakan yang disengaja atau hasil dinamika pasar.

Baris keenam adalah “Pengadaan Publik”. Instrumen yang tercantum meliputi kebijakan seperti “*buy local*” dan tingkat kandungan dalam negeri. Kolom mekanisme menunjukkan bahwa pemerintah memprioritaskan produk domestik dalam pengadaan barang dan jasa. Kebijakan ini menciptakan diskriminasi terhadap produk impor karena akses ke pasar pemerintah menjadi terbatas. Kolom transparansi rendah karena aturan pengadaan sering memiliki banyak detail teknis dan dapat berbeda antar sektor.

Hubungan antar kolom dalam tabel menunjukkan variasi cara negara mengendalikan perdagangan. Instrumen yang lebih langsung seperti tarif memiliki transparansi tinggi, sedangkan instrumen yang lebih tidak langsung seperti regulasi teknis dan kebijakan nilai tukar cenderung memiliki transparansi lebih rendah. Pergeseran dari tarif ke hambatan non-tarif mencerminkan perubahan strategi kebijakan perdagangan, di mana pembatasan dilakukan melalui mekanisme yang lebih kompleks dan sering kali lebih sulit diidentifikasi dampaknya. Struktur tabel ini memperlihatkan bahwa liberalisasi tarif tidak menghilangkan proteksi perdagangan, melainkan mengubah bentuknya. Negara tetap memiliki berbagai alat untuk melindungi industri domestik, baik melalui pembatasan kuantitatif, regulasi teknis, maupun kebijakan ekonomi yang memengaruhi harga dan daya saing.

C. Proteksionisme vs Liberalisasi Perdagangan

Debat antara proteksionisme dan liberalisasi perdagangan adalah salah satu perdebatan paling lama dan paling panas dalam ekonomi

politik internasional. Irwin (2020) dalam *Free Trade Under Fire* memberikan penilaian komprehensif terhadap argumen kedua sisi. Perdebatan antara proteksionisme dan liberalisasi perdagangan telah berlangsung lama karena menyangkut pilihan antara melindungi kepentingan domestik atau membuka ekonomi terhadap persaingan global. Pendukung proteksionisme menilai pembatasan perdagangan penting untuk menjaga industri dalam negeri, lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi, sementara pendukung liberalisasi menekankan manfaat efisiensi, harga yang lebih rendah, serta peningkatan kesejahteraan melalui perdagangan bebas. Perbedaan pandangan ini membuat diskusi menjadi intens dan berkelanjutan, karena masing-masing memiliki dasar argumen yang kuat baik dari sisi ekonomi maupun politik. Karya Irwin memberikan kajian menyeluruh yang menimbang kelebihan dan kelemahan dari kedua pendekatan tersebut.

Tabel 4.2 Argumen Proteksionisme vs Liberalisasi Perdagangan

Dimensi	Argumen Proteksionisme	Argumen Liberalisasi
Industri	<i>Infant industry argument</i>	Efisiensi alokasi & skala
Pekerjaan	Lindungi pekerjaan domestik	Ciptakan pekerjaan di sektor kompetitif
Keamanan	<i>Strategic industry</i> (militer, pangan)	Ketergantungan = <i>peace dividend</i>
Distribusi	Lindungi kelompok rentan	Gains dapat dikompensasi
Inovasi	Beri ruang inovasi domestik	Kompetisi mendorong inovasi
Bukti empiris	Raikhel & Trefler (2016): <i>infant industry</i> ada	Wacziarg & Welch (2022): liberalisasi + 1,5% <i>growth</i>

Sumber: Irwin, D.A. (2020)

Tabel 4.2 membandingkan dua pendekatan utama dalam kebijakan perdagangan, yaitu proteksionisme dan liberalisasi

perdagangan, melalui beberapa dimensi penting. Setiap baris menunjukkan perbedaan logika kebijakan, tujuan ekonomi, serta implikasi yang dihasilkan dari masing-masing pendekatan. Baris pertama adalah “Industri”. Kolom proteksionisme *menampilkan infant industry argument*, yaitu gagasan bahwa industri yang masih baru perlu dilindungi dari persaingan internasional hingga cukup kuat untuk bersaing. Perlindungan biasanya dilakukan melalui tarif atau pembatasan impor. Kolom liberalisasi menekankan efisiensi alokasi dan skala produksi. Perdagangan bebas memungkinkan sumber daya dialokasikan ke sektor yang paling produktif dan perusahaan dapat memproduksi dalam skala lebih besar, sehingga biaya per unit menurun.

Baris kedua adalah “Pekerjaan”. Argumen proteksionisme berfokus pada perlindungan lapangan kerja domestik. Pembatasan impor dianggap dapat menjaga industri lokal tetap beroperasi dan mempertahankan tenaga kerja. Argumen liberalisasi menyoroti penciptaan pekerjaan di sektor yang memiliki keunggulan kompetitif. Perdagangan membuka peluang ekspansi industri yang efisien, sehingga menciptakan lapangan kerja baru meskipun beberapa sektor mungkin mengalami penurunan.

Baris ketiga adalah “Keamanan”. Proteksionisme menekankan pentingnya menjaga industri strategis seperti pertahanan, energi, dan pangan agar tidak bergantung pada negara lain. Ketergantungan dianggap berisiko dalam situasi konflik atau krisis global. Liberalisasi melihat ketergantungan ekonomi sebagai faktor yang dapat mengurangi konflik antarnegara. Hubungan dagang yang saling menguntungkan menciptakan insentif untuk menjaga stabilitas dan perdamaian.

Baris keempat adalah “Distribusi”. Pendekatan proteksionisme berupaya melindungi kelompok rentan, seperti pekerja di industri yang terancam oleh impor. Kebijakan ini bertujuan mengurangi dampak negatif globalisasi terhadap kelompok tertentu. Pendekatan liberalisasi mengakui adanya ketimpangan distribusi, namun berargumen bahwa keuntungan dari perdagangan dapat digunakan untuk memberikan kompensasi melalui kebijakan domestik seperti pajak dan program sosial.

Baris kelima adalah “Inovasi”. Proteksionisme memberikan ruang bagi perusahaan domestik untuk berkembang tanpa tekanan kompetisi asing, sehingga dapat mendorong inovasi dalam lingkungan yang lebih terlindungi. Liberalisasi menekankan bahwa persaingan

internasional justru menjadi pendorong utama inovasi. Perusahaan dipaksa meningkatkan kualitas produk dan efisiensi agar tetap bertahan di pasar global.

Baris keenam adalah “Bukti empiris”. Kolom proteksionisme merujuk pada penelitian Raikhel dan Trefler (2016) yang menemukan bahwa perlindungan terhadap industri baru dalam kondisi tertentu dapat memberikan hasil positif. Kolom liberalisasi mengacu pada studi Wacziarg dan Welch (2022) yang menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan berkorelasi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sekitar 1,5 persen. Data ini menunjukkan bahwa kedua pendekatan memiliki dukungan empiris, meskipun dalam konteks yang berbeda.

Hubungan antar kolom dalam tabel menunjukkan bahwa perbedaan utama terletak pada prioritas kebijakan. Proteksionisme menekankan stabilitas domestik dan perlindungan sektor tertentu, sedangkan liberalisasi menekankan efisiensi, pertumbuhan, dan integrasi global. Setiap dimensi mencerminkan *trade-off* antara perlindungan jangka pendek dan keuntungan jangka panjang. Struktur tabel ini memperlihatkan bahwa pilihan kebijakan perdagangan tidak bersifat hitam-putih. Negara sering menggabungkan kedua pendekatan sesuai dengan kondisi ekonomi, struktur industri, dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai.

D. Kebijakan Subsidi dan *Dumping*

Subsidi ekspor adalah transfer dari pemerintah kepada produsen domestik yang bertujuan meningkatkan daya saing ekspor dengan cara menurunkan biaya produksi atau menjamin harga minimum. WTO *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* membagi subsidi menjadi: terlarang (*prohibited*), dapat digugat (*actionable*), dan tidak dapat digugat (*non-actionable*). Subsidi ekspor merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada produsen dalam negeri agar produk mereka lebih kompetitif di pasar internasional, baik melalui penurunan biaya produksi maupun jaminan harga tertentu. Kebijakan ini dapat membantu meningkatkan volume ekspor, tetapi juga berpotensi menimbulkan distorsi perdagangan dan persaingan tidak sehat antarnegara. Oleh karena itu, WTO mengatur subsidi melalui perjanjian *Subsidies and Countervailing Measures* dengan mengelompokkan jenis subsidi berdasarkan tingkat pelanggaran dan dampaknya, yaitu subsidi

yang secara langsung dilarang karena sangat merusak persaingan, subsidi yang dapat dipermasalahkan jika merugikan negara lain, serta subsidi yang tidak menimbulkan keberatan tertentu.

Definisi *Dumping* (GATT Article VI)

Dumping terjadi ketika produsen mengeksport suatu produk dengan harga di bawah harga normal — biasanya didefinisikan sebagai harga di bawah biaya produksi atau harga jual di pasar domestik negara pengekspor. WTO mengizinkan negara Importir untuk mengenakan anti-dumping duty jika dapat dibuktikan bahwa dumping tersebut menyebabkan material injury pada industri domestik.

Kebijakan subsidi dan dumping merupakan dua instrumen penting dalam kebijakan perdagangan internasional yang sering digunakan oleh negara untuk memengaruhi daya saing produk di pasar global, meskipun keduanya memiliki karakteristik, tujuan, dan implikasi yang berbeda. Kebijakan subsidi merujuk pada bantuan finansial atau dukungan ekonomi yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen domestik, baik dalam bentuk langsung seperti hibah dan insentif pajak, maupun tidak langsung seperti penyediaan infrastruktur, kemudahan kredit, atau harga energi yang lebih rendah. Tujuan utama dari subsidi adalah untuk menurunkan biaya produksi sehingga harga jual produk menjadi lebih kompetitif, baik di pasar domestik maupun internasional. Dengan adanya subsidi, produsen dalam negeri dapat bertahan menghadapi persaingan global, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas ekspor. Dalam banyak kasus, subsidi juga digunakan untuk melindungi sektor-sektor strategis seperti pertanian, energi, dan industri manufaktur, yang dianggap penting bagi ketahanan ekonomi dan stabilitas sosial suatu negara.

Di sisi lain, dumping adalah praktik menjual barang di pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di pasar domestik, atau bahkan di bawah biaya produksi. Praktik ini biasanya dilakukan oleh perusahaan atau negara dengan tujuan untuk merebut pangsa pasar di negara tujuan, melemahkan pesaing lokal, dan pada akhirnya menciptakan dominasi pasar. Dumping sering dianggap sebagai bentuk persaingan tidak sehat karena dapat merugikan industri domestik negara pengimpor yang tidak mampu bersaing dengan harga

yang sangat rendah tersebut. Dalam jangka pendek, konsumen di negara tujuan mungkin diuntungkan karena mendapatkan barang dengan harga murah, tetapi dalam jangka panjang praktik ini dapat menyebabkan kerusakan struktural pada industri lokal, termasuk kebangkrutan perusahaan, pengangguran, dan ketergantungan pada produk impor.

Meskipun berbeda, subsidi dan dumping sering kali saling terkait dalam praktik perdagangan internasional. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah dapat memungkinkan produsen untuk menjual produk mereka di pasar luar negeri dengan harga yang sangat rendah, sehingga secara tidak langsung mendorong terjadinya dumping. Oleh karena itu, banyak negara dan organisasi internasional memandang subsidi tertentu sebagai bentuk distorsi perdagangan yang dapat memicu praktik dumping. Dalam kerangka hukum perdagangan internasional, subsidi dan dumping diatur secara ketat untuk menjaga persaingan yang adil. Negara yang merasa dirugikan oleh praktik dumping dapat mengenakan bea masuk anti-dumping, yaitu tarif tambahan yang bertujuan untuk menetralkan dampak harga yang tidak wajar tersebut. Demikian pula, subsidi yang dianggap merugikan negara lain dapat dikenakan tindakan balasan berupa bea imbalan atau countervailing duties.

Namun, tidak semua subsidi dianggap merugikan atau dilarang. Dalam beberapa kasus, subsidi justru diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi, seperti mendukung inovasi teknologi, meningkatkan kesejahteraan petani, atau mendorong transisi energi bersih. Oleh karena itu, regulasi internasional biasanya membedakan antara subsidi yang diperbolehkan, subsidi yang dapat ditindak, dan subsidi yang dilarang. Subsidi yang bersifat transparan dan tidak secara langsung mendistorsi perdagangan cenderung lebih dapat diterima dibandingkan subsidi yang secara eksplisit bertujuan untuk meningkatkan ekspor atau menggantikan impor.

Dari perspektif ekonomi, kebijakan subsidi memiliki kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi, subsidi dapat membantu industri baru berkembang (infant industry argument), meningkatkan daya saing, serta melindungi sektor-sektor penting dari guncangan eksternal. Di sisi lain, subsidi juga dapat membebani anggaran negara, menciptakan ketergantungan pada bantuan pemerintah, serta mengurangi efisiensi ekonomi karena perusahaan tidak terdorong untuk berinovasi atau meningkatkan produktivitas. Sementara itu, dumping sebagai strategi perdagangan juga memiliki dampak yang kompleks. Bagi pelaku usaha

yang melakukan dumping, strategi ini dapat menjadi cara efektif untuk menembus pasar baru. Namun, bagi negara tujuan, dumping sering kali dipandang sebagai ancaman serius terhadap keberlangsungan industri domestik.

Dalam praktik global, isu subsidi dan dumping sering menjadi sumber sengketa perdagangan antarnegara. Banyak kasus di mana negara-negara saling menuduh melakukan praktik dumping atau memberikan subsidi yang tidak adil, yang kemudian diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan subsidi dan dumping tidak hanya merupakan isu ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi politik dan diplomasi yang kuat. Negara harus berhati-hati dalam merancang dan menerapkan kebijakan ini agar tidak melanggar aturan internasional atau memicu konflik perdagangan.

Kebijakan subsidi dan dumping mencerminkan dinamika kompleks dalam perdagangan internasional, di mana negara berusaha menyeimbangkan antara kepentingan domestik dan komitmen global. Subsidi dapat menjadi alat yang sah untuk mendukung pembangunan ekonomi jika digunakan secara tepat dan transparan, sementara dumping umumnya dianggap sebagai praktik yang merugikan dan perlu dikendalikan. Pemahaman yang mendalam tentang kedua konsep ini sangat penting bagi pembuat kebijakan dan pelaku usaha agar dapat mengambil keputusan yang strategis dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

E. Perjanjian Perdagangan Internasional

Perjanjian perdagangan internasional adalah kesepakatan hukum antara dua atau lebih negara untuk liberalisasi perdagangan barang, jasa, dan investasi. Proliferasi perjanjian perdagangan internasional dari sekitar 70 pada 1990 menjadi lebih dari 350 pada 2023 mencerminkan ketidakpuasan dengan laju negosiasi multilateral WTO. Perjanjian perdagangan internasional merupakan kesepakatan resmi antarnegara untuk membuka akses pasar dan mengurangi hambatan dalam perdagangan barang, jasa, serta investasi. Jumlah perjanjian yang terus meningkat menunjukkan bahwa banyak negara memilih jalur kerja sama bilateral atau regional untuk mempercepat liberalisasi ekonomi. Kondisi

ini muncul karena proses negosiasi di tingkat global melalui WTO sering berjalan lambat dan sulit mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan semua pihak. Perkembangan tersebut menggambarkan pergeseran strategi negara dalam mengelola hubungan perdagangan menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan terfokus.

Tabel 4.3 Perjanjian Perdagangan Regional Utama di Asia-Pasifik

Nama	Anggota	GDP Gabungan	Tahun Berlaku
RCEP	15 negara (ASEAN+5)	USD 26,2 T (30% dunia)	2022
CPTPP	11 negara	USD 13,5 T (13% dunia)	2018
ASEAN FTA	10 negara ASEAN	USD 3,6 T	2015 (AEC)
CAFTA (China-ASEAN)	China + ASEAN	USD 20 T	2010 (upgrade 2019)
Indonesia-Australia CEPA	2 negara	USD 1,8 T	2020

Sumber: WTO Regional Trade Agreements Database (2023)

Tabel 4.3 menyajikan beberapa perjanjian perdagangan internasional utama di kawasan Asia-Pasifik. Baris pertama adalah RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*). Kolom anggota menunjukkan 15 negara yang terdiri dari ASEAN ditambah lima mitra utama seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Kolom GDP gabungan mencatat nilai sekitar USD 26,2 triliun atau sekitar 30% dari ekonomi Global, yang menjadikannya salah satu blok perdagangan terbesar di dunia. Kolom tahun berlaku menunjukkan implementasi dimulai pada 2022. Data ini menunjukkan bahwa RCEP memiliki cakupan luas baik dari sisi jumlah negara maupun ukuran ekonomi, sehingga berpotensi besar dalam membentuk arus perdagangan regional.

Baris kedua adalah CPTPP (*Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership*). Kolom anggota

mencantumkan 11 negara yang tersebar di kawasan Asia-Pasifik dan Amerika. Kolom GDP gabungan menunjukkan sekitar USD 13,5 triliun atau 13% dari ekonomi dunia. Kolom tahun berlaku menunjukkan tahun 2018. Perjanjian ini dikenal memiliki standar tinggi dalam isu seperti perlindungan investasi, hak kekayaan intelektual, dan aturan perdagangan digital, sehingga tidak hanya berfokus pada penurunan tarif.

Baris ketiga adalah ASEAN FTA (*ASEAN Free Trade Area*). Kolom anggota mencantumkan 10 negara ASEAN. Kolom GDP gabungan menunjukkan sekitar USD 3,6 triliun. Kolom tahun berlaku mengacu pada 2015 melalui pembentukan *ASEAN Economic Community* (AEC). Perjanjian ini bertujuan menciptakan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara, dengan penekanan pada pengurangan hambatan perdagangan intra-regional dan peningkatan integrasi ekonomi.

Baris keempat adalah CAFTA (*China–ASEAN Free Trade Area*). Kolom anggota menunjukkan kerja sama antara China dan negara-negara ASEAN. Kolom GDP gabungan mencatat sekitar USD 20 triliun, mencerminkan kombinasi ekonomi besar China dan kawasan Asia Tenggara. Kolom tahun berlaku menunjukkan implementasi awal pada 2010 dengan pembaruan pada 2019. Perjanjian ini memperkuat hubungan perdagangan antara China dan ASEAN, terutama dalam sektor manufaktur dan rantai pasok regional.

Baris kelima adalah Indonesia–Australia CEPA (*Comprehensive Economic Partnership Agreement*). Kolom anggota menunjukkan dua negara, yaitu Indonesia dan Australia. Kolom GDP gabungan mencatat sekitar USD 1,8 triliun. Kolom tahun berlaku menunjukkan tahun 2020. Perjanjian ini bersifat bilateral dan lebih terfokus, mencakup akses pasar, investasi, serta kerja sama ekonomi yang lebih mendalam antara kedua negara.

Hubungan antar kolom dalam tabel menunjukkan variasi skala dan kedalaman perjanjian. Perjanjian dengan jumlah anggota lebih banyak cenderung memiliki GDP gabungan yang besar dan dampak luas terhadap perdagangan regional. Perjanjian bilateral memiliki cakupan anggota yang lebih sempit, namun dapat dirancang lebih spesifik sesuai kepentingan kedua negara.

Perbedaan tahun berlaku menunjukkan dinamika perkembangan kerja sama perdagangan di kawasan. Perjanjian yang lebih baru mencerminkan upaya lanjutan untuk memperdalam integrasi ekonomi,

terutama dalam menghadapi perubahan global seperti digitalisasi dan restrukturisasi rantai pasok. Struktur tabel ini memberikan gambaran bahwa strategi liberalisasi perdagangan tidak hanya dilakukan melalui satu jalur. Negara dapat memilih kerja sama multilateral, regional, atau bilateral sesuai dengan kepentingan ekonomi dan politiknya.

F. Dampak Kebijakan terhadap Perekonomian

Caliendo dan Parro (2015) menggunakan model kuantitatif keseimbangan umum untuk mengestimasi dampak NAFTA dan menemukan bahwa perjanjian tersebut meningkatkan kesejahteraan AS sebesar 0,08%, Kanada 0,06%, dan Meksiko 1,31%. Variasi ini mencerminkan bahwa negara yang lebih kecil dan lebih terbuka umumnya mendapat manfaat relatif lebih besar dari liberalisasi perdagangan. Autor, Dorn, dan Hanson (2021) dalam update studi mereka tetap menunjukkan bahwa dampak *China shock* terhadap pasar tenaga kerja AS persisten, meski kompensasi via program sosial dapat mengatasi dampak distribusional ini.

Dampak perjanjian perdagangan tidak dirasakan secara merata oleh setiap negara, karena besarnya manfaat bergantung pada karakteristik ekonomi masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara yang lebih kecil dan lebih terbuka cenderung memperoleh keuntungan relatif lebih besar dari liberalisasi perdagangan, sementara negara besar mungkin hanya mengalami peningkatan kesejahteraan yang lebih kecil secara persentase. Temuan lain menunjukkan bahwa dampak negatif dari perdagangan, seperti berkurangnya pekerjaan di sektor tertentu akibat persaingan impor, dapat bertahan dalam jangka panjang, meskipun kebijakan sosial dari pemerintah dapat membantu mengurangi beban yang dirasakan oleh kelompok yang terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan membawa manfaat agregat, tetapi tetap menimbulkan tantangan distribusi yang perlu ditangani secara kebijakan.



BAB V

SISTEM KEUANGAN INTERNASIONAL

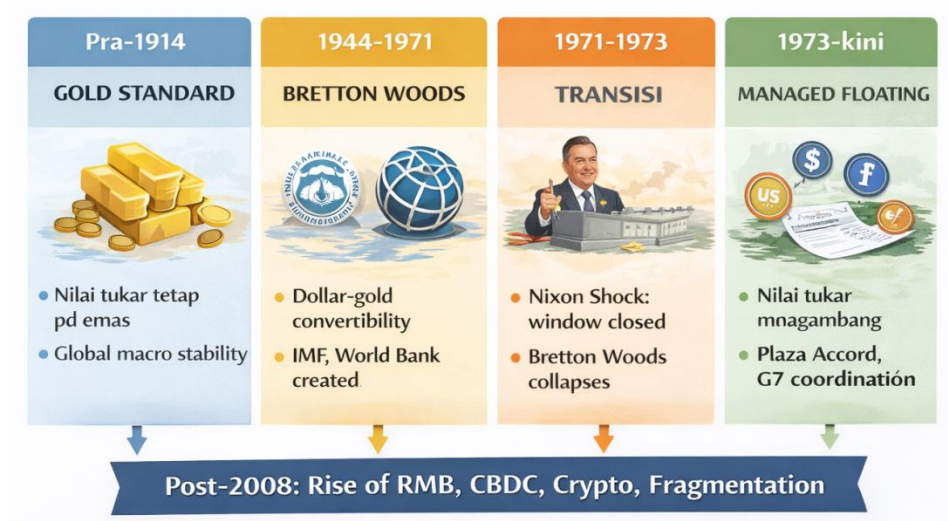
Sistem keuangan internasional adalah jaringan pasar, institusi, regulasi, dan konvensi yang memfasilitasi transaksi keuangan antarnegara, termasuk perdagangan valuta, aliran modal, pinjaman internasional, dan pembayaran lintas batas. Obsfeld (2021) mendefinisikannya sebagai "infrastruktur tersembunyi" yang memungkinkan perdagangan dan investasi internasional berfungsi. Sistem keuangan internasional merupakan struktur kompleks yang terdiri dari berbagai pasar, lembaga, aturan, dan praktik yang mendukung berlangsungnya transaksi keuangan antarnegara, seperti pertukaran mata uang, arus investasi, pinjaman lintas negara, serta sistem pembayaran global. Sistem ini bekerja di balik layar sebagai fondasi yang memastikan aktivitas perdagangan dan investasi dapat berjalan lancar, aman, dan terkoordinasi. Tanpa keberadaan mekanisme ini, hubungan ekonomi global akan sulit berlangsung secara efisien karena tidak ada sarana yang memadai untuk memindahkan dana, mengelola risiko, dan menyelesaikan transaksi antarnegara.

A. Pengertian Sistem Keuangan Internasional

Sistem keuangan internasional mencakup seluruh mekanisme yang digunakan oleh negara-negara untuk saling berinteraksi secara finansial: nilai tukar, neraca pembayaran, pasar uang dan modal internasional, serta institusi-institusi yang mengawasi dan menstabilkan sistem tersebut. Sejarah sistem keuangan internasional modern dimulai dari *Bretton Woods Agreement* (1944) yang membentuk sistem nilai tukar tetap berbasis dolar AS dan emas. Sistem keuangan internasional

mencakup berbagai mekanisme yang memungkinkan negara-negara melakukan transaksi dan hubungan finansial lintas batas, seperti penentuan nilai tukar mata uang, pencatatan neraca pembayaran, serta aktivitas di pasar uang dan pasar modal global yang didukung oleh lembaga-lembaga pengatur dan penstabil. Keberadaan sistem ini membuat interaksi ekonomi antarnegara dapat berlangsung teratur dan terkoordinasi. Perkembangan sistem modernnya berawal dari kesepakatan *Bretton Woods* yang menetapkan kerangka nilai tukar tetap berbasis dolar AS yang dikaitkan dengan emas, sehingga menciptakan stabilitas awal dalam hubungan keuangan internasional pasca Perang Dunia II.

Gambar 4. Evolusi Sistem Keuangan Internasional Pasca-WW2



Sumber: Eichengreen, B. (2019)

Gambar 4 menggambarkan evolusi sistem keuangan internasional dalam empat periode utama, yang disusun secara kronologis dari sebelum 1914 hingga era modern. Setiap kolom menunjukkan rezim nilai tukar, karakteristik utama sistem, serta peristiwa penting yang membentuk perubahan antarperiode. Bagian pertama adalah Pra-1914: *Gold Standard*. Pada fase ini, nilai tukar mata uang ditetapkan berdasarkan emas. Setiap mata uang memiliki nilai yang dikaitkan langsung dengan sejumlah emas tertentu, sehingga kurs antar mata uang menjadi tetap. Stabilitas makroekonomi global terbentuk karena negara-negara berkomitmen menjaga konvertibilitas mata

uangnya terhadap emas. Arus perdagangan dan investasi internasional berjalan relatif lancar karena kepastian nilai tukar yang tinggi. Sistem ini bergantung pada disiplin moneter yang ketat, karena jumlah uang beredar harus sesuai dengan cadangan emas.

Bagian kedua adalah 1944–1971: *Bretton Woods*. Diagram menunjukkan bahwa sistem ini berbasis pada konvertibilitas dolar terhadap emas (*dollar-gold convertibility*). Negara-negara lain menambatkan mata uangnya terhadap dolar AS, sementara dolar dapat ditukar dengan emas pada nilai tetap. Kolom keterangan juga mencantumkan pembentukan institusi seperti IMF dan World Bank yang berfungsi menjaga stabilitas sistem. IMF berperan dalam mengawasi nilai tukar dan memberikan bantuan keuangan, sedangkan *World Bank* fokus pada pembiayaan pembangunan. Sistem ini menciptakan stabilitas nilai tukar sekaligus memberikan fleksibilitas terbatas melalui penyesuaian yang terkoordinasi.

Bagian ketiga adalah 1971–1973: Transisi. Diagram menyoroti peristiwa *Nixon Shock*, yaitu keputusan Amerika Serikat untuk menutup konvertibilitas dolar terhadap emas. Kebijakan ini mengakhiri mekanisme utama *Bretton Woods*. Sistem nilai tukar tetap tidak dapat dipertahankan karena tekanan ketidakseimbangan global dan meningkatnya permintaan dolar. Kolom keterangan menyebutkan bahwa *Bretton Woods* mengalami keruntuhan pada periode ini. Negara-negara mulai mencari bentuk sistem baru yang lebih fleksibel.

Bagian keempat adalah 1973–kini: *Managed Floating*. Pada fase ini, nilai tukar mata uang dibiarkan mengambang di pasar, tetapi tetap dapat dipengaruhi oleh intervensi pemerintah atau bank sentral. Diagram mencantumkan contoh koordinasi internasional seperti *Plaza Accord* dan kerja sama G7. Mekanisme ini memberikan fleksibilitas lebih besar dalam menyesuaikan kondisi ekonomi domestik, namun juga meningkatkan volatilitas nilai tukar. Negara memiliki ruang kebijakan yang lebih luas untuk merespons krisis atau perubahan ekonomi global.

Bagian tambahan di bawah diagram menunjukkan perkembangan pasca-2008, yang mencakup munculnya peran mata uang China (RMB), perkembangan mata uang digital bank sentral (CBDC), serta aset kripto. Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan fragmentasi dalam sistem keuangan global. Perubahan ini mencerminkan pergeseran kekuatan ekonomi serta inovasi teknologi dalam sektor keuangan.

Hubungan antar periode dalam diagram menunjukkan transisi dari sistem yang sangat terikat pada komoditas fisik (emas), menuju sistem berbasis kepercayaan pada mata uang utama, hingga akhirnya menuju sistem yang lebih fleksibel dan berbasis pasar. Setiap perubahan dipicu oleh tekanan ekonomi global, ketidakseimbangan neraca pembayaran, serta kebutuhan akan stabilitas dan fleksibilitas. Struktur diagram ini memberikan gambaran bahwa sistem keuangan internasional terus berevolusi mengikuti dinamika ekonomi dan politik dunia. Setiap rezim memiliki karakteristik, keunggulan, dan keterbatasan yang membentuk cara negara berinteraksi dalam sistem keuangan global.

B. Sistem Nilai Tukar

Sistem Nilai Tukar

Nilai tukar (*Exchange rate*) adalah harga satu mata uang dalam satuan mata uang lain. Tiga sistem nilai tukar utama adalah: (1) *Fixed Exchange rate*: nilai tukar ditetapkan terhadap mata uang acuan (USD, emas, basket); (2) *Freely Floating*: nilai tukar ditentukan sepenuhnya oleh pasar; (3) *Managed float (dirty float)*: nilai tukar pada dasarnya mengambang tetapi bank sentral melakukan intervensi secara berkala untuk mengurangi volatilitas (IMF, 2022).

Tabel 5.1 Perbandingan Sistem Nilai Tukar

Aspek	<i>Fixed Rate</i>	<i>Floating Rate</i>	<i>Managed Float</i>
Mekanisme	Ditetapkan otoritas	Pasar (<i>supply/demand</i>)	Pasar + intervensi BI
Fleksibilitas	Rendah	Tinggi	Menengah
Stabilitas harga	Tinggi	Bergantung bank sentral	Menengah- Tinggi
Cadangan devisa	Harus besar	Tidak kritis	Diperlukan moderat
Otonomi moneter	Terbatas	Penuh	Semi-otonom

Contoh negara	Hongkong (HKD-USD)	Inggris, AS, Jepang	Indonesia, India, China
Risiko utama	Speculative attack	<i>Excessive volatility</i>	Kredibilitas komitmen

Tabel 5.1 membandingkan tiga sistem nilai tukar utama yaitu *Fixed Rate*, *Floating Rate*, dan *Managed Float* melalui beberapa aspek penting yang menunjukkan cara kerja, kelebihan, serta risikonya. Setiap kolom merepresentasikan satu sistem, sedangkan setiap baris menjelaskan karakteristik spesifik dari sistem tersebut. Baris pertama adalah “Mekanisme”. Pada *Fixed Rate*, nilai tukar ditetapkan oleh otoritas moneter, biasanya dikaitkan dengan mata uang tertentu seperti dolar AS atau keranjang mata uang. Pemerintah atau bank sentral memiliki peran dominan dalam menjaga nilai tukar tetap pada level yang ditentukan. Pada *Floating Rate*, nilai tukar sepenuhnya ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran di pasar valuta asing tanpa intervensi langsung. Pada *managed float*, mekanisme dasarnya mengikuti pasar, namun bank sentral tetap melakukan intervensi pada kondisi tertentu untuk mengarahkan pergerakan nilai tukar.

Baris kedua adalah “Fleksibilitas”. *Fixed rate* memiliki fleksibilitas rendah karena nilai tukar dijaga tetap stabil dan tidak mudah berubah. *Floating rate* memiliki fleksibilitas tinggi karena nilai tukar dapat bergerak bebas mengikuti kondisi ekonomi dan pasar global. *Managed float* berada di tengah, karena nilai tukar dapat bergerak, tetapi masih dikendalikan dalam batas tertentu oleh otoritas moneter.

Baris ketiga adalah “Stabilitas harga”. *Fixed rate* cenderung memberikan stabilitas harga yang tinggi karena nilai tukar yang tetap mengurangi ketidakpastian dalam perdagangan internasional. *Floating rate* memiliki stabilitas yang bergantung pada kredibilitas dan kebijakan bank sentral dalam mengendalikan inflasi. *Managed float* memberikan stabilitas menengah hingga tinggi karena adanya intervensi yang bertujuan meredam fluktuasi ekstrem.

Baris keempat adalah “Cadangan devisa”. *Fixed rate* memerlukan cadangan devisa yang besar karena bank sentral harus siap melakukan intervensi untuk mempertahankan nilai tukar. *Floating rate* tidak menjadikan cadangan devisa sebagai faktor kritis karena pasar menentukan nilai tukar secara alami. *Managed float* membutuhkan

cadangan devisa dalam jumlah moderat karena intervensi dilakukan hanya pada kondisi tertentu, tidak secara terus-menerus.

Baris kelima adalah “Otonomi moneter”. *Fixed rate* membatasi kebijakan moneter karena bank sentral harus memprioritaskan stabilitas nilai tukar dibandingkan tujuan domestik seperti pengendalian inflasi atau pertumbuhan ekonomi. *Floating rate* memberikan otonomi penuh kepada bank sentral untuk menjalankan kebijakan moneter sesuai kebutuhan domestik. *Managed float* memberikan otonomi sebagian, karena bank sentral masih harus mempertimbangkan stabilitas nilai tukar saat mengambil kebijakan.

Baris keenam adalah “Contoh negara”. *Fixed rate* dicontohkan oleh Hong Kong yang menambatkan mata uangnya terhadap dolar AS. *Floating rate* diterapkan oleh negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang, di mana nilai tukar bergerak bebas di pasar. *Managed float* digunakan oleh negara seperti Indonesia, India, dan China, yang menggabungkan mekanisme pasar dengan intervensi otoritas.

Baris ketujuh adalah “Risiko utama”. *Fixed rate* menghadapi risiko *speculative attack*, yaitu serangan spekulatif yang dapat mengguncang cadangan devisa jika pasar meragukan kemampuan mempertahankan nilai tukar. *Floating rate* menghadapi risiko volatilitas berlebihan karena nilai tukar dapat berfluktuasi tajam akibat perubahan sentimen pasar. *Managed float* menghadapi tantangan kredibilitas, karena efektivitas intervensi bergantung pada kepercayaan pasar terhadap komitmen dan kapasitas bank sentral.

Hubungan antar aspek dalam tabel menunjukkan adanya *Trade-off* antara stabilitas dan fleksibilitas. Sistem dengan stabilitas tinggi cenderung mengorbankan fleksibilitas dan otonomi kebijakan, sedangkan sistem yang fleksibel menghadapi tantangan volatilitas. *Managed float* muncul sebagai kompromi yang mencoba menyeimbangkan kedua sisi tersebut melalui kombinasi mekanisme pasar dan intervensi kebijakan.

C. Pasar Valuta Asing (*Forex Market*)

Pasar valuta asing atau *foreign exchange market* (forex) merupakan pasar keuangan global yang berfungsi sebagai tempat terjadinya transaksi pertukaran mata uang antarnegara, sekaligus menjadi salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi internasional

modern. Berbeda dengan pasar keuangan lainnya seperti pasar saham yang terpusat pada bursa tertentu, pasar valuta asing bersifat desentralisasi (*over-the-counter market*), yang berarti transaksi dilakukan secara elektronik melalui jaringan perbankan dan institusi keuangan tanpa lokasi fisik tunggal. Skala pasar ini sangat besar, dengan nilai transaksi harian mencapai sekitar USD 7,5 triliun menurut data Bank for International Settlements pada April 2022, menjadikannya pasar terbesar dan paling likuid di dunia. Likuiditas yang tinggi ini memungkinkan pelaku pasar untuk melakukan transaksi dalam jumlah besar dengan cepat tanpa memengaruhi harga secara signifikan, sehingga pasar forex menjadi sangat efisien dalam pembentukan harga atau nilai tukar.

Pasar valuta asing beroperasi selama 24 jam sehari, lima hari dalam seminggu, mengikuti siklus waktu dari pusat-pusat keuangan utama dunia seperti Tokyo, London, dan New York. Ketika pasar di satu wilayah tutup, pasar di wilayah lain akan buka, sehingga aktivitas perdagangan berlangsung hampir tanpa henti. Karakteristik ini menjadikan pasar forex sangat dinamis dan responsif terhadap berbagai informasi ekonomi, politik, maupun sosial yang muncul di berbagai belahan dunia. Pelaku utama dalam pasar ini sangat beragam, mulai dari bank sentral yang bertugas menjaga stabilitas mata uang nasional, bank komersial yang melakukan transaksi untuk kepentingan nasabah maupun sendiri, perusahaan multinasional yang membutuhkan valuta asing untuk kegiatan perdagangan internasional, hingga lembaga investasi seperti hedge fund dan investor individu yang mencari keuntungan dari fluktuasi nilai tukar.

Fungsi utama pasar valuta asing adalah memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi lintas negara. Tanpa adanya pasar ini, perusahaan akan kesulitan melakukan pembayaran dalam mata uang asing atau mengonversi pendapatan dari luar negeri ke dalam mata uang domestik. Selain itu, pasar forex juga berfungsi sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) terhadap risiko nilai tukar. Misalnya, perusahaan yang memiliki kewajiban pembayaran dalam mata uang asing di masa depan dapat menggunakan kontrak forward atau futures untuk mengunci nilai tukar saat ini, sehingga terhindar dari risiko fluktuasi kurs. Di samping itu, pasar valuta asing juga menjadi tempat spekulasi, di mana pelaku pasar mencoba memperoleh keuntungan dari perubahan nilai tukar yang terjadi dalam jangka pendek.

Pergerakan nilai tukar di pasar valuta asing dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Dalam jangka pendek, salah satu determinan utama adalah diferensial suku bunga antarnegara, yang dijelaskan melalui konsep *interest rate parity*, baik dalam bentuk *covered interest parity* maupun *uncovered interest parity*. Secara sederhana, teori ini menyatakan bahwa perbedaan suku bunga antara dua negara akan tercermin dalam pergerakan nilai tukar, sehingga tidak ada peluang arbitrase yang dapat dimanfaatkan secara konsisten. Ketika suatu negara menawarkan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan negara lain, mata uangnya cenderung menguat karena menarik aliran modal masuk dari investor global yang mencari imbal hasil lebih tinggi. Namun, dalam praktiknya, hubungan ini tidak selalu linier karena dipengaruhi oleh faktor lain seperti risiko, kebijakan moneter, dan kondisi ekonomi global.

Selain suku bunga, ekspektasi pelaku pasar juga memainkan peran penting dalam menentukan nilai tukar. Nilai mata uang tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga harapan terhadap kondisi masa depan. Jika investor memperkirakan bahwa suatu negara akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat atau kebijakan moneter yang ketat, maka mata uang negara tersebut cenderung menguat bahkan sebelum perubahan tersebut benar-benar terjadi. Sebaliknya, ketidakpastian politik, krisis ekonomi, atau kebijakan yang tidak kredibel dapat menyebabkan depresiasi mata uang secara cepat. Dalam konteks ini, sentimen pasar menjadi faktor yang sangat berpengaruh, karena persepsi dan psikologi investor sering kali mendorong pergerakan harga yang tidak sepenuhnya rasional.

Dalam jangka panjang, teori yang sering digunakan untuk menjelaskan pergerakan nilai tukar adalah *Purchasing Power Parity* (PPP), yang menyatakan bahwa nilai tukar antara dua mata uang seharusnya mencerminkan perbandingan tingkat harga di kedua negara tersebut. Dengan kata lain, satu unit mata uang seharusnya memiliki daya beli yang sama di berbagai negara setelah dikonversi melalui nilai tukar. Jika harga barang di suatu negara meningkat lebih cepat dibandingkan negara lain, maka mata uang negara tersebut cenderung mengalami depresiasi dalam jangka panjang. Meskipun demikian, penelitian oleh Kenneth Rogoff menunjukkan bahwa dalam kenyataannya nilai tukar sering kali menyimpang secara signifikan dari PPP dalam jangka waktu yang lama, fenomena yang dikenal sebagai “PPP puzzle”. Studi lebih

lanjut oleh Oleg Itskhoki dan Dmitry Mukhin juga menegaskan bahwa faktor-faktor seperti friksi pasar, biaya perdagangan, dan ketidaksempurnaan informasi turut berkontribusi terhadap deviasi tersebut.

Selain faktor ekonomi, kebijakan pemerintah dan bank sentral juga memiliki pengaruh besar terhadap pasar valuta asing. Intervensi langsung di pasar, seperti pembelian atau penjualan mata uang oleh bank sentral, dapat dilakukan untuk menstabilkan nilai tukar atau mencapai target tertentu. Kebijakan moneter seperti perubahan suku bunga, pelonggaran kuantitatif (*quantitative easing*), dan pengendalian inflasi juga berdampak signifikan terhadap pergerakan kurs. Di sisi lain, kebijakan fiskal, stabilitas politik, serta hubungan internasional juga turut membentuk persepsi investor terhadap suatu mata uang.

Perkembangan teknologi juga telah mengubah cara kerja pasar valuta asing secara signifikan. Dengan adanya platform perdagangan elektronik dan algoritma perdagangan otomatis, transaksi dapat dilakukan dalam hitungan milidetik, meningkatkan efisiensi sekaligus kompleksitas pasar. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti volatilitas yang lebih tinggi dan potensi risiko sistemik akibat perdagangan berbasis algoritma. Selain itu, keterlibatan investor ritel semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses ke platform trading online, meskipun hal ini juga meningkatkan risiko kerugian bagi individu yang tidak memiliki pemahaman yang memadai.

Pasar valuta asing merupakan komponen vital dalam sistem keuangan global yang berfungsi sebagai mekanisme utama dalam menentukan nilai tukar mata uang. Pasar ini tidak hanya mendukung perdagangan dan investasi internasional, tetapi juga mencerminkan kondisi ekonomi global secara real time. Kompleksitas faktor yang memengaruhi nilai tukar, mulai dari suku bunga, ekspektasi, hingga kebijakan ekonomi, menjadikan pasar forex sebagai arena yang dinamis dan penuh tantangan. Meskipun teori seperti PPP memberikan kerangka dasar untuk memahami pergerakan jangka panjang, realitas pasar menunjukkan bahwa nilai tukar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sering kali sulit diprediksi secara akurat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang mekanisme dan dinamika pasar valuta asing menjadi sangat penting bagi pelaku ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global.

D. Neraca Pembayaran (*Balance of Payments*)

Neraca Pembayaran (*Balance of Payments*)

Balance of Payments adalah catatan sistematis semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan seluruh negara lain selama periode tertentu. *Balance of Payments* terdiri dari tiga akun utama: (1) Akun Berjalan (*Current Account*): perdagangan barang & jasa, pendapatan primer & sekunder; (2) Akun Modal (*Capital Account*): transfer kapital; (3) Akun Finansial (*Financial Account*): investasi langsung, portofolio, dan instrumen lain (IMF BPM6, 2009; Obstfeld, 2021).

Tabel 5.2 Komponen Neraca Pembayaran Indonesia 2022 (Miliar USD)

Komponen	Nilai (USD Miliar)	Interpretasi
Neraca Perdagangan (<i>Goods</i>)	+ 54,5	Surplus besar; komoditas mendominasi
Neraca Jasa	– 9,8	Defisit; impor jasa transport & travel
Pendapatan Primer	– 28,5	Defisit; dividen ke investor asing
Pendapatan Sekunder	+ 14,9	Surplus; remitansi TKI
AKUN BERJALAN	+ 13,2	Surplus pertama dalam 12 tahun
FDI (net)	+ 21,5	<i>Inflow</i> bersih; minat investor
Portofolio (net)	– 3,7	<i>Outflow</i> ; Global risk-off
CADANGAN DEVISA	137,1	Setara 6,1 bulan impor

Sumber: Bank Indonesia (2023)

Tabel 5.2 menyajikan komponen utama Neraca Pembayaran Indonesia tahun 2022 dalam satuan miliar dolar AS, disertai interpretasi untuk setiap pos. Struktur tabel memperlihatkan bagaimana transaksi eksternal suatu negara dicatat dan dianalisis melalui berbagai komponen dalam akun berjalan dan akun finansial, serta posisi cadangan devisa. Baris pertama adalah “Neraca Perdagangan (*Goods*)” dengan nilai +54,5. Angka positif menunjukkan surplus yang besar, artinya nilai ekspor barang lebih tinggi dibandingkan impor. Interpretasi pada tabel menegaskan bahwa komoditas menjadi faktor utama, yang biasanya mencakup ekspor seperti batu bara, minyak sawit, dan mineral. Surplus ini mencerminkan kinerja kuat sektor barang dalam menghasilkan devisa.

Baris kedua adalah “Neraca Jasa” dengan nilai -9,8. Nilai negatif menunjukkan defisit, yang berarti pengeluaran untuk jasa luar negeri lebih besar daripada penerimaan. Interpretasi menunjukkan bahwa impor jasa transportasi dan perjalanan menjadi penyebab utama. Kondisi ini sering terjadi pada negara yang masih bergantung pada layanan logistik asing atau memiliki tingkat perjalanan internasional yang tinggi. Baris ketiga adalah “Pendapatan Primer” dengan nilai -28,5. Defisit pada komponen ini menunjukkan bahwa pembayaran kepada faktor produksi asing lebih besar dibandingkan penerimaan dari luar negeri. Interpretasi dalam tabel menyebutkan dividen kepada investor asing sebagai faktor utama. Hal ini mencerminkan tingginya kepemilikan asing dalam investasi domestik yang menghasilkan aliran keluar pendapatan.

Baris keempat adalah “Pendapatan Sekunder” dengan nilai +14,9. Nilai positif menunjukkan surplus, yang berarti penerimaan transfer dari luar negeri lebih besar dibandingkan pengiriman ke luar negeri. Interpretasi menekankan remitansi tenaga kerja Indonesia (TKI) sebagai sumber utama. Aliran remitansi ini berperan penting dalam menopang penerimaan devisa. Baris kelima adalah “Akun Berjalan” dengan nilai +13,2. Angka ini merupakan hasil agregasi dari komponen sebelumnya dalam akun berjalan. Nilai positif menunjukkan surplus, yang berarti total penerimaan dari transaksi barang, jasa, dan pendapatan lebih besar dibandingkan pengeluaran. Interpretasi menyebutkan bahwa ini merupakan surplus pertama dalam 12 tahun, yang menandakan perbaikan signifikan dalam posisi eksternal Indonesia.

Baris keenam adalah “FDI (net)” dengan nilai +21,5. Nilai positif menunjukkan arus masuk investasi langsung asing bersih. Interpretasi

menunjukkan adanya minat investor terhadap ekonomi domestik. FDI biasanya mencerminkan investasi jangka panjang seperti pembangunan pabrik atau infrastruktur, sehingga dianggap lebih stabil dibandingkan aliran modal lainnya. Baris ketujuh adalah “Portofolio (net)” dengan nilai -3,7. Nilai negatif menunjukkan arus keluar modal portofolio bersih. Interpretasi mengaitkan kondisi ini dengan situasi *global risk-off*, di mana investor Global cenderung menarik dana dari pasar negara berkembang untuk mengurangi risiko. Aliran ini biasanya lebih volatil karena dipengaruhi oleh sentimen pasar keuangan global.

Baris kedelapan adalah “Cadangan Devisa” sebesar 137,1. Nilai ini menunjukkan total aset valuta asing yang dimiliki oleh bank sentral. Interpretasi menyebutkan bahwa jumlah ini setara dengan 6,1 bulan impor. Rasio ini sering digunakan sebagai indikator ketahanan eksternal, di mana cadangan yang cukup besar memberikan kemampuan untuk menstabilkan nilai tukar dan membiayai impor jika terjadi tekanan ekonomi. Hubungan antar komponen dalam tabel menunjukkan bagaimana surplus pada neraca perdagangan mampu mengimbangi defisit pada jasa dan pendapatan primer, sehingga menghasilkan surplus pada akun berjalan. Arus masuk investasi langsung membantu memperkuat posisi finansial, meskipun terdapat tekanan dari arus keluar portofolio. Cadangan devisa menjadi penopang akhir yang mencerminkan stabilitas eksternal. Struktur tabel ini memberikan gambaran rinci mengenai kondisi eksternal suatu negara, termasuk sumber kekuatan dan potensi kerentanannya dalam interaksi ekonomi global.

Neraca pembayaran atau *Balance of Payments* (BOP) merupakan suatu catatan sistematis yang merangkum seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Konsep ini menjadi alat penting dalam ekonomi internasional karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi eksternal suatu negara, termasuk arus barang, jasa, pendapatan, serta aliran modal. Melalui neraca pembayaran, pemerintah, bank sentral, dan pelaku ekonomi dapat memahami apakah suatu negara mengalami surplus atau defisit dalam hubungan ekonominya dengan dunia internasional, sekaligus menilai stabilitas ekonomi makro secara keseluruhan.

Secara struktur, neraca pembayaran terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu akun berjalan (*current account*), akun modal

(*capital account*), dan akun finansial (*financial account*), serta dilengkapi dengan perubahan cadangan devisa. Akun berjalan mencatat transaksi yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi riil, seperti ekspor dan impor barang (neraca perdagangan), perdagangan jasa, serta pendapatan primer dan sekunder seperti upah tenaga kerja dan transfer unilateral. Jika suatu negara mengekspor lebih banyak daripada mengimpor, maka akan terjadi surplus pada neraca perdagangan yang berkontribusi positif terhadap akun berjalan. Sebaliknya, jika impor lebih besar daripada ekspor, maka terjadi defisit yang dapat menjadi indikasi ketergantungan pada produk luar negeri.

Sementara itu, akun modal relatif lebih kecil perannya dan mencatat transfer modal yang bersifat satu arah, seperti hibah untuk investasi atau penghapusan utang. Komponen yang lebih dominan adalah akun finansial, yang mencerminkan aliran investasi antarnegara, baik dalam bentuk investasi langsung (*foreign direct investment*), investasi portofolio seperti pembelian saham dan obligasi, maupun investasi lainnya seperti pinjaman internasional. Melalui akun finansial, dapat dilihat sejauh mana suatu negara menarik atau mengirimkan modal ke luar negeri. Misalnya, masuknya investasi asing dalam jumlah besar menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi negara tersebut.

Prinsip dasar dalam neraca pembayaran adalah bahwa total keseluruhan harus seimbang (*balance*), karena setiap transaksi yang tercatat memiliki pasangan debit dan kredit. Artinya, jika terjadi defisit pada akun berjalan, maka secara teoritis akan diimbangi oleh surplus pada akun finansial atau penurunan cadangan devisa. Sebaliknya, surplus pada akun berjalan biasanya diikuti oleh arus keluar modal atau peningkatan cadangan devisa. Dengan demikian, istilah “defisit” atau “surplus” dalam neraca pembayaran sebenarnya merujuk pada salah satu komponen tertentu, bukan keseluruhan neraca.

Neraca pembayaran memiliki hubungan yang sangat erat dengan nilai tukar di pasar pasar valuta asing. Ketika suatu negara mengalami defisit akun berjalan yang besar, permintaan terhadap mata uang asing meningkat untuk membayar impor, sehingga dapat menekan nilai tukar mata uang domestik. Sebaliknya, surplus akun berjalan cenderung memperkuat mata uang karena adanya peningkatan permintaan terhadap mata uang domestik dari pembeli luar negeri. Selain itu, arus modal dalam akun finansial juga sangat memengaruhi nilai tukar, terutama

dalam jangka pendek, karena pergerakan investasi global dapat terjadi dengan cepat dan dalam jumlah besar.

Dari sisi kebijakan, neraca pembayaran menjadi indikator penting bagi pemerintah dan bank sentral dalam merumuskan strategi ekonomi. Defisit yang berkepanjangan dapat menimbulkan tekanan terhadap cadangan devisa dan meningkatkan risiko krisis mata uang, sehingga diperlukan langkah-langkah penyesuaian seperti devaluasi, pengetatan kebijakan moneter, atau pembatasan impor. Sebaliknya, surplus yang terlalu besar juga dapat menimbulkan masalah, seperti ketidakseimbangan global atau tekanan dari negara mitra dagang untuk melakukan revaluasi mata uang. Oleh karena itu, pengelolaan neraca pembayaran yang seimbang menjadi tujuan penting dalam kebijakan ekonomi makro.

Dalam praktiknya, neraca pembayaran juga mencerminkan daya saing suatu negara di tingkat global. Negara dengan struktur ekspor yang kuat, produk bernilai tambah tinggi, dan sektor jasa yang kompetitif cenderung memiliki posisi neraca pembayaran yang lebih sehat. Sebaliknya, negara yang bergantung pada impor dan memiliki basis industri yang lemah lebih rentan mengalami defisit. Namun demikian, defisit tidak selalu berarti buruk, terutama jika didorong oleh investasi produktif yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi di masa depan. Misalnya, impor barang modal untuk pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang meskipun dalam jangka pendek menyebabkan defisit.

Selain faktor ekonomi, neraca pembayaran juga dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi seperti stabilitas politik, kebijakan perdagangan, serta kondisi global. Krisis keuangan internasional, perubahan harga komoditas, atau ketegangan geopolitik dapat memengaruhi arus perdagangan dan investasi secara signifikan. Oleh karena itu, analisis neraca pembayaran tidak dapat dilepaskan dari konteks global yang lebih luas. Neraca pembayaran merupakan alat analisis yang sangat penting untuk memahami hubungan ekonomi suatu negara dengan dunia internasional. Melalui komponen-komponennya, neraca ini memberikan informasi yang komprehensif mengenai arus barang, jasa, dan modal, serta membantu dalam menilai stabilitas dan prospek ekonomi. Pemahaman yang baik tentang neraca pembayaran memungkinkan pemerintah, pelaku usaha, dan investor untuk mengambil keputusan

yang lebih tepat dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berubah.

E. Krisis Keuangan Internasional

Krisis keuangan internasional adalah gangguan besar pada sistem keuangan global yang menyebabkan volatilitas ekstrem, pengeringan likuiditas, dan kontraksi ekonomi lintas batas. Reinhart dan Rogoff (2009) menganalisis 800 tahun data krisis dan menemukan bahwa krisis keuangan selalu berulang meski dengan wajah yang berbeda. Krisis keuangan internasional merupakan peristiwa serius yang mengguncang sistem keuangan global sehingga memicu gejolak besar seperti lonjakan ketidakstabilan pasar, berkurangnya ketersediaan dana, dan penurunan aktivitas ekonomi di banyak negara sekaligus. Dampaknya tidak terbatas pada satu wilayah, karena keterkaitan antarnegara membuat gangguan cepat menyebar ke seluruh dunia. Kajian historis menunjukkan bahwa krisis semacam ini bukan kejadian baru, melainkan pola yang terus berulang sepanjang sejarah, meskipun penyebab dan bentuknya dapat berbeda-beda dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan adanya kerentanan yang melekat dalam sistem keuangan global.

Dalam konteks ekonomi internasional, krisis keuangan internasional menjadi salah satu isu paling krusial karena mampu mengganggu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pengangguran, serta memperburuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Secara umum, krisis keuangan internasional dapat dipicu oleh berbagai faktor, baik yang bersifat domestik maupun global. Salah satu penyebab utama adalah ketidakseimbangan makroekonomi, seperti defisit neraca pembayaran yang besar, utang luar negeri yang tinggi, atau inflasi yang tidak terkendali. Selain itu, lemahnya sistem perbankan, pengawasan keuangan yang tidak memadai, serta praktik pemberian kredit yang berisiko tinggi juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap krisis. Dalam banyak kasus, krisis diawali oleh gelembung aset (*asset bubble*), di mana harga aset seperti properti atau saham meningkat jauh di atas nilai fundamentalnya, sebelum akhirnya mengalami koreksi tajam yang memicu kepanikan di pasar.

Sejarah mencatat beberapa krisis keuangan internasional besar yang memberikan pelajaran penting bagi dunia. Salah satu yang paling terkenal adalah Krisis Keuangan Asia 1997, yang dimulai dari Thailand

dan kemudian menyebar ke negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia, Korea Selatan, dan Malaysia. Krisis ini dipicu oleh kombinasi faktor seperti utang luar negeri jangka pendek yang tinggi, nilai tukar yang tidak fleksibel, serta lemahnya sektor perbankan. Dampaknya sangat besar, termasuk depresiasi mata uang secara drastis, kebangkrutan perusahaan, dan peningkatan kemiskinan. Selain itu, Krisis Keuangan Global 2008 juga menjadi contoh penting, yang berawal dari krisis subprime mortgage di Amerika Serikat dan kemudian menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan resesi global dan runtuhnya beberapa institusi keuangan besar.

Salah satu karakteristik utama krisis keuangan internasional adalah adanya efek penularan (*contagion effect*), di mana krisis di satu negara dapat dengan cepat menyebar ke negara lain melalui jalur keuangan dan perdagangan. Dalam era globalisasi, integrasi pasar keuangan yang tinggi membuat aliran modal dapat berpindah dengan sangat cepat, sehingga meningkatkan risiko penyebaran krisis. Misalnya, ketika investor kehilangan kepercayaan terhadap suatu negara, mereka cenderung menarik investasi tidak hanya dari negara tersebut, tetapi juga dari negara lain yang dianggap memiliki karakteristik serupa. Hal ini dapat menyebabkan tekanan terhadap nilai tukar di pasar pasar valuta asing, penurunan cadangan devisa, serta meningkatnya volatilitas di pasar keuangan.

Dampak krisis keuangan internasional sangat luas dan kompleks. Di sektor keuangan, krisis dapat menyebabkan kebangkrutan bank, penurunan likuiditas, dan gangguan sistem pembayaran. Di sektor riil, krisis dapat mengakibatkan penurunan investasi, kontraksi produksi, dan meningkatnya pengangguran. Selain itu, krisis juga dapat memicu masalah sosial dan politik, seperti meningkatnya kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakstabilan pemerintahan. Oleh karena itu, penanganan krisis keuangan memerlukan respons kebijakan yang cepat dan terkoordinasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Peran lembaga internasional sangat penting dalam mengatasi krisis keuangan global. Organisasi seperti *International Monetary Fund* sering memberikan bantuan keuangan dan rekomendasi kebijakan kepada negara-negara yang mengalami krisis, dengan tujuan menstabilkan ekonomi dan memulihkan kepercayaan pasar. Selain itu, kerja sama antarnegara melalui forum internasional juga diperlukan

untuk memperkuat regulasi keuangan, meningkatkan transparansi, serta mengurangi risiko sistemik di masa depan.

Dalam upaya mencegah krisis, banyak negara telah memperkuat kerangka kebijakan makroprudensial dan pengawasan sektor keuangan. Kebijakan ini mencakup pengendalian kredit, peningkatan rasio kecukupan modal bank, serta pengelolaan risiko yang lebih baik. Selain itu, fleksibilitas nilai tukar dan pengelolaan cadangan devisa juga menjadi alat penting untuk menghadapi tekanan eksternal. Pengalaman krisis di masa lalu menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi semata, tetapi juga pada kualitas institusi, tata kelola, dan kredibilitas kebijakan pemerintah.

Krisis keuangan internasional merupakan fenomena kompleks yang mencerminkan kerentanan sistem keuangan global terhadap berbagai guncangan. Meskipun tidak dapat sepenuhnya dihindari, dampaknya dapat diminimalkan melalui kebijakan yang tepat, koordinasi internasional, serta sistem keuangan yang kuat dan transparan. Pemahaman yang mendalam tentang penyebab, mekanisme, dan dampak krisis menjadi sangat penting bagi pembuat kebijakan, pelaku ekonomi, dan masyarakat luas agar dapat lebih siap menghadapi tantangan ekonomi global di masa depan.

Tabel 5.3 Krisis Keuangan Internasional Mayor (2008-2023)

Krisis	Periode	Dampak Output Dunia	Faktor Pemicu
<i>Global financial crisis</i>	2008-2009	-4,0% (2009)	<i>Subprime mortgage, securitization</i>
Krisis Utang Eropa	2010-2012	Kontraksi eurozone	<i>Sovereign debt Yunani, PIIGS</i>
Taper Tantrum	2013	<i>Capital outflow EM</i>	<i>Fed tapering sinyal</i>
COVID Shock	2020	-3,1% (2020)	<i>Pandemic shutdown supply/demand</i>

Inflasi & Kenaikan Fed	2022-2023	Resesi beberapa EM	<i>Fed rate hike</i> cepat, USD menguat
------------------------	-----------	--------------------	---

Sumber: IMF (2023) & Reinhart, C. & Rogoff, K. (2009)

Tabel 5.3 merangkum beberapa krisis keuangan internasional utama periode 2008–2023. Baris pertama adalah “*Global financial crisis*” pada periode 2008–2009. Kolom dampak menunjukkan kontraksi output dunia sebesar –4,0% pada 2009, yang mencerminkan penurunan tajam aktivitas ekonomi global. Kolom faktor pemicu menjelaskan bahwa krisis ini berawal dari pasar *subprime mortgage* di Amerika Serikat yang kemudian diperparah oleh praktik sekuritisasi. Instrumen keuangan yang kompleks menyebarkan risiko ke seluruh sistem keuangan global, sehingga ketika gagal bayar meningkat, dampaknya menular ke bank, pasar modal, dan ekonomi riil di banyak negara.

Baris kedua adalah “Krisis Utang Eropa” pada periode 2010–2012. Kolom dampak menunjukkan terjadinya kontraksi di kawasan eurozone. Kolom faktor pemicu menyoroti krisis utang pemerintah, terutama di negara-negara seperti Yunani, Portugal, Irlandia, Italia, dan Spanyol (sering disebut PIIGS). Ketidakmampuan beberapa negara membayar utang memicu ketidakpercayaan pasar, meningkatkan biaya pinjaman, dan menekan stabilitas sistem keuangan kawasan Eropa. Baris ketiga adalah “Taper Tantrum” pada tahun 2013. Kolom dampak menunjukkan terjadinya arus keluar modal (*Capital outflow*) dari negara berkembang. Kolom faktor pemicu menjelaskan bahwa sinyal kebijakan *tapering* oleh *Federal Reserve* (pengurangan stimulus moneter) menyebabkan investor global menarik dana dari *emerging markets*. Reaksi pasar ini menyebabkan depresiasi mata uang dan tekanan pada pasar keuangan di banyak negara berkembang.

Baris keempat adalah “*COVID Shock*” pada tahun 2020. Kolom dampak mencatat kontraksi output dunia sebesar –3,1%. Kolom faktor pemicu menunjukkan bahwa pandemi global menyebabkan gangguan simultan pada sisi penawaran dan permintaan. Pembatasan aktivitas ekonomi, gangguan rantai pasok, serta penurunan konsumsi dan investasi menciptakan tekanan besar pada ekonomi global. Baris kelima adalah “Inflasi & Kenaikan Fed” pada periode 2022–2023. Kolom dampak menunjukkan terjadinya resesi di beberapa negara berkembang.

Kolom faktor pemicu menjelaskan bahwa kenaikan suku bunga *Federal Reserve* yang cepat, disertai penguatan dolar AS, meningkatkan biaya pembiayaan global. Negara dengan utang dalam dolar menghadapi tekanan tambahan, sementara arus modal cenderung kembali ke Amerika Serikat.

Hubungan antar kolom dalam tabel menunjukkan pola bahwa setiap krisis memiliki pemicu spesifik, namun dampaknya sering meluas secara global melalui keterkaitan sistem keuangan. Krisis yang berawal dari sektor keuangan domestik dapat menyebar ke negara lain melalui pasar modal, nilai tukar, dan arus investasi. Perbandingan antar baris juga memperlihatkan variasi sumber krisis. Beberapa krisis dipicu oleh sektor keuangan, sebagian berasal dari masalah fiskal (krisis utang Eropa), kebijakan moneter global (taper tantrum dan kenaikan suku bunga), serta faktor non-ekonomi seperti pandemi (COVID-19). Perbedaan ini menunjukkan bahwa kerentanan sistem keuangan dapat muncul dari berbagai sumber. Struktur tabel ini membantu memahami bahwa krisis keuangan internasional memiliki karakteristik berulang dalam hal dampak yang luas dan cepat menyebar, meskipun penyebabnya berbeda-beda.

F. Peran Cadangan Devisa

Cadangan devisa adalah aset luar negeri yang dikuasai bank sentral, digunakan untuk intervensi pasar valuta asing, pembayaran utang luar negeri, dan sebagai buffer saat krisis. Aizenman dan Lee (2014) membedakan motif *precautionary* (lindungi dari krisis) dan *mercantilist* (manipulasi nilai tukar untuk daya saing). *Adequacy* cadangan devisa sering diukur menggunakan ARA (*Assessing Reserve Adequacy*) metric IMF, di mana cadangan setara 3-4 bulan impor umumnya dianggap minimal memadai. Cadangan devisa merupakan aset luar negeri yang dimiliki bank sentral dan berfungsi sebagai alat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, seperti menstabilkan nilai tukar, membayar kewajiban luar negeri, serta menjadi penyangga saat terjadi krisis. Kepemilikan cadangan ini didorong oleh dua tujuan utama, yaitu untuk berjaga-jaga menghadapi gejolak ekonomi dan untuk mendukung daya saing ekspor melalui pengelolaan nilai tukar. Kecukupan cadangan devisa biasanya diukur menggunakan indikator tertentu yang mempertimbangkan kebutuhan ekonomi, di mana jumlah yang setara

dengan beberapa bulan impor dipandang sebagai batas minimal agar suatu negara tetap memiliki perlindungan yang memadai terhadap risiko eksternal.

Cadangan devisa merupakan salah satu instrumen kunci dalam pengelolaan stabilitas ekonomi makro suatu negara, khususnya dalam konteks keterbukaan ekonomi dan integrasi dengan sistem keuangan global. Secara umum, cadangan devisa dapat didefinisikan sebagai aset luar negeri yang dimiliki dan dikuasai oleh otoritas moneter, terutama bank sentral, dalam bentuk mata uang asing, emas, hak penarikan khusus (*Special Drawing Rights*), serta posisi cadangan di lembaga internasional. Dalam kerangka ekonomi internasional, cadangan devisa memiliki fungsi strategis sebagai alat untuk menjaga stabilitas nilai tukar, memenuhi kewajiban pembayaran internasional, serta memberikan kepercayaan kepada pasar terhadap kemampuan suatu negara dalam menghadapi tekanan eksternal.

Salah satu peran utama cadangan devisa adalah sebagai instrumen intervensi di pasar valuta asing. Ketika terjadi tekanan terhadap nilai tukar, misalnya depresiasi yang terlalu tajam akibat keluarnya aliran modal atau meningkatnya permintaan terhadap mata uang asing, bank sentral dapat menggunakan cadangan devisanya untuk melakukan intervensi dengan menjual valuta asing dan membeli mata uang domestik. Tindakan ini bertujuan untuk menstabilkan kurs dan mencegah volatilitas yang berlebihan. Sebaliknya, dalam kondisi apresiasi yang terlalu kuat, bank sentral dapat membeli valuta asing untuk menahan penguatan mata uang domestik agar tidak merugikan daya saing ekspor. Dengan demikian, cadangan devisa berfungsi sebagai alat kebijakan yang fleksibel dalam menjaga keseimbangan eksternal.

Selain itu, cadangan devisa juga berperan penting dalam memenuhi kewajiban pembayaran internasional, termasuk pembayaran utang luar negeri pemerintah maupun sektor swasta, serta pembiayaan impor barang dan jasa. Dalam situasi di mana akses terhadap pembiayaan eksternal menjadi terbatas, misalnya saat terjadi krisis keuangan global, cadangan devisa menjadi sumber likuiditas utama yang dapat digunakan untuk memastikan kelangsungan transaksi internasional. Fungsi ini menjadikan cadangan devisa sebagai “penyangga” (*buffer*) yang melindungi perekonomian dari guncangan eksternal yang tidak terduga.

Dari perspektif teori ekonomi, motif kepemilikan cadangan devisa dapat dijelaskan melalui dua pendekatan utama yang dikemukakan oleh Joshua Aizenman dan Jaewoo Lee, yaitu motif *precautionary* dan *mercantilist*. Motif *precautionary* menekankan bahwa cadangan devisa disimpan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko krisis, seperti sudden stop dalam aliran modal atau serangan spekulatif terhadap mata uang. Negara-negara dengan pengalaman krisis di masa lalu cenderung meningkatkan cadangan devisanya sebagai langkah antisipatif untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak eksternal. Sementara itu, motif *mercantilist* berkaitan dengan upaya mempertahankan daya saing ekspor melalui pengelolaan nilai tukar. Dalam hal ini, akumulasi cadangan devisa digunakan untuk mencegah apresiasi mata uang domestik yang berlebihan, sehingga harga produk ekspor tetap kompetitif di pasar internasional.

Kecukupan cadangan devisa menjadi isu penting dalam kebijakan ekonomi, karena jumlah yang terlalu kecil dapat meningkatkan risiko krisis, sementara jumlah yang terlalu besar dapat menimbulkan biaya oportunitas yang tinggi. Untuk menilai kecukupan tersebut, International Monetary Fund mengembangkan indikator yang dikenal sebagai *Assessing Reserve Adequacy* (ARA) metric, yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti ukuran impor, utang jangka pendek, dan potensi arus keluar modal. Secara praktis, salah satu aturan sederhana yang sering digunakan adalah bahwa cadangan devisa sebaiknya setara dengan setidaknya tiga hingga empat bulan impor. Standar ini memberikan gambaran awal mengenai kemampuan suatu negara untuk membiayai kebutuhan impor dalam kondisi darurat tanpa harus bergantung pada sumber pembiayaan eksternal.

Namun demikian, dalam praktiknya, kebutuhan cadangan devisa dapat berbeda-beda tergantung pada karakteristik ekonomi masing-masing negara. Negara dengan sistem nilai tukar tetap atau semi-tetap biasanya membutuhkan cadangan devisa yang lebih besar untuk mempertahankan stabilitas kurs, dibandingkan dengan negara yang menganut sistem nilai tukar mengambang. Selain itu, negara dengan tingkat keterbukaan ekonomi yang tinggi dan ketergantungan besar pada aliran modal asing juga cenderung memerlukan cadangan devisa yang lebih besar untuk mengantisipasi volatilitas pasar keuangan global.

Di sisi lain, akumulasi cadangan devisa yang berlebihan juga memiliki implikasi ekonomi. Cadangan devisa umumnya diinvestasikan

dalam aset yang relatif aman dan likuid, seperti obligasi pemerintah negara maju, yang biasanya memberikan imbal hasil rendah. Akibatnya, terdapat biaya oportunitas karena dana tersebut sebenarnya dapat digunakan untuk investasi domestik yang lebih produktif. Selain itu, intervensi yang berlebihan di pasar valuta asing untuk menambah cadangan devisa juga dapat menimbulkan distorsi pasar dan memicu ketegangan dalam hubungan perdagangan internasional.

Peran cadangan devisa juga semakin penting dalam konteks globalisasi dan meningkatnya volatilitas pasar keuangan. Krisis keuangan internasional yang pernah terjadi menunjukkan bahwa negara dengan cadangan devisa yang memadai cenderung lebih mampu bertahan dan pulih lebih cepat dibandingkan negara dengan cadangan yang terbatas. Cadangan devisa memberikan ruang kebijakan bagi pemerintah dan bank sentral untuk merespons krisis tanpa harus segera mengambil langkah drastis yang dapat memperburuk kondisi ekonomi.

Cadangan devisa merupakan komponen vital dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar terhadap suatu negara. Fungsinya yang mencakup intervensi nilai tukar, pembiayaan transaksi internasional, serta perlindungan terhadap krisis menjadikannya sebagai salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi makro. Namun, pengelolaan cadangan devisa harus dilakukan secara hati-hati dan seimbang, dengan mempertimbangkan kebutuhan likuiditas, risiko eksternal, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan strategi yang tepat, cadangan devisa dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah.



BAB VI

LEMBAGA EKONOMI INTERNASIONAL

Arsitektur institusional yang mengatur ekonomi internasional modern dibangun di atas fondasi *Bretton Woods* yang diciptakan pasca-Perang Dunia II. Keyakinan para pembangunnya, John Maynard Keynes dari Inggris dan Harry Dexter White dari Amerika Serikat adalah bahwa kerja sama institusional internasional dapat mencegah berulangnya proteksionisme destruktif dan ketidakstabilan keuangan yang memperparah Depresi Besar 1930-an. Sistem kelembagaan ekonomi internasional saat ini berakar pada kesepakatan *Bretton Woods* yang dirancang setelah Perang Dunia II untuk menciptakan stabilitas dan kerja sama global. Para perancanganya percaya bahwa dengan membangun institusi internasional yang kuat, negara-negara dapat menghindari kebijakan ekonomi yang merugikan seperti proteksionisme berlebihan dan kekacauan keuangan yang pernah memperparah krisis ekonomi besar sebelumnya. Gagasan ini menekankan pentingnya koordinasi antarnegara agar sistem ekonomi global lebih teratur, stabil, dan mampu mencegah terulangnya krisis besar di masa depan.

A. Peran Lembaga Internasional dalam Ekonomi Global

Lembaga-lembaga ekonomi internasional berfungsi sebagai mekanisme tata kelola global yang mengurangi biaya transaksi dalam kerja sama antarnegara, menyediakan forum untuk negosiasi, menetapkan standar dan aturan, serta memberikan bantuan keuangan dan teknis. Keohane (2005) dalam *After Hegemony* berargumen bahwa lembaga internasional dapat mempertahankan kerja sama bahkan tanpa hegemon tunggal, melalui rezim yang menciptakan ekspektasi bersama

dan meningkatkan biaya melanggar kesepakatan. Lembaga ekonomi internasional berperan sebagai pengatur dan fasilitator dalam hubungan antarnegara agar kerja sama dapat berjalan lebih efisien dan terstruktur. Lembaga ini membantu menekan hambatan seperti ketidakpastian dan biaya transaksi, menyediakan ruang bagi negara untuk bernegosiasi, menetapkan aturan yang disepakati bersama, serta memberikan dukungan finansial dan teknis ketika diperlukan. Gagasan Keohane menekankan bahwa keberadaan lembaga tersebut memungkinkan kerja sama tetap berlangsung meskipun tidak ada satu negara yang mendominasi, karena aturan dan norma yang dibangun menciptakan harapan bersama serta konsekuensi yang lebih besar bagi pihak yang melanggar kesepakatan.

Peran lembaga internasional dalam ekonomi global menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya interdependensi antarnegara dalam perdagangan, investasi, dan sistem keuangan. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai pilar tata kelola global yang membantu menciptakan keteraturan dalam hubungan ekonomi internasional yang pada dasarnya kompleks dan penuh kepentingan yang saling bersaing. Dalam kajian ekonomi internasional, lembaga internasional dipahami sebagai mekanisme yang mampu mengurangi ketidakpastian, menekan biaya transaksi, serta memfasilitasi koordinasi kebijakan antarnegara. Tanpa adanya lembaga semacam ini, kerja sama ekonomi global akan jauh lebih sulit tercapai karena setiap negara cenderung bertindak berdasarkan kepentingan sendiri tanpa adanya aturan yang mengikat.

Salah satu fungsi utama lembaga internasional adalah menyediakan forum bagi negosiasi dan dialog antarnegara. Dalam konteks ini, negara-negara dapat membahas berbagai isu ekonomi seperti perdagangan, stabilitas keuangan, dan pembangunan, serta merumuskan kesepakatan yang saling menguntungkan. Sebagai contoh, *World Trade Organization* berperan dalam mengatur sistem perdagangan internasional melalui perundingan multilateral yang bertujuan mengurangi hambatan perdagangan dan menciptakan persaingan yang adil. Dengan adanya forum yang terstruktur, proses negosiasi menjadi lebih transparan dan terarah, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan.

Selain sebagai forum negosiasi, lembaga internasional juga berfungsi menetapkan standar dan aturan yang menjadi pedoman dalam

interaksi ekonomi global. Aturan-aturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tarif perdagangan, perlindungan investasi, hingga regulasi sektor keuangan. Dengan adanya standar yang disepakati bersama, negara-negara memiliki acuan yang jelas dalam menjalankan kebijakan ekonomi, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan antar pelaku ekonomi. Dalam hal ini, lembaga seperti *International Monetary Fund* memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan internasional melalui pengawasan kebijakan makroekonomi dan pemberian rekomendasi kebijakan kepada negara anggota.

Fungsi lain yang tidak kalah penting adalah pemberian bantuan keuangan dan teknis kepada negara-negara yang membutuhkan. Lembaga internasional sering kali menjadi sumber pembiayaan darurat bagi negara yang mengalami krisis ekonomi atau kesulitan neraca pembayaran. Selain itu, mereka juga menyediakan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan, konsultasi kebijakan, dan transfer pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas institusi domestik. *World Bank*, misalnya, berfokus pada pembiayaan pembangunan dan pengentasan kemiskinan melalui berbagai proyek di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Bantuan ini tidak hanya membantu stabilisasi jangka pendek, tetapi juga mendukung pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Dari perspektif teoretis, peran lembaga internasional dalam mempertahankan kerja sama global dijelaskan secara mendalam oleh Robert Keohane dalam karyanya *After Hegemony*. Keohane berargumen bahwa kerja sama internasional tidak selalu bergantung pada keberadaan satu negara hegemon yang dominan, melainkan dapat dipertahankan melalui keberadaan institusi yang menciptakan rezim internasional. Rezim ini terdiri dari aturan, norma, dan prosedur yang disepakati bersama, yang berfungsi untuk membentuk ekspektasi perilaku negara. Dengan adanya ekspektasi yang jelas, negara lebih cenderung mematuhi kesepakatan karena biaya pelanggaran menjadi lebih tinggi, baik dalam bentuk sanksi ekonomi maupun hilangnya reputasi di mata internasional. Dengan kata lain, lembaga internasional membantu menciptakan lingkungan di mana kerja sama menjadi pilihan yang rasional bagi negara-negara.

Lembaga internasional juga berperan dalam mengurangi asimetri informasi antarnegara. Dalam ekonomi global, sering kali terdapat

ketidakseimbangan informasi yang dapat menghambat kerja sama atau menimbulkan ketidakpercayaan. Melalui pengumpulan dan penyebaran data, serta evaluasi kebijakan secara berkala, lembaga internasional membantu menyediakan informasi yang lebih transparan dan dapat diandalkan. Hal ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh suatu negara tidak merugikan negara lain secara tidak adil

Namun demikian, peran lembaga internasional tidak lepas dari berbagai tantangan dan kritik. Salah satu kritik utama adalah bahwa lembaga-lembaga ini sering dianggap mencerminkan kepentingan negara-negara maju yang memiliki pengaruh lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, beberapa kebijakan yang direkomendasikan, terutama dalam konteks penyesuaian struktural, dinilai kurang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi negara berkembang. Kritik lainnya berkaitan dengan efektivitas lembaga internasional dalam menghadapi krisis global yang semakin kompleks, seperti krisis keuangan, perubahan iklim, dan ketimpangan ekonomi.

Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa lembaga internasional tetap memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi global. Dalam dunia yang semakin terhubung, kebutuhan akan koordinasi dan kerja sama antarnegara menjadi semakin mendesak. Lembaga internasional menyediakan kerangka institusional yang memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama secara lebih efektif, mengatasi masalah bersama, dan memanfaatkan peluang globalisasi secara optimal.

Lembaga internasional berfungsi sebagai pengatur sekaligus fasilitator dalam sistem ekonomi global. Melalui perannya dalam menyediakan forum negosiasi, menetapkan aturan, memberikan bantuan, serta menciptakan ekspektasi bersama, lembaga-lembaga ini membantu menciptakan sistem ekonomi internasional yang lebih stabil, transparan, dan terkoordinasi. Pemikiran Keohane menegaskan bahwa keberadaan lembaga internasional memungkinkan kerja sama tetap berlangsung meskipun tidak ada kekuatan dominan tunggal, karena aturan dan norma yang dibangun mampu mengarahkan perilaku negara ke arah yang lebih kooperatif. Dengan demikian, lembaga internasional menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari dinamika ekonomi global modern.

B. IMF (*International Monetary Fund*)

International Monetary Fund (IMF) merupakan salah satu lembaga keuangan internasional paling penting dalam sistem ekonomi global yang dibentuk untuk menjaga stabilitas moneter dan keuangan antarnegara. IMF didirikan pada tahun 1944 dalam konferensi *Bretton Woods* dan mulai beroperasi pada tahun 1947, dengan tujuan utama menciptakan sistem moneter internasional yang stabil setelah kekacauan ekonomi pada masa Depresi Besar dan Perang Dunia II. Hingga saat ini, IMF memiliki sekitar 190 negara anggota, yang menjadikannya sebagai forum global utama dalam kerja sama ekonomi dan keuangan. Dalam kerangka ekonomi internasional, IMF berfungsi sebagai institusi yang mengatur interaksi moneter global agar berjalan lebih stabil, terkoordinasi, dan dapat diprediksi.

Mandat utama IMF mencakup tiga fungsi inti yang saling terkait. Pertama, IMF bertugas mendorong stabilitas sistem moneter internasional, yaitu dengan memastikan bahwa nilai tukar mata uang dan sistem pembayaran global berjalan secara tertib dan tidak menimbulkan gangguan yang merugikan perekonomian dunia. Stabilitas ini penting karena fluktuasi nilai tukar yang berlebihan dapat mengganggu perdagangan internasional dan aliran investasi. Kedua, IMF berperan dalam memfasilitasi pertumbuhan perdagangan internasional dengan menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif, di mana negara-negara dapat melakukan transaksi lintas batas secara lebih efisien dan aman. Ketiga, IMF menyediakan sumber daya keuangan bagi negara anggota yang mengalami masalah neraca pembayaran, sehingga mereka dapat mengatasi krisis likuiditas tanpa harus mengambil langkah ekstrem seperti pembatasan perdagangan atau devaluasi yang tidak terkendali.

Salah satu mekanisme utama dalam operasional IMF adalah sistem kuota (*quota*), yang menentukan kontribusi finansial masing-masing negara anggota, hak suara dalam pengambilan keputusan, serta besaran pinjaman yang dapat diakses. Negara dengan kuota lebih besar memiliki pengaruh lebih besar dalam kebijakan IMF, yang sering kali mencerminkan ukuran ekonomi dan kontribusi mereka terhadap perekonomian global. Hingga tahun 2023, total kapasitas pinjaman IMF mencapai sekitar USD 1 triliun, yang menunjukkan kemampuan lembaga ini dalam menyediakan dukungan keuangan skala besar bagi negara-negara yang menghadapi tekanan ekonomi. Dana ini menjadi

sangat penting terutama dalam situasi krisis, ketika akses ke pasar keuangan internasional menjadi terbatas.

Seiring waktu, peran IMF mengalami evolusi yang signifikan. Pada awalnya, IMF lebih berfokus pada pengawasan nilai tukar dan penyediaan pinjaman jangka pendek. Namun, dalam perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks, fungsi IMF meluas menjadi mencakup pengawasan kebijakan ekonomi makro (*surveillance*), pemberian rekomendasi kebijakan, serta analisis risiko global. Melalui kegiatan *surveillance*, IMF secara rutin mengevaluasi kondisi ekonomi negara anggota dan memberikan saran kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Proses ini juga mencakup publikasi laporan ekonomi global yang menjadi referensi penting bagi pembuat kebijakan dan pelaku pasar.

Setelah Krisis Keuangan Global 2008, peran IMF semakin diperkuat sebagai koordinator respons global terhadap krisis. IMF tidak hanya memberikan pinjaman darurat, tetapi juga berperan dalam mengoordinasikan kebijakan antarnegara untuk mencegah penyebaran krisis yang lebih luas. Selain itu, IMF juga aktif dalam mengidentifikasi risiko sistemik, yaitu risiko yang dapat mengancam stabilitas seluruh sistem keuangan global. Dengan meningkatnya integrasi pasar keuangan, kemampuan untuk mendeteksi dan mengelola risiko semacam ini menjadi sangat penting.

Salah satu instrumen penting yang dimiliki IMF adalah *Special Drawing Rights* (SDR), yaitu aset cadangan internasional yang dapat digunakan oleh negara anggota untuk memperkuat cadangan devisa mereka. SDR bukanlah mata uang dalam arti konvensional, tetapi merupakan klaim atas mata uang asing yang dapat dipertukarkan antarnegara anggota IMF. Dalam situasi krisis global, alokasi SDR dapat memberikan likuiditas tambahan tanpa menambah utang secara langsung. Contoh nyata dari peran ini adalah alokasi SDR sebesar USD 650 miliar pada Agustus 2021, yang merupakan yang terbesar dalam sejarah IMF. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap dampak ekonomi global dari pandemi COVID-19, dengan tujuan membantu negara-negara, terutama negara berkembang, dalam menghadapi tekanan likuiditas dan menjaga stabilitas ekonomi.

Peran IMF dalam era modern tidak lagi terbatas pada fungsi tradisional, tetapi telah berkembang menjadi aktor sentral dalam tata kelola ekonomi global. IMF kini terlibat dalam berbagai isu, mulai dari

stabilitas keuangan, pengelolaan utang, hingga dampak perubahan iklim terhadap ekonomi. Selain itu, IMF juga bekerja sama dengan lembaga internasional lain untuk memperkuat sistem keuangan global dan meningkatkan ketahanan ekonomi negara-negara anggota.

Namun demikian, IMF juga menghadapi berbagai kritik. Salah satu kritik utama adalah terkait dengan kondisi atau persyaratan (*conditionality*) yang menyertai pinjaman IMF, yang sering dianggap terlalu ketat dan dapat memperburuk kondisi sosial ekonomi di negara penerima. Selain itu, struktur kuota yang menentukan hak suara juga dikritik karena dianggap kurang mencerminkan perubahan kekuatan ekonomi global, terutama meningkatnya peran negara-negara berkembang. IMF memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi global. Melalui mandatnya dalam stabilitas moneter, fasilitasi perdagangan, dan penyediaan pembiayaan, serta melalui evolusi perannya dalam menghadapi tantangan global, IMF menjadi salah satu institusi utama dalam sistem ekonomi internasional. Keberadaannya memberikan jaring pengaman bagi negara-negara yang menghadapi krisis, sekaligus membantu menciptakan sistem keuangan global yang lebih stabil dan terkoordinasi di tengah dinamika ekonomi dunia yang terus berubah.

C. World Bank

World Bank Group terdiri dari lima lembaga, yang terpenting adalah IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*) dan IDA (*International Development Association*). Berbeda dari IMF yang berfokus pada stabilitas jangka pendek, *World Bank* memfokuskan diri pada pembiayaan pembangunan jangka panjang dan pengurangan kemiskinan. *World Bank Group* merupakan kumpulan lembaga internasional yang memiliki peran utama dalam mendukung pembangunan ekonomi, terutama melalui IBRD dan IDA sebagai dua institusi terpentingnya. Kedua lembaga ini memberikan pembiayaan dan bantuan kepada negara-negara untuk proyek pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Peran ini berbeda dari IMF yang lebih berfokus pada menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek, sehingga *World Bank* lebih menitikberatkan pada upaya pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Tabel 6.1 Perbandingan IMF dan *World Bank*

Aspek	IMF	World Bank
Didirikan	1944 / operasi 1947	1944 / operasi 1946
Anggota	190 negara	189 negara
Fokus Utama	Stabilitas moneter	Pembangunan & pengurangan kemiskinan
Jenis Pinjaman	Darurat; jangka pendek	Proyek pembangunan; jangka panjang
Kondisionalitas	Kebijakan makro (SAP)	Reformasi sektoral spesifik
Total Assets (2023)	USD 1,0 T (SDR)	USD 700 Miliar
Kritik Utama	<i>Pro-austerity, one-size-fits-all</i>	<i>Env. impact, debt sustainability</i>

Sumber: IMF (2023) & World Bank (2023)

Tabel 6.1 membandingkan dua institusi utama dalam sistem keuangan internasional, yaitu IMF (*International Monetary Fund*) dan *World Bank*, melalui beberapa aspek penting yang menunjukkan perbedaan mandat, instrumen, serta pendekatan kebijakan. Baris pertama adalah “Didirikan”. Kedua lembaga sama-sama lahir dari Konferensi *Bretton Woods* tahun 1944. IMF mulai beroperasi pada 1947, sedangkan *World Bank* pada 1946. Informasi ini menunjukkan bahwa keduanya dibentuk dalam konteks yang sama, yaitu untuk menata kembali sistem ekonomi Global pasca Perang Dunia II, namun kemudian berkembang dengan fungsi yang berbeda.

IMF memiliki 190 negara anggota, sedangkan *World Bank* memiliki 189 negara. Perbedaan kecil ini menunjukkan cakupan keanggotaan yang hampir universal, sehingga kedua lembaga memiliki legitimasi global dalam menjalankan perannya. IMF berfokus pada stabilitas moneter internasional, termasuk menjaga kestabilan nilai tukar, mengatasi krisis neraca pembayaran, dan memantau kebijakan

makroekonomi negara anggota. *World Bank* berfokus pada pembangunan dan pengurangan kemiskinan, dengan menyalurkan pembiayaan untuk proyek jangka panjang seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. IMF menyediakan pinjaman darurat dengan jangka pendek hingga menengah untuk membantu negara menghadapi krisis likuiditas atau ketidakseimbangan eksternal. *World Bank* memberikan pinjaman untuk proyek pembangunan jangka panjang, yang biasanya digunakan untuk investasi produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

IMF menerapkan syarat kebijakan makroekonomi, sering dikaitkan dengan program penyesuaian struktural, seperti pengurangan defisit fiskal atau reformasi moneter. *World Bank* menerapkan reformasi sektoral yang lebih spesifik, misalnya dalam sektor pendidikan, energi, atau tata kelola pemerintahan. Perbedaan ini mencerminkan fokus masing-masing lembaga terhadap stabilitas jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. IMF memiliki aset sekitar USD 1,0 triliun (dalam satuan SDR), sedangkan *World Bank* sekitar USD 700 miliar. Angka ini menunjukkan kapasitas keuangan masing-masing lembaga dalam memberikan pinjaman dan dukungan kepada negara anggota. IMF sering dikritik karena pendekatan yang dianggap pro-austeritas dan menggunakan kebijakan yang seragam untuk berbagai negara tanpa mempertimbangkan kondisi spesifik. *World Bank* menghadapi kritik terkait dampak lingkungan dari proyek pembangunan serta isu keberlanjutan utang bagi negara penerima pinjaman.

Hubungan antar kolom dalam tabel menunjukkan pembagian peran yang saling melengkapi. IMF menangani stabilitas ekonomi jangka pendek dan krisis, sedangkan *World Bank* berperan dalam pembangunan jangka panjang. Perbedaan dalam jenis pinjaman dan kondisionalitas mencerminkan strategi intervensi yang berbeda sesuai dengan tujuan masing-masing lembaga. Struktur tabel ini memberikan gambaran bahwa meskipun berasal dari institusi yang sama, IMF dan *World Bank* menjalankan fungsi yang berbeda dalam mendukung perekonomian global.

D. WTO (*World Trade Organization*)

World Trade Organization (WTO) merupakan lembaga internasional yang berperan sebagai pilar utama dalam tata kelola

Buku Referensi **159**

perdagangan global modern. WTO resmi berdiri pada 1 Januari 1995 sebagai kelanjutan dan penyempurnaan dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang telah ada sejak 1947. Transformasi dari GATT menjadi WTO menandai perubahan penting dari sekadar kerangka perjanjian menjadi sebuah organisasi formal dengan struktur kelembagaan yang lebih kuat, aturan yang lebih komprehensif, serta mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan jumlah anggota sekitar 164 negara yang mewakili hampir 98% perdagangan dunia, WTO menjadi satu-satunya organisasi multilateral yang secara khusus mengatur aturan perdagangan internasional dalam skala global.

Dalam perspektif ekonomi internasional, WTO memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem perdagangan yang terbuka, transparan, dan berbasis aturan (*rule-based system*). Salah satu fungsi utama WTO adalah sebagai forum negosiasi, di mana negara-negara anggota dapat merundingkan berbagai kesepakatan perdagangan, seperti pengurangan tarif, penghapusan hambatan non-tarif, serta liberalisasi sektor jasa dan investasi. Melalui putaran perundingan multilateral, WTO berupaya mendorong terciptanya perdagangan bebas yang adil dan saling menguntungkan. Forum ini juga memberikan ruang bagi negara berkembang untuk menyuarakan kepentingannya dan berpartisipasi dalam pembentukan aturan global.

Fungsi kedua WTO adalah mengadministrasikan dan mengawasi pelaksanaan berbagai perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati oleh negara anggota. Perjanjian-perjanjian ini mencakup berbagai bidang, seperti perdagangan barang, jasa, dan hak kekayaan intelektual. WTO memastikan bahwa setiap anggota mematuhi komitmen yang telah dibuat, sehingga tercipta kepastian hukum dalam perdagangan internasional. Kepastian ini sangat penting bagi pelaku usaha dan investor, karena memungkinkan mereka untuk merencanakan aktivitas ekonomi dengan lebih baik tanpa khawatir terhadap perubahan kebijakan yang tidak terduga.

Fungsi ketiga, yang sering dianggap sebagai salah satu inovasi paling signifikan dari WTO, adalah mekanisme penyelesaian sengketa atau *Dispute Settlement Mechanism* (DSM). Mekanisme ini dirancang untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan antarnegara secara terstruktur, transparan, dan berbasis hukum. Berbeda dengan sistem di era GATT yang sangat bergantung pada konsensus sehingga sering kali tidak efektif, DSM WTO memiliki sifat yang mengikat (*binding*).

Artinya, keputusan yang dihasilkan oleh panel sengketa dan badan banding (*Appellate Body*) harus dipatuhi oleh pihak yang bersengketa. Jika suatu negara tidak mematuhi keputusan tersebut, maka negara lain dapat mengambil tindakan balasan yang sah sesuai aturan WTO.

Sejak didirikan hingga tahun 2023, lebih dari 620 kasus sengketa telah diajukan ke WTO, menjadikannya salah satu sistem penyelesaian sengketa paling aktif dalam hukum internasional. Tingginya jumlah kasus ini menunjukkan bahwa WTO tidak hanya berfungsi sebagai forum diskusi, tetapi juga sebagai lembaga yang benar-benar digunakan oleh negara-negara untuk menyelesaikan konflik perdagangan secara damai. Mekanisme ini berperan penting dalam mencegah eskalasi konflik menjadi perang dagang yang lebih luas, sekaligus menjaga stabilitas sistem perdagangan global.

Selain tiga fungsi utama tersebut, WTO juga berperan dalam meningkatkan transparansi kebijakan perdagangan melalui mekanisme *trade policy review*, di mana kebijakan perdagangan negara anggota ditinjau secara berkala. Proses ini membantu meningkatkan akuntabilitas dan memungkinkan negara lain untuk memahami kebijakan yang diterapkan, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dan potensi konflik. WTO juga memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada negara berkembang agar mereka dapat lebih efektif berpartisipasi dalam sistem perdagangan global.

Namun demikian, WTO juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan perannya. Salah satu isu yang paling menonjol adalah stagnasi dalam perundingan multilateral, seperti dalam *Doha Development Round* yang mengalami kebuntuan selama bertahun-tahun. Selain itu, fungsi penyelesaian sengketa WTO juga sempat mengalami hambatan akibat tidak berfungsinya *Appellate Body* secara optimal dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan lainnya adalah meningkatnya praktik proteksionisme dan konflik perdagangan antarnegara besar, yang dapat melemahkan sistem perdagangan multilateral.

Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, WTO tetap memainkan peran sentral dalam menjaga keteraturan dan kepastian dalam perdagangan internasional. Dengan menyediakan forum negosiasi, mengelola perjanjian, serta menyelesaikan sengketa secara mengikat, WTO membantu menciptakan sistem perdagangan global yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif menjadi salah satu keunggulan utama

WTO dibandingkan sistem sebelumnya, karena memberikan jaminan bahwa aturan yang disepakati benar-benar ditegakkan.

WTO merupakan institusi kunci dalam ekonomi global yang memastikan bahwa interaksi perdagangan antarnegara berlangsung dalam kerangka aturan yang jelas dan adil. Perannya yang komprehensif, mulai dari negosiasi hingga penegakan hukum, menjadikan WTO sebagai fondasi utama dalam sistem perdagangan internasional modern. Dalam dunia yang semakin terintegrasi, keberadaan WTO sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan akan kerja sama global, sehingga perdagangan internasional dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan inklusif.

E. ASEAN dan Kerja Sama Regional

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) didirikan 1967 oleh 5 negara pendiri (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand) dan kini beranggotakan 10 negara. Visi ASEAN adalah mewujudkan komunitas yang terintegrasi, damai, dan sejahtera. *ASEAN Economic Community* (AEC), yang dicanangkan pada 2015, bertujuan membangun pasar tunggal dan basis produksi di Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi kawasan di Asia Tenggara yang awalnya dibentuk oleh lima negara dan kemudian berkembang menjadi sepuluh anggota dengan tujuan memperkuat kerja sama regional. Organisasi ini memiliki visi untuk menciptakan kawasan yang stabil, damai, dan makmur melalui peningkatan kerja sama di berbagai bidang. Salah satu wujud konkret dari kerja sama tersebut adalah pembentukan *ASEAN Economic Community* yang bertujuan mengintegrasikan ekonomi negara-negara anggota melalui pembentukan pasar tunggal dan basis produksi bersama, sehingga arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja menjadi lebih terhubung di kawasan Asia Tenggara.

Dalam perspektif ekonomi internasional, kerja sama regional seperti ASEAN memiliki peran penting dalam memperkuat integrasi ekonomi antarnegara yang memiliki kedekatan geografis dan kepentingan bersama. ASEAN berfungsi sebagai platform untuk mengurangi hambatan perdagangan, meningkatkan arus investasi, serta memperkuat daya saing kawasan dalam menghadapi persaingan global. Salah satu inisiatif utama dalam bidang ekonomi adalah pembentukan *ASEAN Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi

ASEAN, yang bertujuan menciptakan pasar dan basis produksi tunggal di kawasan Asia Tenggara. Melalui AEC, negara-negara anggota berupaya mewujudkan aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal.

Salah satu instrumen penting dalam kerja sama ekonomi ASEAN adalah pengurangan tarif melalui skema *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), yang bertujuan menurunkan hambatan perdagangan antarnegara anggota. Dengan tarif yang lebih rendah, produk dari negara anggota dapat bersaing lebih baik di pasar regional, sehingga mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN. Selain itu, ASEAN juga mengembangkan berbagai perjanjian perdagangan bebas dengan mitra eksternal, seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru, yang semakin memperluas akses pasar bagi negara-negara anggotanya.

Kerja sama regional ASEAN tidak hanya terbatas pada perdagangan, tetapi juga mencakup integrasi sektor keuangan, pembangunan infrastruktur, serta kerja sama dalam bidang industri dan teknologi. Dalam sektor keuangan, ASEAN berupaya memperkuat stabilitas melalui koordinasi kebijakan moneter dan pengembangan pasar keuangan regional. Sementara itu, dalam bidang infrastruktur, ASEAN mendorong konektivitas antarnegara melalui proyek-proyek transportasi dan logistik yang bertujuan mengurangi biaya perdagangan dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Upaya ini sangat penting untuk mendukung integrasi ekonomi yang lebih dalam dan merata di seluruh kawasan.

Selain manfaat ekonomi, kerja sama regional ASEAN juga memiliki dimensi politik dan strategis yang penting. ASEAN berperan sebagai forum dialog dan diplomasi yang membantu menjaga stabilitas kawasan melalui prinsip non-intervensi dan konsensus. Pendekatan ini memungkinkan negara-negara dengan sistem politik dan tingkat pembangunan yang berbeda untuk tetap bekerja sama secara harmonis. Stabilitas politik yang terjaga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi di kawasan.

Namun demikian, integrasi ekonomi ASEAN juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antarnegara anggota, yang dapat menghambat implementasi kebijakan bersama. Negara-negara dengan ekonomi yang lebih maju cenderung lebih siap dalam menghadapi liberalisasi,

sementara negara yang kurang berkembang membutuhkan waktu dan dukungan lebih untuk menyesuaikan diri. Selain itu, masih terdapat hambatan non-tarif, perbedaan regulasi, serta keterbatasan infrastruktur yang dapat mengurangi efektivitas integrasi.

Di sisi lain, tingkat perdagangan intra-ASEAN yang masih relatif rendah dibandingkan dengan kawasan lain seperti Uni Eropa menunjukkan bahwa potensi kerja sama regional belum sepenuhnya dimanfaatkan. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk memperdalam integrasi ekonomi, meningkatkan harmonisasi kebijakan, serta memperkuat institusi regional. Selain itu, dinamika geopolitik global dan persaingan antara kekuatan besar juga menjadi tantangan tersendiri bagi ASEAN dalam menjaga netralitas dan kesatuan kawasan.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, ASEAN tetap menjadi contoh penting dari keberhasilan kerja sama regional di dunia berkembang. Keberadaannya telah membantu menciptakan kawasan yang relatif stabil, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat posisi negara-negara anggotanya dalam ekonomi global. Melalui pendekatan yang fleksibel dan berbasis konsensus, ASEAN mampu mengakomodasi berbagai kepentingan nasional sekaligus mendorong kerja sama yang saling menguntungkan.

ASEAN dan kerja sama regional yang dibangunnya memainkan peran strategis dalam membentuk dinamika ekonomi dan politik di Asia Tenggara. Dengan fokus pada integrasi ekonomi, peningkatan konektivitas, serta stabilitas kawasan, ASEAN menjadi instrumen penting dalam menghadapi tantangan globalisasi. Ke depan, keberhasilan ASEAN akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk memperdalam integrasi, mengatasi kesenjangan antarnegara, serta beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan geopolitik global yang terus berkembang.

F. Kritik terhadap Lembaga Internasional

Kritik terhadap lembaga internasional dalam ekonomi global muncul dari kenyataan bahwa meskipun lembaga-lembaga ini dirancang untuk menciptakan stabilitas, efisiensi, dan kerja sama antarnegara, implementasi kebijakannya tidak selalu menghasilkan dampak yang merata atau adil bagi semua pihak, terutama negara berkembang. Dalam kajian ekonomi internasional, lembaga seperti *International Monetary*

Fund, *World Bank*, dan *World Trade Organization* sering dipandang sebagai pilar utama tata kelola ekonomi global, tetapi juga menjadi sasaran kritik karena pendekatan kebijakan, distribusi kekuasaan, dan efektivitas kelembagaannya.

Salah satu kritik paling berpengaruh datang dari Joseph Stiglitz dalam bukunya *People, Power, and Profits* (2019), yang menyoroti dampak negatif dari program *structural adjustment* yang sering disyaratkan oleh IMF dan World Bank kepada negara-negara yang mengalami krisis. Program ini umumnya mencakup kebijakan pengetatan fiskal, liberalisasi perdagangan, deregulasi, dan privatisasi sektor publik. Meskipun bertujuan untuk memulihkan stabilitas ekonomi dan meningkatkan efisiensi, dalam praktiknya kebijakan tersebut sering kali menimbulkan konsekuensi sosial yang berat, seperti meningkatnya pengangguran, berkurangnya akses terhadap layanan publik, serta memburuknya tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Kritik Stiglitz menekankan bahwa pendekatan yang terlalu berfokus pada stabilitas makroekonomi sering mengabaikan dimensi sosial dan institusional yang sangat penting bagi pembangunan jangka panjang.

Sejalan dengan itu, Dani Rodrik dalam karyanya *The Globalization Paradox* (2011) mengkritik apa yang disebut sebagai pendekatan *one-size-fits-all* yang sering dipromosikan oleh lembaga-lembaga Bretton Woods. Menurut Rodrik, kebijakan ekonomi yang dianggap “standar” atau universal tidak selalu sesuai dengan kondisi spesifik masing-masing negara. Negara berkembang memiliki struktur ekonomi, kapasitas institusi, serta konteks sosial-politik yang sangat beragam, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Ketika kebijakan yang seragam diterapkan tanpa mempertimbangkan perbedaan ini, hasilnya sering kali tidak optimal, bahkan dapat memperburuk kondisi ekonomi. Kritik ini menyoroti pentingnya ruang kebijakan (*policy space*) bagi negara untuk merancang strategi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan domestiknya.

Di sisi lain, *World Trade Organization* juga menghadapi kritik yang tidak kalah signifikan, terutama terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement Mechanism*). Menurut analisis Kyle Bagwell dan Robert Staiger (2020), mekanisme ini yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu kekuatan utama WTO, kini menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya politisasi. Salah satu

isu utama adalah pemblokiran oleh Amerika Serikat terhadap penunjukan hakim di badan banding (*Appellate Body*), yang menyebabkan terganggunya fungsi penyelesaian sengketa secara efektif. Kondisi ini melemahkan kredibilitas WTO sebagai lembaga yang mampu menegakkan aturan perdagangan internasional secara adil dan konsisten.

Selain kritik terhadap kebijakan dan mekanisme, terdapat pula kritik terkait distribusi kekuasaan dalam lembaga internasional. Negara-negara maju sering memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui sistem kuota di IMF maupun kapasitas negosiasi di WTO. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa lembaga internasional lebih mencerminkan kepentingan negara maju dibandingkan negara berkembang. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan kebutuhan dan prioritas negara-negara dengan tingkat pembangunan yang lebih rendah.

Kritik lainnya berkaitan dengan legitimasi dan akuntabilitas lembaga internasional. Karena lembaga-lembaga ini beroperasi di tingkat global, sering kali terdapat jarak antara pengambil keputusan dan masyarakat yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Hal ini dapat menimbulkan defisit demokrasi, di mana keputusan penting yang memengaruhi kehidupan jutaan orang dibuat tanpa partisipasi langsung dari mereka. Dalam konteks ini, transparansi dan keterlibatan publik menjadi isu penting yang terus didorong oleh berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil.

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa kritik terhadap lembaga internasional tidak selalu berarti penolakan terhadap keberadaan mereka. Sebaliknya, banyak kritik bertujuan untuk mendorong reformasi agar lembaga-lembaga tersebut dapat berfungsi lebih efektif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan global yang terus berubah. Misalnya, reformasi dalam sistem kuota IMF, peningkatan representasi negara berkembang, serta perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa WTO merupakan beberapa agenda yang sering dibahas dalam upaya memperkuat tata kelola ekonomi global.

Kritik terhadap lembaga internasional mencerminkan kompleksitas dalam mengelola ekonomi global yang melibatkan berbagai kepentingan dan tingkat pembangunan yang berbeda. Pandangan dari Stiglitz menyoroti dampak sosial kebijakan, Rodrik menekankan pentingnya fleksibilitas dan konteks lokal, sementara

Bagwell dan Staiger mengingatkan tentang pentingnya menjaga integritas institusi. Ketiga perspektif ini menunjukkan bahwa meskipun lembaga internasional memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas dan kerja sama global, mereka juga perlu terus beradaptasi dan melakukan perbaikan agar dapat memenuhi tantangan ekonomi global secara lebih inklusif dan berkelanjutan.



BAB VII

INVESTASI

INTERNASIONAL DAN

PERUSAHAAN

MULTINASIONAL

Investasi langsung luar negeri dan perusahaan multinasional adalah pilar utama globalisasi ekonomi modern. UNCTAD (2023) melaporkan bahwa total *stock Foreign Direct Investment* global mencapai USD 41 triliun, sementara *Multi National Company* mengendalikan sekitar sepertiga dari total output manufaktur global dan lebih dari separuh perdagangan internasional. Pemahaman atas motivasi, dampak, dan regulasi investasi internasional adalah esensi dari studi ekonomi internasional kontemporer. Investasi langsung luar negeri dan perusahaan multinasional memegang peranan sangat penting dalam struktur ekonomi global saat ini karena keduanya menjadi penggerak utama arus modal, produksi, dan perdagangan antarnegara. Besarnya nilai investasi yang tersebar di berbagai negara menunjukkan tingkat keterhubungan ekonomi yang sangat tinggi, sementara dominasi perusahaan multinasional dalam produksi manufaktur dan perdagangan global menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi dunia berada di bawah pengaruh korporasi berskala internasional. Kondisi ini membuat kajian mengenai alasan perusahaan berinvestasi di luar negeri, dampak keberadaan investasi tersebut terhadap ekonomi negara tuan rumah, serta aturan yang mengatur aktivitasnya menjadi bagian penting dalam memahami dinamika ekonomi internasional modern.

A. *Foreign Direct Investment (FDI)*

Foreign Direct Investment (FDI) atau penanaman modal asing langsung merupakan salah satu bentuk aliran modal internasional di mana investor dari suatu negara menanamkan modalnya secara langsung ke dalam kegiatan ekonomi di negara lain dengan tujuan memperoleh kendali atau pengaruh signifikan terhadap perusahaan atau aset yang diinvestasikan. Berbeda dengan investasi portofolio yang bersifat pasif, FDI biasanya melibatkan kepemilikan saham dalam jumlah besar (umumnya minimal 10%), partisipasi dalam manajemen, serta keterlibatan langsung dalam operasional perusahaan. Dalam kerangka ekonomi internasional, FDI dipandang sebagai salah satu mekanisme utama dalam integrasi ekonomi global karena menghubungkan pasar, teknologi, dan sumber daya lintas negara secara lebih mendalam.

FDI dapat berbentuk berbagai jenis, di antaranya adalah *greenfield investment* dan *brownfield investment*. *Greenfield* terjadi ketika investor asing membangun fasilitas produksi baru dari awal di negara tujuan, seperti mendirikan pabrik atau kantor cabang baru. Sementara itu, *brownfield* terjadi melalui akuisisi atau merger dengan perusahaan yang sudah ada di negara tersebut. Selain itu, FDI juga dapat dibedakan berdasarkan motivasinya, seperti *market-seeking* (mencari pasar baru), *resource-seeking* (mencari sumber daya alam atau tenaga kerja murah), *efficiency-seeking* (meningkatkan efisiensi produksi melalui pembagian rantai nilai global), dan *strategic asset-seeking* (memperoleh teknologi atau keunggulan kompetitif tertentu).

Salah satu kerangka teoritis yang paling dikenal dalam menjelaskan FDI adalah paradigma OLI (*Ownership, Location, Internalization*) yang dikembangkan oleh John Dunning. Menurut teori ini, perusahaan akan melakukan investasi langsung di luar negeri jika memiliki keunggulan kepemilikan (*ownership advantages*), seperti teknologi atau merek yang kuat; jika negara tujuan memiliki keunggulan lokasi (*location advantages*), seperti biaya tenaga kerja yang rendah atau akses pasar yang besar; serta jika lebih efisien untuk menginternalisasi kegiatan produksi dibandingkan melalui kontrak pasar (*internalization advantages*). Ketiga faktor ini menjelaskan mengapa perusahaan multinasional memilih untuk berinvestasi secara langsung daripada hanya mengekspor atau melakukan lisensi.

Dampak FDI terhadap perekonomian negara penerima umumnya bersifat positif, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi. Kehadiran perusahaan asing dapat meningkatkan produktivitas melalui adopsi teknologi baru, pelatihan tenaga kerja, serta praktik manajemen yang lebih efisien. Selain itu, FDI juga dapat meningkatkan ekspor dan memperkuat integrasi negara penerima dalam rantai nilai global. Namun demikian, manfaat ini tidak selalu otomatis terjadi dan sangat bergantung pada kapasitas domestik, seperti kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, FDI juga memiliki potensi dampak negatif yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah risiko dominasi perusahaan asing terhadap sektor-sektor strategis, yang dapat mengurangi kedaulatan ekonomi negara penerima. Selain itu, perusahaan multinasional terkadang melakukan praktik seperti *profit repatriation* (pemulangan keuntungan ke negara asal) yang dapat mengurangi manfaat ekonomi lokal. Dalam beberapa kasus, FDI juga dapat menyebabkan persaingan yang tidak seimbang dengan perusahaan domestik yang lebih kecil dan kurang kompetitif. Bagi negara asal, FDI dapat memberikan keuntungan berupa diversifikasi investasi, akses ke pasar baru, serta peningkatan keuntungan perusahaan. Namun, terdapat juga kekhawatiran bahwa FDI dapat menyebabkan relokasi industri ke luar negeri, yang berpotensi mengurangi lapangan kerja domestik. Oleh karena itu, dampak FDI perlu dilihat secara komprehensif dari perspektif kedua belah pihak.

Kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam menarik dan mengelola FDI. Banyak negara berlomba-lomba menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui insentif pajak, deregulasi, serta pembangunan infrastruktur. Namun, kebijakan ini harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan “*race to the bottom*”, yaitu persaingan antarnegara dalam menurunkan standar regulasi atau pajak secara berlebihan untuk menarik investor. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa FDI memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian domestik, misalnya melalui pengembangan industri lokal dan peningkatan kapasitas tenaga kerja. Dalam konteks globalisasi, FDI menjadi semakin penting sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan integrasi pasar internasional. Perusahaan multinasional yang melakukan FDI memainkan peran sentral dalam membentuk jaringan produksi global yang kompleks, di mana berbagai tahapan

produksi tersebar di berbagai negara sesuai dengan keunggulan masing-masing. Hal ini memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi, tetapi juga meningkatkan ketergantungan antarnegara.

FDI merupakan komponen penting dalam dinamika ekonomi global yang menawarkan peluang sekaligus tantangan. Dengan pengelolaan yang tepat, FDI dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, tanpa kebijakan yang efektif dan institusi yang kuat, manfaat FDI dapat tidak optimal atau bahkan menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang karakteristik, determinan, dan implikasi FDI sangat penting bagi negara dalam merumuskan strategi pembangunan yang adaptif di tengah perubahan ekonomi global yang cepat.

B. Motif Investasi Internasional

Motif investasi internasional merujuk pada berbagai alasan yang mendorong individu, perusahaan, maupun institusi untuk menanamkan modalnya di luar negeri, baik dalam bentuk investasi langsung maupun portofolio. Dalam kerangka ekonomi internasional, motif ini tidak hanya berkaitan dengan pencarian keuntungan semata, tetapi juga mencerminkan strategi jangka panjang dalam merespons perbedaan kondisi ekonomi, peluang pasar, serta dinamika global. Pemahaman terhadap motif investasi internasional menjadi penting karena dapat menjelaskan pola aliran modal antarnegara sekaligus dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan integrasi global.

Salah satu motif utama adalah *market-seeking*, yaitu dorongan untuk mengakses pasar baru yang lebih luas. Perusahaan yang telah mencapai kejenuhan di pasar domestik sering mencari peluang ekspansi ke negara lain dengan jumlah penduduk besar atau pertumbuhan ekonomi tinggi. Dengan berinvestasi langsung di negara tujuan, perusahaan dapat lebih dekat dengan konsumen, mengurangi biaya distribusi, serta menyesuaikan produk dengan preferensi lokal. Motif ini sangat umum ditemukan pada perusahaan multinasional yang ingin memperluas pangsa pasar globalnya.

Motif kedua adalah *resource-seeking*, yaitu keinginan untuk memperoleh akses terhadap sumber daya yang tidak tersedia atau terbatas di negara asal. Sumber daya tersebut dapat berupa bahan baku,

energi, atau tenaga kerja dengan biaya lebih rendah. Banyak investasi di sektor pertambangan, energi, dan manufaktur padat karya didorong oleh motif ini. Negara berkembang sering menjadi tujuan utama karena memiliki kekayaan sumber daya alam dan biaya produksi yang relatif rendah, sehingga menarik bagi investor asing.

Motif berikutnya adalah *efficiency-seeking*, yang berkaitan dengan upaya meningkatkan efisiensi produksi melalui pembagian proses produksi secara global. Dalam konteks ini, perusahaan memanfaatkan perbedaan biaya faktor produksi antarnegara untuk mengoptimalkan rantai nilai global. Misalnya, tahap produksi yang padat karya ditempatkan di negara dengan upah rendah, sementara tahap yang membutuhkan teknologi tinggi dilakukan di negara maju. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing di pasar internasional.

Selain itu, terdapat motif *strategic asset-seeking*, yaitu upaya untuk memperoleh aset strategis seperti teknologi, merek dagang, jaringan distribusi, atau keahlian tertentu yang dimiliki oleh perusahaan di negara lain. Motif ini sering mendorong terjadinya merger dan akuisisi lintas negara, terutama di sektor teknologi dan industri berbasis pengetahuan. Dengan mengakuisisi perusahaan yang memiliki keunggulan tertentu, investor dapat memperkuat posisi kompetitifnya di tingkat global.

Motif lain yang tidak kalah penting adalah *diversification-seeking*, terutama dalam konteks investasi portofolio. Investor internasional sering menyebarkan investasinya ke berbagai negara untuk mengurangi risiko. Dengan melakukan diversifikasi geografis, risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi atau politik di satu negara dapat diminimalkan. Strategi ini menjadi semakin relevan dalam dunia yang penuh ketidakpastian, di mana gejolak ekonomi di satu wilayah dapat berdampak luas.

Selain faktor ekonomi, motif investasi internasional juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan kondisi institusional. Insentif pajak, stabilitas politik, kemudahan berusaha, serta kualitas infrastruktur menjadi faktor penentu dalam menarik investor asing. Negara yang mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif cenderung lebih berhasil menarik aliran modal internasional. Sebaliknya, ketidakpastian hukum, korupsi, atau instabilitas politik dapat menjadi penghalang utama bagi investasi.

Dalam perspektif teori, motif investasi internasional sering dikaitkan dengan paradigma OLI yang dikembangkan oleh John Dunning, yang menekankan pentingnya keunggulan kepemilikan, lokasi, dan internalisasi. Motif-motif seperti market-seeking, resource-seeking, dan efficiency-seeking pada dasarnya merupakan manifestasi dari keunggulan lokasi, sementara strategic asset-seeking berkaitan dengan keunggulan kepemilikan. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa perusahaan memilih untuk berinvestasi secara langsung di luar negeri daripada menggunakan mekanisme lain seperti ekspor atau lisensi. Namun demikian, motif investasi internasional tidak selalu bersifat ekonomi semata. Dalam beberapa kasus, terdapat juga pertimbangan politik dan strategis, seperti memperkuat hubungan bilateral, mengamankan pasokan sumber daya, atau meningkatkan pengaruh geopolitik. Hal ini menunjukkan bahwa investasi internasional sering kali berada di persimpangan antara kepentingan ekonomi dan politik.

Motif investasi internasional dalam perspektif modern tidak dapat dilepaskan dari kerangka analitis yang dikembangkan oleh John Dunning melalui OLI *Paradigm* atau *Eclectic Paradigm*. Kerangka ini menjadi salah satu teori paling komprehensif dalam menjelaskan mengapa perusahaan melakukan ekspansi lintas negara dan memilih bentuk investasi tertentu, khususnya *foreign direct investment* (FDI). Dalam kajian ekonomi internasional, paradigma OLI memberikan pendekatan integratif yang menggabungkan berbagai motif ekonomi, strategis, dan organisasi dalam satu model yang koheren. Dunning berargumen bahwa keputusan perusahaan untuk menjadi perusahaan multinasional tidak didorong oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi tiga keunggulan utama, yaitu *Ownership* (O), *Location* (L), dan *Internalization* (I).

Komponen pertama, *Ownership Advantage* (O), menjelaskan mengapa perusahaan tertentu memiliki kemampuan untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Keunggulan ini merujuk pada aset spesifik yang dimiliki perusahaan, seperti teknologi, merek dagang, hak kekayaan intelektual, serta keahlian manajerial dan organisasi. Perusahaan yang ingin bersaing di pasar internasional harus memiliki sesuatu yang unik atau superior dibandingkan pesaing lokal di negara tujuan. Tanpa keunggulan ini, perusahaan akan kesulitan menghadapi persaingan di pasar asing yang biasanya sudah diisi oleh pelaku domestik yang lebih memahami kondisi lokal. Selain itu, skala ekonomi (*economies of scale*)

juga menjadi bagian penting dari keunggulan kepemilikan, karena memungkinkan perusahaan memproduksi dalam jumlah besar dengan biaya rata-rata yang lebih rendah. Jaringan distribusi global yang kuat juga memperkuat posisi perusahaan dalam menjangkau pasar internasional secara lebih efisien. Dengan demikian, *Ownership Advantage* menjadi fondasi utama yang menentukan apakah suatu perusahaan memiliki kapasitas untuk melakukan investasi internasional.

Komponen kedua, *Location Advantage* (L), berfokus pada alasan mengapa perusahaan memilih negara tertentu sebagai lokasi investasi. Keputusan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan karakteristik negara tujuan, seperti biaya tenaga kerja, ketersediaan sumber daya alam, ukuran dan potensi pasar, serta kualitas infrastruktur. Negara dengan biaya produksi yang lebih rendah dapat menarik investasi yang berorientasi pada efisiensi, sementara negara dengan pasar yang besar lebih menarik bagi investasi yang berorientasi pada pasar (*market-seeking*). Selain itu, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, dan kemudahan berusaha juga menjadi faktor penting dalam menentukan daya tarik suatu lokasi. Infrastruktur yang baik, seperti transportasi dan komunikasi, akan mendukung kelancaran operasional dan distribusi, sehingga meningkatkan efisiensi investasi. Dalam konteks ini, *Location Advantage* menjelaskan bagaimana faktor eksternal di negara tujuan berperan dalam membentuk keputusan investasi internasional.

Komponen ketiga, *Internalization Advantage* (I), menjelaskan mengapa perusahaan memilih untuk melakukan investasi langsung dibandingkan alternatif lain seperti ekspor atau lisensi. *Internalization* berkaitan dengan keputusan untuk mengendalikan sendiri aktivitas produksi dan distribusi daripada menyerahkannya kepada pihak eksternal. Salah satu alasan utama adalah untuk menghindari masalah asimetri informasi, di mana pihak luar mungkin tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai teknologi atau standar kualitas yang diinginkan perusahaan. Selain itu, internalisasi memungkinkan perusahaan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari potensi penyalahgunaan oleh mitra lokal. Pengendalian langsung juga mempermudah koordinasi dalam rantai pasok global serta memastikan konsistensi kualitas produk. Dengan kata lain, *Internalization Advantage* mencerminkan pertimbangan efisiensi organisasi dan pengurangan risiko dalam pengelolaan operasi internasional.

Ketiga komponen dalam paradigma OLI tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dan harus hadir secara bersamaan agar investasi langsung ke luar negeri menjadi pilihan yang rasional. *Ownership Advantage* memberikan kemampuan kompetitif, *Location Advantage* menentukan tempat yang paling menguntungkan, dan *Internalization Advantage* menentukan cara terbaik untuk mengorganisasi aktivitas tersebut. Jika salah satu dari ketiga elemen ini tidak terpenuhi, maka perusahaan kemungkinan akan memilih strategi lain, seperti ekspor atau kerja sama lisensi, daripada melakukan FDI. Misalnya, perusahaan yang memiliki teknologi unggul tetapi tidak menemukan lokasi yang sesuai mungkin akan tetap beroperasi di dalam negeri, sementara perusahaan yang tertarik pada suatu lokasi tetapi tidak memiliki keunggulan kompetitif tidak akan mampu bersaing di pasar tersebut.

Paradigma OLI juga membantu menjelaskan berbagai motif investasi internasional yang telah dibahas sebelumnya, seperti *market-seeking*, *resource-seeking*, *efficiency-seeking*, dan *strategic asset-seeking*. Motif-motif ini pada dasarnya merupakan manifestasi dari interaksi antara ketiga komponen OLI. Misalnya, *resource-seeking* berkaitan erat dengan *Location Advantage*, sementara *strategic asset-seeking* sering kali terkait dengan *Ownership Advantage*. Sementara itu, keputusan untuk mengintegrasikan aktivitas produksi secara global melalui FDI mencerminkan *Internalization Advantage*.

OLI *Paradigm* memberikan kerangka sistematis untuk memahami bagaimana dan mengapa perusahaan multinasional terbentuk serta bagaimana mereka merancang strategi ekspansi global. Dengan menggabungkan faktor internal perusahaan dan kondisi eksternal negara tujuan, paradigma ini mampu menjelaskan kompleksitas keputusan investasi internasional secara komprehensif. Dalam dunia yang semakin terintegrasi, pemahaman terhadap kerangka ini menjadi sangat penting, baik bagi perusahaan yang ingin berekspansi ke luar negeri maupun bagi pemerintah yang ingin menarik investasi asing. Dengan memahami interaksi antara *Ownership*, *Location*, dan *Internalization*, negara dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan daya tarik investasi sekaligus memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat optimal bagi perekonomian domestik.

C. Peran Perusahaan Multinasional (MNC)

Perusahaan multinasional (MNC) adalah perusahaan yang memiliki dan mengendalikan operasi produktif di lebih dari satu negara. MNC adalah aktor non-negara paling berpengaruh dalam ekonomi global. Dengan kapasitas untuk mengalihkan produksi, laba, dan tenaga kerja antar yurisdiksi, MNC memiliki pengaruh yang sering melampaui kapasitas regulasi negara-negara berkembang. Perusahaan multinasional merupakan entitas bisnis yang menjalankan dan mengendalikan kegiatan produksi di berbagai negara sekaligus, sehingga tidak terbatas pada satu wilayah nasional saja. Besarnya skala dan kekuatan ekonomi perusahaan-perusahaan ini membuat mereka menjadi aktor non-negara yang sangat dominan dalam sistem ekonomi global, bahkan banyak di antaranya memiliki nilai ekonomi yang melampaui negara. Kemampuan untuk memindahkan produksi, keuntungan, dan tenaga kerja ke berbagai negara memberikan mereka posisi tawar yang sangat kuat, sehingga sering kali lebih besar dibandingkan kemampuan pemerintah, terutama di negara berkembang, dalam mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi tersebut.

Perusahaan multinasional atau *multinational corporations* (MNC) merupakan aktor kunci dalam ekonomi global yang beroperasi di lebih dari satu negara melalui jaringan anak perusahaan, cabang, atau afiliasi. Keberadaan MNC tidak hanya mencerminkan tingkat integrasi ekonomi dunia yang semakin tinggi, tetapi juga menjadi motor utama dalam pergerakan investasi, perdagangan, dan transfer teknologi lintas negara. Dalam perspektif ekonomi internasional, MNC dipandang sebagai penghubung utama antara pasar domestik dan global, karena mereka mengorganisasi produksi, distribusi, dan inovasi secara internasional. Aktivitas mereka biasanya terkait erat dengan *Foreign Direct Investment*, di mana perusahaan menanamkan modal langsung di negara lain untuk memperoleh kendali atas operasi bisnis.

Salah satu peran utama MNC adalah sebagai penggerak investasi global. Melalui FDI, MNC membawa modal ke negara tujuan, yang dapat digunakan untuk membangun fasilitas produksi, mengembangkan infrastruktur, serta memperluas kapasitas ekonomi. Investasi ini sering kali menjadi sumber pembiayaan penting bagi negara berkembang yang memiliki keterbatasan modal domestik. Selain itu, kehadiran MNC juga dapat menciptakan lapangan kerja, baik secara langsung melalui

perekrutan tenaga kerja lokal maupun secara tidak langsung melalui efek pengganda (*multiplier effect*) pada sektor-sektor terkait.

Peran penting lainnya adalah sebagai agen transfer teknologi dan pengetahuan. MNC biasanya memiliki akses terhadap teknologi canggih, praktik manajemen modern, serta inovasi yang dikembangkan di tingkat global. Ketika mereka beroperasi di negara lain, teknologi dan pengetahuan ini dapat ditransfer ke perusahaan lokal melalui berbagai mekanisme, seperti pelatihan tenaga kerja, kemitraan bisnis, atau difusi teknologi. Proses ini dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing industri domestik, terutama jika didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan kapasitas lokal.

MNC juga memainkan peran sentral dalam pembentukan dan pengelolaan rantai nilai global (*global value chains*). Dalam sistem ini, proses produksi suatu barang atau jasa dibagi menjadi berbagai tahapan yang tersebar di berbagai negara sesuai dengan keunggulan masing-masing. MNC mengoordinasikan aktivitas ini secara terintegrasi, sehingga memungkinkan efisiensi produksi yang lebih tinggi. Misalnya, penelitian dan pengembangan dapat dilakukan di negara maju, sementara produksi dilakukan di negara dengan biaya tenaga kerja lebih rendah, dan distribusi dilakukan di pasar global. Struktur ini mencerminkan bagaimana MNC mengoptimalkan sumber daya global untuk meningkatkan daya saing.

Selain kontribusi ekonomi, MNC juga memiliki peran dalam integrasi pasar internasional. Dengan beroperasi di berbagai negara, MNC membantu menghubungkan pasar yang sebelumnya terpisah, sehingga meningkatkan arus barang, jasa, dan modal. Mereka juga berperan dalam menyebarkan standar global, baik dalam hal kualitas produk, praktik bisnis, maupun regulasi. Dalam banyak kasus, standar yang diterapkan oleh MNC menjadi acuan bagi perusahaan lokal untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. Namun demikian, peran MNC tidak lepas dari berbagai tantangan dan kritik. Salah satu isu utama adalah potensi dominasi ekonomi oleh perusahaan asing, yang dapat melemahkan posisi perusahaan domestik, terutama di negara berkembang. Selain itu, praktik seperti *profit repatriation* dapat mengurangi manfaat ekonomi yang diperoleh negara tuan rumah, karena sebagian besar keuntungan dikembalikan ke negara asal. Isu lainnya adalah terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, di mana

beberapa MNC dituduh melakukan eksploitasi sumber daya atau tenaga kerja di negara dengan regulasi yang lebih lemah.

Dari sisi kebijakan, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur aktivitas MNC agar memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian domestik. Hal ini dapat dilakukan melalui regulasi yang jelas, insentif investasi yang tepat, serta kebijakan yang mendorong keterkaitan antara MNC dan industri lokal. Misalnya, pemerintah dapat mendorong *local content requirements* atau kemitraan dengan usaha kecil dan menengah untuk memastikan bahwa manfaat investasi tersebar lebih luas. Selain itu, MNC juga semakin dituntut untuk berperan dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, perusahaan tidak hanya dinilai dari kinerja finansial, tetapi juga dari dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Banyak MNC kini mengadopsi prinsip *corporate social responsibility* (CSR) dan *environmental, social, and governance* (ESG) untuk meningkatkan keberlanjutan operasional mereka.

Perusahaan multinasional memainkan peran yang sangat signifikan dalam ekonomi global sebagai penggerak investasi, inovasi, dan integrasi pasar. Mereka membawa peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tetapi juga menimbulkan tantangan yang memerlukan pengelolaan yang tepat. Dengan kebijakan yang efektif dan tata kelola yang baik, peran MNC dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di berbagai negara.

Tabel 7.1 MNC Terbesar berdasarkan Aset Luar Negeri (2022)

Peringkat	Perusahaan	Negara Asal	Sektor	Aset LN (USD M)
1	Apple	AS	Teknologi	330.000
2	Shell	Belanda	Energi	325.000
3	Toyota	Jepang	Otomotif	298.000
4	Volkswagen	Jerman	Otomotif	260.000
5	Microsoft	AS	Teknologi	245.000

Sumber: UNCTAD (2023)

Tabel 7.1 menampilkan perusahaan multinasional terbesar di dunia berdasarkan aset luar negeri tahun 2022, dengan lima kolom utama: “Peringkat”, “Perusahaan”, “Negara Asal”, “Sektor”, dan “Aset LN (USD M)”. Setiap baris menunjukkan posisi perusahaan dalam skala Global serta karakteristik industrinya. Baris pertama adalah peringkat 1: Apple. Kolom negara asal menunjukkan Amerika Serikat, sedangkan sektor adalah teknologi. Kolom aset luar negeri sebesar USD 330.000 juta menunjukkan besarnya kepemilikan aset di luar negeri, seperti fasilitas produksi, kantor cabang, dan investasi internasional. Nilai ini mencerminkan kapasitas global Apple dalam mengelola rantai pasok dan pasar internasional, terutama dalam industri berbasis inovasi.

Baris kedua adalah peringkat 2: Shell. Negara asalnya Belanda dan bergerak di sektor energi. Aset luar negeri sebesar USD 325.000 juta menunjukkan skala operasi global yang sangat luas, mencakup eksplorasi, produksi, dan distribusi energi di berbagai negara. Sektor energi membutuhkan investasi besar dan lokasi operasi yang tersebar, sehingga wajar memiliki aset luar negeri yang tinggi. Baris ketiga adalah peringkat 3: Toyota. Perusahaan ini berasal dari Jepang dan bergerak di sektor otomotif. Aset luar negeri sebesar USD 298.000 juta mencerminkan jaringan produksi global, termasuk pabrik dan fasilitas perakitan di berbagai negara. Strategi produksi dekat pasar konsumen menjadi salah satu faktor utama dalam ekspansi internasional perusahaan otomotif.

Baris keempat adalah peringkat 4: Volkswagen. Negara asalnya Jerman dengan sektor otomotif. Aset luar negeri sebesar USD 260.000 juta menunjukkan skala internasional yang besar, serupa dengan Toyota. Perusahaan ini mengoperasikan berbagai merek dan fasilitas produksi lintas negara untuk menjangkau pasar global. Baris kelima adalah peringkat 5: Microsoft. Perusahaan ini berasal dari Amerika Serikat dan bergerak di sektor teknologi. Aset luar negeri sebesar USD 245.000 juta mencerminkan investasi dalam pusat data, kantor regional, serta infrastruktur digital global. Berbeda dari manufaktur, sektor teknologi lebih menekankan pada aset berbasis pengetahuan dan jaringan digital.

Hubungan antar kolom dalam tabel menunjukkan bahwa sektor industri memengaruhi pola ekspansi internasional. Perusahaan energi dan otomotif cenderung memiliki aset fisik besar di berbagai lokasi, sementara perusahaan teknologi menggabungkan aset fisik dan digital dalam skala global. Perbandingan antar perusahaan juga menunjukkan

dominasi negara maju sebagai asal MNC terbesar. Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang menjadi pusat perusahaan dengan kapasitas ekspansi global yang tinggi. Hal ini mencerminkan keunggulan dalam teknologi, modal, dan manajemen.

Nilai aset luar negeri dalam tabel menunjukkan tingkat internasionalisasi perusahaan. Semakin besar aset di luar negeri, semakin tinggi keterlibatan perusahaan dalam ekonomi global, baik melalui produksi, distribusi, maupun investasi. Struktur tabel ini menggambarkan bagaimana MNC beroperasi lintas batas dan memiliki pengaruh besar terhadap arus investasi, perdagangan, serta struktur industri global.

D. Dampak FDI terhadap Negara Berkembang

Dampak FDI terhadap negara berkembang adalah salah satu topik paling kontroversial dalam literatur ekonomi internasional. Meta-analisis oleh Iamsiraroj dan Ulubasoglu (2015) dari 880 studi menemukan efek rata-rata positif FDI terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dengan heterogenitas yang sangat besar bergantung pada kondisi penerima. Pengaruh investasi langsung luar negeri terhadap negara berkembang masih menjadi perdebatan karena hasilnya tidak selalu sama di setiap negara. Kajian yang menggabungkan banyak penelitian menunjukkan bahwa secara umum FDI cenderung memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti peningkatan investasi, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, besarnya manfaat tersebut sangat bergantung pada kondisi masing-masing negara penerima, seperti kualitas institusi, stabilitas ekonomi, dan kapasitas sumber daya manusia. Perbedaan kondisi ini menyebabkan hasil FDI bisa sangat bervariasi, ada yang memberikan dorongan pertumbuhan signifikan dan ada pula yang dampaknya terbatas.

Tabel 7.2 Potensi Dampak Positif dan Negatif FDI

Dimensi	Potensi Dampak Positif	Potensi Dampak Negatif
Pertumbuhan	Transfer teknologi, kapital	<i>Crowding out</i> perusahaan lokal

Tenaga kerja	Ciptakan lapangan kerja formal	<i>Race to bottom</i> standar kerja
Teknologi	<i>Spillover</i> ke industri lokal	Transfer ke anak perusahaan saja
Fiskal	Pajak perusahaan, royalti	Transfer <i>pricing</i> erosi basis pajak
Lingkungan	Teknologi <i>cleaner</i>	<i>Pollution haven hypothesis</i>
Neraca Pembayaran	Inflow kapital	Repatriasi laba (<i>outflow</i>)

Sumber: Dikompilasi dari UNCTAD (2023) & Iamsiraroj, S. (2016)

Tabel 7.2 menyajikan potensi dampak FDI terhadap negara berkembang dalam dua sisi, yaitu dampak positif dan negatif, yang dibagi ke dalam beberapa dimensi utama. Struktur tabel terdiri dari tiga kolom: “Dimensi”, “Potensi Dampak Positif”, dan “Potensi Dampak Negatif”, sehingga setiap aspek dapat dianalisis secara berimbang. Baris pertama adalah “Pertumbuhan”. Kolom dampak positif menunjukkan bahwa FDI membawa transfer teknologi dan tambahan kapital. Investasi asing meningkatkan kapasitas produksi serta memperkenalkan teknik produksi yang lebih efisien. Kolom dampak negatif menunjukkan kemungkinan *crowding out*, yaitu ketika perusahaan asing yang lebih kuat justru menekan atau menggantikan perusahaan lokal, sehingga mengurangi ruang tumbuh bagi pelaku domestik.

Baris kedua adalah “Tenaga kerja”. Dampak positif terlihat dari penciptaan lapangan kerja formal, terutama di sektor industri dan manufaktur. Perusahaan multinasional sering membawa standar manajemen yang lebih terstruktur. Dampak negatif muncul dalam bentuk *race to the bottom*, yaitu kecenderungan negara menurunkan standar tenaga kerja atau upah untuk menarik investasi, yang dapat merugikan kesejahteraan pekerja. Baris ketiga adalah “Teknologi”. Dampak positif berupa *spillover* teknologi ke industri lokal, di mana perusahaan domestik belajar dari praktik dan inovasi perusahaan asing. Dampak negatif terjadi jika transfer teknologi terbatas hanya pada anak perusahaan milik investor asing tanpa menyebar ke ekonomi lokal, sehingga manfaatnya tidak luas.

Baris keempat adalah “Fiskal”. Dampak positif mencakup penerimaan pajak perusahaan dan royalti dari aktivitas investasi. Pendapatan ini dapat digunakan untuk pembangunan. Dampak negatif muncul melalui praktik *transfer pricing*, di mana perusahaan memindahkan keuntungan ke yurisdiksi pajak rendah, sehingga mengurangi basis pajak negara penerima. Baris kelima adalah “Lingkungan”. Dampak positif terjadi ketika perusahaan asing membawa teknologi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan praktik lokal. Dampak negatif dikenal sebagai *pollution haven hypothesis*, yaitu kecenderungan perusahaan memindahkan aktivitas yang mencemari ke negara dengan regulasi lingkungan yang lebih lemah.

Baris keenam adalah “Neraca Pembayaran”. Dampak positif berupa masuknya aliran modal yang memperkuat posisi eksternal negara. Dampak negatif muncul dari repatriasi laba, yaitu pengiriman keuntungan kembali ke negara asal investor, yang menciptakan arus keluar devisa dalam jangka panjang. Hubungan antar kolom dalam tabel menunjukkan bahwa setiap manfaat FDI memiliki potensi risiko yang menyertainya. Dampak positif tidak otomatis terjadi, melainkan bergantung pada kebijakan dan kapasitas domestik dalam mengelola investasi asing.

Perbandingan antar dimensi juga menunjukkan bahwa pengaruh FDI tidak hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi, tetapi mencakup aspek sosial, teknologi, fiskal, lingkungan, dan eksternal. Variasi dampak ini menjelaskan mengapa hasil FDI berbeda antarnegara. Struktur tabel ini memberikan gambaran bahwa FDI merupakan instrumen yang kuat namun kompleks, yang dapat menjadi pendorong pembangunan atau menimbulkan tantangan tergantung pada bagaimana negara penerima mengelolanya.

E. Risiko dan Tantangan Investasi Global

Risiko dan tantangan dalam investasi global merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari keputusan pelaku ekonomi untuk menanamkan modal lintas negara. Dalam konteks ekonomi internasional, investasi internasional tidak hanya dipengaruhi oleh potensi keuntungan, tetapi juga oleh berbagai ketidakpastian yang bersifat multidimensi, mencakup faktor ekonomi, institusional, politik, hingga geopolitik. Kompleksitas ini semakin meningkat seiring dengan

integrasi ekonomi global yang membuat suatu negara tidak lagi berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dengan dinamika global yang sering kali sulit diprediksi.

Salah satu risiko utama yang menentukan keputusan investasi adalah kualitas institusi di negara tujuan. Penelitian oleh Christian Daude dan Ernesto Stein (2007) menunjukkan bahwa faktor institusional seperti *rule of law*, kontrol korupsi, dan efektivitas pemerintahan merupakan determinan paling kuat dalam menarik *foreign direct investment* (FDI). Investor cenderung memilih negara yang memiliki sistem hukum yang jelas dan dapat ditegakkan, karena hal ini memberikan kepastian dalam perlindungan hak milik dan kontrak. Sebaliknya, tingkat korupsi yang tinggi dan birokrasi yang tidak efisien dapat meningkatkan biaya transaksi serta risiko usaha, sehingga mengurangi daya tarik suatu negara sebagai tujuan investasi. Dengan kata lain, kualitas institusi menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang stabil dan dapat dipercaya.

Selain faktor institusional, risiko ekonomi juga memainkan peran penting. Fluktuasi nilai tukar, inflasi, perubahan suku bunga, serta ketidakstabilan makroekonomi dapat memengaruhi profitabilitas investasi. Misalnya, depresiasi mata uang di negara tujuan dapat mengurangi nilai keuntungan yang diperoleh investor ketika dikonversi ke mata uang asal. Ketidakpastian ini sering kali membuat investor lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, stabilitas ekonomi makro menjadi salah satu prasyarat utama dalam menarik investasi asing.

Dalam beberapa tahun terakhir, risiko geopolitik menjadi semakin menonjol sebagai faktor yang memengaruhi investasi global. Laporan *United Nations Conference on Trade and Development* (2023) menunjukkan bahwa pembatasan investasi oleh negara tuan rumah (*investment restrictions*) meningkat secara signifikan, dari sekitar 30 kasus per tahun pada periode 2010–2015 menjadi lebih dari 150 kasus per tahun pada periode 2020–2023. Peningkatan ini mencerminkan perubahan dalam kebijakan ekonomi global, di mana banyak negara mulai lebih protektif terhadap sektor-sektor strategis, seperti teknologi, energi, dan infrastruktur. Kebijakan ini sering kali dipicu oleh pertimbangan keamanan nasional, persaingan geopolitik, serta keinginan untuk melindungi industri domestik.

Risiko politik juga menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Perubahan pemerintahan, ketidakstabilan politik, konflik sosial, atau kebijakan yang tidak konsisten dapat menciptakan ketidakpastian yang tinggi bagi investor. Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat mengubah regulasi secara tiba-tiba, mengenakan pajak baru, atau bahkan melakukan nasionalisasi aset asing. Risiko semacam ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi investor dan menjadi salah satu alasan utama mengapa investasi internasional sering kali memerlukan analisis risiko yang mendalam.

Selain itu, terdapat pula risiko regulasi dan kebijakan yang semakin kompleks. Dalam era globalisasi yang diiringi dengan meningkatnya kesadaran terhadap isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (*environmental, social, and governance*), investor harus menghadapi berbagai standar dan regulasi yang berbeda di setiap negara. Kepatuhan terhadap regulasi ini dapat meningkatkan biaya operasional, tetapi di sisi lain juga menjadi syarat penting untuk menjaga keberlanjutan investasi. Ketidaksesuaian antara regulasi domestik dan internasional juga dapat menimbulkan hambatan tambahan bagi perusahaan multinasional.

Tantangan lain yang semakin relevan adalah risiko terkait rantai pasok global. Gangguan pada rantai pasok, seperti yang terlihat selama pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa ketergantungan pada jaringan produksi global dapat menjadi sumber kerentanan. Perusahaan kini harus mempertimbangkan diversifikasi lokasi produksi serta strategi mitigasi risiko untuk mengurangi dampak gangguan tersebut. Hal ini menambah kompleksitas dalam pengambilan keputusan investasi internasional.

Meskipun menghadapi berbagai risiko, investasi global tetap menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi dunia. Namun, keberhasilan investasi sangat bergantung pada kemampuan investor dalam mengelola risiko tersebut. Analisis yang komprehensif terhadap kondisi ekonomi, institusi, dan politik menjadi kunci dalam menentukan lokasi dan strategi investasi yang tepat. Di sisi lain, negara tuan rumah juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif melalui peningkatan kualitas institusi, stabilitas kebijakan, serta transparansi regulasi.

Risiko dan tantangan investasi global mencerminkan dinamika ekonomi dunia yang semakin kompleks dan tidak pasti. Faktor institusional, ekonomi, dan geopolitik saling berinteraksi dalam membentuk keputusan investasi, sehingga memerlukan pendekatan yang

holistik dalam analisis dan pengelolaannya. Peningkatan pembatasan investasi dan ketidakpastian kebijakan menunjukkan bahwa arus investasi global tidak lagi semata-mata ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh pertimbangan strategis yang lebih luas. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam terhadap risiko menjadi sangat penting bagi investor maupun pembuat kebijakan dalam menghadapi perubahan lanskap ekonomi global.

F. Kebijakan Investasi

Kebijakan investasi merupakan instrumen strategis yang digunakan pemerintah untuk menarik, mengarahkan, dan mengelola aliran modal, baik domestik maupun asing, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam kerangka ekonomi internasional, kebijakan investasi tidak hanya berkaitan dengan pemberian insentif atau pembukaan sektor usaha, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, kepastian hukum, serta efisiensi regulasi yang secara keseluruhan membentuk iklim investasi suatu negara. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan reformasi besar dalam kebijakan investasinya, terutama melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Salah satu fokus utama reformasi tersebut adalah penyederhanaan perizinan usaha melalui sistem digital yang terintegrasi, yaitu *Online Single Submission* (OSS). Sistem ini dirancang untuk memangkas birokrasi yang sebelumnya panjang dan kompleks, sehingga investor dapat memperoleh izin usaha dengan lebih cepat dan transparan. Dengan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), OSS mengelompokkan jenis usaha berdasarkan tingkat risikonya, sehingga persyaratan perizinan dapat disesuaikan secara lebih efisien. Reformasi ini bertujuan untuk mengurangi hambatan administratif yang selama ini menjadi salah satu keluhan utama investor, sekaligus meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.

Selain penyederhanaan perizinan, kebijakan investasi Indonesia juga mencakup pembukaan sektor-sektor yang sebelumnya tertutup atau dibatasi bagi investor asing. Melalui revisi daftar negatif investasi menjadi daftar prioritas investasi, pemerintah memberikan peluang yang lebih luas bagi investor untuk masuk ke berbagai sektor strategis,

termasuk manufaktur, infrastruktur, dan ekonomi digital. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan aliran *Foreign Direct Investment* (FDI), yang berperan penting dalam transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kapasitas produksi nasional.

Pemerintah juga memberikan berbagai insentif untuk menarik investasi, terutama di sektor-sektor prioritas dan wilayah yang kurang berkembang, seperti kawasan timur Indonesia. Insentif tersebut dapat berupa keringanan pajak (*tax holiday* dan *tax allowance*), kemudahan impor bahan baku, serta dukungan infrastruktur. Tujuannya adalah untuk mendorong pemerataan pembangunan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Dengan mengarahkan investasi ke daerah yang memiliki potensi tetapi belum berkembang optimal, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif.

Namun demikian, meskipun reformasi kebijakan investasi telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, tantangan implementasi masih menjadi isu penting. Salah satu tantangan utama adalah konsistensi pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Perbedaan interpretasi regulasi, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta kapasitas birokrasi yang bervariasi dapat menghambat efektivitas kebijakan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi regulasi tidak hanya memerlukan perubahan aturan, tetapi juga peningkatan kualitas institusi dan tata kelola pemerintahan.

Selain itu, isu kepastian hukum menjadi perhatian utama bagi investor. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja, yang menyatakan perlunya perbaikan dalam proses legislasi, menimbulkan ketidakpastian sementara terhadap keberlanjutan kebijakan tersebut. Meskipun pemerintah telah melakukan penyesuaian untuk memenuhi putusan tersebut, dinamika ini dapat memengaruhi persepsi investor terhadap stabilitas regulasi di Indonesia. Dalam investasi jangka panjang, kepastian hukum merupakan faktor krusial karena investor membutuhkan jaminan bahwa aturan yang berlaku tidak akan berubah secara drastis dalam waktu singkat.

Di sisi lain, tantangan global juga turut memengaruhi efektivitas kebijakan investasi nasional. Persaingan antarnegara dalam menarik investasi semakin ketat, dengan banyak negara menawarkan insentif yang kompetitif dan reformasi regulasi yang agresif. Selain itu, meningkatnya risiko geopolitik dan perubahan dalam rantai pasok global mendorong perusahaan untuk lebih selektif dalam menentukan lokasi

investasi. Dalam konteks ini, Indonesia perlu terus meningkatkan daya saingnya tidak hanya melalui insentif, tetapi juga melalui peningkatan kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, dan stabilitas ekonomi makro.

Kebijakan investasi Indonesia mencerminkan upaya serius untuk menciptakan iklim investasi yang lebih terbuka, efisien, dan kompetitif. Reformasi melalui UU Cipta Kerja dan implementasi OSS menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi hambatan struktural yang selama ini menghambat investasi. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi implementasi, kepastian hukum, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika global. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, kebijakan investasi dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktural di Indonesia.



BAB VIII

DINAMIKA GLOBAL DAN ISU KONTEMPORER

Abad ke-21 ditandai oleh serangkaian guncangan dan transformasi yang menguji ketahanan arsitektur ekonomi internasional yang dibangun pasca-Perang Dunia II. Dari perang dagang AS-China, pandemi COVID-19, invasi Rusia ke Ukraina, hingga percepatan transisi digital dan perubahan iklim, setiap guncangan ini mengungkap ketidakcukupan tatanan multilateral yang ada dan mendorong pencarian arsitektur tata kelola global yang baru. Sistem ekonomi internasional yang dibentuk setelah Perang Dunia II menghadapi tekanan besar akibat berbagai peristiwa dan perubahan besar di abad ke-21. Konflik perdagangan antara negara besar, krisis kesehatan global, perang antarnegara, serta perubahan teknologi dan lingkungan menunjukkan bahwa aturan dan lembaga global yang ada tidak lagi sepenuhnya mampu mengatasi tantangan baru yang semakin kompleks. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk meninjau kembali cara kerja sistem ekonomi dunia agar lebih sesuai dengan dinamika dan risiko yang berkembang saat ini, sehingga muncul dorongan untuk membangun tata kelola global yang lebih adaptif dan relevan.

A. Globalisasi dan De-Globalisasi

Apakah dunia sedang mengalami de-Globalisasi? Pertanyaan ini menjadi salah satu debat paling hangat dalam ekonomi internasional kontemporer. Aiyar *et al.* (2023) dari IMF mencatat bahwa sementara perdagangan dan FDI sebagai porsi PDB Global tidak mengalami penurunan dramatis, terjadi fragmentasi kualitatif: perdagangan semakin terkonsentrasi dalam blok geopolitik, dan kebijakan industrial (yang

lama dianggap tabu dalam ortodoksi neoliberal) kini bangkit kembali. Terdapat perdebatan mengenai apakah globalisasi sedang melemah, karena meskipun secara angka perdagangan dan investasi internasional masih relatif stabil terhadap ukuran ekonomi dunia, pola hubungan ekonominya mengalami perubahan yang signifikan. Aktivitas perdagangan dan investasi cenderung lebih terkonsentrasi pada kelompok negara yang memiliki kesamaan kepentingan politik dan geopolitik, sehingga kerja sama ekonomi tidak lagi sepenuhnya bersifat global dan terbuka. Pada saat yang sama, banyak negara mulai kembali menerapkan kebijakan industri yang lebih aktif untuk melindungi dan mengembangkan sektor tertentu, yang sebelumnya kurang mendapat perhatian dalam pendekatan ekonomi yang lebih liberal. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran bentuk globalisasi, bukan sekadar penurunan aktivitas ekonomi internasional.

Globalisasi dan de-globalisasi merupakan dua fenomena yang saling terkait dalam dinamika ekonomi dunia modern, mencerminkan proses integrasi dan fragmentasi yang terjadi secara bersamaan dalam sistem global. Dalam perspektif ekonomi internasional, globalisasi merujuk pada peningkatan keterhubungan antarnegara melalui arus perdagangan, investasi, teknologi, informasi, dan mobilitas manusia yang semakin intensif. Sebaliknya, de-globalisasi menggambarkan kecenderungan perlambatan, pembalikan, atau restrukturisasi proses tersebut akibat berbagai tekanan ekonomi, politik, dan sosial.

Globalisasi mulai mengalami percepatan signifikan sejak akhir abad ke-20, didorong oleh liberalisasi perdagangan, kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, serta peran lembaga internasional seperti *World Trade Organization* yang mendorong sistem perdagangan berbasis aturan. Perusahaan multinasional memperluas operasinya ke berbagai negara melalui *Foreign Direct Investment*, membentuk rantai nilai global yang kompleks di mana proses produksi tersebar lintas negara sesuai keunggulan masing-masing. Akibatnya, negara-negara menjadi semakin saling bergantung, baik dalam hal produksi, konsumsi, maupun stabilitas ekonomi.

Dampak globalisasi sangat luas. Di satu sisi, globalisasi meningkatkan efisiensi ekonomi melalui spesialisasi dan pembagian kerja internasional, memperluas akses pasar, serta mendorong transfer teknologi dan pengetahuan. Banyak negara berkembang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan

dengan memanfaatkan peluang dari perdagangan dan investasi global. Selain itu, konsumen juga diuntungkan melalui ketersediaan barang dan jasa yang lebih beragam dengan harga yang lebih kompetitif.

Namun di sisi lain, globalisasi juga menimbulkan berbagai tantangan dan kritik. Ketimpangan ekonomi baik antarnegara maupun di dalam negara sering meningkat karena manfaat globalisasi tidak terdistribusi secara merata. Sektor atau kelompok yang tidak kompetitif dapat terdampak negatif akibat persaingan global. Selain itu, globalisasi juga meningkatkan kerentanan terhadap krisis, karena guncangan di satu negara dapat dengan cepat menyebar ke negara lain melalui sistem keuangan dan perdagangan yang terintegrasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kecenderungan de-globalisasi atau setidaknya “*rebalancing*” globalisasi. Fenomena ini tidak selalu berarti penghentian globalisasi secara total, tetapi lebih pada perubahan arah dan pola integrasi global. Salah satu faktor utama adalah meningkatnya proteksionisme, di mana negara-negara mulai menerapkan kebijakan untuk melindungi industri domestik, seperti tarif, subsidi, dan pembatasan investasi. Ketegangan geopolitik, terutama antara kekuatan ekonomi besar, juga memperkuat tren ini dengan mendorong fragmentasi dalam sistem perdagangan dan teknologi global.

Selain faktor politik, pandemi COVID-19 menjadi titik balik penting yang mengungkap kerentanan rantai pasok global. Gangguan produksi dan distribusi mendorong banyak perusahaan untuk meninjau kembali strategi mereka, termasuk melakukan diversifikasi lokasi produksi atau bahkan *reshoring* (memindahkan kembali produksi ke negara asal). Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi yang menjadi ciri globalisasi kini mulai diseimbangkan dengan pertimbangan ketahanan (*resilience*).

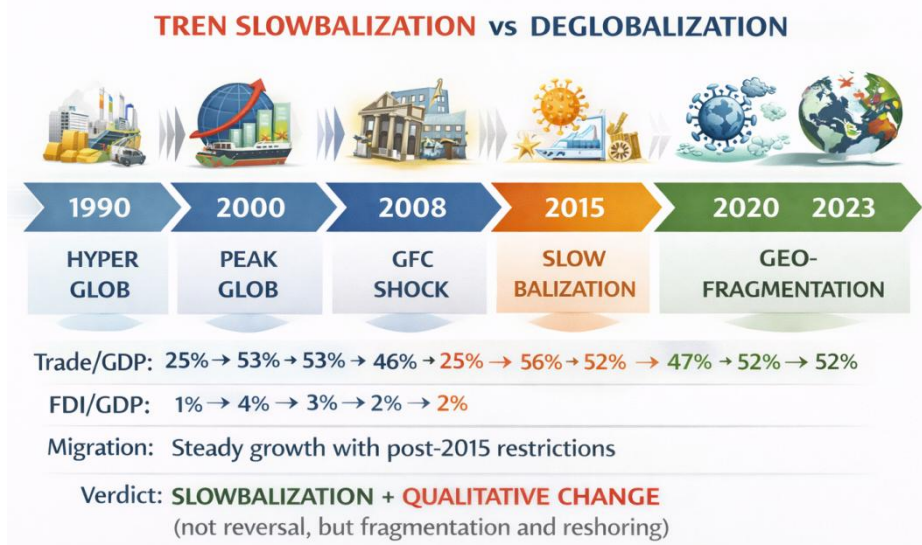
De-globalisasi juga tercermin dalam meningkatnya pembatasan terhadap arus investasi dan teknologi. Negara-negara semakin berhati-hati dalam membuka sektor strategis kepada investor asing, terutama di bidang yang terkait dengan keamanan nasional seperti teknologi digital, energi, dan infrastruktur. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi kini semakin dipengaruhi oleh faktor politik dan keamanan.

Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa de-globalisasi tidak berarti berakhirnya globalisasi. Sebaliknya, yang terjadi adalah transformasi menuju bentuk globalisasi yang baru, yang mungkin

lebih regional, selektif, dan berbasis pada aliansi strategis. Misalnya, kerja sama regional seperti *Association of Southeast Asian Nations* semakin penting sebagai alternatif dalam menghadapi ketidakpastian global. Negara-negara cenderung memperkuat hubungan ekonomi dengan mitra yang dianggap lebih stabil dan terpercaya.

Globalisasi dan de-globalisasi merupakan dua sisi dari dinamika ekonomi global yang terus berkembang. Globalisasi membawa peluang besar dalam bentuk pertumbuhan ekonomi dan integrasi pasar, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti ketimpangan dan kerentanan terhadap krisis. Sementara itu, de-globalisasi mencerminkan respons terhadap tantangan tersebut, dengan penekanan pada perlindungan kepentingan nasional dan peningkatan ketahanan ekonomi. Ke depan, tantangan utama bagi negara dan pelaku ekonomi adalah menemukan keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan, antara efisiensi dan ketahanan, dalam menghadapi perubahan lanskap ekonomi global yang semakin kompleks.

Gambar 5. Evolusi Globalisasi: Dari *Hyperglobalization* ke *Fragmentation*



Sumber: IMF (2023) & Aiyar, S. et al. (2023)

Gambar 5 menggambarkan evolusi globalisasi dari fase *hyperglobalization* menuju fragmentasi geopolitik, disertai indikator kuantitatif seperti rasio perdagangan dan FDI terhadap PDB Global.

Struktur penyajian menunjukkan garis waktu, perubahan fase, serta indikator ekonomi yang mendasarinya. Bagian garis waktu menampilkan urutan periode 1990, 2000, 2008, 2015, 2020, hingga 2023. Setiap titik waktu dihubungkan dengan fase perkembangan globalisasi. Pada awal periode, fase “*hyperglobalization*” ditandai oleh ekspansi cepat perdagangan dan investasi lintas negara. Tahun 2000 menunjukkan fase puncak globalisasi (*peak globalization*), ketika integrasi ekonomi mencapai tingkat tertinggi. Tahun 2008 ditandai sebagai GFC *shock*, yaitu krisis keuangan global yang mulai mengganggu momentum integrasi. Tahun 2015 menunjukkan fase *slowbalization*, yaitu perlambatan pertumbuhan globalisasi. Tahun 2020 ditandai oleh COVID *shock* yang mempercepat gangguan rantai pasok. Tahun 2023 menunjukkan fase *geoeconomic fragmentation*, yaitu pembentukan blok-blok ekonomi berdasarkan kepentingan geopolitik.

Bagian indikator *Trade/GDP* menunjukkan perubahan rasio perdagangan terhadap PDB Global dari waktu ke waktu. Nilai meningkat dari sekitar 25% pada 1990 menjadi 53% pada awal 2000-an, yang mencerminkan ekspansi perdagangan global yang sangat cepat. Setelah itu, angka stagnan di sekitar 53%, lalu turun ke 46%, dan kembali naik ke 52%. Pola ini menunjukkan bahwa perdagangan global tidak runtuh, tetapi mengalami fluktuasi dan perlambatan pertumbuhan. Bagian indikator *FDI/GDP* menunjukkan rasio investasi langsung terhadap PDB global. Nilai meningkat dari sekitar 1% menjadi 4% pada masa ekspansi globalisasi, kemudian turun ke 3% dan akhirnya sekitar 2%. Penurunan ini menunjukkan bahwa aktivitas investasi lintas negara mengalami pelemahan relatif dibandingkan periode puncaknya.

Bagian *Migration* menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil, namun disertai pembatasan setelah tahun 2015. Hal ini mencerminkan meningkatnya kontrol terhadap mobilitas tenaga kerja lintas negara, yang menjadi salah satu tanda perubahan dalam dinamika globalisasi. Bagian “*Verdict*” dalam diagram menyimpulkan arah perubahan sebagai *slowbalization* disertai perubahan kualitatif. Istilah ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak berhenti, tetapi mengalami transformasi dalam bentuk dan pola. Penekanan diberikan pada fenomena fragmentasi dan *reshoring*, yaitu kecenderungan negara dan perusahaan untuk memindahkan kembali produksi ke dalam negeri atau ke negara mitra yang dianggap lebih aman secara geopolitik.

Hubungan antar elemen dalam diagram menunjukkan bahwa perubahan globalisasi tidak hanya tercermin dari penurunan atau kenaikan angka, tetapi juga dari pergeseran struktur hubungan ekonomi. Rasio perdagangan dan FDI yang relatif stabil menyembunyikan perubahan arah aliran yang semakin terkonsentrasi pada blok tertentu. Perbandingan antar fase menunjukkan bahwa faktor pemicu perubahan berasal dari berbagai sumber, seperti krisis keuangan, pandemi, dan ketegangan geopolitik. Setiap peristiwa tersebut memengaruhi cara negara dan perusahaan mengelola hubungan ekonomi internasional. Diagram ini memberikan gambaran bahwa dunia tidak mengalami pembalikan globalisasi secara penuh, melainkan pergeseran menuju pola yang lebih terfragmentasi dan selektif dalam hubungan ekonomi internasional.

B. Perang Dagang (*Trade War*)

Perang dagang (*trade war*) merupakan konflik ekonomi antarnegara yang ditandai dengan saling mengenakan hambatan perdagangan, seperti tarif, kuota, atau pembatasan lainnya, dengan tujuan melindungi industri domestik atau menekan mitra dagang. Dalam kerangka ekonomi internasional, perang dagang dipandang sebagai bentuk kegagalan kerja sama internasional, di mana negara-negara memilih strategi proteksionisme daripada liberalisasi perdagangan. Salah satu contoh paling menonjol dalam era modern adalah konflik antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang dimulai pada tahun 2018 di bawah pemerintahan Donald Trump.

Konflik ini dianggap sebagai konfrontasi ekonomi terbesar sejak *Smoot-Hawley Tariff Act* tahun 1930, yang pada masa lalu memperburuk kondisi ekonomi global selama Depresi Besar. Dalam perang dagang modern ini, Amerika Serikat mengenakan tarif hingga 25% terhadap sekitar USD 360 miliar impor dari Tiongkok, dengan alasan untuk mengurangi defisit perdagangan dan menanggapi praktik yang dianggap tidak adil, seperti subsidi industri dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Sebagai respons, Tiongkok memberlakukan tarif balasan terhadap sekitar USD 185 miliar impor dari Amerika Serikat. Eskalasi ini menciptakan efek domino dalam sistem perdagangan global, karena kedua negara merupakan ekonomi terbesar dunia dan memiliki peran dominan dalam rantai pasok internasional.

Dampak perang dagang ini tidak berhenti pada pergantian pemerintahan di Amerika Serikat. Di bawah kepemimpinan Joe Biden, sebagian besar kebijakan tarif yang diterapkan sebelumnya tetap dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa konflik tersebut bukan sekadar kebijakan jangka pendek, melainkan bagian dari strategi jangka panjang dalam menghadapi persaingan ekonomi dengan Tiongkok. Bahkan, kebijakan tersebut berkembang lebih jauh dengan menambahkan dimensi baru berupa pembatasan teknologi, khususnya pada sektor strategis seperti semikonduktor dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Pembatasan ekspor chip canggih dan teknologi terkait mencerminkan bahwa persaingan tidak lagi terbatas pada perdagangan barang, tetapi telah meluas ke perebutan keunggulan teknologi global.

Perang dagang AS–China memiliki dampak luas terhadap ekonomi global. Salah satu dampak utama adalah terganggunya rantai pasok global, karena perusahaan harus menyesuaikan strategi produksi dan distribusi mereka untuk menghindari tarif tinggi. Banyak perusahaan multinasional mulai memindahkan sebagian produksinya ke negara lain sebagai bentuk diversifikasi risiko, yang pada gilirannya mengubah peta investasi global. Selain itu, perang dagang juga meningkatkan ketidakpastian ekonomi, yang dapat menurunkan investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia.

Dari sisi teori ekonomi, perang dagang sering kali menghasilkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat, termasuk negara yang memulai kebijakan tersebut. Tarif yang lebih tinggi dapat melindungi industri domestik dalam jangka pendek, tetapi juga meningkatkan biaya bagi konsumen dan perusahaan yang bergantung pada impor. Dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat mengurangi efisiensi ekonomi dan menghambat inovasi. Selain itu, negara ketiga yang tidak terlibat langsung juga dapat terdampak, baik secara negatif melalui penurunan permintaan global, maupun secara positif melalui peluang relokasi investasi.

Perang dagang juga mencerminkan perubahan dalam struktur globalisasi menuju arah yang lebih terfragmentasi. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok mendorong munculnya blok ekonomi dan teknologi yang lebih terpisah, di mana negara-negara cenderung memilih mitra strategis berdasarkan kepentingan geopolitik. Hal ini

sejalan dengan tren de-globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya proteksionisme dan pembatasan investasi lintas negara.

Perang dagang AS–China menunjukkan bahwa hubungan ekonomi internasional tidak hanya ditentukan oleh logika pasar, tetapi juga oleh dinamika politik dan strategis. Konflik ini menegaskan bahwa perdagangan internasional dapat menjadi instrumen kekuatan negara dalam persaingan global. Dengan meluasnya konflik ke sektor teknologi, perang dagang modern tidak lagi sekadar tentang barang dan tarif, tetapi juga tentang kontrol terhadap inovasi dan masa depan ekonomi digital. Oleh karena itu, memahami perang dagang menjadi penting untuk melihat arah perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks dan sarat dengan kepentingan geopolitik.

C. Krisis Ekonomi Global

Krisis ekonomi global merupakan fenomena ketika terjadi gangguan besar yang memengaruhi sistem ekonomi dunia secara luas, mencakup penurunan aktivitas produksi, perdagangan, investasi, serta meningkatnya pengangguran dan ketidakstabilan keuangan. Dalam perspektif ekonomi internasional, krisis semacam ini biasanya bersifat sistemik, artinya tidak terbatas pada satu negara, tetapi menyebar secara cepat melalui keterkaitan ekonomi global yang semakin erat. Salah satu contoh paling nyata dalam era modern adalah krisis yang dipicu oleh pandemi COVID-19, yang menyebabkan gangguan simultan pada sisi penawaran dan permintaan di hampir seluruh negara.

Pandemi COVID-19 memicu kontraksi ekonomi global yang sangat dalam, bahkan disebut sebagai yang terparah sejak *Great Depression* pada tahun 1930-an. Berdasarkan data *International Monetary Fund* (IMF), produk domestik bruto (PDB) dunia mengalami penurunan sekitar 3,1% pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh pembatasan mobilitas, penutupan aktivitas ekonomi, serta terganggunya produksi dan distribusi barang secara global. Sektor-sektor seperti pariwisata, transportasi, dan manufaktur mengalami dampak yang sangat signifikan, sementara ketidakpastian yang tinggi menyebabkan penurunan investasi dan konsumsi secara bersamaan.

Namun demikian, respons kebijakan terhadap krisis ini juga merupakan yang terbesar dalam sejarah modern. Banyak negara, terutama negara maju, menerapkan stimulus fiskal dalam skala besar,

seperti bantuan langsung kepada masyarakat, subsidi bagi dunia usaha, serta peningkatan belanja pemerintah. Di sisi lain, bank sentral melakukan pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga, pembelian aset (*quantitative easing*), serta penyediaan likuiditas dalam jumlah besar untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter secara simultan ini menjadi faktor kunci dalam menahan dampak krisis agar tidak semakin dalam.

Hasil dari respons kebijakan tersebut terlihat pada pemulihan ekonomi global yang relatif cepat. Pada tahun 2021, ekonomi dunia tumbuh sekitar 6,1%, yang merupakan salah satu tingkat pertumbuhan tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Pemulihan ini didorong oleh peningkatan konsumsi, *rebound* produksi industri, serta percepatan distribusi vaksin yang memungkinkan aktivitas ekonomi kembali berjalan. Meskipun demikian, pemulihan tersebut tidak merata antarnegara, di mana negara maju cenderung pulih lebih cepat dibandingkan negara berkembang yang memiliki keterbatasan dalam kapasitas fiskal dan akses terhadap vaksin.

Salah satu pelajaran penting dari krisis COVID-19 adalah terkait dengan kerentanan rantai pasok global. Sebelum pandemi, globalisasi dan integrasi produksi lintas negara dianggap sebagai sumber efisiensi yang memungkinkan biaya produksi lebih rendah dan distribusi lebih cepat. Namun, ketika terjadi gangguan besar seperti pandemi, keterhubungan ini justru menjadi sumber risiko. Gangguan di satu negara dapat dengan cepat menyebar ke negara lain, menyebabkan kekurangan bahan baku, keterlambatan produksi, serta kenaikan harga. Hal ini mendorong banyak perusahaan dan negara untuk meninjau kembali strategi mereka, termasuk dengan melakukan diversifikasi sumber pasokan atau memperkuat produksi domestik.

Selain itu, krisis ini juga menyoroti pentingnya peran kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Tanpa intervensi yang cepat dan besar, dampak ekonomi dari pandemi kemungkinan akan jauh lebih parah. Hal ini memperkuat pandangan bahwa dalam situasi krisis, pasar tidak selalu mampu menyesuaikan diri secara otomatis, sehingga diperlukan peran aktif negara untuk mengelola dampak ekonomi dan sosial. Krisis COVID-19 juga memperlihatkan bahwa faktor non-ekonomi, seperti kesehatan masyarakat, dapat memiliki dampak ekonomi yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi global tidak hanya bergantung pada kebijakan ekonomi semata, tetapi

juga pada kemampuan negara dalam mengelola risiko lintas sektor. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan ke depan cenderung lebih holistik, dengan mempertimbangkan interaksi antara aspek ekonomi, kesehatan, dan sosial.

Krisis ekonomi global akibat pandemi COVID-19 memberikan gambaran tentang bagaimana sistem ekonomi dunia yang saling terhubung dapat menjadi sumber kekuatan sekaligus kerentanan. Respons kebijakan yang cepat dan terkoordinasi mampu mempercepat pemulihan, tetapi juga menimbulkan tantangan baru, seperti peningkatan utang publik dan tekanan inflasi. Pengalaman ini menjadi pelajaran penting bagi negara-negara dalam merancang kebijakan yang lebih tangguh dan adaptif untuk menghadapi krisis di masa depan, serta dalam menyeimbangkan antara efisiensi global dan ketahanan ekonomi nasional.

D. Perubahan Iklim dan Ekonomi Internasional

Perubahan iklim kini menjadi salah satu isu paling menentukan dalam ekonomi global, karena dampaknya tidak hanya bersifat lingkungan, tetapi juga langsung memengaruhi pola perdagangan, investasi, dan kebijakan industri lintas negara. Dalam perspektif ekonomi internasional, perubahan iklim telah mengubah cara negara dan perusahaan memandang pertumbuhan ekonomi, dari yang semata berorientasi pada efisiensi menuju keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan. Transisi menuju ekonomi rendah karbon (*low-carbon economy*) dan energi bersih menjadi agenda utama yang tidak terpisahkan dari strategi pembangunan global.

Salah satu instrumen kebijakan yang paling signifikan dalam mengaitkan isu lingkungan dengan perdagangan internasional adalah *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) yang diterapkan oleh Uni Eropa. Kebijakan ini mulai berlaku pada tahun 2023 dalam fase transisi dan direncanakan sepenuhnya diimplementasikan pada tahun 2026. CBAM pada dasarnya mengenakan biaya karbon terhadap impor produk-produk dengan intensitas emisi tinggi, seperti baja, semen, aluminium, pupuk, dan listrik, terutama dari negara yang belum memiliki kebijakan harga karbon (*carbon pricing*) yang setara. Tujuan utama kebijakan ini adalah mencegah *carbon leakage*, yaitu perpindahan produksi ke negara dengan regulasi lingkungan yang lebih longgar,

sekaligus mendorong negara mitra dagang untuk mengadopsi standar lingkungan yang lebih ketat.

Dari sisi ekonomi internasional, CBAM memiliki implikasi yang luas terhadap daya saing perdagangan global. Negara-negara yang belum memiliki sistem harga karbon atau teknologi produksi yang lebih bersih berpotensi menghadapi biaya tambahan ketika mengekspor ke pasar Eropa. Hal ini dapat menurunkan daya saing produk mereka, terutama di sektor-sektor yang padat karbon. Analisis dari *Organisation for Economic Co-operation and Development* menunjukkan bahwa dampak kebijakan ini tidak seragam bagi negara berkembang. Bagi negara seperti Indonesia, sektor baja dan aluminium diperkirakan akan terdampak cukup signifikan karena intensitas emisi yang relatif tinggi dalam proses produksinya. Namun, di sisi lain, terdapat potensi keuntungan melalui *trade diversion*, di mana perubahan pola perdagangan global dapat membuka peluang bagi sektor lain yang lebih kompetitif atau lebih ramah lingkungan.

Selain dampak pada perdagangan, perubahan iklim juga menciptakan kebutuhan investasi yang sangat besar untuk mendukung transisi energi. *World Bank* memperkirakan bahwa negara-negara berkembang membutuhkan tambahan investasi sekitar USD 2,5 triliun per tahun untuk beralih menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Investasi ini mencakup pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, pembangunan infrastruktur hijau, serta transformasi sektor industri agar lebih rendah emisi. Kebutuhan pembiayaan yang besar ini menjadi tantangan sekaligus peluang, karena membuka ruang bagi aliran investasi internasional, termasuk dalam bentuk *green finance* dan *sustainable investment*.

Di sisi lain, transisi menuju ekonomi hijau juga membawa risiko dan tantangan tersendiri. Negara berkembang sering menghadapi keterbatasan teknologi, kapasitas institusi, serta akses pembiayaan, sehingga sulit untuk beradaptasi dengan cepat terhadap standar lingkungan yang semakin ketat. Jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan seperti CBAM dapat memperlebar kesenjangan antara negara maju dan berkembang. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa transisi ini berlangsung secara adil (*just transition*), dengan dukungan teknologi dan pembiayaan bagi negara yang membutuhkan.

Perubahan iklim juga mendorong perubahan dalam strategi perusahaan multinasional dan pelaku pasar global. Banyak perusahaan kini mulai mengintegrasikan faktor lingkungan dalam keputusan investasi dan produksi, termasuk melalui penerapan standar *environmental, social, and governance* (ESG). Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak lagi menjadi isu tambahan, tetapi telah menjadi bagian inti dari strategi bisnis dan daya saing global.

Perubahan iklim telah menggeser paradigma ekonomi internasional dari sekadar efisiensi menuju keberlanjutan dan ketahanan. Kebijakan seperti CBAM mencerminkan bagaimana isu lingkungan kini menjadi bagian integral dari perdagangan global, dengan implikasi yang luas bagi negara dan pelaku ekonomi. Bagi negara berkembang, tantangan utama adalah bagaimana menyesuaikan diri dengan perubahan ini tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi, sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul dari transisi menuju ekonomi hijau. Dalam konteks ini, keberhasilan adaptasi akan sangat ditentukan oleh kebijakan domestik, kualitas institusi, serta kemampuan untuk mengakses teknologi dan pembiayaan global.

E. Ekonomi Digital Global

UNCTAD (2023) memperkirakan nilai ekonomi digital global mencapai USD 22,5 triliun, atau sekitar 25% dari PDB dunia. Transformasi digital sedang merombak pola komparatif *advantage* tradisional: negara-negara yang berhasil membangun ekosistem digital yang kuat dengan infrastruktur, *human capital digital*, dan regulasi yang mendukung, akan meraih *gains from digital trade* yang jauh lebih besar. Ekonomi digital telah berkembang menjadi komponen besar dalam perekonomian dunia dan menyumbang porsi signifikan terhadap total output global. Perkembangan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak lagi hanya bergantung pada sektor fisik, tetapi juga pada layanan dan transaksi berbasis teknologi digital yang terus tumbuh pesat. Perubahan ini juga menggeser cara lama dalam melihat keunggulan suatu negara, karena kemampuan bersaing kini lebih ditentukan oleh kesiapan infrastruktur digital, kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi, serta aturan yang mendukung perkembangan ekosistem digital. Negara yang mampu membangun faktor-faktor tersebut akan

memperoleh manfaat lebih besar dari perdagangan digital dan pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi.

Tabel 8.1 Ukuran Ekonomi Digital Negara-Negara Pilihan (2022)

Negara	<i>Digital Economy</i> (% GDP)	Platform Champion	<i>Digital Trade</i> (USD M)
AS	~35%	Google, Amazon, Meta, Apple	1.200.000
China	~35%	Alibaba, Tencent, ByteDance	450.000
UE (rata-rata)	~25%	SAP, ASML, Booking	620.000
India	~12%	Infosys, TCS, Flipkart	245.000
Indonesia	~8%	GoTo, Tokopedia	77.000
Vietnam	~8%	VNG, Zalo, VinFast	55.000

Sumber: UNCTAD (2023) & *Google-Temasek-Bain* (2023)

Tabel 8.1 menyajikan perbandingan ukuran ekonomi digital di beberapa negara dan kawasan tahun 2022 melalui tiga indikator utama: “*Digital Economy* (% GDP)”, “*Platform Champion*”, dan “*Digital Trade* (USD M)”. Setiap baris menggambarkan posisi relatif suatu negara dalam pengembangan ekonomi Digital. Baris pertama adalah Amerika Serikat (AS). Kolom “*Digital Economy*” menunjukkan kontribusi sekitar ~35% dari PDB, yang menandakan bahwa lebih dari sepertiga aktivitas ekonomi terkait dengan sektor digital. Kolom “*Platform Champion*” mencantumkan perusahaan seperti Google, Amazon, Meta, dan Apple, yang merupakan pemimpin global dalam teknologi digital. Kolom “*Digital Trade*” sebesar USD 1.200.000 juta menunjukkan skala perdagangan digital yang sangat besar, mencerminkan dominasi AS dalam layanan digital global.

Baris kedua adalah China. Nilai “*Digital Economy*” juga sekitar ~35% dari PDB, setara dengan AS. Kolom “*Platform Champion*”

mencakup Alibaba, Tencent, dan ByteDance, yang menjadi pemain utama dalam ekosistem Digital domestik dan regional. Kolom “*Digital Trade*” sebesar USD 450.000 juta menunjukkan volume perdagangan digital yang besar, meskipun masih di bawah AS. Posisi ini mencerminkan kekuatan China dalam pasar domestik yang luas serta *platform* digital yang terintegrasi. Baris ketiga adalah Uni Eropa (UE). Kontribusi ekonomi digital sekitar ~25% dari PDB, lebih rendah dibandingkan AS dan China. Kolom “*Platform Champion*” mencantumkan perusahaan seperti SAP, ASML, dan Booking, yang menunjukkan kekuatan UE pada sektor teknologi industri dan layanan tertentu. Nilai “*Digital Trade*” sebesar USD 620.000 juta menunjukkan kapasitas perdagangan Digital yang kuat, meskipun struktur industrinya lebih terfragmentasi dibandingkan AS.

Baris keempat adalah India. Kontribusi ekonomi digital sekitar ~12% dari PDB, menunjukkan tahap perkembangan yang masih berkembang. Kolom “*Platform Champion*” mencakup Infosys, TCS, dan Flipkart, yang kuat di sektor jasa IT dan *e-commerce*. Nilai “*Digital Trade*” sebesar USD 245.000 juta menunjukkan peningkatan peran India dalam perdagangan digital, didorong oleh populasi besar dan pertumbuhan teknologi informasi. Baris kelima adalah Indonesia. Kontribusi ekonomi digital sekitar ~8% dari PDB, yang menunjukkan potensi pertumbuhan yang masih besar. Kolom “*Platform Champion*” mencantumkan GoTo dan Tokopedia sebagai pemain utama dalam ekosistem digital domestik. Nilai “*Digital Trade*” sebesar USD 77.000 juta menunjukkan skala yang lebih kecil dibandingkan negara besar, namun mencerminkan perkembangan pesat di kawasan Asia Tenggara.

Baris keenam adalah Vietnam. Kontribusi ekonomi digital juga sekitar ~8% dari PDB, serupa dengan Indonesia. Kolom “*Platform Champion*” mencakup VNG, Zalo, dan VinFast, yang menunjukkan kombinasi *platform* digital dan industri teknologi. Nilai “*Digital Trade*” sebesar USD 55.000 juta menunjukkan pertumbuhan ekonomi digital yang cukup signifikan untuk negara berkembang. Hubungan antar kolom menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi digital terhadap PDB berkaitan erat dengan keberadaan *platform* digital besar dan kapasitas perdagangan digital. Negara dengan perusahaan teknologi global cenderung memiliki nilai *Digital Trade* yang lebih tinggi.

Perbandingan antar negara menunjukkan kesenjangan antara negara maju dan berkembang. AS dan China memiliki skala ekonomi

digital terbesar, diikuti oleh UE, sementara India, Indonesia, dan Vietnam berada pada tahap pengembangan dengan potensi pertumbuhan tinggi. Struktur tabel ini menggambarkan bahwa kekuatan ekonomi Digital ditentukan oleh kombinasi ukuran ekonomi digital, keberadaan perusahaan *platform*, dan kemampuan berpartisipasi dalam perdagangan digital global.

F. Ketimpangan Ekonomi Global

Ketimpangan ekonomi global merupakan isu sentral dalam ekonomi dunia modern yang mencerminkan distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata baik antarindividu, antarnegara, maupun di dalam negara itu sendiri. Dalam perspektif ekonomi internasional, ketimpangan tidak hanya dipandang sebagai masalah sosial, tetapi juga sebagai faktor yang memengaruhi stabilitas ekonomi, pertumbuhan jangka panjang, dan keberlanjutan globalisasi. Meskipun dalam beberapa dekade terakhir terjadi penurunan kemiskinan absolut secara global, terutama di negara-negara berkembang, distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi tetap sangat tidak merata.

Laporan *World Inequality Report 2022* yang disusun oleh Thomas Piketty, Lucas Chancel, dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan global masih sangat tinggi. Sekitar 10% populasi terkaya dunia menguasai lebih dari separuh (sekitar 52%) pendapatan global, sementara 50% populasi terbawah hanya memperoleh sekitar 8,5%. Angka ini menggambarkan konsentrasi kekayaan yang sangat besar pada kelompok kecil, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global tidak secara otomatis menghasilkan distribusi yang adil. Ketimpangan ini tidak hanya terjadi antarnegara, tetapi juga semakin terlihat dalam struktur ekonomi domestik banyak negara, baik maju maupun berkembang.

Analisis oleh Branko Milanovic dalam bukunya *Global Inequality* (2016) memberikan perspektif tambahan melalui konsep “*elephant curve*”. Kurva ini menggambarkan bahwa kelompok kelas menengah di negara berkembang, khususnya di Asia, mengalami pertumbuhan pendapatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, didorong oleh globalisasi, industrialisasi, dan integrasi ke dalam perdagangan internasional. Namun, pada saat yang sama, kelompok kelas menengah bawah di negara maju justru mengalami stagnasi

pendapatan. Fenomena ini menciptakan pola ketimpangan yang lebih kompleks, di mana globalisasi menghasilkan pemenang dan pihak yang tertinggal secara berbeda di berbagai wilayah dunia.

Ketimpangan ekonomi global dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural. Globalisasi, misalnya, telah meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperbesar kesenjangan bagi kelompok yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan, teknologi, atau peluang ekonomi. Perkembangan teknologi, khususnya digitalisasi dan otomatisasi, juga cenderung meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja berkeahlian tinggi, sementara mengurangi peluang bagi pekerja dengan keterampilan rendah. Hal ini memperlebar kesenjangan pendapatan antara kelompok yang memiliki akses terhadap pendidikan dan teknologi dengan yang tidak. Selain itu, perbedaan kualitas institusi dan kebijakan publik antarnegara juga berperan penting dalam membentuk ketimpangan. Negara dengan sistem pendidikan yang baik, perlindungan sosial yang kuat, serta kebijakan redistribusi yang efektif cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah. Sebaliknya, negara dengan institusi yang lemah dan ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi cenderung mengalami konsentrasi kekayaan yang lebih tinggi.

Ketimpangan juga memiliki implikasi ekonomi dan politik yang signifikan. Dari sisi ekonomi, ketimpangan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan karena menurunkan daya beli kelompok berpendapatan rendah dan mengurangi potensi konsumsi agregat. Dari sisi politik, ketimpangan dapat memicu ketidakpuasan sosial, meningkatkan polarisasi, serta mendorong munculnya kebijakan populis yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Dalam konteks global, ketimpangan juga dapat memengaruhi hubungan antarnegara, terutama dalam isu perdagangan, migrasi, dan kerja sama internasional. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa ketimpangan global tidak bersifat statis. Penurunan kemiskinan ekstrem di banyak negara berkembang menunjukkan bahwa globalisasi dapat memberikan manfaat yang signifikan jika dikelola dengan baik. Tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa manfaat tersebut dapat didistribusikan secara lebih merata. Hal ini memerlukan kombinasi kebijakan domestik dan kerja sama internasional, termasuk investasi dalam pendidikan, reformasi sistem pajak, penguatan perlindungan sosial, serta peningkatan akses terhadap teknologi.

Ketimpangan ekonomi global mencerminkan paradoks dalam sistem ekonomi modern: pertumbuhan yang tinggi tidak selalu diikuti oleh distribusi yang adil. Temuan dari Piketty dan Milanovic menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam pengurangan kemiskinan, kesenjangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan tetap menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, pengelolaan ketimpangan menjadi salah satu isu kunci dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi global dapat berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan di masa depan.



BAB IX

EKONOMI

INTERNASIONAL

INDONESIA

Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan ke-16 di dunia dengan PDB USD 1,32 triliun pada 2022. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau, populasi 278 juta jiwa, dan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk memanfaatkan dinamika ekonomi internasional demi akselerasi pembangunan nasionalnya. Indonesia memiliki posisi ekonomi yang cukup besar di tingkat regional maupun global, ditunjukkan oleh besarnya produk domestik bruto yang menempatkannya sebagai salah satu ekonomi utama di dunia. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan yang sangat luas, jumlah penduduk yang besar, serta kekayaan sumber daya alam memberikan modal penting bagi pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor ini membuat Indonesia memiliki peluang besar untuk terlibat aktif dalam ekonomi internasional, baik melalui perdagangan, investasi, maupun kerja sama Global, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

A. Peran Indonesia dalam Perdagangan Global

Peran Indonesia dalam perdagangan global semakin strategis seiring dengan meningkatnya integrasi ekonomi dunia dan permintaan terhadap komoditas utama. Dalam perspektif ekonomi internasional, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara dengan keunggulan

komparatif kuat di sektor berbasis sumber daya alam, yang menjadikannya salah satu aktor penting dalam rantai pasok global. Posisi ini tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi, tetapi juga oleh peran Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi, pangan, dan bahan baku industri dunia.

Indonesia merupakan produsen terbesar dunia untuk beberapa komoditas strategis, seperti minyak kelapa sawit mentah (*crude palm oil* atau CPO), nikel, dan batu bara termal. Dominasi ini memberikan pengaruh besar terhadap harga dan pasokan global, terutama dalam industri yang sangat bergantung pada bahan baku tersebut. Misalnya, nikel menjadi komponen penting dalam produksi baterai kendaraan listrik, sehingga meningkatnya permintaan global terhadap energi bersih secara langsung meningkatkan relevansi Indonesia dalam ekonomi masa depan. Selain itu, Indonesia juga merupakan eksportir signifikan untuk komoditas seperti karet alam, timah, serta produk tekstil, yang menunjukkan diversifikasi dalam struktur eksportnya.

Dari sisi nilai perdagangan, total perdagangan Indonesia mencapai sekitar USD 554 miliar pada tahun 2022, yang menempatkannya di antara 20 besar eksportir dunia. Angka ini mencerminkan tingkat keterbukaan ekonomi yang cukup tinggi serta integrasi yang kuat dengan pasar internasional. Perdagangan internasional menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena memberikan akses ke pasar yang lebih luas serta memungkinkan pemanfaatan keunggulan komparatif secara optimal.

Selain sebagai eksportir komoditas, Indonesia juga memainkan peran penting dalam rantai nilai global yang semakin berkembang. Kebijakan hilirisasi, khususnya di sektor pertambangan seperti nikel, menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah domestik sebelum produk diekspor. Dengan membangun industri pengolahan di dalam negeri, Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk setengah jadi atau jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat struktur industri nasional serta meningkatkan daya saing dalam jangka panjang.

Namun demikian, ketergantungan yang tinggi pada komoditas juga menimbulkan tantangan. Harga komoditas di pasar global cenderung fluktuatif, sehingga dapat memengaruhi stabilitas penerimaan ekspor. Selain itu, tekanan internasional terkait isu lingkungan, seperti deforestasi dalam produksi minyak sawit atau emisi karbon dari batu

bara, juga dapat memengaruhi akses pasar Indonesia. Kebijakan seperti *Carbon Border Adjustment Mechanism* di Uni Eropa menunjukkan bahwa standar lingkungan semakin menjadi faktor penting dalam perdagangan internasional.

Di sisi lain, Indonesia juga memiliki peluang besar untuk memperluas perannya dalam perdagangan global melalui diversifikasi ekspor dan peningkatan daya saing industri manufaktur. Integrasi dalam kerja sama regional seperti *Association of Southeast Asian Nations* memberikan akses ke pasar regional yang luas dan memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan perdagangan internasional. Selain itu, perkembangan ekonomi digital dan jasa juga membuka peluang baru untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas.

Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam perdagangan global sebagai pemasok utama berbagai komoditas strategis sekaligus sebagai ekonomi besar yang terintegrasi dengan pasar dunia. Keunggulan ini memberikan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan strategi yang tepat untuk mengelola risiko dan tantangan yang ada. Dengan memperkuat hilirisasi, meningkatkan kualitas produk, serta menyesuaikan diri dengan standar global yang terus berkembang, Indonesia dapat memperkuat perannya sebagai pemain utama dalam perdagangan internasional yang berkelanjutan dan kompetitif.

Tabel 9.1 Posisi Indonesia dalam Komoditas Global (2022)

Komoditas	Pangsa Produksi Global	Peringkat Dunia	Nilai Ekspor (USD M)
Minyak Sawit (CPO)	~58%	1st	28.724
Nikel	~37%	1st	33.800
Batu Bara	~7%	3rd	43.890
Karet alam	~25%	2nd	3.680
Kopi	~7%	4th	1.230
Kakao	~15%	3rd	1.180

Sumber: UNCOMTRADE (2023). | Kementerian Perdagangan RI
(2023). Statistik Ekspor Komoditas 2022.

Tabel 9.1 menunjukkan bahwa posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas global pada tahun 2022 sangat kuat, terutama pada beberapa komoditas utama berbasis sumber daya alam. Pada komoditas minyak sawit (CPO), Indonesia mendominasi dengan pangsa produksi sekitar 58% dari total global dan menempati peringkat pertama dunia, dengan nilai ekspor mencapai USD 28,724 miliar. Dominasi ini menegaskan peran strategis Indonesia sebagai pemain utama dalam pasar minyak nabati internasional. Hal serupa juga terlihat pada komoditas nikel, di mana Indonesia menguasai sekitar 37% produksi global dan kembali menempati posisi pertama dunia, dengan nilai ekspor yang bahkan lebih tinggi, yaitu USD 33,800 miliar, mencerminkan pentingnya nikel dalam industri global seperti baterai dan kendaraan listrik.

Pada komoditas batu bara, Indonesia memiliki pangsa produksi sekitar 7% dan berada di peringkat ketiga dunia, namun justru mencatat nilai ekspor tertinggi di antara komoditas lain dalam tabel, yaitu USD 43,890 miliar, yang menunjukkan tingginya permintaan global terhadap energi fosil. Sementara itu, pada komoditas karet alam, Indonesia menyumbang sekitar 25% produksi global dan menempati peringkat kedua dunia, dengan nilai ekspor sebesar USD 3,680 miliar, menandakan peran penting dalam industri manufaktur seperti otomotif. Untuk komoditas kopi, Indonesia berada di peringkat keempat dunia dengan pangsa sekitar 7% dan nilai ekspor USD 1,230 miliar, menunjukkan kontribusi yang signifikan meskipun tidak dominan. Terakhir, pada komoditas kakao, Indonesia memiliki pangsa sekitar 15% produksi global dan menempati peringkat ketiga dunia dengan nilai ekspor USD 1,180 miliar. Tabel ini menggambarkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang kuat dalam berbagai komoditas primer, dengan dominasi paling menonjol pada minyak sawit dan nikel, serta peran signifikan dalam batu bara, karet, kopi, dan kakao. Hal ini menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu aktor penting dalam rantai pasok global berbasis sumber daya alam.

Hubungan antar kolom menunjukkan bahwa pangsa produksi global berkaitan erat dengan peringkat dunia. Negara dengan pangsa besar cenderung berada di posisi teratas dalam peringkat. Nilai ekspor

memberikan dimensi tambahan dengan menunjukkan seberapa besar komoditas tersebut berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Perbandingan antar komoditas menunjukkan bahwa sektor energi dan mineral seperti batu bara dan nikel memiliki nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan komoditas pertanian, meskipun beberapa komoditas pertanian memiliki pangsa produksi global yang besar. Struktur tabel ini menggambarkan bahwa kekuatan Indonesia dalam perdagangan global sangat bertumpu pada komoditas berbasis sumber daya alam, baik di sektor perkebunan maupun pertambangan, yang menjadikannya aktor penting dalam rantai pasok global.

B. Struktur Ekspor dan Impor Indonesia

Struktur ekspor Indonesia masih didominasi oleh produk berbasis sumber daya alam dan komoditas primer, meskipun terdapat peningkatan gradual dalam ekspor manufaktur dan olahan. Bank Indonesia (2023) mencatat bahwa ekspor non-migas mencapai 93% dari total ekspor pada 2022, dengan komoditas (CPO, batu bara, nikel) menyumbang sekitar 40%. Komposisi ekspor Indonesia masih lebih banyak berasal dari sektor berbasis sumber daya alam dibandingkan produk industri manufaktur yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Walaupun terdapat perkembangan bertahap dalam ekspor barang olahan, ketergantungan pada komoditas primer seperti minyak sawit, batu bara, dan nikel masih cukup besar dalam struktur perdagangan luar negeri. Dominasi ekspor non-migas menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan ekspor Indonesia tidak berasal dari minyak dan gas, melainkan dari sektor lain, namun porsi komoditas mentah tetap menjadi kontributor utama. Kondisi ini menggambarkan bahwa transformasi menuju ekonomi berbasis industri bernilai tambah masih berlangsung.

Struktur ekspor dan impor Indonesia mencerminkan karakteristik perekonomian yang sedang bertransformasi dari berbasis sumber daya alam menuju industrialisasi yang lebih bernilai tambah. Dalam perspektif ekonomi internasional, pola ini menunjukkan bagaimana suatu negara memanfaatkan keunggulan komparatifnya sekaligus berupaya meningkatkan posisi dalam rantai nilai global. Dari sisi ekspor, struktur Indonesia masih didominasi oleh komoditas berbasis sumber daya alam. Produk utama meliputi batu bara, minyak kelapa sawit (*crude palm oil*), nikel, serta produk mineral lainnya. Selain itu, Indonesia juga

mengekspor karet alam, timah, serta produk manufaktur seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik dalam skala yang lebih terbatas. Dominasi komoditas ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan dalam sektor ekstraktif dan agrikultur, yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran penting melalui kebijakan hilirisasi, terutama di sektor pertambangan. Misalnya, ekspor nikel tidak lagi hanya dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga dalam bentuk produk olahan seperti feronikel dan bahan baku baterai, yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Sementara itu, struktur impor Indonesia didominasi oleh barang modal, bahan baku, dan barang penolong yang digunakan untuk mendukung aktivitas produksi domestik. Impor mesin dan peralatan industri, bahan kimia, komponen elektronik, serta bahan bakar menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan industri nasional. Hal ini menunjukkan bahwa impor Indonesia sebagian besar bersifat produktif, yaitu digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dapat diekspor kembali atau digunakan dalam perekonomian domestik. Selain itu, Indonesia juga mengimpor barang konsumsi, meskipun porsinya relatif lebih kecil dibandingkan barang modal dan bahan baku.

Hubungan antara ekspor dan impor ini mencerminkan posisi Indonesia dalam rantai nilai global, di mana negara ini berperan sebagai pemasok bahan mentah sekaligus sebagai bagian dari proses produksi internasional. Ketergantungan pada impor bahan baku dan teknologi menunjukkan bahwa sektor industri domestik masih membutuhkan dukungan dari luar negeri, terutama dalam hal teknologi dan komponen berteknologi tinggi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas industri dalam negeri menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan tersebut dan meningkatkan daya saing.

Struktur perdagangan Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika global, termasuk perubahan harga komoditas, permintaan internasional, serta kebijakan perdagangan dari mitra dagang utama. Misalnya, kebijakan lingkungan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism yang diterapkan oleh Uni Eropa dapat memengaruhi ekspor komoditas tertentu yang memiliki intensitas karbon tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor non-ekonomi seperti standar lingkungan semakin berperan dalam menentukan akses pasar internasional. Selain itu, diversifikasi ekspor menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia.

Ketergantungan yang tinggi pada komoditas membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global. Oleh karena itu, pengembangan sektor manufaktur dan jasa menjadi penting untuk menciptakan struktur ekspor yang lebih seimbang dan stabil. Upaya ini juga sejalan dengan strategi untuk meningkatkan nilai tambah domestik dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global.

Struktur ekspor dan impor Indonesia mencerminkan proses transisi ekonomi yang sedang berlangsung. Di satu sisi, keunggulan dalam sumber daya alam memberikan kontribusi besar terhadap ekspor, tetapi di sisi lain, ketergantungan pada impor bahan baku dan teknologi menunjukkan perlunya penguatan industri domestik. Dengan kebijakan yang tepat, seperti hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta inovasi teknologi, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan struktur perdagangan yang lebih beragam, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

C. Kebijakan Perdagangan Indonesia

Kebijakan perdagangan Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan karakter yang cukup kompleks, karena menggabungkan dua pendekatan yang sering kali berjalan berdampingan tetapi tidak selalu selaras: liberalisasi perdagangan dan proteksionisme berbasis kebijakan industri. Dalam perspektif ekonomi internasional, fenomena ini mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara keterbukaan ekonomi guna meningkatkan efisiensi dan akses pasar, dengan kebutuhan untuk memperkuat struktur industri domestik serta meningkatkan nilai tambah.

Di satu sisi, Indonesia активно memperluas integrasi ekonomi melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas (*free trade agreements* atau FTA). Melalui *Association of Southeast Asian Nations Free Trade Area* dan skema ASEAN+6, Indonesia terhubung dengan mitra besar seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru. Selain itu, Indonesia juga menjadi bagian dari Regional Comprehensive Economic Partnership, yang merupakan salah satu perjanjian perdagangan terbesar di dunia. Di luar itu, Indonesia menandatangani perjanjian bilateral seperti Indonesia–Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) dan Indonesia–EFTA CEPA, yang bertujuan memperluas akses pasar ekspor,

menarik investasi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan perdagangan global. Pendekatan ini mencerminkan strategi liberalisasi yang bertujuan meningkatkan daya saing melalui keterbukaan ekonomi.

Namun di sisi lain, Indonesia juga menerapkan kebijakan yang lebih protektif sebagai bagian dari strategi industrialisasi. Salah satu instrumen penting adalah kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), yang mewajibkan penggunaan komponen lokal dalam berbagai sektor, terutama industri manufaktur dan proyek pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan industri domestik, meningkatkan kapasitas produksi nasional, serta mengurangi ketergantungan pada impor. Dalam praktiknya, TKDN menjadi alat untuk menciptakan permintaan domestik bagi produk lokal, meskipun sering kali menimbulkan perdebatan terkait efisiensi dan kepatuhan terhadap aturan perdagangan internasional.

Kebijakan yang paling menonjol dan kontroversial adalah larangan ekspor bahan mentah, khususnya nikel sejak 2020 dan bauksit sejak 2023. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi hilirisasi, yaitu mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor. Dengan melarang ekspor bahan mentah, pemerintah berupaya menarik investasi dalam pembangunan smelter dan industri pengolahan, sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri. Dalam konteks ini, kebijakan tersebut dapat dianggap berhasil karena meningkatkan investasi asing dan mempercepat perkembangan industri berbasis mineral, terutama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik.

Namun, kebijakan ini juga menimbulkan konsekuensi di tingkat internasional. Uni Eropa menggugat kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia ke *World Trade Organization*, dengan alasan bahwa kebijakan tersebut melanggar prinsip perdagangan bebas dan membatasi akses terhadap bahan baku. Putusan WTO memenangkan Uni Eropa, yang menunjukkan adanya ketegangan antara kebijakan domestik berbasis pembangunan industri dengan aturan perdagangan internasional. Kasus ini mencerminkan dilema yang dihadapi banyak negara berkembang: bagaimana memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan domestik tanpa melanggar komitmen internasional.

Secara konseptual, dualisme kebijakan perdagangan Indonesia ini dapat dipahami sebagai upaya untuk mengejar *catch-up industrialization*. Liberalisasi diperlukan untuk membuka akses pasar dan meningkatkan efisiensi, sementara proteksionisme selektif

digunakan untuk melindungi dan mengembangkan industri strategis. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara kedua pendekatan tersebut agar tidak menimbulkan distorsi ekonomi atau konflik perdagangan yang berkepanjangan.

Ke depan, efektivitas kebijakan perdagangan Indonesia akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan kemampuan beradaptasi dengan dinamika global. Isu-isu seperti standar lingkungan, digitalisasi perdagangan, serta perubahan rantai pasok global akan semakin memengaruhi arah kebijakan. Dalam konteks ini, Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan protektif yang diterapkan benar-benar menghasilkan peningkatan kapasitas industri, bukan sekadar perlindungan jangka pendek. Kebijakan perdagangan Indonesia mencerminkan strategi yang pragmatis tetapi kompleks, dengan menggabungkan keterbukaan ekonomi dan intervensi negara untuk mendorong industrialisasi. Pendekatan ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, tetapi juga memerlukan pengelolaan yang hati-hati agar tetap sejalan dengan aturan global dan tidak menghambat integrasi ekonomi jangka panjang.

D. Investasi Asing di Indonesia

Investasi asing di Indonesia, khususnya dalam bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI), memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, serta integrasi dengan ekonomi global. Dalam perspektif ekonomi internasional, FDI tidak hanya dipandang sebagai aliran modal, tetapi juga sebagai sarana transfer teknologi, peningkatan kapasitas produksi, serta penciptaan lapangan kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berhasil memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi investasi utama di Asia Tenggara.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2023, realisasi investasi total yang mencakup Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai sekitar Rp 1.207 triliun pada tahun 2022. Angka ini tidak hanya melampaui target tahunan pemerintah, tetapi juga menunjukkan pertumbuhan sekitar 34% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan tingkat kepercayaan investor yang semakin kuat terhadap prospek ekonomi Indonesia, didukung oleh stabilitas

makroekonomi, potensi pasar domestik yang besar, serta berbagai reformasi kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Struktur investasi yang masuk ke Indonesia menunjukkan konsentrasi pada sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi. Salah satu sektor utama adalah industri logam dasar, khususnya yang berkaitan dengan pengolahan nikel. Kebijakan hilirisasi yang diterapkan pemerintah, seperti larangan ekspor bahan mentah, telah mendorong pembangunan smelter dan industri pengolahan di dalam negeri. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pusat penting dalam rantai pasok global untuk baterai kendaraan listrik, yang permintaannya terus meningkat seiring dengan transisi menuju energi bersih.

Selain itu, sektor industri kimia juga menjadi tujuan utama investasi, karena perannya yang penting dalam mendukung berbagai sektor manufaktur lainnya. Investasi di sektor ini mencerminkan upaya untuk memperkuat struktur industri domestik serta mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku. Di sisi lain, perkembangan pesat ekonomi digital turut mendorong investasi dalam infrastruktur digital, seperti pusat data, jaringan telekomunikasi, dan platform teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menarik investasi di sektor tradisional, tetapi juga di sektor berbasis teknologi yang menjadi pendorong pertumbuhan masa depan.

Meskipun kinerja investasi menunjukkan tren positif, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah konsistensi implementasi kebijakan dan kepastian hukum, yang sangat penting bagi investor dalam mengambil keputusan jangka panjang. Selain itu, kualitas infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja terampil, serta efisiensi birokrasi juga menjadi faktor yang memengaruhi daya tarik investasi. Persaingan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara juga semakin ketat, sehingga Indonesia perlu terus meningkatkan daya saingnya.

Di sisi lain, investasi asing juga membawa implikasi yang perlu dikelola dengan baik. Ketergantungan yang berlebihan pada investasi asing dapat menimbulkan risiko, seperti repatriasi keuntungan ke luar negeri atau dominasi sektor tertentu oleh perusahaan asing. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah perlu memastikan bahwa investasi yang masuk memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian domestik, termasuk melalui transfer teknologi, pengembangan industri lokal, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Perkembangan investasi asing di Indonesia menunjukkan arah yang positif dan mencerminkan transformasi ekonomi menuju sektor yang lebih bernilai tambah dan berbasis teknologi. Dengan kombinasi kebijakan yang tepat, stabilitas ekonomi, serta peningkatan kualitas institusi, Indonesia memiliki potensi besar untuk terus menjadi salah satu tujuan utama investasi global. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa pertumbuhan investasi ini tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Tabel 9.1 Realisasi FDI Indonesia per Sektor Prioritas (2022)

Sektor	FDI (Rp Triliun)	Negara Investor Utama
Industri Logam Dasar	89,3	China, Korea Selatan
Transportasi, Gudang & Telekomunikasi	55,3	Singapura, Jepang
Industri Kimia & Farmasi	44,8	Singapura, Jerman
Pertambangan	42,1	Australia, China
Industri Makanan	37,9	Singapura, Malaysia
Perumahan & Kawasan Industri	36,5	Singapura, Jepang

Sumber: BKPM/Kementerian Investasi RI (2023)

Tabel 9.1 menyajikan realisasi *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia tahun 2022 berdasarkan sektor prioritas. Baris pertama adalah “Industri Logam Dasar” dengan nilai Rp 89,3 triliun. Angka ini merupakan yang terbesar dalam tabel, menunjukkan bahwa sektor ini menjadi tujuan utama FDI. Kolom negara investor utama mencantumkan China dan Korea Selatan, yang dikenal aktif dalam pengembangan industri nikel dan hilirisasi. Besarnya investasi pada sektor ini berkaitan dengan strategi pengolahan sumber daya mineral menjadi produk bernilai tambah.

Baris kedua adalah “Transportasi, Gudang & Telekomunikasi” dengan nilai Rp 55,3 triliun. Sektor ini mencakup infrastruktur logistik

dan Digital. Negara investor utama adalah Singapura dan Jepang, yang memiliki keunggulan dalam pembiayaan dan teknologi infrastruktur. Investasi di sektor ini menunjukkan pentingnya konektivitas fisik dan Digital dalam mendukung aktivitas ekonomi. Baris ketiga adalah “Industri Kimia & Farmasi” sebesar Rp 44,8 triliun. Investor utama berasal dari Singapura dan Jerman. Sektor ini berperan dalam mendukung industri manufaktur lanjutan serta kebutuhan kesehatan. Nilai investasi menunjukkan upaya penguatan basis industri kimia domestik.

Baris keempat adalah “Pertambangan” dengan nilai Rp 42,1 triliun. Investor utama adalah Australia dan China, yang memiliki pengalaman dan kapasitas dalam eksplorasi serta ekstraksi sumber daya alam. Sektor ini tetap menjadi daya tarik karena kekayaan mineral Indonesia. Baris kelima adalah “Industri Makanan” sebesar Rp 37,9 triliun. Investor utama berasal dari Singapura dan Malaysia. Sektor ini berkaitan dengan kebutuhan konsumsi domestik yang besar serta peluang ekspor produk olahan pangan. Baris keenam adalah “Perumahan & Kawasan Industri” dengan nilai Rp 36,5 triliun. Negara investor utama adalah Singapura dan Jepang. Investasi di sektor ini mendukung pembangunan kawasan industri dan infrastruktur properti yang menjadi basis bagi kegiatan produksi dan investasi lainnya.

Hubungan antar kolom menunjukkan bahwa nilai FDI berkaitan erat dengan karakteristik sektor. Sektor berbasis sumber daya dan industri berat cenderung menarik investasi terbesar, sementara sektor jasa dan konsumsi juga menunjukkan peran penting dalam mendukung ekosistem ekonomi. Perbandingan antar sektor menunjukkan dominasi industri berbasis hilirisasi sumber daya seperti logam dasar dan pertambangan, yang sejalan dengan kebijakan industrialisasi nasional. Sektor infrastruktur dan manufaktur juga mendapatkan porsi signifikan sebagai pendukung pertumbuhan jangka panjang. Struktur tabel ini menggambarkan bahwa arus FDI ke Indonesia terfokus pada sektor-sektor strategis yang mendukung transformasi ekonomi, terutama hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, dan penguatan kapasitas manufaktur.

E. Tantangan dan Peluang Indonesia di Pasar Global

Indonesia menghadapi paradoks sumber daya (*resource curse paradox*): kekayaan sumber daya alam yang melimpah belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kemakmuran yang merata dan diversifikasi ekonomi yang berkelanjutan. Indeks kompleksitas ekonomi Indonesia masih relatif rendah dibanding GDP-nya, mencerminkan ketergantungan pada komoditas yang harganya *volatile*. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, tetapi kekayaan tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong pemerataan kesejahteraan dan pengembangan struktur ekonomi yang lebih beragam. Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan yang kuat pada komoditas primer yang harga di pasar globalnya mudah berubah, sehingga perekonomian menjadi rentan terhadap fluktuasi eksternal. Rendahnya tingkat kompleksitas ekonomi juga menandakan bahwa struktur produksi Indonesia belum cukup didominasi oleh sektor bernilai tambah tinggi dan teknologi, sehingga manfaat dari sumber daya alam belum sepenuhnya diubah menjadi kekuatan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Tabel 9.2 Tantangan dan Peluang Indonesia dalam Ekonomi Global

Dimensi	Tantangan	Peluang
Komoditas	Harga <i>volatile</i> , <i>Dutch disease</i>	Hilirisasi, Value-added Export
Tenaga Kerja	Produktivitas rendah, <i>skill gap</i>	Bonus demografi 2030-2045
Digital	Kesenjangan digital	<i>Digital economy</i> terbesar ASEAN
Investasi	Birokrasi, infrastruktur	Pasar 278 juta; lokasi strategis
Perdagangan	Konsentrasi mitra & produk	RCEP, G20, ASEAN <i>Chairmanship</i>
Iklim	Deforestasi, emisi karbon	Transisi hijau, <i>green bond</i>

Sumber: World Bank (2023) & WEF (2023)

Tabel 9.2 menyajikan tantangan dan peluang Indonesia dalam ekonomi global melalui tiga kolom: “Dimensi”, “Tantangan”, dan “Peluang”. Setiap baris menggambarkan satu aspek strategis yang memperlihatkan dua sisi kondisi ekonomi Indonesia: hambatan yang dihadapi dan potensi yang dapat dimanfaatkan. Baris pertama adalah “Komoditas”. Kolom tantangan menunjukkan harga yang *volatile* dan risiko *Dutch disease*. Ketergantungan pada komoditas membuat perekonomian sensitif terhadap fluktuasi harga global, sementara *Dutch disease* mengacu pada melemahnya sektor industri akibat dominasi ekspor sumber daya alam. Kolom peluang menunjukkan hilirisasi dan ekspor bernilai tambah. Pengolahan komoditas menjadi produk jadi atau setengah jadi dapat meningkatkan nilai ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Baris kedua adalah “Tenaga Kerja”. Tantangan yang dicantumkan adalah produktivitas rendah dan kesenjangan keterampilan (*skill gap*). Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia belum sepenuhnya mendukung kebutuhan industri modern. Kolom peluang menampilkan bonus demografi 2030–2045, yaitu periode ketika proporsi penduduk usia produktif mencapai puncak. Jika dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Baris ketiga adalah “Digital”. Tantangan utama adalah kesenjangan digital, yang mencakup akses internet, infrastruktur, dan literasi teknologi yang belum merata. Kolom peluang menunjukkan potensi sebagai ekonomi digital terbesar di ASEAN, didorong oleh jumlah penduduk besar dan adopsi teknologi yang meningkat pesat.

Baris keempat adalah “Investasi”. Tantangan yang tercantum meliputi birokrasi dan keterbatasan infrastruktur. Hambatan ini dapat mengurangi daya tarik investasi. Kolom peluang menunjukkan pasar domestik sebesar 278 juta penduduk serta lokasi strategis di jalur perdagangan global. Faktor ini menjadi daya tarik utama bagi investor asing. Baris kelima adalah “Perdagangan”. Tantangan yang muncul adalah konsentrasi mitra dagang dan produk ekspor, yang membuat Indonesia rentan terhadap perubahan pada pasar tertentu. Kolom peluang mencantumkan keterlibatan dalam RCEP, G20, dan kepemimpinan ASEAN, yang membuka akses pasar lebih luas dan memperkuat posisi dalam diplomasi ekonomi. Baris keenam adalah “Iklim”. Tantangan meliputi deforestasi dan emisi karbon, yang menjadi sorotan global dan dapat memengaruhi akses pasar. Kolom peluang menunjukkan potensi

dalam transisi hijau dan penggunaan instrumen seperti *green bond*, yang dapat menarik investasi berkelanjutan dan meningkatkan reputasi internasional.

Hubungan antar kolom dalam tabel menunjukkan bahwa setiap tantangan memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai strategi transformasi. Hambatan struktural tidak hanya menjadi masalah, tetapi juga titik awal untuk perubahan kebijakan dan pengembangan ekonomi. Perbandingan antar dimensi menunjukkan bahwa tantangan Indonesia tersebar di berbagai sektor (ekonomi, sosial, teknologi, hingga lingkungan) sementara peluangnya juga bersifat multidimensional. Hal ini menandakan bahwa strategi pembangunan memerlukan pendekatan terpadu. Struktur tabel ini menggambarkan bahwa posisi Indonesia dalam ekonomi Global ditentukan oleh kemampuan mengelola risiko sekaligus mengoptimalkan potensi yang tersedia di setiap dimensi.

F. Strategi Peningkatan Daya Saing Nasional

Strategi peningkatan daya saing nasional Indonesia pada dasarnya diarahkan untuk menggeser fondasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam dan biaya tenaga kerja rendah menuju ekonomi berbasis produktivitas, inovasi, dan teknologi. Dalam kerangka ekonomi internasional, daya saing suatu negara tidak lagi ditentukan hanya oleh keunggulan komparatif tradisional, tetapi oleh kemampuan menciptakan nilai tambah melalui inovasi, efisiensi, dan kompleksitas ekonomi. Oleh karena itu, berbagai strategi yang dirumuskan pemerintah Indonesia mencerminkan upaya transformasi struktural jangka panjang.

Salah satu inisiatif utama adalah Making Indonesia 4.0 yang diluncurkan pada tahun 2018. Program ini berfokus pada transformasi industri manufaktur melalui adopsi teknologi digital seperti *automation*, *internet of things*, dan *artificial intelligence*. Lima sektor prioritas yang ditetapkan (tekstil dan garmen, otomotif, elektronik, kimia, serta makanan dan minuman) dipilih karena memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi dan potensi untuk ditingkatkan melalui modernisasi. Strategi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga mendorong integrasi Indonesia ke dalam rantai nilai global yang lebih maju.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan pendekatan berbasis wilayah melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan berbagai transformasinya. Pendekatan ini menekankan pengembangan koridor ekonomi yang disesuaikan dengan keunggulan masing-masing daerah, seperti sumber daya alam, lokasi geografis, dan potensi industri lokal. Dengan strategi ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi lebih merata di seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur menjadi komponen penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah dan meningkatkan efisiensi logistik.

Dalam jangka panjang, arah pembangunan Indonesia dirumuskan dalam visi Indonesia 2045, yang menargetkan Indonesia menjadi salah satu dari lima ekonomi terbesar di dunia dengan PDB mencapai sekitar USD 7 triliun. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, didukung oleh peningkatan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, serta stabilitas ekonomi makro. Visi ini juga menekankan pentingnya transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Dari sisi analisis akademik, Michael Porter menekankan bahwa Indonesia perlu beralih dari strategi *competing on factor costs* yang mengandalkan upah murah dan sumber daya alam ke strategi berbasis inovasi dan produktivitas. Pergeseran ini menuntut investasi besar dalam pendidikan berkualitas, penelitian dan pengembangan (*research and development*), serta penciptaan ekosistem inovasi yang mendukung kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi. Tanpa transformasi ini, Indonesia berisiko terjebak dalam *middle-income trap*, yaitu kondisi di mana pertumbuhan ekonomi melambat sebelum mencapai tingkat pendapatan tinggi.

Pendekatan lain yang relevan datang dari Ricardo Hausmann dan Cesar Hidalgo melalui konsep *Economic Complexity Index* (ECI). Indeks ini menunjukkan bahwa negara dengan struktur ekspor yang lebih kompleks yaitu mampu memproduksi dan mengekspor barang dengan tingkat teknologi dan pengetahuan tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Indonesia perlu melakukan diversifikasi ekspor ke produk-produk yang lebih kompleks, seperti manufaktur berteknologi tinggi dan produk berbasis inovasi, untuk meningkatkan daya saing globalnya.

Namun, implementasi strategi ini tidak tanpa tantangan. Kualitas sumber daya manusia, kesenjangan infrastruktur antarwilayah, serta keterbatasan kapasitas riset dan inovasi masih menjadi hambatan utama. Selain itu, transformasi industri juga memerlukan adaptasi dari dunia usaha, termasuk investasi dalam teknologi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Koordinasi kebijakan antarinstansi pemerintah juga menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa berbagai program berjalan secara sinergis.

Strategi peningkatan daya saing nasional Indonesia mencerminkan upaya komprehensif untuk melakukan transformasi ekonomi dari berbasis faktor menuju berbasis inovasi. Inisiatif seperti Making Indonesia 4.0, MP3EI, dan visi Indonesia 2045 menunjukkan arah kebijakan yang jelas menuju ekonomi yang lebih modern dan berdaya saing tinggi. Keberhasilan strategi ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi, kualitas institusi, serta kemampuan Indonesia dalam beradaptasi dengan dinamika ekonomi global yang terus berubah.



BAB X

PROSPEK EKONOMI

INTERNASIONAL

Berbagai perkembangan besar seperti kemajuan teknologi digital, peralihan menuju energi yang lebih ramah lingkungan, perubahan struktur rantai pasok global akibat faktor geopolitik, serta meningkatnya peran ekonomi Asia sedang mengubah cara negara memperoleh keunggulan dalam perdagangan, pola hubungan ekonomi antarnegara, dan sistem aturan global yang telah bertahan selama puluhan tahun. Perubahan ini menunjukkan bahwa tatanan ekonomi dunia tidak lagi statis, melainkan terus bergeser mengikuti dinamika global, sehingga menimbulkan tantangan sekaligus peluang baru, terutama bagi negara berkembang dalam menyesuaikan diri dan memanfaatkan perubahan tersebut.

A. Tren Ekonomi Global Masa Depan

Tren ekonomi global ke depan menunjukkan arah yang semakin kompleks, ditandai oleh interaksi antara teknologi, geopolitik, perubahan iklim, dan transformasi struktur ekonomi. Dalam perspektif ekonomi internasional, dunia tidak lagi bergerak menuju satu arah globalisasi yang linear, tetapi mengalami kombinasi antara integrasi, fragmentasi, dan reorientasi strategi ekonomi di berbagai negara. Beberapa tren utama dapat diidentifikasi sebagai penentu arah ekonomi global di masa depan.

Salah satu tren paling dominan adalah transformasi digital yang semakin cepat. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, *big data*, dan otomatisasi mengubah cara produksi, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi digital menjadi sumber pertumbuhan baru, di mana perusahaan berbasis teknologi memiliki peran yang semakin besar dalam menciptakan nilai ekonomi. Digitalisasi juga mempercepat integrasi

lintas negara, terutama dalam sektor jasa, tetapi sekaligus meningkatkan kesenjangan antara negara yang memiliki kapasitas teknologi tinggi dan yang tidak.

Di sisi lain, globalisasi mengalami perubahan arah menuju bentuk yang lebih selektif. Fenomena yang sering disebut sebagai *re-globalization* atau *slowbalization* menunjukkan bahwa perdagangan dan investasi tetap berlangsung, tetapi dengan pola yang lebih regional dan berbasis aliansi strategis. Ketegangan geopolitik serta pengalaman krisis seperti pandemi mendorong negara dan perusahaan untuk memprioritaskan ketahanan rantai pasok dibandingkan efisiensi semata. Hal ini terlihat dari tren *reshoring*, *nearshoring*, dan diversifikasi produksi ke berbagai lokasi.

Perubahan iklim juga menjadi faktor struktural yang semakin menentukan arah ekonomi global. Kebijakan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism yang diterapkan oleh Uni Eropa menunjukkan bahwa isu lingkungan kini terintegrasi langsung dalam kebijakan perdagangan. Transisi menuju ekonomi hijau akan mendorong investasi besar dalam energi terbarukan, teknologi rendah karbon, dan infrastruktur berkelanjutan. Namun, transisi ini juga menimbulkan tantangan bagi negara berkembang yang perlu menyesuaikan struktur ekonominya tanpa mengorbankan pertumbuhan.

Selain itu, pergeseran pusat gravitasi ekonomi global ke Asia menjadi tren jangka panjang yang semakin jelas. Negara-negara Asia, termasuk Indonesia, diperkirakan akan memainkan peran yang semakin besar dalam perdagangan, investasi, dan inovasi global. Pertumbuhan kelas menengah di kawasan ini juga akan menjadi pendorong utama permintaan global di masa depan. Hal ini mengubah peta ekonomi dunia yang sebelumnya didominasi oleh negara-negara Barat.

Tren lain yang tidak kalah penting adalah meningkatnya peran negara dalam perekonomian. Setelah periode panjang liberalisasi, banyak pemerintah kini lebih aktif dalam mengarahkan kebijakan industri, melindungi sektor strategis, serta mengelola risiko ekonomi. Kebijakan industri modern, termasuk subsidi, insentif, dan regulasi teknologi, menjadi alat utama dalam persaingan global. Ini menunjukkan bahwa batas antara ekonomi dan politik semakin kabur.

Ketimpangan ekonomi juga diperkirakan tetap menjadi isu utama di masa depan. Meskipun globalisasi dan pertumbuhan ekonomi telah mengurangi kemiskinan di banyak negara, distribusi manfaatnya masih

tidak merata. Teknologi dan globalisasi dapat memperlebar kesenjangan jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang inklusif. Oleh karena itu, banyak negara mulai menekankan pentingnya pertumbuhan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Tren ekonomi global masa depan tidak dapat dipahami melalui satu dimensi saja. Dunia bergerak menuju sistem yang lebih multipolar, terdigitalisasi, dan berorientasi pada keberlanjutan, tetapi juga lebih terfragmentasi dan penuh ketidakpastian. Bagi negara seperti Indonesia, tantangan utamanya adalah bagaimana memanfaatkan peluang dari tren ini seperti digitalisasi dan pertumbuhan Asia sambil mengelola risiko yang muncul dari perubahan struktur global. Keberhasilan dalam menghadapi tren ini akan sangat ditentukan oleh kemampuan beradaptasi, kualitas kebijakan, serta kekuatan institusi dalam mengelola transformasi ekonomi jangka panjang.

B. Peran Teknologi dan Digitalisasi

Peran teknologi dan digitalisasi dalam ekonomi global saat ini bersifat transformasional, karena tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengubah struktur produksi, pasar tenaga kerja, dan pola perdagangan internasional. Dalam perspektif ekonomi internasional, teknologi digital menjadi salah satu kekuatan utama yang membentuk ulang keunggulan kompetitif negara dan perusahaan. Perubahan ini menciptakan peluang baru, tetapi juga menghadirkan tantangan besar, terutama bagi negara berkembang yang selama ini mengandalkan jalur industrialisasi tradisional.

Salah satu dampak paling signifikan terlihat pada pasar tenaga kerja. Analisis oleh Daron Acemoglu dan Pascual Restrepo (2022) menunjukkan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan otomatisasi akan menyebabkan *displacement* besar pada pekerjaan yang bersifat rutin, baik manual maupun kognitif. Pekerjaan seperti administrasi dasar, produksi berulang, atau pengolahan data sederhana menjadi semakin mudah digantikan oleh mesin dan algoritma. Namun, teknologi juga menciptakan *complementarities*, yaitu meningkatkan nilai pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, interaksi sosial, dan adaptabilitas tinggi. Dengan kata lain, teknologi tidak hanya menggantikan tenaga kerja, tetapi juga mengubah jenis keterampilan yang dibutuhkan di pasar.

Implikasi dari perubahan ini sangat penting bagi negara berkembang. Selama beberapa dekade, banyak Negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Taiwan berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi pesat melalui industrialisasi manufaktur padat karya. Namun, dalam era otomatisasi dan robotika, jalur pembangunan ini menjadi semakin sulit diikuti. Produksi yang sebelumnya mengandalkan tenaga kerja murah kini dapat digantikan oleh mesin, sehingga keunggulan biaya tenaga kerja menjadi kurang relevan. Hal ini menuntut negara berkembang untuk mencari strategi pembangunan baru yang lebih berbasis pada keterampilan, inovasi, dan teknologi.

Di sisi lain, digitalisasi juga membuka peluang besar dalam perdagangan internasional. *Platform* digital memungkinkan pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk mengakses pasar global tanpa harus membangun jaringan distribusi fisik yang mahal. Melalui aplikasi seperti Amazon, Alibaba Group, dan Shopee, pelaku usaha dapat menjual produk mereka langsung ke konsumen di berbagai negara. Hal ini secara signifikan menurunkan hambatan masuk ke pasar internasional dan menciptakan peluang inklusi ekonomi yang lebih luas.

Menurut *World Trade Organization* (2022), penggunaan saluran digital dapat menurunkan biaya ekspor bagi pelaku usaha kecil hingga 82%. Penurunan biaya ini mencakup aspek logistik, pemasaran, hingga transaksi, yang sebelumnya menjadi kendala utama bagi UMKM untuk menembus pasar global. Dengan demikian, digitalisasi berpotensi mendemokratisasi perdagangan internasional, di mana tidak hanya perusahaan besar yang dapat berpartisipasi, tetapi juga pelaku usaha kecil dari berbagai negara.

Namun, manfaat digitalisasi tidak otomatis dirasakan secara merata. Terdapat kesenjangan digital (*digital divide*) antara negara maju dan berkembang, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam satu negara. Akses terhadap infrastruktur digital, seperti internet cepat dan perangkat teknologi, menjadi prasyarat utama untuk memanfaatkan peluang ini. Selain itu, keterampilan digital juga menjadi faktor penting, karena tanpa kemampuan yang memadai, tenaga kerja dan pelaku usaha tidak dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Tantangan lain adalah regulasi dan tata kelola ekonomi digital. Isu seperti perlindungan data, keamanan siber, perpajakan digital, serta persaingan usaha menjadi semakin kompleks dalam era digital. Negara

perlu merumuskan kebijakan yang mampu mendorong inovasi sekaligus melindungi kepentingan publik. Dalam konteks ini, kerja sama internasional juga menjadi penting untuk menciptakan aturan yang konsisten dalam perdagangan digital global.

Teknologi dan digitalisasi merupakan pedang bermata dua dalam ekonomi global. Di satu sisi, mereka meningkatkan efisiensi, membuka akses pasar, dan menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Di sisi lain, mereka juga mengubah struktur pasar tenaga kerja dan menantang model pembangunan tradisional, terutama bagi negara berkembang. Oleh karena itu, kunci keberhasilan terletak pada kemampuan negara dalam beradaptasi, melalui investasi dalam pendidikan, pengembangan keterampilan, serta pembangunan infrastruktur digital yang merata. Dengan strategi yang tepat, digitalisasi dapat menjadi pendorong utama transformasi ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

C. Integrasi Ekonomi Regional

Integrasi ekonomi regional merupakan proses di mana negara-negara dalam suatu kawasan meningkatkan kerja sama ekonomi melalui pengurangan hambatan perdagangan, koordinasi kebijakan, hingga pembentukan pasar bersama atau bahkan integrasi ekonomi yang lebih dalam. Dalam perspektif ekonomi internasional, integrasi regional dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, memperluas pasar, serta memperkuat posisi tawar negara-negara anggota dalam sistem ekonomi global yang semakin kompetitif.

Salah satu contoh paling relevan adalah *Association of Southeast Asian Nations*, yang menjadi kerangka utama integrasi ekonomi di Asia Tenggara. Melalui *ASEAN Economic Community* (AEC), negara-negara anggota berupaya menciptakan pasar dan basis produksi tunggal dengan aliran barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil yang lebih bebas. Integrasi ini tidak hanya meningkatkan perdagangan intra-kawasan, tetapi juga menjadikan ASEAN sebagai pusat produksi yang terhubung dengan rantai nilai global.

Selain ASEAN, integrasi ekonomi regional juga diperkuat melalui perjanjian yang lebih luas seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership*. RCEP mencakup negara-negara ASEAN bersama mitra utama seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia,

dan Selandia Baru, sehingga membentuk salah satu blok perdagangan terbesar di dunia. Perjanjian ini bertujuan untuk menyederhanakan aturan perdagangan, mengurangi tarif, serta meningkatkan konektivitas ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Bagi negara seperti Indonesia, keikutsertaan dalam RCEP membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan daya tarik sebagai tujuan investasi.

Manfaat utama dari integrasi ekonomi regional adalah peningkatan efisiensi melalui spesialisasi dan skala ekonomi. Dengan pasar yang lebih besar, perusahaan dapat memproduksi dalam jumlah lebih besar dengan biaya lebih rendah. Selain itu, integrasi juga mendorong aliran investasi lintas negara, karena perusahaan dapat memanfaatkan keunggulan masing-masing lokasi dalam kawasan. Hal ini memperkuat pembentukan rantai nilai regional yang menjadi bagian dari sistem produksi global.

Namun, integrasi regional juga memiliki tantangan. Perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antarnegara anggota dapat menimbulkan ketimpangan dalam distribusi manfaat. Negara yang lebih maju atau lebih kompetitif cenderung memperoleh keuntungan lebih besar, sementara negara yang kurang siap dapat menghadapi tekanan pada industri domestik. Selain itu, harmonisasi kebijakan dan regulasi sering kali menjadi proses yang kompleks, karena melibatkan kepentingan nasional yang berbeda.

Dalam konteks global yang semakin tidak pasti, integrasi ekonomi regional juga berfungsi sebagai strategi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi. Ketika perdagangan global menghadapi hambatan akibat konflik geopolitik atau proteksionisme, kerja sama regional dapat menjadi alternatif untuk menjaga arus perdagangan dan investasi tetap berjalan. Hal ini menjelaskan mengapa integrasi regional semakin penting dalam era yang ditandai oleh fragmentasi global.

Integrasi ekonomi regional merupakan salah satu pilar utama dalam ekonomi global modern. Melalui kerja sama yang lebih erat, negara-negara dapat meningkatkan efisiensi, memperluas peluang ekonomi, serta memperkuat posisi mereka dalam persaingan global. Namun, keberhasilan integrasi sangat bergantung pada kemampuan negara anggota untuk mengelola perbedaan, memperkuat institusi, dan memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh kawasan.

D. Ketahanan Ekonomi Global

Ketahanan ekonomi global (*economic resilience*) menjadi salah satu konsep kunci dalam memahami dinamika ekonomi internasional kontemporer, terutama setelah dunia menghadapi guncangan besar seperti pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik yang berkepanjangan, termasuk perang di Ukraina. Sebelum periode krisis ini, arsitektur ekonomi global cenderung dibangun di atas prinsip efisiensi maksimum, di mana perusahaan dan negara berupaya menekan biaya produksi melalui globalisasi rantai pasok, *outsourcing*, dan *just-in-time production systems*. Dalam pendekatan tersebut, ketergantungan pada satu atau beberapa lokasi produksi dianggap sebagai hal yang wajar selama mampu memberikan keuntungan biaya. Namun, krisis global telah mengungkap sisi rapuh dari sistem ini. Gangguan pada satu titik dalam rantai pasok dapat menimbulkan efek domino yang luas, menghambat produksi, menaikkan harga, dan bahkan memicu krisis ekonomi di berbagai negara.

Pandemi COVID-19 menjadi titik balik yang sangat signifikan dalam perubahan paradigma ini. Pembatasan mobilitas, penutupan pabrik, dan gangguan logistik global menyebabkan kelangkaan berbagai barang penting, mulai dari alat kesehatan hingga semikonduktor. Negara-negara yang sangat bergantung pada impor untuk kebutuhan strategis menyadari bahwa efisiensi semata tidak cukup untuk menjamin stabilitas ekonomi. Dalam konteks ini, ketahanan ekonomi dipahami sebagai kemampuan suatu sistem untuk menyerap guncangan, beradaptasi terhadap perubahan, dan pulih dengan cepat setelah krisis. Ketahanan tidak hanya berarti bertahan, tetapi juga mencakup fleksibilitas dan kapasitas untuk bertransformasi menghadapi kondisi baru.

Perang di Ukraina semakin memperkuat urgensi ketahanan ekonomi global. Konflik ini mengganggu pasokan energi dan pangan dunia, mengingat Ukraina dan Rusia merupakan pemain penting dalam ekspor gandum, pupuk, dan energi. Lonjakan harga energi di Eropa serta krisis pangan di berbagai negara berkembang menunjukkan betapa rentannya sistem global terhadap konflik geopolitik. Ketergantungan yang tinggi pada sumber energi tertentu, seperti gas alam dari Rusia, membuat banyak negara harus menghadapi tekanan ekonomi yang berat ketika pasokan terganggu. Dari sini, muncul kesadaran bahwa

diversifikasi sumber daya dan mitra dagang merupakan bagian penting dari strategi ketahanan ekonomi.

Dalam konteks kebijakan, perubahan paradigma ini tercermin dalam munculnya pendekatan baru yang sering disebut sebagai “*new Washington consensus*”. Pendekatan ini menekankan peran aktif negara dalam membangun fondasi ekonomi yang tangguh. Tidak seperti konsensus lama yang lebih mengedepankan liberalisasi pasar dan deregulasi, pendekatan baru ini mengakui pentingnya intervensi pemerintah dalam sektor-sektor strategis. Investasi publik dalam infrastruktur menjadi prioritas, tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memastikan kelancaran distribusi barang dan jasa dalam situasi krisis. Infrastruktur yang kuat, termasuk pelabuhan, jaringan logistik, dan sistem digital, memungkinkan ekonomi untuk tetap berfungsi meskipun terjadi gangguan eksternal.

Selain itu, penguatan industri strategis menjadi fokus utama dalam membangun ketahanan ekonomi. Banyak negara mulai mengembangkan kebijakan industrial yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dalam sektor-sektor penting seperti energi, pangan, kesehatan, dan teknologi tinggi. Misalnya, produksi semikonduktor yang sebelumnya terkonsentrasi di beberapa negara kini mulai didiversifikasi ke berbagai wilayah. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi risiko gangguan pasokan, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas domestik dalam menghadapi krisis di masa depan. Dalam konteks ini, konsep *reshoring* dan *friend-shoring* menjadi semakin populer, di mana perusahaan memindahkan produksi kembali ke dalam negeri atau ke negara-negara mitra yang dianggap lebih stabil secara politik.

Pengembangan teknologi hijau juga menjadi bagian integral dari strategi ketahanan ekonomi global. Krisis energi yang dipicu oleh konflik geopolitik telah mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Negara-negara mulai berinvestasi dalam energi surya, angin, dan sumber energi bersih lainnya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan. Selain itu, teknologi hijau juga berperan dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan, yang pada gilirannya meningkatkan ketahanan terhadap krisis lingkungan seperti perubahan iklim. Dengan

demikian, ketahanan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan stabilitas jangka pendek, tetapi juga dengan keberlanjutan jangka panjang.

Diversifikasi rantai pasok merupakan elemen kunci lainnya dalam membangun ketahanan ekonomi. Perusahaan kini lebih berhati-hati dalam menentukan lokasi produksi dan sumber bahan baku. Alih-alih mengandalkan satu negara atau wilayah, mereka cenderung menyebar risiko dengan memiliki beberapa pemasok dari berbagai lokasi. Meskipun strategi ini dapat meningkatkan biaya dalam jangka pendek, manfaatnya dalam mengurangi risiko gangguan jangka panjang dianggap lebih besar. Digitalisasi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan visibilitas dan fleksibilitas rantai pasok, memungkinkan perusahaan untuk merespons perubahan dengan lebih cepat dan efektif.

Perubahan ini juga berdampak pada kebijakan perdagangan internasional. Jika sebelumnya perdagangan global didorong oleh prinsip efisiensi dan keunggulan komparatif, kini aspek keamanan dan keberlanjutan menjadi pertimbangan yang semakin penting. Negara-negara mulai menerapkan kebijakan yang lebih selektif dalam menjalin hubungan dagang, dengan mempertimbangkan stabilitas politik dan keselarasan nilai dengan mitra dagang. Dalam beberapa kasus, hal ini mengarah pada fragmentasi ekonomi global, di mana perdagangan lebih banyak terjadi dalam blok-blok regional atau kelompok negara yang memiliki kepentingan bersama. Meskipun demikian, tantangan utama adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara ketahanan dan keterbukaan ekonomi, agar upaya meningkatkan ketahanan tidak justru menghambat pertumbuhan ekonomi global.

Bagi negara berkembang, isu ketahanan ekonomi memiliki implikasi yang sangat penting. Di satu sisi, mereka memiliki peluang untuk menarik investasi baru sebagai bagian dari diversifikasi rantai pasok global. Di sisi lain, mereka juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas domestik dan memperkuat institusi ekonomi. Investasi dalam pendidikan, teknologi, dan infrastruktur menjadi kunci untuk memastikan bahwa negara berkembang dapat beradaptasi dengan perubahan lanskap ekonomi global. Selain itu, kerja sama internasional tetap diperlukan untuk menghadapi tantangan global yang bersifat lintas batas, seperti pandemi dan perubahan iklim.

Ketahanan ekonomi global mencerminkan pergeseran mendasar dalam cara dunia memandang hubungan antara efisiensi dan keamanan. Krisis global telah menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang terlalu

terfokus pada efisiensi dapat menjadi rapuh ketika menghadapi guncangan besar. Oleh karena itu, keseimbangan antara efisiensi, ketahanan, dan keberlanjutan menjadi tujuan utama dalam perumusan kebijakan ekonomi saat ini. Dengan mengintegrasikan investasi strategis, diversifikasi, inovasi teknologi, dan kerja sama internasional, negara dan perusahaan dapat membangun sistem ekonomi yang tidak hanya mampu tumbuh, tetapi juga tahan terhadap berbagai tantangan di masa depan.

E. Strategi Negara Berkembang

Rodrik (2023) dalam tulisan terbarunya mengajukan argumen bahwa era kebijakan industri telah kembali bahkan di negara-negara maju sekalipun (IRA dan CHIPS Act AS; Green Deal UE). Bagi negara berkembang, ini sekaligus membuka peluang (justifikasi kebijakan industri) dan ancaman (*industrial subsidy* dari negara maju mendistorsi persaingan global). Kebijakan industri kembali menjadi pendekatan utama dalam strategi ekonomi banyak negara, termasuk negara maju yang kini aktif mendorong sektor-sektor strategis melalui subsidi, investasi, dan perlindungan industri tertentu.

Kebijakan seperti di Amerika Serikat dan Uni Eropa menunjukkan bahwa negara tidak lagi sepenuhnya mengandalkan mekanisme pasar bebas, tetapi ikut campur untuk memperkuat sektor penting seperti teknologi dan energi hijau. Kondisi ini memberikan dua dampak bagi negara berkembang: di satu sisi membuka ruang untuk menerapkan kebijakan industri mereka sendiri tanpa dianggap menyimpang dari praktik global, tetapi di sisi lain menciptakan ketimpangan persaingan karena negara maju memiliki kapasitas subsidi yang jauh lebih besar sehingga dapat mendistorsi pasar internasional.

1. Strategi diferensiasi produk: Bergerak dari komoditas ke produk bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi dan upgrading kapasitas manufaktur.
2. Diversifikasi mitra dagang: Kurangi konsentrasi ketergantungan pada satu negara (China, AS) untuk mengurangi risiko geopolitik.
3. Investasi dalam modal manusia: Pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan industri masa depan (*Digital skills, green economy*).
4. Memaksimalkan regional *integration*: RCEP, ASEAN, AfCFTA sebagai batu loncatan menuju pasar global.

5. *Green industrialization*: Manfaatkan transisi hijau global sebagai peluang industrialisasi baru (*EV battery, green hydrogen, solar panels*).



DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D. & Restrepo, P. (2022). Tasks, Automation, and the Rise in US Wage *Inequality*. *Econometrica*, 90(5), 1973-2016.
- Aizenman, J. & Lee, J. (2014). *International Reserves: Precautionary Versus Mercantilist Views, Theory and Evidence*. *Open Economies Review*, 18(2), 191-214.
- Aiyar, S., Chen, J., Ebeke, C., Garcia-Saltos, R., Gudmundsson, T., Ilyina, A., ... & Weiss, M. (2023). *GeoEconomic Fragmentation and the Future of Multilateralism*. IMF Staff Discussion Note SDN/2023/001. *International Monetary Fund*.
- Amiti, M., Redding, S.J., & Weinstein, D.E. (2019). The Impact of the 2018 Tariffs on *Prices and Welfare*. *Journal of Economic Perspectives*, 33(4), 187-210.
- Anderson, J.E. & van Wincoop, E. (2003). Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle. *American Economic Review*, 93(1), 170-192.
- Antras, P. (2015). *Global Production: Firms, Contracts, and Trade Structure*. Princeton University Press.
- ASEAN Secretariat. (2023). *ASEAN Statistical Highlights 2023*. ASEAN Secretariat. Jakarta, Indonesia.
- Autor, D., Dorn, D., & Hanson, G. (2013). The China Syndrome: Local *Labor Market* Effects of Import Competition in the United States. *American Economic Review*, 103(6), 2121-2168.
- Autor, D., Dorn, D., & Hanson, G. (2021). On the Persistence of the China Shock. *Brookings Papers on Economic Activity*, Spring 2021, 381-437.
- Bagwell, K. & Staiger, R.W. (2020). *The Economics of the World Trading System*, revised edition. MIT Press.
- Baldwin, R. (2016). *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*. Harvard University Press.
- Baldwin, R. & Lopez-Gonzalez, J. (2015). *Supply-Chain Trade: A Portrait of Global Patterns and Several Testable Hypotheses*. *World Economy*, 38(11), 1682-1721.

- Bank Indonesia. (2023). Statistik Neraca Pembayaran Indonesia Q4 2022. Bank Indonesia. Jakarta.
- Bhagwati, J. (2014). *Defense of Globalization: With a New Afterword*. Oxford University Press.
- BIS (Bank for *International* Settlements). (2022). Triennial Central Bank Survey of *Foreign Exchange* and OTC Derivatives Markets. BIS. Basel.
- BKPM/Kementerian Investasi RI. (2023). Laporan Kinerja Investasi 2022. Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jakarta.
- Blind, K., Cremers, K., Mueller, E., & Nürnberg, H. (2023). The Impact of Patents on Export Performance and *Internationalization* Strategy. *World Economy*, 46(2), 345-378.
- Bown, C.P. (2022). The GATT's Starting Point: Tariff Levels circa 1947. In W. Martin & A. Mattoo (Eds.), *Unfinished Business? The WTO's Doha Agenda*. PIIE Working Paper.
- Caliendo, L. & Parro, F. (2015). Estimates of the *Trade and Welfare* Effects of NAFTA. *Review of Economic Studies*, 82(1), 1-44.
- Carbaugh, R.J. (2019). *International Economics*, 16th edition. Cengage Learning.
- Costinot, A. & Donaldson, D. (2016). How Large Are the Gains from *Economic Integration*? Theory and Evidence from U.S. Agriculture, 1880-2002. *Econometrica*, 84(5), 1727-1786.
- Daude, C. & Stein, E. (2007). The Quality of Institutions and *Foreign Direct Investment*. *Economics & Politics*, 19(3), 317-344.
- Deardorff, A.V. (2014). *Comparative Advantage: The Theory, Its Variants, and Its Implications for Trade and Investment Policy*. *Journal of International Economics*, 92(1), 38-46.
- Dollar, D., Kleineberg, T., & Kraay, A. (2016). *Growth* Is Still Good for the Poor. *European Economic Review*, 81, 68-85.
- Dunning, J.H. & Lundan, S.M. (2008). *Multinational Enterprises and the Global Economy*, 2nd edition. Edward Elgar Publishing.
- Eichengreen, B. (2019). *Globalizing Capital: A History of the International Monetary System*, 3rd edition. Princeton University Press.
- Fajgelbaum, P.D., Goldberg, P.K., Kennedy, P.J., & Khandelwal, A.K. (2020). The Return to *Protectionism*. *Quarterly Journal of Economics*, 135(1), 1-55.

- Fajgelbaum, P.D. & Khandelwal, A.K. (2022). The *Economic* Impacts of the US-China Trade War. *Annual Review of Economics*, 14, 205-228.
- Feenstra, R.C. & Taylor, A.M. (2021). *International Economics*, 5th edition. Worth Publishers.
- Google-Temasek-Bain. (2023). e-Conomy SEA 2023: ASEAN's Digital *Economy* Report. Google, Temasek, Bain & Company.
- Griffith, R., Redding, S., & Van Reenen, J. (2016). Mapping the Two Faces of R&D: *Productivity Growth* in a Panel of OECD Industries. *Review of Economics and Statistics*, 86(4), 883-895.
- Hausmann, R. & Hidalgo, C. (2014). The Atlas of *Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity*. MIT Press.
- Helpman, E. & Krugman, P.R. (1985). *Market Structure and Foreign Trade: Increasing Returns, Imperfect Competition, and the International Economy*. MIT Press.
- Helpman, E., Itskhoki, O., & Redding, S.J. (2023). *Trade, Labor Markets, and the China Shock*. *Journal of International Economics*, 140, 103679.
- Iamsiraroj, S. (2016). The *Foreign Direct Investment–Economic Growth* Nexus. *International Review of Economics & Finance*, 42, 116-133.
- IMF (*International Monetary Fund*). (2022). Annual Report on *Exchange Arrangements and Exchange Restrictions (AREAER)* 2022. IMF. Washington, D.C.
- IMF. (2023). *World Economic Outlook: A Rocky Recovery*. April 2023. IMF. Washington, D.C.
- IMF. (2024). *World Economic Outlook Update: Moderating Inflation and Steady Growth Open Path to Soft Landing*. January 2024. IMF.
- Irwin, D.A. (2020). *Free Trade Under Fire*, 5th edition. Princeton University Press.
- Itskhoki, O. & Mukhin, D. (2021). *Exchange rate Disconnect in General Equilibrium*. *Journal of Political Economy*, 129(8), 2183-2232.
- Keohane, R.O. (2005). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. 2nd edition. Princeton University Press.

- Kementerian Perdagangan RI. (2023). Statistik Ekspor-Impor Indonesia 2022. Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan. Jakarta.
- Koopman, R., Wang, Z., & Wei, S.J. (2014). Tracing *Value-Added* and Double Counting in Gross Exports. *American Economic Review*, 104(2), 459-494.
- Krugman, P.R. (1979). Increasing Returns, Monopolistic Competition, and *International trade*. *Journal of International Economics*, 9(4), 469-479.
- Krugman, P.R., Obstfeld, M., & Melitz, M.J. (2022). *International Economics: Theory and Policy*, 12th edition. Pearson Education.
- McKinsey Global Institute. (2022). *Global Flows: The Ties That Bind in an Interconnected World*. McKinsey & Company. New York.
- Melitz, M.J. (2003). The Impact of *Trade* on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry *Productivity*. *Econometrica*, 71(6), 1695-1725.
- Milanovic, B. (2016). *Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization*. Harvard University Press.
- Obstfeld, M. (2021). Two Challenges from *Globalization*. *Journal of International Money and Finance*, 110, 102233.
- Obstfeld, M. & Rogoff, K. (2020). Revisiting Speculative Hyperinflations in *Monetary Models*. *Review of Economic Dynamics*, 38, 1-23.
- OECD. (2022). *Digital Trade Report: Measuring Digital Trade*. OECD Publishing. Paris.
- OECD. (2023). *OECD Economic Outlook 2023/2: Occasional Papers*. OECD Publishing. Paris.
- Petri, P.A. & Plummer, M.G. (2023). RCEP: New Architecture for *Trade Integration* in Asia. *Asian Economic Policy Review*, 18(1), 1-21.
- Piketty, T., Chancel, L., Cogneau, D., *et al.* (2022). *World Inequality Report 2022*. World Inequality Lab. Paris.
- Porter, M.E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press.
- Porter, M.E. & Rivkin, J. (2012). Choosing the United States. *Harvard Business Review*, 90(3), 80-93.
- Posen, A.S. (2021). The *Price* of Nostalgia: America's Self-Defeating *Economic Retreat*. *Foreign Affairs*, 100(3), 10-19.
- Reinhart, C.M. & Rogoff, K.S. (2009). *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly*. Princeton University Press.

- Rodrik, D. (2011). *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*. W.W. Norton & Company.
- Rodrik, D. (2023). *Industrial Policy for the Twenty-First Century: The Return of Industrial Policy*. Project Syndicate, March 2023.
- Rogoff, K. (1996). The Purchasing Power Parity Puzzle. *Journal of Economic Literature*, 34(2), 647-668.
- Salvatore, D. (2022). *International Economics*, 13th edition. John Wiley & Sons.
- Stiglitz, J.E. (2019). *People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent*. W.W. Norton & Company.
- Sullivan, J. (2023). *Renewing American Economic Leadership*. Address at the Brookings Institution, Washington D.C., April 27, 2023.
- UNCTAD. (2020). *World Investment Report 2020: International Production Beyond the Pandemic*. United Nations. New York.
- UNCTAD. (2023). *World Investment Report 2023: Investing in Sustainable Energy for All*. United Nations. New York.
- UNCTAD. (2023). *Digital Economy Report 2023: Shaping an Environmentally Sustainable and Inclusive Digital Future*. United Nations. Geneva.
- Vernon, R. (1966). *International Investment and International trade in the Product Cycle*. *Quarterly Journal of Economics*, 80(2), 190-207.
- Wacziarg, R. & Welch, K.H. (2022). *Trade liberalization and Growth: New Evidence*. *World Bank Economic Review*, 22(2), 187-231.
- World Bank. (2022). *The Changing Wealth of Nations 2021: Managing Assets for the Future*. World Bank. Washington D.C.
- World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects: Reforms Amid Uncertainty*. June 2023. World Bank. Washington D.C.
- World Bank. (2023). *World Development Indicators 2023*. World Bank. Washington D.C.
- WTO (*World Trade Organization*). (2022). *World Trade Report 2022: Climate Change and International trade*. WTO. Geneva.
- WTO. (2023). *World Trade Report 2023: Re-Globalization for a Secure, Inclusive and Sustainable Future*. WTO. Geneva.
- WTO. (2023). *World Tariff Profiles 2023*. WTO. Geneva.



GLOSARIUM

Apresiasi dan Depresiasi	Kenaikan (apresiasi) atau penurunan (depresiasi) nilai mata uang akibat mekanisme pasar.
<i>Artificial Intelligence</i>	Teknologi yang memungkinkan mesin melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia.
Cadangan Devisa	Aset luar negeri yang dimiliki bank sentral untuk menjaga stabilitas ekonomi.
De-globalisasi	Kecenderungan berkurangnya integrasi global akibat proteksionisme, geopolitik, atau krisis.
Devaluasi	Kebijakan penurunan nilai mata uang secara resmi untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor.
Dumping	Praktik menjual barang di luar negeri dengan harga lebih rendah dari harga domestik.
<i>E-commerce</i>	Perdagangan barang dan jasa melalui platform digital.
Energi Terbarukan	Sumber energi yang dapat diperbarui seperti matahari, angin, dan air.
<i>Exchange Rate</i>	Harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang menentukan daya beli internasional.

<i>Foreign Direct Investment</i>	Investasi langsung oleh perusahaan atau individu di negara lain dengan tujuan mengendalikan bisnis.
<i>Forex Market</i>	Pasar global tempat mata uang diperdagangkan secara kontinu oleh berbagai pelaku ekonomi.
<i>Global Supply Chain</i>	Jaringan distribusi barang dari produksi hingga konsumsi lintas negara.
<i>Global Value Chain</i>	Jaringan produksi lintas negara di mana setiap tahap dilakukan di lokasi berbeda.
Globalisasi Ekonomi	Proses meningkatnya integrasi ekonomi antarnegara melalui perdagangan, investasi, dan arus teknologi.
<i>Green Economy</i>	Sistem ekonomi yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan.
Hilirisasi Industri	Proses pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi.
Industrialisasi	Transformasi ekonomi dari sektor pertanian ke manufaktur dan industri.
Inflasi Global	Kenaikan harga secara umum yang terjadi secara luas di berbagai negara.
Inovasi	Pengembangan ide, produk, atau proses baru yang meningkatkan nilai ekonomi.
Keunggulan Absolut	Kemampuan suatu negara memproduksi barang dengan biaya lebih rendah atau produktivitas lebih tinggi secara langsung.

Keunggulan Komparatif	Konsep bahwa suatu negara akan lebih efisien memproduksi barang dengan biaya peluang lebih rendah dibanding negara lain.
Kuota Impor	Batas jumlah barang yang boleh diimpor dalam periode tertentu.
Liberalisasi Perdagangan	Pengurangan hambatan perdagangan untuk mendorong arus barang dan jasa yang lebih bebas.
<i>Nearshoring</i>	Pemindahan produksi ke negara yang lebih dekat secara geografis.
Neraca Pembayaran	Catatan sistematis seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan dunia internasional dalam periode tertentu.
<i>Portofolio Investment</i>	Investasi dalam bentuk aset keuangan seperti saham dan obligasi tanpa kontrol langsung.
Produktivitas	Tingkat efisiensi dalam menghasilkan output dari input tertentu.
Proteksionisme	Kebijakan yang melindungi industri domestik dari persaingan luar negeri.
<i>Reshoring</i>	Pemindahan kembali produksi ke negara asal perusahaan.
Subsidi	Bantuan pemerintah kepada produsen domestik untuk meningkatkan daya saing.
Tarif	Pajak yang dikenakan pada barang impor untuk melindungi industri domestik.



INDEKS

A

adaptabilitas, 184

asimetri, 12, 150

audit, 107

B

blockChain, 36, 101

C

cloud, 105, 108, 109

D

diferensiasi, 14, 56, 64, 67, 68,
76, 77, 79, 80, 81, 82, 87, 89,
94, 98, 100, 150, 189

Digitalisasi, 32, 35, 43, 98, 121,
182, 185

diplomatik, 30

distribusi, 1, 6, 9, 14, 19, 20,
23, 24, 25, 26, 31, 32, 34, 41,
55, 59, 62, 63, 64, 65, 69, 73,
80, 81, 85, 87, 98, 99, 100,
103, 104, 105, 106, 109, 110,
111, 116, 121, 148, 149, 150,
152, 153, 168, 176, 184, 185

dividen, 130, 131, 187

domestik, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 23,
24, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 40,
41, 43, 44, 49, 55, 59, 68, 73,
76, 77, 78, 79, 86, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 102, 103, 105,
106, 111, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 125, 128, 131, 132,

135, 143, 148, 155, 156, 157,
162, 163, 166, 167, 169, 176,
179, 185, 187

E

e-commerce, 97, 98, 99, 167,
185

ekonomi, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 66,
67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76,
77, 78, 79, 81, 82, 88, 89, 91,
92, 94, 95, 96, 97, 99, 100,
102, 103, 107, 108, 110, 111,
114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 123, 125, 127, 128,
129, 130, 132, 133, 134, 135,
137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 153, 155, 156,
158, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 167, 168, 169,
172, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 182, 183, 184, 185,
187, 188, 189, 191, 198

ekspansi, 5, 6, 19, 23, 40, 55,
78, 81, 84, 87, 88, 89, 99,

116, 144, 149, 150, 151, 153,
159, 160, 187
emisi, 26, 35, 165, 178, 179
empiris, 64, 66, 67, 70, 71, 88,
96, 98, 99, 115, 117, 162
entitas, 10, 11, 146, 151

F

finansial, 2, 4, 7, 114, 123, 131,
132, 138, 199
fintech, 36
fiskal, 8, 15, 27, 28, 111, 135,
140, 156, 164
fleksibilitas, 23, 58, 78, 82,
106, 125, 127, 128
fluktuasi, 10, 14, 127, 160, 177,
178
fundamental, 4, 9, 22, 129, 182

G

geografis, 18, 19, 64, 69, 71,
72, 93, 94, 100, 103, 107,
108, 109, 149, 169, 184, 190
Globalisasi, iv, 18, 20, 22, 25,
26, 116, 146, 158, 159, 160,
161, 190

I

implikasi, 5, 9, 59, 62, 63, 87,
102, 106, 116, 183
inflasi, 7, 29, 127, 128, 163
infrastruktur, 5, 6, 8, 17, 30, 35,
36, 50, 57, 60, 72, 86, 87, 90,
92, 93, 96, 102, 103, 106,
110, 123, 132, 139, 140, 150,
153, 165, 175, 176, 177, 178,
179, 184, 188, 190
inklusif, 31, 36
inovatif, 33, 84
integrasi, 6, 8, 16, 17, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 29, 32, 34, 66,

88, 100, 103, 104, 106, 117,
120, 144, 148, 159, 174, 183,
188
investasi, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 16,
17, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 33,
35, 36, 37, 43, 44, 49, 50, 57,
60, 63, 65, 69, 72, 78, 87, 88,
89, 92, 93, 94, 96, 98, 106,
118, 120, 123, 124, 130, 131,
132, 135, 140, 142, 143, 144,
146, 147, 148, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 164, 169, 174, 175,
176, 177, 179, 180, 185, 187,
188, 189, 198
investor, 11, 14, 17, 128, 129,
130, 131, 132, 134, 155, 156,
157, 175, 176, 179

K

koLaborasi, 94, 96, 105
komoditas, 3, 16, 18, 19, 26,
41, 45, 46, 53, 57, 61, 68, 74,
83, 86, 125, 130, 131, 169,
170, 171, 172, 173, 174, 177,
178, 189, 191
komparatif, 2, 3, 42, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 70, 71, 72,
73, 74, 78, 80, 81, 89, 96,
102, 165, 182, 183, 190
komprehensif, 9, 17, 33, 51, 57,
66, 70, 74, 82, 89, 96, 115,
186
konkret, 41, 93, 142
kredit, 28, 112, 114
kripto, 125

L

Leadership, 191, 196
likuiditas, 101, 133, 138, 140

- M**
- manajerial, 150
 manifestasi, 34
 manipulasi, 40, 135
 manufaktur, 4, 5, 16, 22, 23, 41, 57, 60, 61, 84, 85, 86, 87, 96, 102, 104, 120, 146, 153, 155, 171, 173, 174, 176, 177, 185, 189
 metodologi, 104
 moneter, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 23, 27, 28, 29, 31, 41, 124, 126, 127, 128, 134, 135, 138, 139, 140, 164, 187, 198
- N**
- negosiasi, 6, 7, 16, 27, 28, 29, 30, 100, 111, 112, 118, 137, 141
 neraca, 2, 3, 7, 18, 19, 39, 123, 125, 132, 138, 140
 non-tarif, 4, 12, 13, 34, 40, 110, 112, 114
- O**
- otoritas, 3, 4, 11, 126, 127, 128
- P**
- politik, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 40, 41, 44, 57, 70, 74, 102, 111, 115, 125, 145, 156, 158, 184, 190
 proyeksi, 187, 188
- R**
- rasional, 1, 53, 151
real-time, 16
 regulasi, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 24, 31, 34, 65, 72, 79, 101, 102, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 123, 146, 151, 155, 157, 165, 191
 relevansi, 42, 43, 50, 65, 70, 74, 80
 revolusi, 1, 77
 robotika, 102
 royalti, 154, 155
- S**
- siber, 34, 35, 37, 102
 stabilitas, 1, 3, 4, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 42, 57, 66, 72, 86, 95, 102, 106, 115, 116, 117, 124, 125, 127, 128, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 154, 157
 suku bunga, 6, 7, 12, 15, 29, 31, 128, 135, 198
sustainability, 139
- T**
- tarif, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 28, 34, 40, 41, 65, 70, 81, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 120, 161, 162
 transformasi, 5, 34, 36, 40, 51, 71, 74, 80, 110, 158, 160, 165, 172, 177, 179, 180, 182, 183
 transparansi, 101, 107, 113, 114
- U**
- universal, 44, 140
- V**
- varietas, 76, 77, 78, 79, 87

BIOGRAFI PENULIS



Dr. (Cand) Sarah Rizki Amalia, S.E., M.Si.

Lahir di Palembang, 17 November 1992. Seorang Dosen Ekonomi di STIE KALPATARU program studi Manajemen. Saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral di Institut Pertanian Bogor.



Bukhari Muslim, S.E., M.M., M.Si., C.TL., C.BC., C.SM., C.ME., C.LI.

Lahir di Dompu, 30 Mei 1976. Lulus S1 Ilmu Manajemen pada STIE Kalpataru, Lulus S2 pada STIE IPWIJA dan Lulus S2 berikutnya pada Universita Krisnadwipayana di Program Studi Ilmu Administrasi tahun 2020. Saat ini mengajar pada KBS : Kalpataru Business School.



Rudy Rahwana, S.E., M.M., M.Ak., CRPA.

Lahir di Blora, 16 April 1976. Pendidikan S1 Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kalpataru Bogor Lulus tahun 2008, Pendidikan S2 Magister Manajemen Konsentrai Akuntansi Keuangan dari STIE ISM Jakarta Lulus 2012 dan Pendidikan S2 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Magister Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Keuangan Universitas Negeri Jakarta Lulus tahun 2025. Saat ini dipercaya sebagai Dosen Tetap Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kalpataru Bogor sejak tahun 2014 pada Program Studi Akuntansi. Selama jadi dosen saya pernah bekerja di berbagai bidang dari perusahaan Manufaktur Industrial, Dagang dan Jasa, Developer dan Kontraktor sebagai praktisi Akuntansi dan Pajak , Pada tahun 2019 sampai dengan hari ini saya bekerja di PT. Hikmah Alam Sentosa, dengan branding PESONA KAHURIPAN GROUP di Bogor sebagai Head Tax of Division and Head HRD & GA of Division.



Dr. Asep Sofwan Munandar, S.E., M.M.

Lahir di Sukabumi pada tanggal 27 Mei 1974. Penulis menyelesaikan S1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Tahun 1998, dan melanjutkan S2 di Universitas Jenderal Soedirman, lulus tahun 2005, Penulis merupakan Dosen Tetap Di Universitas Juanda, dan tahun 2022 menyelesaikan S3 dari Universitas Padjadjaran Bandung. Fokus penelitian dan penulisan dalam bidang Ekonomi, dan Manajemen Keuangan, berbagai artikel yang dihasilkan telah memberikan kontribusi berharga khususnya dalam kajian Ekonomi, Keuangan dan Perbankan.

Buku Referensi **EKONOMI INTERNASIONAL**

Teori, Kebijakan, dan Dinamika Global

Buku referensi “Ekonomi Internasional: Teori, Kebijakan, dan Dinamika Global” merupakan buku ajar yang dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi lintas negara dalam konteks Global yang terus berkembang. Pembahasan dalam buku ini menekankan keterkaitan antara landasan teoretis, kerangka kebijakan, dan fenomena empiris yang membentuk sistem ekonomi internasional. Materi diawali dengan pengenalan konsep dasar ekonomi internasional, termasuk ruang lingkup, aktor, serta pola interaksi dalam perdagangan dan keuangan Global. Pembahasan kemudian berlanjut pada teori-teori perdagangan internasional, mulai dari keunggulan absolut dan komparatif hingga pendekatan modern yang menjelaskan peran skala ekonomi, diferensiasi produk, dan struktur pasar. Analisis ini memberikan dasar untuk memahami mengapa negara melakukan perdagangan dan bagaimana keuntungan dari perdagangan didistribusikan.